



SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 02 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

dan

BUPATI PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten Probolinggo, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh PD untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program PD dan lintas PD yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJPD dan RTRW.

Pasal 3

Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk:

- a. menetapkan visi, misi dan program pembangunan jangka menengah Daerah;
- b. menetapkan pedoman dalam penyusunan RKPD, Renja PD, Renstra PD dan perencanaan penganggaran; dan
- c. mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan Daerah, serta dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan.

Pasal 4

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat hal sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN;

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH;

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;

BAB V PENUTUP

- (2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar.

- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra PD.

Pasal 7

Program dan kegiatan Tahun 2025 yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui sebagai program dan kegiatan Tahun 2025.

Pasal 8

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2030-2034 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 Nomor 24 Seri G) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 Nomor 13 Seri G), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 Nomor 18 Seri G), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 29 Agustus 2025

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

MOHAMMAD HARIS

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 29 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH

ttd

UGAS IRWANTO, S.Sos. M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19690515 199003 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 1 SERI D

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 196-5/2025.

Salinan sesuai dengan aslinya:

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM


ADHY CATURINDRA B, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19820215 201001 1 017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Perencanaan pembangunan nasional merupakan pemilihan alternatif-alternatif atas sumber daya yang tersedia dan bersifat terbatas. Perencanaan pembangunan dilakukan agar pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan yang wajib disusun baik mulai dari tingkat pusat maupun daerah dan terangkai dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berakhirnya periodisasi dari Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045 mendorong pelaksanaan penyusunan RPJMD periode Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah tahap pertama dari pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045. Penyusunan RPJMD periode Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai penjabaran atas arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan yang terjabarkan dalam pembangunan 5 (lima) tahunan. Hal ini merupakan amanat yang tercantum di dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Probolinggo yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah. RPJMD ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2029. Pelaksanaan RPJMD merupakan pelaksanaan dari RPJPD yang terbagi dalam beberapa tahapan periodisasi pembangunan perencanaan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.

RPJMD yang memuat visi, misi dan program Bupati untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD tersebut merupakan rencana pembangunan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan hal tersebut menjadi sangat penting bagi Kabupaten Probolinggo untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana pembangunan baik pada tingkat Nasional, Provinsi maupun daerah, terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang harus saling berkaitan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dokumen rencana pembangunan daerah juga harus mengacu pada rencana pembangunan daerah di atasnya, baik dokumen rencana pembangunan di provinsi maupun nasional. Keterkaitan dokumen perencanaan ini dimaksudkan agar pembangunan seluruh daerah terpadu dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah jangka pendek jangka menengah maupun jangka panjang, disusun kurun waktu tertentu sebagaimana pedoman yang telah ditetapkan pemerintah dan harus selaras dengan rencana anggaran, sehingga dapat dipastikan apa yang telah direncanakan dapat terealisasi karena didukung oleh anggaran yang memadai.

Rencana pembangunan daerah lima tahun disiapkan sebagai informasi kepada publik, tentang komitmen politik kepala daerah setempat yang dipilih dalam pilihan kepala daerah dalam kurun waktu masa baktinya. Rencana pembangunan ini diuraikan setiap lima tahun dalam Rencana Pengembangan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD adalah dokumen perencanaan yang menggambarkan pandangan, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, termasuk program daerah yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, kebijakan pengembangan regional, keuangan lokal, dan indikasi kerangka pendanaan lima tahun.

Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo terpilih periode 2025-2029 **dr. Mohammad Haris Damanhuri Romly (Gus Haris)** dan **Fahmi Abdul Haq Zaini (Ra Fahmi)** yang telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025, menuangkan visi, misi, dan komitmen politik dan arah pembangunan pada RPJMD Kabupaten Probolinggo untuk periode tahun 2025 hingga 2029. Penyusunan RPJMD 2025–2029 diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek pembangunan.

Dalam Penyusunan RPJMD tahun 2025-2029, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 yang secara teknis dijabarkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Instruksi ini mengamanatkan sejumlah perubahan-perubahan teknis yaitu: Penyusunan RPJMD 2025–2029 wajib selaras dengan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) 2025-2045, mengacu pada RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, dan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi lokal, serta kearifan lokal. Langkah ini bertujuan agar setiap daerah dapat merancang kebijakan pembangunan yang inklusif, kontekstual, serta berkelanjutan, sekaligus mendukung arah pembangunan nasional.

Beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan seperti perbedaan, struktur bab dalam dokumen perencanaan daerah (Dokrenda) dan adanya proyeksi hingga tahun 2030 untuk mengakomodasi masa transisi kepala daerah dan persiapan penyusunan RKPD tahun 2030, mengisyaratkan bahwa kesiapan substansi, pemahaman konteks, dan sinergi antar pihak sangat dibutuhkan agar dokumen perencanaan tidak sebatas taat pedoman dan aturan, namun harus relevan terhadap kondisi dan perkembangan, partisipatif dan berdaya guna. Dalam pelaksanaan penyusunan rencana jangka menengah proses dimulai pada tahap persiapan termasuk membentuk tim penyusun, menerapkan desain tim penyusun, mempersiapkan agenda kerja tim,

menganalisis penilaian, dan hal-hal lain yang diperlukan dalam prosedur yang telah ditentukan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa RPJMD harus dikaitkan dengan dokumen perencanaan lainnya, sehingga secara berkesinambungan dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah dan nasional. Dalam hal untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 harus diselaraskan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 yang telah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Selain itu, pada tingkat kabupaten, RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 seluruh perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Probolinggo. RPJMD Kabupaten Probolinggo 2025-2029 juga akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo setiap tahun mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Besar dalam Daerah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (dahulu Republik Indonesia) tentang

- Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868)
 11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 19. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
 20. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Perekonomian di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-

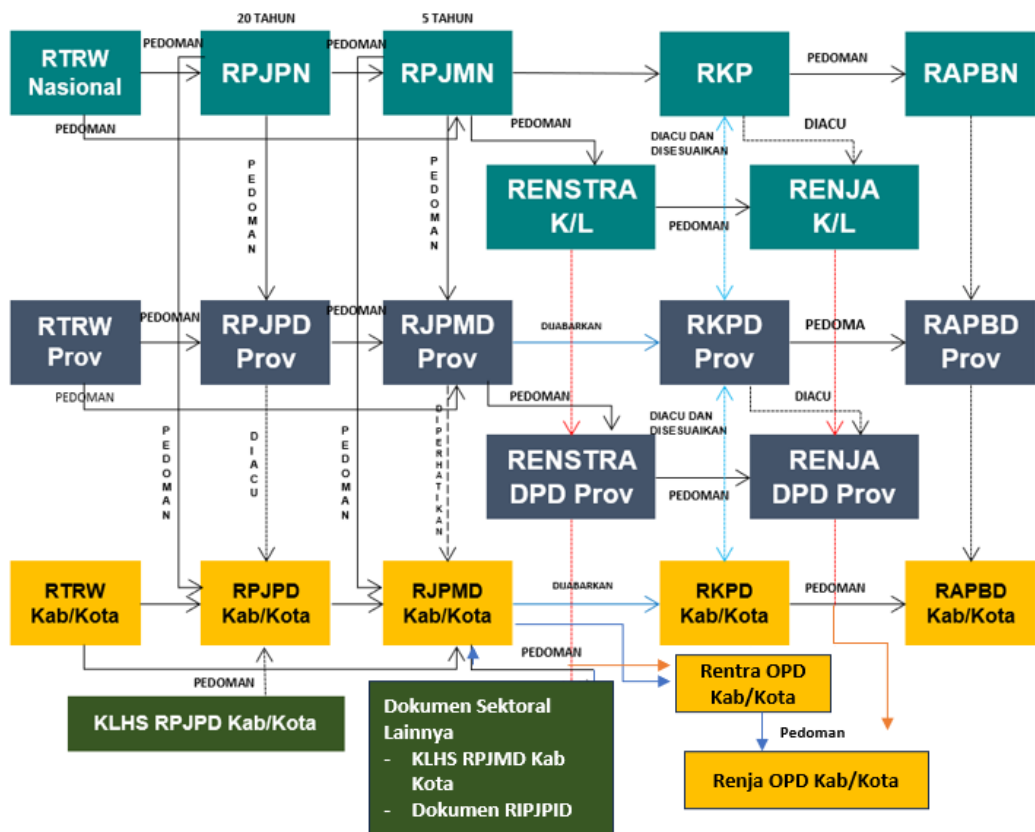
- Surabaya- Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, dan Kawasan Lingkar Wilis dan Lintas Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

- 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan KLHS (Permen Laporan Harta Kekayaan Nomor 69 Tahun 2017);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

- Probolinggo Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 02 Tahun 2011 Seri E);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045;
38. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah akan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya di daerah dan dengan dokumen perencanaan pemerintah di tingkat Nasional. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 juga menjelaskan hubungan antara dokumen RPJMD Kabupaten dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya secara lebih rinci, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.1. RPJMD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang harus memperhatikan dan berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan lainnya.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen

Sumber : Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

RPJMD Kabupaten Probolinggo 2025-2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo 2025-2045, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Probolinggo 2025-2045. Seiring dengan tuntutan pembangunan berkelanjutan, RPJMD juga harus memperhatikan hasil dan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan dalam rangka penyusunan RPJMD. RPJMD Kabupaten Probolinggo 2025-2029 juga akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo pada periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 serta Rencana Strategis (Renstra) seluruh perangkat daerah (PD) di lingkungan Kabupaten Probolinggo periode tahun 2025-2029. Renstra tersebut nantinya akan dijabarkan menjadi rencana kerja tahunan Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo.

A. Hubungan antara RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam proses penyusunan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 perlu memperhatikan keselarasan dengan rencana pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Telaah terhadap RPJMN 2025-2029 yang dapat menjadi *highlight* pembangunan jangka menengah Kabupaten Probolinggo di antaranya seperti Arah Pembangunan Kewilayahan Jawa Timur dalam RPJMN 2025-2029 menyebutkan adanya beberapa poin indikasi intervensi yang berkaitan dengan Kabupaten Probolinggo, seperti pengembangan TPST Regional Pasuruan-Probolinggo dan peningkatan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru (Kabupaten Malang - Kabupaten Pasuruan - Kabupaten Probolinggo - Kabupaten Lumajang).

B. Hubungan antara RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 juga menelaah keterhubungan dengan kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi yang termuat dalam Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2029. Pengkajian dilakukan terhadap isu strategis daerah dan kebijakan strategis daerah yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Salah satunya pada Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, mengisyaratkan Probolinggo dalam Arah Kebijakan Kewilayahan yang tentunya merupakan penyelarasan dengan RPJMN 2025-2029. Arah Kebijakan Kewilayahan yang dimaksud dalam hal ini yakni terkait pengembangan wilayah kawasan penghubung antar kawasan dan kepulauan tepatnya pada Kawasan Bromo Tengger Semeru dan Kawasan Selingkar Ijen. Sebagai bagian dari Kawasan Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Probolinggo mendapat *highlight* indikasi intervensi

sebagai Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Tapal Kuda; Kawasan Konservasi TN Bromo-Tengger-Semeru; dan Kawasan *Geopark* Probolinggo. Selain itu, Kabupaten Probolinggo sebagai bagian dari Kawasan Selingkar Ijen mendapat *highlight* indikasi intervensi terkait pengembangan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi.

C. Hubungan antara RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045

Penyusunan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 harus berpedoman pula pada RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045 pada periode yang bersangkutan, yaitu tahap I. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari RPJPD Kabupaten Probolinggo tersebut terkait dengan isu strategis pembangunan kabupaten, arah kebijakan pembangunan dan transformasi, serta sasaran pembangunan pada tahap I periode RPJPD, yaitu tahun 2025-2029. Indikator dan sasaran pencapaian indikator pada tahap I RPJPD tersebut akan menjadi sasaran indikator kinerja RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029. Arah kebijakan tahap I dengan tema Penguatan Pondasi Transformasi menjadi landasan dalam menyusun RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029. Pondasi yang dimaksud pada tema tersebut berupa penguatan kebijakan, sistem kelembagaan, maupun modal dasar pembangunan, meliputi SDM, tata kelola, Infrastruktur, Regulasi yang mendukung kemantapan ekonomi inklusif, sosial, budaya, ketenteraman, dan ketertiban umum. Adapun ke-8 misi RPJPD Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2045 yang perlu menjadi perhatian dalam menyusun RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, yakni:

1. Mewujudkan transformasi sosial menuju Sumberdaya Manusia yang berdaya saing dan berkarakter;
2. Menciptakan masyarakat tenteram, tertib dan terlindungi;

3. Menciptakan Ketahanan Sosial yang mantap;
4. Mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif;
5. Menyediakan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan;
6. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
7. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata; dan
8. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola menuju Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang Prima.

D. Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Probolinggo 2025-2029 juga memperhatikan arah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045. Pada saat RPJMD ini disusun, RTRW Kabupaten Probolinggo 2025-2045 sedang dalam proses pengesahan menjadi Peraturan Daerah. Meskipun demikian, substansi Rancangan Peraturan Daerah tersebut relevan dengan kondisi terkini maupun rencana pengembangan ruang wilayah hingga tahun 2045. Arah kebijakan pembangunan daerah, termasuk pembangunan infrastruktur daerah perlu memperhatikan pengaturan terhadap rencana struktur ruang kabupaten, rencana pola ruang kabupaten, kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten, khususnya yang akan diagendakan dalam rencana pembangunan periode 2025-2029. Hal tersebut perlu dilakukan agar perencanaan juga dapat mendukung ketercapaian tujuan RTRW Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045, yakni Terwujudnya Kabupaten Probolinggo sebagai sentra komoditas pertanian yang berdaya saing dengan mengembangkan agropolitan serta minapolitan yang didukung oleh industri dan pariwisata

E. Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dengan RIPJPID Kabupaten Probolinggo.

Dokumen Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Daerah menjadi salah satu dokumen yang perlu ditelaah dalam menyusun RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029. Keselarasan dengan dokumen RIPJPID ini berkaitan dengan arah kebijakan riset dan inovasi serta pemanfaatannya guna peningkatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, kualitas kebijakan berbasis bukti, ekosistem riset dan inovasi, serta daya saing Kabupaten Probolinggo. Salah satu isyarat penting dari telaah pada dokumen RIPJPID Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dapat diambil terkait proyeksi pengembangan ekosistem riset dan inovasi Kabupaten Probolinggo 2045 yang dirumuskan pada 12 poin, yakni:

1. Tuntas dalam melaksanakan reformasi kebijakan berbasis bukti untuk tiap OPD, bahkan riset-inovasi telah membudaya di tiap OPD;
2. Memiliki basis data yang lengkap, *up to date* dan dapat diakses umum untuk kepentingan riset-inovasi;
3. Memiliki infrastruktur dasar dan sarana pendukung riset-inovasi yang handal untuk pengembangan sektor prioritas/unggulan;
4. Memiliki kebun raya yang dikelola secara kolaboratif;
5. Memiliki anggaran riset-inovasi yang optimal;
6. Memiliki sistem perlindungan dan pemanfaatan hasil riset-inovasi yang handal;
7. Memiliki forum riset-inovasi yang aktif, produktif, kolaboratif;
8. Memiliki berbagai kemitraan dengan lembaga-lembaga kredibel khususnya pada sektor prioritas/unggulan, baik nasional maupun internasional;
9. Memiliki sistem promosi/kampanye riset inovasi, difusi inovasi dan penghargaan yang handal;
10. Memiliki sistem pembinaan perusahaan pemula berbasis riset-inovasi yang handal;

11. Memiliki sistem inventarisasi, pengembangan dan perlindungan IPTEK masyarakat yang handal;
12. Memiliki sistem pengembangan produk unggulan daerah berbasis riset inovasi yang handal.

F. Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Sektorial Daerah Lainnya

RPJMD Kabupaten Probolinggo 2025-2029 juga memperhatikan berbagai rekomendasi yang diberikan oleh dokumen perencanaan pembangunan sektoral lainnya, seperti: (i) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang telah disusun dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Probolinggo 2025-2029. Komitmen masyarakat internasional, termasuk Indonesia dan seluruh daerah otonomnya, untuk melaksanakan *pembangunan yang berkeadilan* antar generasi telah menetapkan *tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)* yang harus dicapai dalam pembangunannya. Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Probolinggo 2025-2029 telah melaporkan evaluasi hasil capaian SDGs di kabupaten tersebut dalam lima tahun terakhir beserta berbagai rekomendasi untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Kabupaten Probolinggo tahun 2030. Pengintegrasian substansi dan rekomendasi dokumen ini ke dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo 2025-2029 haruslah dipertimbangkan sebagai bentuk komitmen penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan; (ii) Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Probolinggo 2025-2029. RPJMD Kabupaten Probolinggo 2025-2029 ini merupakan penyempurnaan dari Rancangan Teknokratik RPJMD yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana pembangunan lima tahun mendatang; (iii) Evaluasi capaian pembangunan 5 tahun terakhir yang menjadi dasar perumusan permasalahan daerah terkini; dan (iv) rencana pembangunan jangka panjang induk/sektoral lainnya untuk periode yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menyediakan rancangan dokumen rencana pembangunan 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2025-2029, yang akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Probolinggo pada periode tersebut.

Sementara itu, tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 adalah:

- a. Penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Probolinggo khususnya dalam merumuskan Gambaran Umum Kondisi dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Isu-isu Strategis Daerah dan Permasalahan yang harus dijawab dalam kurun waktu tahun 2025-2029;
- b. Menjabarkan visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2025-2029 menjadi sasaran, tujuan, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan serta indikator kinerja pembangunan tahun 2025-2029;
- c. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.5. Sistematika Penulisan

Berdasarkan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sistematika RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang; Dasar hukum penyusunan; keterkaitan dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029;

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini menguraikan beberapa subbab tentang: (i) Kondisi daerah terkini, yang diuraikan melalui penyajian data dan informasi tentang

hasil evaluasi pembangunan Kabupaten Probolinggo selama lima tahun terakhir. Perkembangan capaian berbagai indikator kinerja pembangunan daerah disajikan untuk memberikan gambaran kondisi daerah dalam aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan pelayanan publik (penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah). Subbab ini juga menyajikan kinerja daerah dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal, kerja sama daerah, dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mendukung kinerja pelayanan pemerintahan daerah; (ii) kondisi (kemampuan) keuangan daerah dan pengelolaannya selama lima tahun terakhir dalam mendukung pembangunan daerah. Kondisi lima tahun terakhir digunakan sebagai dasar dalam memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan pada periode perencanaan (2025-2030); (iii) Subbab tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis. Permasalahan pembangunan meliputi permasalahan makro daerah dan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta permasalahan pembangunan daerah di tingkat internasional, nasional, dan regional di Kabupaten Probolinggo. Permasalahan dan isu tersebut menjadi dasar perumusan isu strategis daerah yang harus dijawab atau diselesaikan dalam pembangunan daerah tahun 2025-2029.

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menyajikan dua subbab, yaitu: (i) Visi, Misi, Sasaran, dan Tujuan Pembangunan Tahun 2025-2029; dan (ii) Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029. Subbab pertama menguraikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 dan penjabarannya menjadi sasaran dan tujuan pembangunan pada periode tersebut. Subbab ini juga menguraikan indikator kinerja utama dan daerah serta target pencapaiannya untuk setiap tahun dalam periode perencanaan. Sedangkan subbab kedua berisi tentang cara atau strategi dan arah kebijakan umum dan khusus pembangunan Kabupaten Probolinggo dalam menjalankan misi pencapaian visi, tujuan, dan sasaran

pembangunan tahun 2025-2029. Pada bagian ini juga dipaparkan program-program prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan nasional, Provinsi Jawa Timur, serta prioritas Bupati dan Wakil Bupati.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PELAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH

Secara umum, dalam bab ini diuraikan mengenai program dan kinerja pemerintah daerah selama masa jabatan Bupati 2025-2029. Namun untuk mengakomodir pelaksanaan pemerintah daerah pada masa transisi, maka penjabarannya ditambahkan hingga tahun 2030. Secara rinci, bab ini menguraikan dua bagian, yaitu (i) subbab Program Perangkat Daerah; dan (ii) subbab Kinerja Pemerintah Daerah. Subbab pertama menguraikan daftar program Perangkat Daerah tahun 2025-2030 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah. Subbab ini juga memuat indikator program, target, dan pagu indikatif program Perangkat Daerah selama periode 2025-2030. Bagian kedua merangkum berbagai indikator kinerja pembangunan Kabupaten Probolinggo dan targetnya selama periode 2025-2030. Indikator kinerja pembangunan daerah meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah atau Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat simpulan penting mengenai substansi, tata tertib pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah serta pelaksanaannya, sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

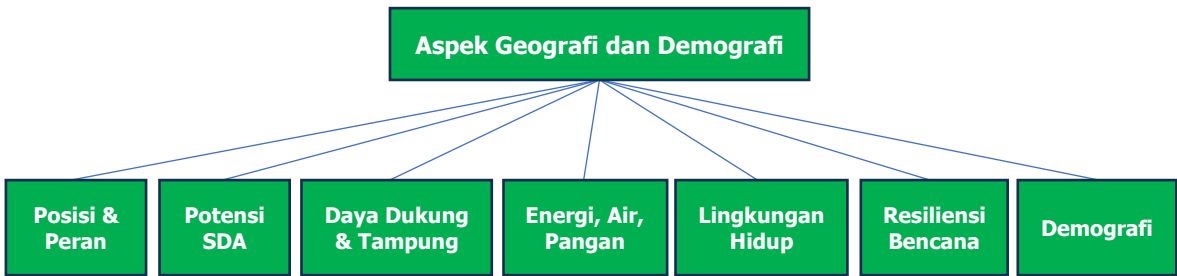
BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek Geografi dan Demografi memberikan gambaran umum mengenai Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan kondisi secara fisik dan manusia sekaligus interaksi keterhubungannya. Gambaran mengenai kondisi aspek geografi dan demografi menjadi landasan untuk mempertimbangkan perencanaan pembangunan Kabupaten Probolinggo yang sesuai. Penjelasan mengenai kondisi geografi dan demografi Kabupaten Probolinggo akan dijabarkan dalam beberapa turunan poin pembahasan, yakni: (1) Posisi dan Peran Strategis Daerah; (2) Potensi Sumber Daya Alam; (3) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup; (4) Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan; (5) Lingkungan Hidup Berkualitas; (6) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim; dan (7) Demografi.



Gambar 2. 1 Peta Pembahasan Aspek Geografi dan Demografi

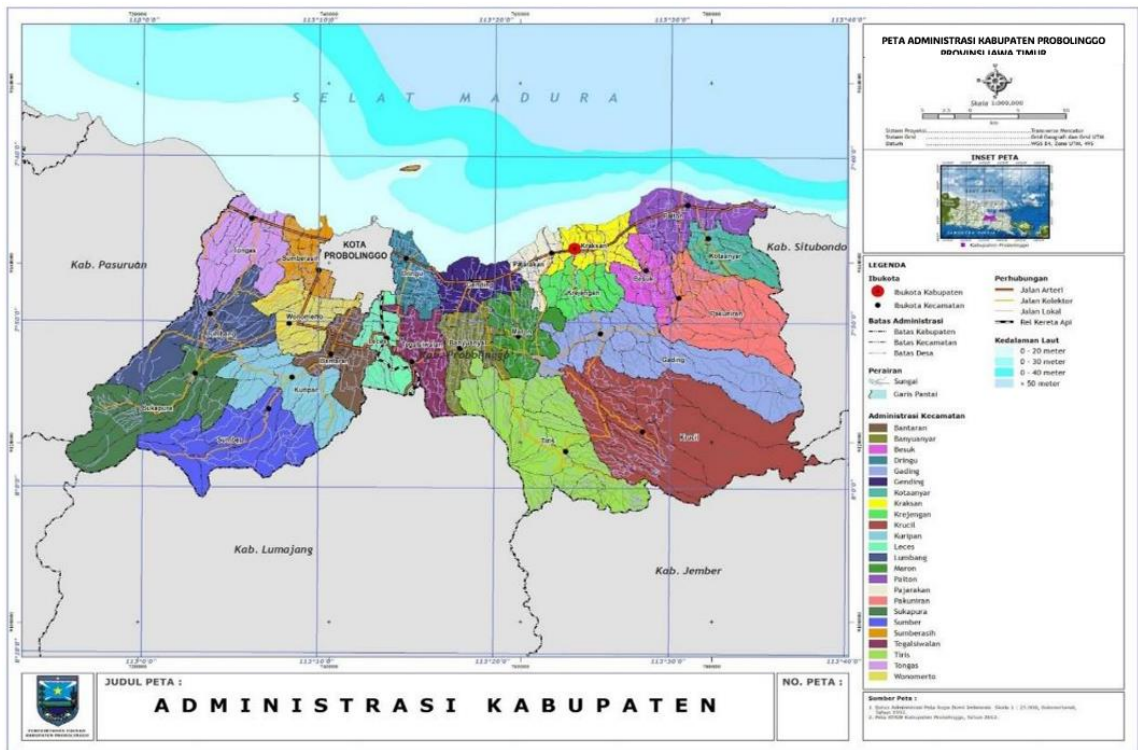
Sumber: Imendagri Nomor 2 Tahun 2025 (diolah)

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Probolinggo secara geografis terletak di lereng serangkai pegunungan yang membujur dari Barat ke Timur Provinsi Jawa Timur, yakni Pegunungan Tengger, Gunung Lamongan dan Gunung Argopuro. Secara astronomis, Kabupaten Probolinggo berada pada posisi 07°40’- 08°10’ Lintang Selatan (LS) dan 112°50’- 113°30’ Bujur Timur (BT) dengan dengan luas wilayah sekitar 169.616,65 Ha atau ± 1.696,16 Km². Sedangkan secara administratif, Kabupaten Probolinggo berbatasan dengan:

1. Utara : Selat Madura
2. Barat : Kabupaten Pasuruan
3. Timur : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Jember
4. Selatan : Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang

Sedangkan, di sebelah utara bagian tengah terdapat daerah otonom yaitu Kota Probolinggo. Berikut adalah Peta Administrasi Kabupaten Probolinggo berdasarkan rancangan akhir RTRW Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 - 2045.



Gambar 2.2 Peta Administrasi Kabupaten Probolinggo
 Sumber: Pemerintah Kabupaten Probolinggo, 2025

Kabupaten Probolinggo terdiri atas 24 kecamatan yang terbagi ke dalam 325 desa dan 5 kelurahan, serta mencakup 1.375 dusun, 1.643 Rukun Warga (RW), dan 5.869 Rukun Tetangga (RT). Pembagian wilayah administrasi pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel 2.1.

**Tabel 2. 1 Data Luas Wilayah di Setiap Kecamatan
Kabupaten Probolinggo**

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Sukapura	102,08	6,02
2	Sumber	141,88	8,36
3	Kuripan	66,75	3,94
4	Bantaran	42,13	2,48
5	Leces	36,81	2,17
6	Tegalsiwalan	41,74	2,46
7	Banyuanyar	45,70	2,69
8	Tiris	165,67	9,77
9	Krucil	202,53	11,94
10	Gading	146,85	8,66
11	Pakuniran	113,85	6,71
12	Kotaanyar	42,58	2,51
13	Paiton	53,28	3,14
14	Besuk	35,04	2,07
15	Kraksaan	37,80	2,23
16	Krejengan	34,43	2,03
17	Pajarakan	21,34	1,26
18	Maron	51,39	3,03
19	Gending	36,61	2,16
20	Dringu	31,13	1,84
21	Wonomerto	45,67	2,69
22	Lumbang	92,71	5,47
23	Tongas	77,95	4,60
24	Sumberasih	30,25	1,78
Total		1.696,17	100

Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2025

Kontribusi Kabupaten Probolinggo terhadap wilayah sekitar.

A. Kontribusi Ekonomi

Kabupaten Probolinggo memiliki peran strategis dalam mendorong perekonomian wilayah sekitarnya di Jawa Timur, terutama melalui sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, transportasi, dan pariwisata. Sektor pertanian yang rata-rata menyumbang sekitar 30% terhadap PDRB daerah menjadi basis

ketahanan pangan tidak hanya bagi Kabupaten Probolinggo, tetapi juga bagi distribusi ke wilayah tetangga. Selama masa pandemi tahun 2020, meskipun ekonomi regional tertekan, pertanian di Kabupaten Probolinggo tetap tumbuh positif sehingga membantu menjaga suplai pangan di kawasan Tapal Kuda.

Seiring pemulihan ekonomi pada 2021–2022, sektor transportasi dan pergudangan tumbuh pesat (masing-masing 8,34% dan 15,05%), memperkuat peran Kabupaten Probolinggo sebagai jalur distribusi barang dan jasa dari wilayah pesisir utara menuju hinterland Jawa Timur. Industri pengolahan juga konsisten tumbuh (6,44% di 2021 dan 5,33% di 2022), memberikan nilai tambah pada hasil pertanian lokal yang sebagian dipasarkan ke daerah lain.

Pada 2023–2024, kontribusi Kabupaten Probolinggo terhadap wilayah sekitar semakin jelas. Pertanian yang menyumbang 30% terhadap PDRB daerah menyediakan komoditas penting seperti padi, jagung, dan sayuran untuk mendukung kebutuhan pangan regional. Sementara itu, transportasi dan pergudangan tumbuh dua digit hingga 12,31% pada 2024, menjadikan Kabupaten Probolinggo simpul logistik penting di jalur Pantura dan kawasan Tapal Kuda. Dukungan dari sektor industri pengolahan yang tumbuh stabil (7,16% di 2024) memperkuat daya saing produk lokal yang tidak hanya beredar di dalam kabupaten, tetapi juga menjadi pasokan bagi pasar regional. Dengan demikian, kinerja ekonomi Kabupaten Probolinggo sepanjang 2020–2024 tidak hanya menopang pertumbuhan internal, tetapi juga memberi kontribusi nyata terhadap dinamika ekonomi di wilayah sekitar.

B. Kontribusi infrastruktur

Infrastruktur yang baik adalah kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Kabupaten Probolinggo telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 150 miliar untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pada tahun 2024. Pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo, tetapi juga bagi daerah sekitarnya. Dengan adanya peningkatan infrastruktur, diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar

wilayah, yang tercermin dari penurunan waktu tempuh perjalanan antar kabupaten sebesar 20%.

Kontribusi Kabupaten Probolinggo juga terlihat dari sektor infrastruktur keciptakaryaan. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) membantu menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) mendukung terwujudnya lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Sementara itu, penguatan pengelolaan persampahan telah menjadi bagian penting dalam menjaga kebersihan, kualitas hidup, sekaligus memperbaiki wajah kota dan desa. Infrastruktur ini tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Probolinggo, tetapi juga memberi dampak positif terhadap keseimbangan lingkungan dan pembangunan wilayah di sekitarnya.

C. Kontribusi Lingkungan Hidup

Kabupaten Probolinggo memiliki komitmen yang kuat terhadap pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Melalui program-program konservasi, seperti reboisasi dan pengelolaan sampah, Kabupaten Probolinggo berkontribusi dalam menjaga ekosistem dan sumber daya alam. Pada tahun 2024, Kabupaten Probolinggo menargetkan penanaman 100.000 pohon sebagai bagian dari program pelestarian lingkungan, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas udara dan mengurangi dampak perubahan iklim.

Selain itu Kabupaten Probolinggo memberi kontribusi nyata bagi wilayah sekitarnya maupun Jawa Timur secara lebih luas. Dari sisi geografi, letaknya yang strategis di kawasan Tapal Kuda menjadikan Kabupaten Probolinggo sebagai simpul penghubung antara jalur utara dan selatan Pulau Jawa. Dari sisi demografi, jumlah penduduk yang cukup besar sekaligus keberagaman potensi sumber daya alamnya ikut memperkuat peran Kabupaten Probolinggo sebagai daerah penyangga pertumbuhan di kawasan timur Jawa. Dengan kata lain, Kabupaten Probolinggo bukan sekadar wilayah administratif, melainkan juga bagian penting dari dinamika pembangunan regional.

2.1.1.2 Potensi dan Sumber Daya Alam

Kabupaten Probolinggo memiliki kekayaan sumber daya alam yang beragam dan berpotensi besar untuk dikembangkan sebagai keunggulan komparatif daerah. Letak geografis yang strategis serta kondisi topografi yang bervariasi, mulai dari kawasan pesisir hingga pegunungan, memberikan peluang pemanfaatan berbagai potensi sumber daya alam, seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, serta pariwisata berbasis alam. Potensi ini tidak hanya menjadi modal dasar dalam meningkatkan perekonomian daerah, tetapi juga dapat dioptimalkan sebagai penggerak utama pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun potensi-potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Probolinggo yakni sebagai berikut:

- a. Kabupaten Probolinggo memiliki hutan lindung seluas 27.364,094 hektar yang tersebar di Kecamatan Sukapura, Kecamatan Gading, Kecamatan Pakuniran, Kecamatan Krucil, Kecamatan Tiris, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Sumber dan Kecamatan Lumbang. Kawasan hutan lindung di Kabupaten Probolinggo ini memiliki fungsi utama sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan untuk penyimpan cadangan air di dalam tanah, mengendalikan erosi pada tanah, mencegah terjadinya banjir, mencegah intrusi air laut, menjaga kesuburan pada tanah, sebagai tempat penyimpanan sumber daya genetika (plasma nutfah), habitat flora dan fauna, destinasi wisata alam dan sebagai sarana belajar ilmu pengetahuan alam;
- b. Hutan produksi di Kabupaten Probolinggo adalah seluas 33.193,27 hektar yang tersebar di Kecamatan Tongas, Kecamatan Paiton, Kecamatan Sukapura, Kecamatan Krejengan, Kecamatan Gading, Kecamatan Gending, Kecamatan Dringu, Kecamatan Bantaran, Kecamatan Besuk, Kecamatan Kotaanyar, Kecamatan Pakuniran, Kecamatan Maron, Kecamatan Pajarakan, Kecamatan Krucil, Kecamatan Tiris, Kecamatan Banyuanyar, Kecamatan Tegalsiwalan, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Sumber, Kecamatan Lumbang dan Kecamatan Wonomerto. Tanaman kehutanan terbagi atas kayu pertukangan, kayu bakar dan getah;

- c. Kawasan pertanian lahan sawah di Kabupaten Probolinggo meliputi sawah irigasi dan sawah tadah hujan yang tersebar di seluruh kecamatan. Frekuensi penanaman adalah satu hingga tiga kali dalam setahun. Luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Probolinggo untuk sawah irigasi adalah seluas 38.163 hektar dan sawah tadah hujan seluas 7.650 hektar;
- d. Kawasan pertambangan Wilayah Kabupaten Probolinggo memiliki potensi pertambangan bahan mineral bukan logam dan batuan. Penambangan bahan galian c tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhinya. Pertambangan galian C di Kabupaten Probolinggo dengan luas 406,37 hektar terdapat di Kecamatan Tongas, Kecamatan Paiton, Kecamatan Sukapura, Kecamatan Kotaanyar, Kecamatan Pakuniran, Kecamatan Pajarakan, Kecamatan Lumbang dan Kecamatan Wonomerto;
- e. Kawasan wisata
- Wisata Alam
Wisata alam yang terdapat di Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut: Wisata Gunung Bromo, Padang Savana atau Bukit Teletubies Gunung Bromo, Gunung Argopuro, Pulau Gili Ketapang, Air Panas Desa Tiris, Air Terjun Madakaripura, Air Terjun Umbulan, Air Terjun Triban, Air Terjun Kedung Amis, Air Terjun Sumber Pakis II, Air Terjun Kali Pedati, Air Terjun Guyangan, Air Terjun Tirai Bidadari, Wisata Tirta Ageng, Gowa Lawa/ Gua Batman, Puncak Seruni Point, Metigen View/Pusung Agung, Gunung Kembang Puncak Sari, Wisata Tirta Ronggojalu, Danau Agung / Ranu Agung, Ranu Segaran, Danau Taman Hidup, Puncak Pundak Lembu, Pantai Duta, Pantai Bahak, Pantai Tambaksari, Air Terjun Dewi Rengganis Dan Air Terjun Darungan, dan sebagainya.
 - Wisata Buatan
Wisata buatan yang terdapat di Kabupaten Probolinggo adalah Wisata Pantai Bentar, Wisata Water Boom Kecamatan Dringu yang saat ini sudah tidak beroperasi, Marbagong dan Pemandian Jabung di Kecamatan Paiton dan Wisata Water Boom Kecamatan Leces.
 - Wisata Minat Khusus

Wisata minat khusus yang terdapat di Kabupaten Probolinggo adalah Wisata Snorkeling Gili Ketapang, Wisata Arung Jeram Sungai Pekalen, Water Tubing Gading.

- Wisata Budaya/Sejarah

Wisata budaya/sejarah yang terdapat di Kabupaten Probolinggo adalah Candi Jabung Paiton, Candi Kedaton, dan Perayaan Yadnya Kasada.

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan adalah kemampuan suatu lingkungan atau bumi untuk mendukung kehidupan makhluk hidup di atasnya, mencakup aspek ekonomi, lingkungan, budaya, dan demografi, dalam hal ini daya dukung memiliki batas maksimal dalam mendukung kebutuhan makhluk hidup. Konsep utama dari daya dukung adalah perbandingan antara ketersediaan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*). Hal ini sangat penting untuk dikaji karena ketersediaan (*supply*) jumlahnya terbatas dan kebutuhan (*demand*) jumlahnya terus meningkat dari waktu ke waktu. Sedangkan daya tampung lingkungan mengacu pada kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan.

A. Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Secara umum Kabupaten Probolinggo memiliki status defisit air karena gap antara kebutuhan dan ketersediaan. Meskipun demikian pada setiap kecamatan dibeberapa tempat status air masuk kategori belum terlampaui. Berdasarkan data di bawah ketersediaan air di Kabupaten Probolinggo sejumlah 323.079.152,02 m³/tahun dan kebutuhannya mencapai 534.786.288,00 m³/tahun. Dengan demikian status Kabupaten Probolinggo telah melampaui ketersediaan air bersih dengan defisit sebesar -211.707.135,98 m³/tahun. Data terkait tentang status daya dukung air di Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

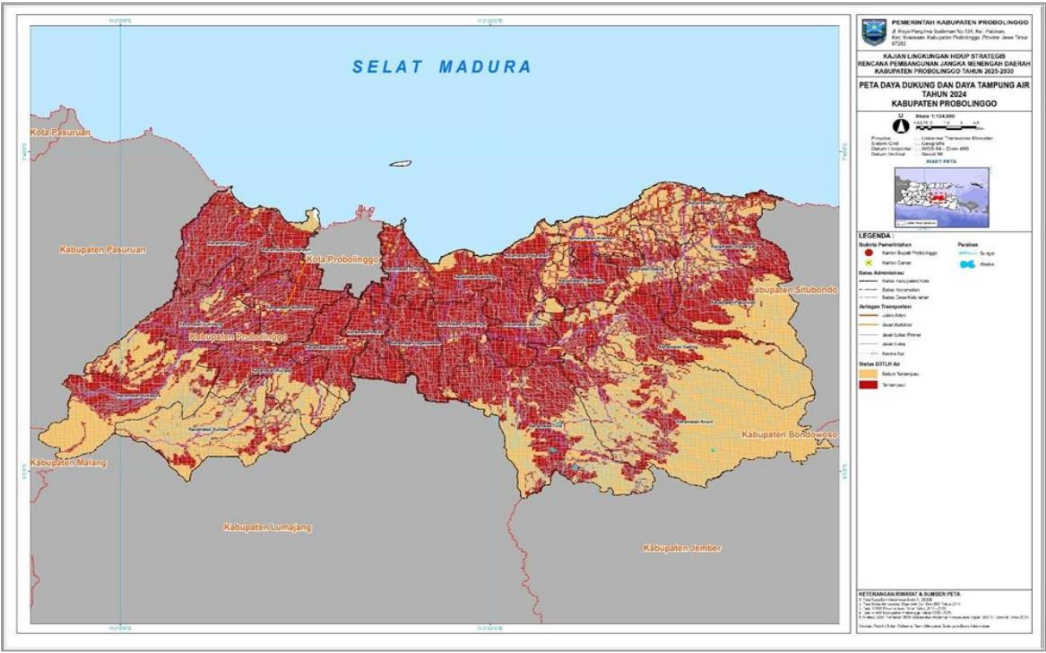
**Tabel 2. 2 Status Daya Dukung Air Kabupaten Probolinggo
Tahun 2024**

Kecamatan	Ketersediaan Air (m3/Tahun)	Kebutuhan Air (m3/Tahun)	Selisih	Status
Bantaran	431.248,54	234.766,69	196.481,86	Belum Terlampaui
	6.857.429,00	20.866,272,91	- 14.008.843,91	Terlampaui
Banyuwanyar	119.597,02	14.287,71	105.309,30	Belum Terlampaui
	9.274.923,39	20.705.728,29	- 11.430.804,89	Terlampaui
Besuk	6.381.219,33	4.637.144,87	1.744.074,46	Belum Terlampaui
	7.252.712,86	16.418.967,13	- 9.166.254,27	Terlampaui
Dringu	104.063,68	1.107,73	102.955,96	Belum Terlampaui
	4.523.303,94	18.757.369,07	- 14.234.065,14	Terlampaui
Gading	24.090.149,87	3.542.790,06	20.547.359,80	Belum Terlampaui
	9.577.913,84	30.498.896,34	- 20.920.982,50	Terlampaui
Gending	142.673,46	3.476,61	139.196,86	Belum Terlampaui
	4.689.945,61	18.494.672,59	- 13.804.726,99	Terlampaui
Kotaanyar	2.664.737,48	1.906.222,14	758.515,34	Belum Terlampaui
	5.109.873,83	14.373.092,66	- 9.263.218,84	Terlampaui
Kraksaan	6.989.884,84	5.187.757,87	1.802.126,97	Belum Terlampaui
	4.983.875,69	14.139.058,13	- 9.155.182,44	Terlampaui
Krejengan	3.418.846,46	2.541.199,81	877.646,66	Belum Terlampaui
	4.818.352,73	17.541.270,59	- 12.722.917,87	Terlampaui
Krucil	75.881.038,34	14.334.341,05	61.546.697,29	Belum Terlampaui
	5.885.890,01	19.286.836,55	- 13.400.946,54	Terlampaui
Kuripan	1.914.210,47	64.207,70	1.850.002,77	Belum Terlampaui
	2.489.462,22	17.854.720,30	- 15.365.258,08	Terlampaui
Leces	132.653,28	84.457,69	48.195,59	Belum Terlampaui
	7.346.257,40	20.374.449,91	- 13.028.192,51	Terlampaui
Lumbang	1.203.460,11	140.599,84	1.062.860,27	Belum Terlampaui
	3.860.077,26	22.882.753,76	- 19.022.676,50	Terlampaui
Maron	1.435.598,92	913.946,81	521.652,12	Belum Terlampaui
	12.354.930,24	26.494.293,19	- 14.139.362,95	Terlampaui
Paiton	11.595.586,06	8.520.394,05	3.075.192,01	Belum Terlampaui
	7.627.315,34	18.287.137,55	- 10.659.822,21	Terlampaui
Pajarakan	1.340.957,40	696.798,41	644.158,99	Belum Terlampaui
	3.991.055,26	10.647.520,79	- 6.656.465,53	Terlampaui
Pakuniran	11.560.128,62	2.090.902,18	9.469.226,44	Belum Terlampaui
	6.093.134,62	20.978.070,62	- 14.884.936,00	Terlampaui

Kecamatan	Ketersediaan Air (m3/Tahun)	Kebutuhan Air (m3/Tahun)	Selisih	Status
Sukapura	2.658.201,74	202.599,97	2.455.601,77	Belum Terlampaui
	1.340.541,13	18.654.113,63	- 17.313.572,49	Terlampaui
Sumber	8.666.029,98	528.895,11	8.137.134,87	Belum Terlampaui
	1.778.569,62	7.752.199,29	- 5.973.629,67	Terlampaui
Sumberasih	61.210,41	9.577,31	51.633,10	Belum Terlampaui
	4.884.413,27	18.450.903,89	- 13.566.490,62	Terlampaui
Tegalsiwalan	7.131,49	4.995,58	2.135,91	Belum Terlampaui
	8.082.469,75	21.027.270,02	- 12.944.800,27	Terlampaui
Tiris	17.476.172,21	7.343.650,12	10.132.522,08	Belum Terlampaui
	11.562.569,71	38.364.887,48	- 26.802.317,77	Terlampaui
Tongas	180.177,42	49.458,35	130.719,07	Belum Terlampaui
	6.058.023,14	28.810.042,45	- 22.752.019,31	Terlampaui
Wonomerto	134.337,05	55.790,82	78.546,23	Belum Terlampaui
	4.046.797,96	20.016.392,38	- 15.969.594,42	Terlampaui
TOTAL	323.079.152,02	534.789.288,00	- 211.707.135,98	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo, 2025

Berdasarkan tabel di atas, secara lebih rinci dapat diketahui bahwa seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Probolinggo memiliki status ketersediaan air yang belum terlampaui (sebagian kecil) dan terlampaui (sebagian besar) artinya ketersediaan air sudah kurang mampu memenuhi kebutuhan akan air yang layak bagi penduduk. Kecamatan dengan nilai defisit/terlampaui ketersediaan air tertinggi adalah Kecamatan Tiris dengan defisit 26.802.317,77m3 air per tahun. Kecamatan dengan nilai defisit terendah adalah kecamatan Sumber dengan defisit 5.973.629,67 m3 air per tahun, Maka dari itu, perlu adanya alternatif untuk mencegah terlampauinya ketersediaan air terhadap kebutuhan air. Berikut merupakan peta daya dukung dan daya tampung air eksisting di Kabupaten Probolinggo.



Gambar 2. 3 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kabupaten Probolinggo Tahun 2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo, 2025

Daya dukung air merupakan salah satu aspek krusial dalam pengelolaan sumber daya air di suatu daerah, termasuk Kabupaten Probolinggo. Daya dukung air mengacu pada kapasitas sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pertanian, industri, dan ekosistem secara berkelanjutan. Dengan meningkatnya populasi, urbanisasi, dan perubahan iklim, tantangan dalam pengelolaan sumber daya air semakin kompleks. Oleh karena itu, proyeksi daya dukung air menjadi penting untuk memastikan ketersediaan air yang cukup dan berkualitas bagi semua sektor.

Di Kabupaten Probolinggo, proyeksi daya dukung air dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk curah hujan, penggunaan air, dan kondisi geografis. Proyeksi Daya Dukung Air dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 3 Status Daya Dukung Air Kabupaten Probolinggo Tahun 2029

Kecamatan	Ketersediaan Air (m3/Tahun)	Kebutuhan Air (m3/Tahun)	Selisih	Status
Bantaran	431.248,54	234.808,22	196.440,32	Belum Terlampaui
	6.857.429,00	20.904.506,58	-14.047.077,57	Terlampaui
Banyuwanyar	119.597,02	14.415,68	105.181,34	Belum Terlampaui
	9.274.923,39	20.748.195,52	-11.473.272,13	Terlampaui

Kecamatan	Ketersediaan Air (m3/Tahun)	Kebutuhan Air (m3/Tahun)	Selisih	Status
Besuk	6.381.219,33	4.638.580,74	1.742.638,59	Belum Terlampaui
	7.252.712,86	16.470.840,06	-9.218.127,20	Terlampaui
Dringu	104.063,68	1.118,55	102.945,13	Belum Terlampaui
	4.523.303,94	18.802.977,45	-14.279.673,51	Terlampaui
Gading	24.084.746,03	3.543.374,31	20.541.371,71	Belum Terlampaui
	9.583.317,68	30.565.876,89	-20.982.559,21	Terlampaui
Gending	142.673,46	3.514,49	139.158,97	Belum Terlampaui
	4.689.945,61	18.534.378,71	-13.844.433,10	Terlampaui
Kotaanyar	2.654.089,04	1.896.020,36	758.068,68	Belum Terlampaui
	5.120.522,26	14.409.732,84	-9.289.210,58	Terlampaui
Kraksaan	6.989.884,84	5.188.164,66	1.801.720,19	Belum Terlampaui
	4.983.875,69	14.186.344,14	-9.202.468,45	Terlampaui
Krejengan	3.418.846,46	2.542.011,66	876.834,81	Belum Terlampaui
	4.818.352,73	17.576.746,74	-12.758.394,02	Terlampaui
Krucil	75.794.318,94	14.266.130,94	61.528.188,00	Belum Terlampaui
	5.972.609,41	19.415.958,66	-13.443.349,25	Terlampaui
Kuripan	1.914.210,47	64.627,09	1.849.583,38	Belum Terlampaui
	2.489.462,22	17.873.740,91	-15.384.278,68	Terlampaui
Leces	132.653,28	84.513,72	48.139,56	Belum Terlampaui
	7.346.257,40	20.415.779,48	-13.069.522,08	Terlampaui
Lumbang	1.203.460,11	141.722,06	1.061.738,05	Belum Terlampaui
	3.860.077,26	22.903.922,74	-19.043.845,48	Terlampaui
Maron	1.435.598,92	914.720,10	520.878,82	Belum Terlampaui
	12.354.930,24	26.548.988,70	-14.194.058,46	Terlampaui
Paiton	11.562.760,18	8.488.452,59	3.074.307,59	Belum Terlampaui
	7.660.141,22	18.344.480,61	-10.684.339,39	Terlampaui
Pajarakan	1.333.126,92	689.322,93	643.803,99	Belum Terlampaui
	3.998.885,74	10.670.029,87	-6.671.144,13	Terlampaui
Pakuniran	11.560.128,62	2.094.297,34	9.465.831,28	Belum Terlampaui
	6.093.134,62	21.007.075,46	-14.913.940,85	Terlampaui
Sukapura	2.658.201,74	203.551,49	2.454.650,26	Belum Terlampaui
	1.340.541,13	18.661.110,91	-17.320.569,78	Terlampaui
Sumber	8.660.017,15	525.110,11	8.134.907,04	Belum Terlampaui
	1.784.582,45	7.765.747,49	-5.981.165,04	Terlampaui
Sumberasih	61.210,41	9.687,97	51.522,44	Belum Terlampaui
	4.884.413,27	18.515.420,43	-13.631.007,15	Terlampaui
Tegalsiwalan	7.131,49	5.025,43	2.106,06	Belum Terlampaui
	8.082.469,75	21.046.248,17	-12.963.778,42	Terlampaui
Tiris	17.466.092,41	7.343.657,75	10.122.434,67	Belum Terlampaui
	11.572.649,50	38.436.591,85	-26.863.942,35	Terlampaui
Tongas	180.177,42	49.757,01	130.420,42	Belum Terlampaui

Kecamatan	Ketersediaan Air (m3/Tahun)	Kebutuhan Air (m3/Tahun)	Selisih	Status
Wonomerto	6.058.023,14	28.871.087,79	-22.813.064,65	Terlampau
	132.326,59	53.807,29	78.519,30	Belum Terlampaui
	4.048.808,42	20.053.886,31	-16.005.077,89	Terlampau
Total	323.079.152,02	535.726.060,80	-212.646.908,78	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo, 2025

Data proyeksi ini memberikan gambaran tentang ketersediaan air di masa depan, serta potensi risiko yang mungkin dihadapi, seperti kekeringan atau pencemaran. Dengan memahami proyeksi daya dukung air, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dapat merencanakan strategi pengelolaan air yang lebih efektif, termasuk pengembangan infrastruktur, konservasi sumber daya air, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air yang berkelanjutan.

Secara umum Kabupaten Probolinggo memiliki status yang terlampaui atau defisit air, Meskipun demikian pada setiap kecamatan di beberapa tempat status air masuk kategori Belum terlampaui. Berdasarkan data di tersebut ketersediaan air di Kabupaten Probolinggo sejumlah 323.079.152,02 m3/tahun dan kebutuhannya mencapai 535.726.060,80 m3/tahun. Dengan demikian status Kabupaten Probolinggo telah melampaui ketersediaan air bersih dengan defisit sebesar -212.646.908,78 m3/tahun.

B. Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan

Secara umum Kabupaten Probolinggo memiliki status yang belum terlampaui atau surplus pangan, Meskipun demikian pada setiap kecamatan di beberapa tempat status pangan masuk kategori terlampaui. Berdasarkan data di bawah ketersediaan pangan (beras) di Kabupaten Probolinggo sejumlah 185.803.884 kg/tahun dan kebutuhannya mencapai 131.632.828,20 kg/tahun. Dengan demikian status Kabupaten Probolinggo belum melampaui ketersediaan pangan dengan selisih sebesar 54.171.055,80 kg/tahun. Data terkait tentang status daya dukung pangan di Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Status Daya Dukung (Pangan) Kabupaten
Probolinggo Tahun 2024

Kecamatan	Kebutuhan Pangan/Beras (Kg/Tahun)	Ketersediaan Pangan/Beras (Kg/Tahun)	Selisih	Status
Bantaran	8.675.987,47	1.864.754,71	6.811.232,76	Belum Terlampaui
	1.148.469,53	3.071.511,81	-1.923.042,28	Terlampaui
Banyuwanyar	1.226.193,46	65.786,27	1.160.407,20	Belum Terlampaui
	1.273.995,54	6.180.720,33	-4.906.724,80	Terlampaui
Besuk	4.613.473,41	498.611,67	4.114.861,74	Belum Terlampaui
	2.087.158,59	5.191.842,93	-3.104.684,34	Terlampaui
Dringu	1.859.659,31	64.313,00	1.795.346,31	Belum Terlampaui
	1.196.405,69	6.067.238,36	-4.870.832,67	Terlampaui
Gading	27.444.005,81	1.513.173,28	25.930.832,52	Belum Terlampaui
	1.984.191,19	4.639.825,80	-2.655.634,60	Terlampaui
Gending	7.550.461,75	1.450.927,67	6.099.534,08	Belum Terlampaui
	1.728.157,25	3.339.403,57	-1.611.246,32	Terlampaui
Kotaanyar	3.828.352,86	466.332,92	3.362.019,94	Belum Terlampaui
	1.434.278,14	3.699.744,84	-2.265.466,70	Terlampaui
Kraksaan	16.731.515,30	3.521.013,34	13.210.501,97	Belum Terlampaui
	1.271.727,70	4.242.153,46	-2.970.425,77	Terlampaui
Krejengan	15.751.174,45	2.268.299,11	13.482.875,34	Belum Terlampaui
	1.267.050,55	2.357.826,57	-1.090.776,02	Terlampaui
Krucil	4.021.932,64	28.517,16	3.993.415,48	Belum Terlampaui
	733.759,36	6.494.767,16	-5.761.007,80	Terlampaui
Kuripan	2.443.475,18	90.790,85	2.352.684,33	Belum Terlampaui
	801.437,82	3.344.816,15	-2.543.378,33	Terlampaui
Leces	1.144.788,89	32.464,80	1.112.324,09	Belum Terlampaui
	942.571,11	6.465.286,52	-5.522.715,41	Terlampaui
Lumbang	3.789.243,19	688.860,68	3.100.382,51	Belum Terlampaui
	1.260.071,81	2.979.266,84	-1.719.195,03	Terlampaui
Maron	15.521.718,21	3.942.473,12	11.579.245,09	Belum Terlampaui
	1.761.896,79	3.530.752,28	-1.768.855,49	Terlampaui
Paiton	5.769.394,29	465.981,12	5.303.413,17	Belum Terlampaui
	2.704.897,71	7.217.636,20	-4.512.738,49	Terlampaui
Pajarakan	10.837.256,48	2.312.428,83	8.524.827,64	Belum Terlampaui
	659.848,52	1.530.911,81	-871.063,28	Terlampaui

Kecamatan	Kebutuhan Pangan/Beras (Kg/Tahun)	Ketersediaan Pangan/Beras (Kg/Tahun)	Selisih	Status
Pakuniran	6.524.137,73	500.938,74	6.023.198,99	Belum Terlampaui
	1.415.609,27	4.524.182,62	-3.108.573,35	Terlampaui
Sukapura	55.136,34	178,89	54.957,45	Belum Terlampaui
	19.524,66	2.222.780,83	-2.203.256,17	Terlampaui
Sumber	218.863,70	209,54	218.654,16	Belum Terlampaui
	62.211,30	2.944.142,54	-2.881.931,24	Terlampaui
Sumberasih	6.282.086,18	1.466.898,00	4.815.188,18	Belum Terlampaui
	2.111.270,82	5.879.002,84	-3.767.732,02	Terlampaui
Tegalsiwalan	1.588.295,54	88.307,32	1.499.988,23	Belum Terlampaui
	1.014.787,46	4.089.912,80	-3.075.125,35	Terlampaui
Tiris	1.779.876,40	20.808,76	1.759.067,64	Belum Terlampaui
	699.608,60	7.844.943,96	-7.145.335,36	Terlampaui
Tongas	6.785.203,17	1.315.131,20	5.470.071,97	Belum Terlampaui
	1.775.669,83	6.433.510,16	-4.657.840,33	Terlampaui
Wonomerto	1.171.167,96	124.437,22	1.046.730,74	Belum Terlampaui
	835.885,04	4.549.009,62	-3.713.124,58	Terlampaui
Total	185.803.884,00	131.632.828,20	54.171.055,80	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo, 2025

Berdasarkan tabel diatas, secara lebih rinci dapat diketahui bahwa seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Probolinggo memiliki status ketersediaan pangan yang belum terlampaui (sebagian besar) dan terlampaui (sebagian kecil) artinya ketersediaan pangan masih mampu memenuhi kebutuhan akan pangan yang berdasarkan kebutuhan besar layak bagi penduduk per tahun. Kecamatan dengan total status pangan defisit/terlampaui tertinggi.



Gambar 2. 4 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Kabupaten Probolinggo Tahun 2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo, 2025

Daya dukung pangan merupakan indikator penting yang mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam memproduksi dan menyediakan pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi masyarakat. Di Kabupaten Probolinggo, proyeksi daya dukung pangan menjadi sangat krusial mengingat pertumbuhan populasi yang terus meningkat, perubahan pola konsumsi, serta tantangan yang dihadapi dalam sektor pertanian, seperti perubahan iklim, penurunan kualitas tanah, dan keterbatasan sumber daya air.

Proyeksi daya dukung pangan di Kabupaten Probolinggo dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk luas lahan pertanian, produktivitas tanaman, ketersediaan air, dan kebijakan pertanian yang diterapkan. Data proyeksi ini memberikan gambaran tentang potensi produksi pangan di masa depan, serta tantangan yang mungkin dihadapi, seperti fluktuasi harga, ancaman hama dan penyakit, serta dampak perubahan iklim.

Secara umum Kabupaten Probolinggo memiliki status yang belum terlampaui atau surplus pangan, Meskipun demikian pada setiap kecamatan di beberapa tempat status pangan masuk kategori

terlampau. Berdasarkan data di bawah ketersediaan pangan (beras) di Kabupaten Probolinggo sejumlah 185.803.884 Kg/tahun dan kebutuhannya mencapai 131.632.828,20 Kg/tahun. Dengan demikian status Kabupaten Probolinggo belum melampaui ketersediaan pangan dengan selisih sebesar 54.171.055,80 kg/tahun. Data terkait tentang proyeksi daya dukung pangan di Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 5 Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Probolinggo Tahun 2029

Kecamatan	Kebutuhan Pangan/Beras (Kg/Tahun)	Ketersediaan Pangan/Beras (Kg/Tahun)	Selisih	Status
Bantaran	8.643.136,92	1.850.755,69	6.792.381,23	Belum Terlampaui
	1.181.320,08	3.135.782,47	-1.954.462,39	Terlampaui
Banyuwanyar	1.226.193,46	66.375,47	1.159.818,00	Belum Terlampaui
	1.273.995,54	6.236.076,77	-4.962.081,24	Terlampaui
Besuk	4.613.473,41	504.746,74	4.108.726,67	Belum Terlampaui
	2.087.158,59	5.255.725,02	-3.168.566,43	Terlampaui
Dringu	1.857.748,08	63.017,30	1.794.730,78	Belum Terlampaui
	1.198.316,92	6.128.451,50	-4.930.134,58	Terlampaui
Gading	27.423.488,43	1.514.415,41	25.909.073,02	Belum Terlampaui
	2.004.708,57	4.727.325,03	-2.722.616,46	Terlampaui
Gending	7.513.690,27	1.429.716,12	6.083.974,15	Belum Terlampaui
	1.764.928,73	3.412.815,92	-1.647.887,19	Terlampaui
Kotaanyar	3.811.619,51	453.413,50	3.358.206,01	Belum Terlampaui
	1.451.011,49	3.747.389,14	-2.296.377,65	Terlampaui
Kraksaan	16.731.515,30	3.549.424,38	13.182.090,92	Belum Terlampaui
	1.271.727,70	4.276.383,38	-3.004.655,68	Terlampaui
Krejengan	15.709.333,89	2.249.582,11	13.459.751,79	Belum Terlampaui
	1.308.891,11	2.424.205,17	-1.115.314,07	Terlampaui
Krucil	4.021.137,94	28.067,62	3.993.070,31	Belum Terlampaui
	734.554,06	6.575.220,10	-5.840.666,03	Terlampaui
Kuripan	2.443.475,18	91.465,60	2.352.009,58	Belum Terlampaui
	801.437,82	3.369.674,40	-2.568.236,58	Terlampaui
Leces	1.144.788,89	32.736,39	1.112.052,50	Belum Terlampaui
	942.571,11	6.519.371,85	-5.576.800,74	Terlampaui
Lumbang	3.768.128,97	673.170,99	3.094.957,98	Belum Terlampaui
	1.281.186,03	3.024.234,37	-1.743.048,34	Terlampaui
Maron	15.521.718,21	3.980.907,07	11.540.811,14	Belum Terlampaui
	1.761.896,79	3.565.172,49	-1.803.275,70	Terlampaui
	5.769.394,29	468.004,47	5.301.389,83	Belum

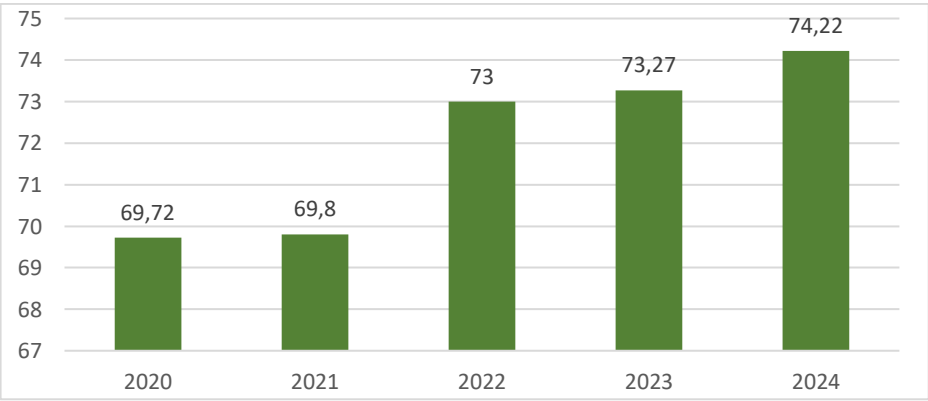
Kecamatan	Kebutuhan Pangan/Beras (Kg/Tahun)	Ketersediaan Pangan/Beras (Kg/Tahun)	Selisih	Status
Paiton				Terlampau
	2.704.897,71	7.248.975,97	-4.544.078,27	Terlampau
Pajarakan	10.826.111,30	2.313.130,19	8.512.981,10	Belum Terlampau
	670.993,70	1.549.955,97	-878.962,26	Terlampau
Pakuniran	6.514.937,92	495.926,13	6.019.011,79	Belum Terlampau
	1.424.809,08	4.571.750,23	-3.146.941,15	Terlampau
Sukapura	55.136,34	179,73	54.956,61	Belum Terlampau
	19.524,66	2.233.220,15	-2.213.695,49	Terlampau
Sumber	218.863,70	210,45	218.653,25	Belum Terlampau
	62.211,30	2.956.964,87	-2.894.753,57	Terlampau
Sumberasih	6.192.379,63	1.393.550,16	4.798.829,48	Belum Terlampau
	2.200.977,37	6.037.233,72	-3.836.256,36	Terlampau
Tegalsiwalan	1.588.295,54	88.834,97	1.499.460,58	Belum Terlampau
	1.014.787,46	4.114.350,75	-3.099.563,30	Terlampau
Tiris	1.779.876,40	21.057,93	1.758.818,47	Belum Terlampau
	699.608,60	7.938.883,19	-7.239.274,59	Terlampau
Tongas	6.777.458,51	1.321.016,57	5.456.441,93	Belum Terlampau
	1.783.414,49	6.508.195,59	-4.724.781,09	Terlampau
Wonomerto	1.171.167,96	125.679,09	1.045.488,88	Belum Terlampau
	835.885,04	4.594.408,03	-3.758.523,00	Terlampau
Total	185.803.884,00	132.867.150,16	52.936.733,84	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo, 2025

2.1.1.4 Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

A. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir.



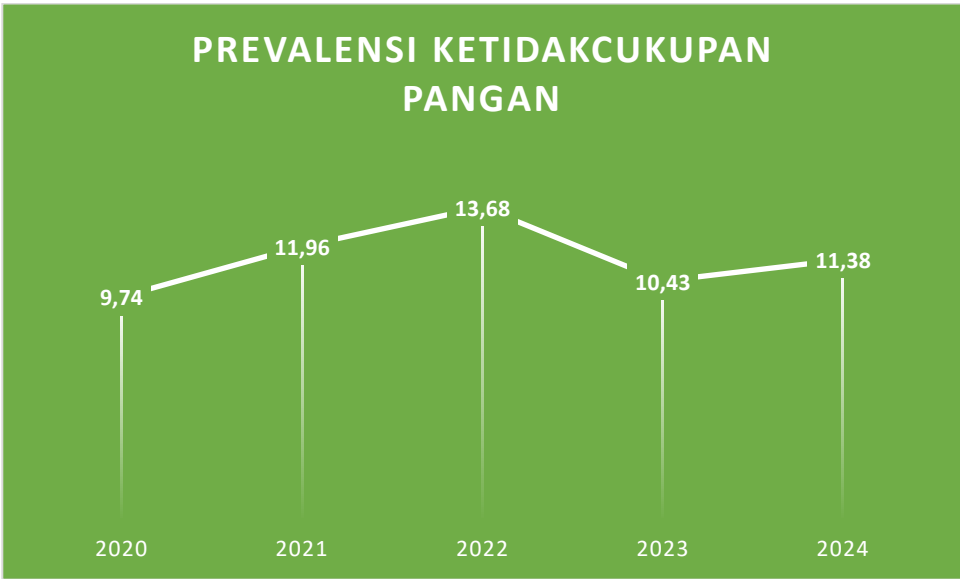
Gambar 2. 5 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Pada gambar 2.5 Indeks Ketahanan Pangan menunjukkan tren meningkat sepanjang 2020–2024, dengan capaian tertinggi pada

tahun 2024 sebesar 74,22. Peningkatan ini menggambarkan bahwa daerah mampu memperkuat ketahanan pangan secara bertahap dan konsisten. Ke depan, tantangan yang perlu diperhatikan adalah menjaga stabilitas produksi pangan, memperkuat sistem distribusi, serta memastikan akses pangan yang merata agar ketahanan pangan tetap terjaga dan berkelanjutan.

Hal ini didukung dengan Prevalensi Ketidacukupan Pangan yang menunjukkan tren sebaliknya. Semakin kokoh sistem pangan lokal, maka semakin kecil proporsi penduduk yang kekurangan gizi kronis. Prevalensi Ketidacukupan Pangan atau Prevalensi of Undernourishment (PoU) ditunjukkan oleh grafik dibawah:



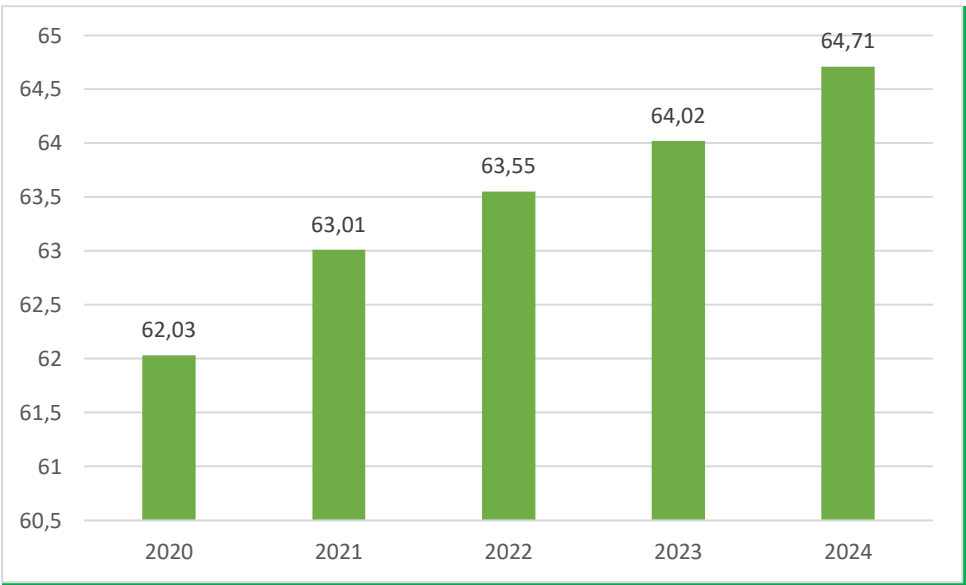
Gambar 2. 6 Prevalensi Ketidacukupan Pangan Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 - 2024

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Prevalensi ketidacukupan pangan di wilayah Kabupaten Probolinggo cenderung berfluktuasi dengan puncak masalah pada 2022 (13,68%). Upaya perbaikan berhasil menurunkannya pada 2023, tetapi masih terjadi sedikit kenaikan di 2024. Hal ini menegaskan perlunya konsistensi kebijakan dan penguatan sistem ketahanan pangan, khususnya pada aspek distribusi dan keterjangkauan pangan, agar prevalensi ketidacukupan pangan dapat terus ditekan secara berkelanjutan.

B. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak

Capaian indikator kinerja proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2020-2024 mengalami peningkatan.



Gambar 2.7 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Kabupaten Probolinggo Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo, 2025

Gambar 2.7 menunjukkan bagaimana akses rumah tangga terhadap air minum layak di Kabupaten Probolinggo terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Pada 2020, baru sekitar 62% rumah tangga yang memiliki akses berkelanjutan. Angka ini kemudian meningkat menjadi 63% di 2021, naik lagi ke 63,5% pada 2022, lalu 64,02 % di 2023, hingga mencapai sekitar 64,71% di tahun 2024.

Akses terhadap air minum layak di Kabupaten Probolinggo menunjukkan tren positif dan konsisten naik sepanjang 2020–2024. Meski begitu, masih ada sebagian masyarakat yang belum terlayani. Ke depan, tantangannya adalah memperluas cakupan ke wilayah yang sulit dijangkau dan memastikan layanan air minum yang ada tetap berkelanjutan serta aman dikonsumsi.

Selain menghitung capaian akses Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak , Pemerintah daerah juga menghitung capaian akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap

minum perpipaan. Capaian akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan adalah rumah tangga yang terlayani jaringan perpipaan PDAM dibagi dengan jumlah rumah tangga perkotaan. Dengan asumsi sumber air oleh PDAM dianggap siap minum perpipaan, dengan kualitas sesuai Permenkes No 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. Data capaian akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan sebesar 22.366 SR, dibanding jumlah KK Perkotaan sebesar 52.903,72 adalah 42%.

Dari capaian akses di atas, menegaskan bahwa masih diperlukan kebijakan dan pelaksanaan program kerja yang masif dan berkelanjutan guna mendukung ketahanan air di Kabupaten Probolinggo.

2.1.1.5 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Dalam rangka mewujudkan tujuan rencana pembangunan jangka menengah yang ke-4 yaitu meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas infrastruktur dalam pengembangan wilayah, pemerintah daerah merumuskan satu indikator tujuan yaitu Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI). IKLI adalah sebuah indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah atau penyedia layanan publik lainnya. IKLI memberikan gambaran tentang seberapa baik pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan dari perspektif masyarakat.

IKLI bertujuan untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap kinerja pembangunan infrastruktur, mengidentifikasi harapan dan keinginan masyarakat terkait infrastruktur, serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan infrastruktur di masa depan. Manfaat IKLI antara lain:

- Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur;
- Memberikan informasi tentang aspek-aspek infrastruktur yang perlu ditingkatkan;

- Menjadi acuan dalam penyusunan rencana dan strategi perbaikan kinerja infrastruktur;
- Meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam penyediaan layanan infrastruktur.

Terdapat 6 unsur utama untuk mengukur Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI), yaitu :

1. Ketersediaan Fisik (availability)
2. Kualitas Fisik (quality)
3. Kesesuaian (Appropriateness)
4. Efektifitas Pemanfaatan (Utility)
5. Penyerapan Tenaga Kerja (Job Creation)
6. Kontribusi pada Perekonomian

Indeks kepuasan layanan infrastruktur (IKLI) merupakan indikator baru dalam rencana pembangunan daerah jangka menengah di Kabupaten Probolinggo sehingga Pemda Kabupaten Probolinggo belum memiliki data eksisting. Pengukuran target IKLI didasarkan pada: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Indeks kepuasan layanan infrastruktur (IKLI) merupakan agregat dari kepuasan layanan infrastruktur jalan, jembatan, sumber daya air, rumah layak huni, bangunan gedung, air minum layak, air limbah domestik, persampahan, pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan perhitungan awal bahwa baseline IKLI pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 72,7 % (kategori C : Kurang Baik). Indikator IKLI didukung dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut:

a. Indek Infrastruktur Dasar

Indeks infrastruktur dasar merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai ketersediaan dan kualitas fasilitas dasar di suatu wilayah. Indeks infrastruktur dasar merupakan indeks baru dan dihitung mulai tahun 2025. Indeks ini mencerminkan tingkat kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan akses terhadap layanan-layanan penting seperti air bersih, sanitasi, kesehatan, dll. Di Kabupaten Probolinggo indeks infrastruktur dasar

dihitung berdasarkan ketersediaan air minum layak, sanitasi, rumah layak huni bangunan gedung, ketersediaan sarana pendidikan, kesehatan, penanganan sampah serta pengelolaan sumber daya air.

Indeks infrastruktur dasar dihitung berdasarkan rata-rata dari penjumlahan Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan, Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman), Persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni, Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik, Persentase ketersediaan sarana pendidikan, Persentase ketersediaan sarana kesehatan, Persentase penanganan sampah dan Persentase kenaikan pengelolaan sumber daya air kondisi baik.

Rumah tangga dikatakan menggunakan/mempunyai akses air minum layak apabila sumber air minum yang digunakan rumah tangga berasal dari leding, air terlindung (pompa/sumur bor, sumur terlindung, mata air terlindung) dengan jarak ≥ 10 m dari penampungan kotoran/limbah, dan air hujan / Rumah tangga yang mempunyai akses air minum perpipaan perkotaan dan pedesaan. Capaian persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan pada tahun 2024 sebesar 64,71 %. Pengelola SPAM Kabupaten Probolinggo 1 BUMD yaitu Perusahaan Umum Daerah Argapura dan 126 Pokmas/ Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (KPSPAM).

Sumber air minum layak adalah sumber air yang secara kualitas, kuantitas, dan kontinuitas memenuhi syarat kesehatan dan dapat digunakan tanpa menimbulkan risiko terhadap kesehatan. Sumber ini meliputi air perpipaan, sumur terlindungi, mata air terlindungi, penampungan air hujan, serta air kemasan/isi ulang yang memenuhi standar. Cara perhitungannya adalah:

Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak =

$$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak}}{\text{Total rumah tangga}} \times 100\%$$

Indikator ini penting karena ketersediaan air minum yang layak merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas

kesehatan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs).

b. Indeks Konektivitas Wilayah

Indeks konektivitas wilayah adalah ukuran yang menggambarkan tingkat keterhubungan suatu wilayah melalui berbagai moda transportasi dan jaringan, seperti jalan, rel, laut, dan udara. Indeks ini digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu wilayah terhubung dengan wilayah lain, yang memungkinkan terjadinya pergerakan orang, barang, dan informasi. Konektivitas wilayah dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk infrastruktur transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara), sistem transportasi yang ada (moda transportasi yang tersedia) dan regulasi terkait. Indeks konektivitas wilayah merupakan agregat dari ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan mantap, rasio konektivitas kabupaten serta persentase keselamatan transportasi. Persentase keselamatan transportasi merupakan agregat dari persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal, rasio terjadi kecelakaan dan persentase angkutan jalan yang laik jalan.

2.1.1.6 Lingkungan Hidup Berkualitas

A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah Kabupaten/Kota pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan. IKLH dihitung menggunakan rumus $IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$

Tujuan IKLH:

1. Memberikan gambaran kondisi lingkungan hidup pada suatu wilayah dan periode tertentu.
2. Menjadi bahan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Menjadi alat ukur kinerja pengelolaan lingkungan hidup.

4. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik terkait pencapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sedangkan manfaat IKLH:

1. Membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan lingkungan yang efektif.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas lingkungan.
3. Mendorong upaya perbaikan kualitas lingkungan secara berkelanjutan.

Kondisi kualitas lingkungan hidup dapat dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masing-masing daerah. IKLH terdiri dari 3 indikator, yaitu indikator Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Adapun secara rinci capaian IKLH Kabupaten Probolinggo Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,4	64,17	60,38	64,14	61,56
Indeks Kualitas Air	50	50,77	38,89	47,78	36,25
Indeks Kualitas Udara	80,18	80,71	82,82	83,64	88,71
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	55,38	56,58	55,79	56,15	54,82

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo, 2025

Penggolongan IKLH yaitu: nilai IKLH >80 tergolong sangat baik, nilai $70 < \text{IKLH} \leq 80$ tergolong baik, nilai $60 < \text{IKLH} \leq 70$ tergolong cukup baik, nilai $50 < \text{IKLH} \leq 60$ tergolong kurang baik, nilai $40 < \text{IKLH} \leq 50$ tergolong sangat kurang baik, nilai $30 < \text{IKLH} \leq 40$ mendapatkan predikat waspada. IKLH Kabupaten Probolinggo tahun 2020 sampai 2024 tergolong cukup baik.

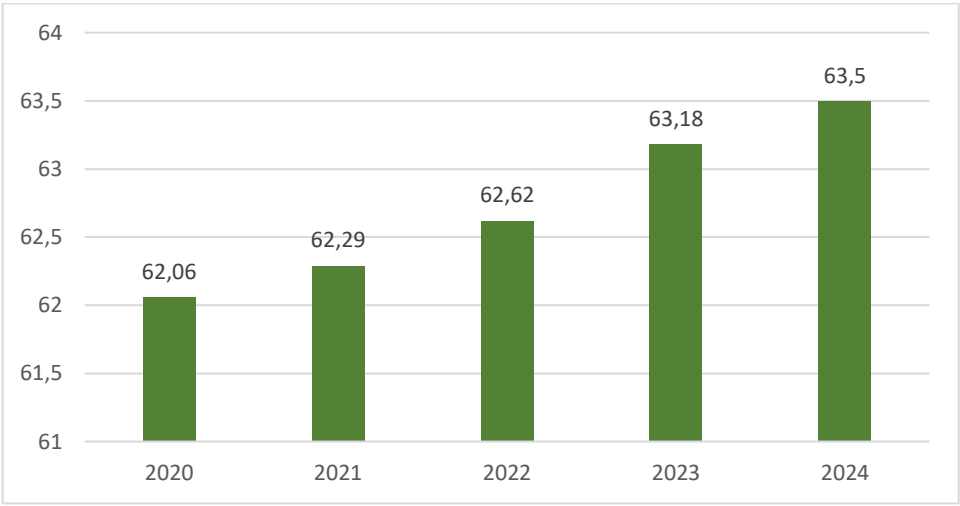
Sejak tahun 2020 - 2024 Capaian IKLH Kabupaten Probolinggo fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari tabel dimana capaian IKLH Tahun

2021 mengalami kenaikan sebesar 0,71 namun kembali turun tahun 2022 sebesar 3,79. Kenaikan lalu penurunan juga terjadi di tahun 2023 hingga 2024. Fluktuasi IKLH secara signifikan disebabkan oleh kenaikan dan penurunan nilai IKA dan IKL. IKA belum mencapai target karena beberapa hal, diantaranya waktu pelaksanaan pemantauan kualitas air yang tidak sesuai dengan rencana dimana idealnya pemantauan kualitas air dalam 1 (satu) tahun dilakukan saat musim hujan dan kemarau. Namun di Tahun 2024 seluruhnya dilakukan di musim kemarau. Hal ini terjadi karena jadwal pemantauan kualitas Air Semester I yang seharusnya dilakukan maksimal di Bulan Februari, bergeser hingga bulan April akibat kegiatan yang bersumber dari DAU Kesehatan yang belum bisa dilaksanakan. Di sisi lain, Musim hujan di awal tahun 2024 berakhir lebih cepat, sehingga sampel air di waktu musim hujan tidak mencukupi. Selain itu belum adanya sinergi yang optimal dalam pelaksanaan program Kali Bersih di Kabupaten Probolinggo. Sedangkan IKL pada tahun 2024 terjadi penurunan dikarenakan adanya Deforestasi dari Hutan Lahan Kering Sekunder menjadi Penutupan Lahan “Sawah”, Degradasi lahan dari Pertanian Lahan Kering menjadi Tanah Terbuka dan dari Sawah menjadi Permukiman, Kejadian Kebakaran Hutan Lahan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh peningkatan polusi udara akibat aktivitas industri dan transportasi serta aktivitas sehari-hari Masyarakat. Tren capaian IKLH yang cukup berfluktuasi ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan yang menghambat Pembangunan daerah, yaitu penurunan kualitas hidup masyarakat, dan dampak negatif terhadap kesehatan. Selain itu, masalah lingkungan seperti pencemaran air dan udara, serta kerusakan ekosistem juga semakin parah

B. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

Berkaitan dengan komitmen menjaga lingkungan hidup yang berkualitas, sejak tahun 2020 dengan mengacu pada metadata SDGs yakni rumah tangga dapat dikatakan memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak jika memiliki fasilitas BAB sendiri, terbatas, atau di MCK komunal, menggunakan kloset leher angsa, serta pembuangan akhir tinja ke tangki septik, IPAL, atau lubang tanah di perdesaan. Di Kabupaten Probolinggo, berikut merupakan capaian rumah tangga

yang telah memiliki akses terhadap sanitasi layak dalam rentang tahun 2020-2024:



Gambar 2. 8 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo, 2025

Capaian indikator persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak di Kabupaten Probolinggo menunjukkan tren yang membaik dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak mencapai 63,5%, meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini diharapkan mampu mendukung upaya menjaga kesehatan masyarakat, karena akses sanitasi yang baik dapat mencegah paparan kotoran maupun bahan buangan berbahaya yang menjadi media penular penyakit.

Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur yang telah mencapai 85,56%, maka capaian Kabupaten Probolinggo masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan yang cukup besar dan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih terarah serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya di bidang sanitasi, agar proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak dapat semakin meningkat.

Strategi Pembangunan Sanitasi

Pembangunan sanitasi di Kabupaten Probolinggo, khususnya pada sektor pengelolaan air limbah domestik dan persampahan, merupakan prioritas strategis yang tercermin dalam dokumen perencanaan daerah. Berdasarkan implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), Kabupaten Probolinggo menghadapi berbagai isu strategis dan telah merumuskan paket kebijakan serta program kegiatan untuk periode hingga tahun 2029.

a. Sektor Air Limbah Domestik

Capaian akses layak air limbah masih 68,1% dan akses aman baru 1,5%. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan lingkungan sehat, dengan masih banyaknya pembuangan limbah langsung ke tempat terbuka. Kabupaten Probolinggo memiliki Fasilitas IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) 1 Unit dibangun tahun 2017 yang berada di kawasan TPA Seboro Kecamatan Krejengan. Kapasitas IPLT sebesar 20 m³ dengan kapasitas terpakai IPLT 10 M³ (50%), jumlah rumah tangga yang memanfaatkan adalah 4393 Rumah Tangga. Keterbatasan dana APBD dan belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat maupun swasta (CSR). Belum maksimalnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur teknis dan administrasi dalam penentuan calon penerima bantuan, serta kurangnya koordinasi dengan perangkat desa.

Beberapa hal yang mungkin dilakukan untuk mengatasi hal tersebut di Kabupaten Probolinggo menerapkan beberapa hal di antaranya: Optimalisasi penyedotan lumpur tinja, Peningkatan pembangunan tangki septik baik individual maupun komunal. Pemicuan kesadaran masyarakat melalui berbagai media. Paket Kebijakan dengan program kegiatan meliputi penyusunan SK Bupati dan Perbup tentang daftar serta penyedotan lumpur tinja gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selain itu, juga diperlukan program pembangunan tangki septik individual dan komunal menggunakan dana APBD, APBDes, dan Pusat. Pada tahun 2024, telah dibangun 1173 unit SPALDS dan direncanakan 1230 unit pada tahun 2025. Inovasi solutif yang berfokus pada pembuatan

promosi berbasis media sosial dan rambu larangan BABS di tepi sungai.

Adapun target akses aman air limbah di 2029 adalah 40%, dengan capaian eksisting 2023 sebesar 1,5%, dan capaian s.d. 2024 sebesar 1,6%. Sedangkan target akses layak air limbah di 2029 adalah 100%, dengan capaian eksisting 2023 sebesar 68,1%, dan capaian s.d. 2024 sebesar 68,35%. Alokasi anggaran diperlukan untuk mengatasi hal ini. Pada tahun 2023, terdapat 194.173 unit tangki septik individual dan 4.100 KK yang dilayani tangki septik komunal/IPAL Komunal antara lain IPAL Komunal Patokan, IPAL Komunal Semampir, IPAL Komunal Sidomukti, IPAL Komunal Pegalangan Kidul 2 Unit. Penambahan infrastruktur di 2024 meliputi 5.578 unit tangki septik individual yang didanai dari berbagai sumber seperti APBD, APBD Desa, APBN, DAK, Swasta, dan Masyarakat. Terdapat pula IPAL permukiman berbasis masyarakat sebanyak 480 SR di 2023 dan penambahan 550 SR di 2024 dari APBD Provinsi dan APBN.

b. Sektor Persampahan

Masalah persampahan masih menjadi persoalan yang harus di atas di Kabupaten Probolinggo hingga saat ini. Kondisi yang ada meliputi Sampah yang belum tertangani mencapai 55,73%, Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana persampahan, Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Untuk mengatasi masalah persampahan, Kabupaten Probolinggo sudah memiliki sarana dan prasarana seperti tabel di bawah ini :

Tabel 2. 7 Tipe Sarana dan Prasarana Persampahan

No	Tipe sarana dan prasarana	Jumlah	Satuan
1	TPA Seboro	1	Unit
2	TPS 3R	10	Unit
3	Bank Sampah	29	Unit
4	TPS	78	Unit
5	Kontainer	119	Unit
6	Arm Roll Truck	10	Unit

No	Tipe sarana dan prasarana	Jumlah	Satuan
7	Dump Truck	11	Unit
8	Pick Up	1	Unit

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo, 2025

Selain penyediaan sarana dan prasarana persampahan Pemerintah daerah kabupaten Probolinggo melaksanakan Pelatihan pengelolaan sampah bagi kelompok swadaya Masyarakat, Sosialisasi Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Bupati (PERBUP) turunan tentang sampah serta penerapan ekonomi sirkular. Penambahan di tahun 2024 meliputi 1 unit TPS 3R dari Swasta dan 1 unit Dump Truk dari DAK. Penguatan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) dalam pengelolaan IPAL dan MCK perlu ditingkatkan. Optimalisasi fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan peningkatan koordinasi antar instansi sangat penting. Diperlukan penambahan jumlah truk tinja dan kerjasama dengan pihak swasta untuk pembuangan tinja ke IPLT. Penggalan alternatif pendanaan selain APBD, seperti Hibah, CSR, dan ZISWAF, harus dioptimalkan. Dalam Pembangunan lima tahun ke depan Kabupaten Probolinggo berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sanitasi melalui program-program yang terstruktur, didukung oleh regulasi, kelembagaan, aspek teknis, pendanaan, dan partisipasi aktif masyarakat. Tantangan yang ada menjadi fokus perbaikan berkelanjutan untuk mencapai target sanitasi yang lebih baik di masa mendatang

C. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah mengacu pada jumlah sampah yang dihasilkan dan kemudian diolah di fasilitas pengolahan sampah. Proses ini melibatkan berbagai tahap, mulai dari pengumpulan, pemilahan, pengolahan, hingga pembuangan akhir atau pemanfaatan kembali sampah.

Sistem pengumpulan sampah di Kabupaten Probolinggo umumnya menggunakan sistem pengumpulan individual tidak langsung, yaitu memanfaatkan gerobak dan juga secara individual menuju ke TPS yang menjadi tanggung jawab masyarakat, kecuali

untuk sampah hasil penyapuan jalan merupakan tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo. Dalam pengumpulan sampah, beberapa elemen berperan penting, seperti TPS (Tempat Penampungan Sementara), Pengangkut Sampah, TPA (Tempat Pemrosesan Akhir), dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dari data, selisih timbulan sampah berbanding dengan yang tertangani masih cukup tinggi meskipun mengalami tren perbaikan, sebagaimana terlihat pada data timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah berikut:

Tabel 2. 8 Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Probolinggo Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	persen	0,33	2,0592	2,0595	12,19	12,62

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2025

Capaian kinerja pengolahan sampah di Kabupaten Probolinggo dalam lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah baru mencapai 0,33%, angka ini masih sangat rendah. Namun, pada tahun 2021 terjadi peningkatan cukup besar menjadi 2,06%, meskipun capaian pada tahun 2022 relatif stagnan di angka yang hampir sama yaitu 2,06%. Perkembangan lebih positif terlihat pada tahun 2023 dengan lonjakan yang cukup tinggi mencapai 12,19%, dan tren ini berlanjut di tahun 2024 dengan capaian 12,62%.

Secara umum, pengelolaan sampah di Kabupaten Probolinggo terus menunjukkan perbaikan meskipun masih menghadapi tantangan besar. Lonjakan capaian pada tahun 2023–2024 menjadi sinyal positif bahwa intervensi kebijakan dan penguatan fasilitas pengolahan sampah mulai membuahkan hasil. Ke depan, diperlukan konsistensi dalam menjaga tren peningkatan ini serta memperluas cakupan pengolahan sampah agar dapat memberikan dampak nyata terhadap kebersihan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.

Selain perhitungan Capaian kinerja pengolahan sampah seperti diatas, Pemerintah daerah juga menghitung Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah seperti tabel 2.8 di bawah ini:

Tabel 2. 9 Capaian Kinerja Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Probolinggo Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (dalam satuan persen)	23,66	25,98	26,18	26, 38	26,58

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2025

Proporsi rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah di Kabupaten Probolinggo memang menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, hingga tahun 2024 capaian tersebut masih berada pada angka 26,58 persen, yang tergolong rendah. Kondisi ini tidak terlepas dari beberapa tantangan yang dihadapi.

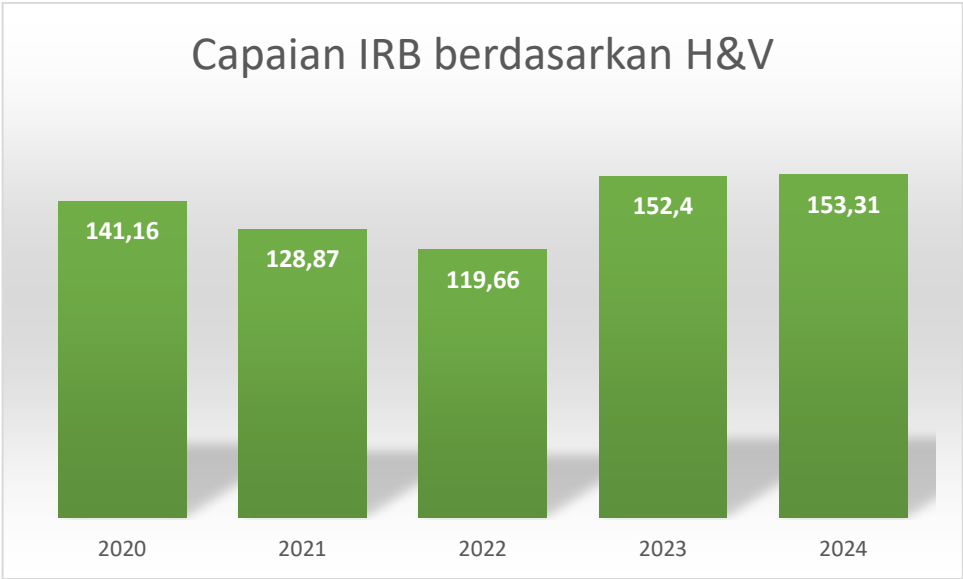
Pertama, ketersediaan sarana dan prasarana persampahan, seperti armada angkutan, TPS, maupun fasilitas pengolahan, masih terbatas sehingga belum mampu menjangkau seluruh rumah tangga. Selain itu, keterbatasan anggaran operasional membuat cakupan layanan belum bisa diperluas secara optimal. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah karakteristik wilayah Kabupaten Probolinggo yang sebagian besar berupa pedesaan dengan aksesibilitas jalan yang beragam, sehingga menyulitkan pelayanan rutin pengangkutan sampah.

Di sisi lain, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah secara baik juga masih perlu ditingkatkan. Partisipasi dalam membayar retribusi atau mendukung upaya pengolahan sampah masih relatif rendah, sehingga berpengaruh terhadap keberlanjutan layanan. Inovasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat pun masih belum berjalan optimal, sehingga ketergantungan pada sistem pengumpulan terpusat masih tinggi.

2.1.1.7 Resiliensi terhadap Bencana Alam dan Perubahan Iklim

a. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Probolinggo menunjukkan adanya tren penurunan dari tahun 2020 sampai 2024. Tren penurunan Indeks Risiko Bencana didorong salah satunya oleh pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak seperti CSR Perusahaan, NGO, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan BNPB untuk mengatasi permasalahan contohnya dalam penanganan bencana banjir di Desa Dringu. Selain itu penggunaan media sosial untuk memberikan peringatan dini, informasi evakuasi, dan update situasi terkini juga memberikan dampak signifikan terhadap pelayanan publik tanggap bencana.



Gambar 2. 9 Capaian Indeks Risiko Bencana Kabupaten Probolinggo Tahun 2020-2024

Sumber: BPBD Kabupaten Probolinggo, 2025

IRB H&V 2021 Kabupaten Probolinggo baru tersedia datanya selama 2 tahun (2023 dan 2024). IRB dihitung dengan formula $R = (H \times V) / C$, di mana risiko adalah perkalian antara ancaman (H) dan kerentanan (V) bencana dibagi dengan kapasitas penanggulangan bencana. Kabupaten Probolinggo memiliki potensi risiko bencana yang cukup signifikan, terutama bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan potensi gempa bumi serta letusan gunung berapi karena lokasinya dekat dengan Gunung Bromo. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Probolinggo dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang berfluktuasi. Setelah sempat menurun hingga 2022, nilai IRB

melonjak tajam pada 2023–2024. Hal ini menegaskan bahwa risiko bencana masih tinggi dan memerlukan perhatian serius, terutama dalam memperkuat kapasitas mitigasi, kesiapsiagaan masyarakat, serta perlindungan infrastruktur vital. Upaya yang konsisten diperlukan agar penurunan IRB bisa dicapai kembali secara berkelanjutan.

b. Resiliensi Terhadap Bencana dan perubahan iklim

Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo memiliki resiliensi yang cukup tinggi terhadap perubahan iklim yang dipengaruhi oleh gas rumah kaca hal ini dapat terlihat pada tabel berikut ini. Penurunan gas rumah kaca dipengaruhi oleh rencana aksi kegiatan di beberapa sektor yaitu sektor energi (kegiatan car free day, uji emisi kendaraan bermotor, pemanfaatan energi terbarukan, biogas, efisiensi energi/lampu LED), kawasan pesisir dan kelautan (penanaman mangrove), lahan (penggunaan pupuk organik, System of Rice Intensification/SRI, Varietas Padi Rendah Emisi, Penanaman dengan tanaman perkebunan, Ruang Terbuka Hijau), sektor pengolahan air limbah (Pembangunan fasilitas pengolahan air limbah terpusat/setempat, inisiasi perbup layanan lumpur tinja terjadwal/L2T2).

**Tabel 2. 10 Capaian Penurunan Emisi GRK Kumulatif
Kabupaten Probolinggo (satuan Ton CO2
Equivalen)**

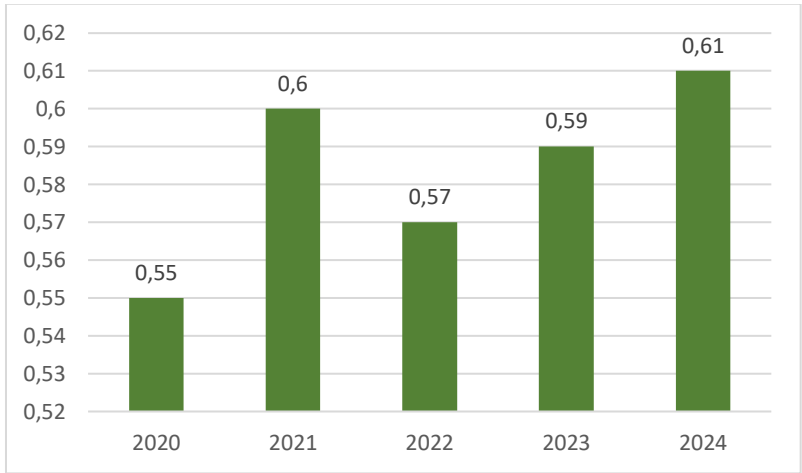
Sektor	2020	2021	2022	2023	2024
Energi	44,50	44,50	0,06	-	-
Kawasan Pesisir dan Kelautan			45,54	312,72	496,10
Lahan	185,33	62,32	8.390,63	6.856,80	7.300,81
Pengelolaan Limbah	-	-	244,96	63,50	87,34
Total Keseluruhan	229,83	106,82	8.681,19	7.233,02	7.884,25

Sumber : Kementrian Lingkungan Hidup, 2025

c. Indeks Ketahanan Daerah

Tren skor Indeks Ketahanan Daerah di Kabupaten Probolinggo menunjukkan fluktuasi pada rentang 2020 hingga 2024, dengan skor

tertinggi pada tahun 2022. Secara umum, Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Probolinggo menunjukkan tren positif dengan capaian tertinggi pada 2024 (0,61). Hal ini menandakan adanya perbaikan kapasitas daerah dalam mengantisipasi dan merespons berbagai risiko. Meski demikian, masih ada fluktuasi yang perlu diwaspadai, sehingga konsistensi penguatan kelembagaan, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya tetap menjadi kunci dalam menjaga dan meningkatkan ketahanan daerah secara berkelanjutan.



Gambar 2. 10 Capaian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2020-2024

Sumber: BPBD Kabupaten Probolinggo, 2025

Gambar 2.10 menunjukkan perkembangan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Probolinggo dalam periode 2020–2024. Pada tahun 2020, nilai IKD berada di angka 0,55, kemudian naik cukup signifikan pada 2021 menjadi 0,60. Namun, capaian tersebut sedikit menurun di tahun 2022 menjadi 0,57, lalu kembali meningkat pada 2023 ke angka 0,59, hingga akhirnya mencapai titik tertinggi 0,61 pada 2024.

2.1.1.8 Demografi

Kondisi demografi Kabupaten Probolinggo menunjukkan perkembangan jumlah penduduk yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo mengalami pertumbuhan populasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan alami dan migrasi. Data terbaru mencatat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo terus meningkat, mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks. Pertumbuhan ini tidak hanya mencerminkan

peningkatan jumlah penduduk, tetapi juga menunjukkan adanya perubahan dalam struktur usia dan komposisi sosial masyarakat.

Struktur demografi Kabupaten Probolinggo menunjukkan tren pertumbuhan penduduk yang konsisten naik dari tahun ke tahun. Komposisi penduduk perempuan yang lebih banyak dibanding laki-laki relatif stabil sepanjang periode ini. Laju pertumbuhan penduduk yang cenderung meningkat, terutama lonjakan pada 2024, menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan pembangunan, khususnya di bidang pelayanan dasar, penyediaan lapangan kerja, serta pengendalian laju pertumbuhan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap sumber daya dan infrastruktur daerah. Terlihat pada tabel di bawah ini :

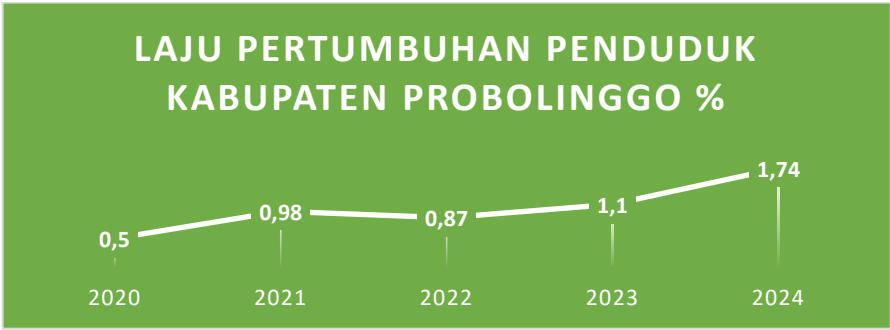
**Tabel 2. 11 Struktur Demografi Kabupaten Probolinggo
Tahun 2020-2024**

Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk	Jiwa	1.146.131	1.157.408	1.167.509	1.180.367	1.200.931
Laki-laki	Jiwa	565.800	571.412	575.834	581.973	592.531
Perempuan	Jiwa	580.331	585.996	591.675	598.394	608.400
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	-	0.98	0.87	1.10	1.74
Sex Ratio	rasio	97.5	97.5	97.3	97.3	97.4

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, 2025

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat perubahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah selama periode tertentu, biasanya dinyatakan dalam persen per tahun. Laju ini dipengaruhi oleh faktor kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas), serta migrasi masuk dan keluar. Penduduk Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 588.718 ribu jiwa. Dalam lima tahun terakhir, Kabupaten Probolinggo mengalami laju pertumbuhan penduduk yang relatif rendah, yakni sebesar 1,18% per tahun.



Gambar 2. 11 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Probolinggo 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2025

Berdasarkan grafik, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Probolinggo menunjukkan tren yang cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 0,5%, kemudian meningkat hampir dua kali lipat pada tahun 2021 menjadi 0,98%. Namun, pada tahun 2022 sempat mengalami sedikit penurunan menjadi 0,87%. Setelah itu, pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi 1,1%, dan pada tahun 2024 pertumbuhan semakin signifikan hingga mencapai 1,74%. Kenaikan ini menunjukkan adanya dorongan yang cukup kuat terhadap dinamika demografi di Kabupaten Probolinggo.

Secara umum, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan dengan tren positif meskipun sempat menurun pada tahun 2022. Lonjakan signifikan pada tahun 2024 mengindikasikan perlunya perhatian serius pemerintah daerah terhadap pengendalian jumlah penduduk serta penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan infrastruktur agar pertumbuhan penduduk dapat diimbangi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat

b. Rasio Penduduk

Rasio penduduk berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin Kabupaten Probolinggo menunjukkan rasio yang didominasi oleh kelompok umur usia produktif dan secara jenis kelamin didominasi oleh perempuan. Sebagaimana pada Gambar 2.11 pada kelompok umur 0-4 dan 5-9 menunjukkan adanya sedikit kelebihan jumlah pria di kelompok usia yang sangat muda. Namun, jumlah kelompok umur

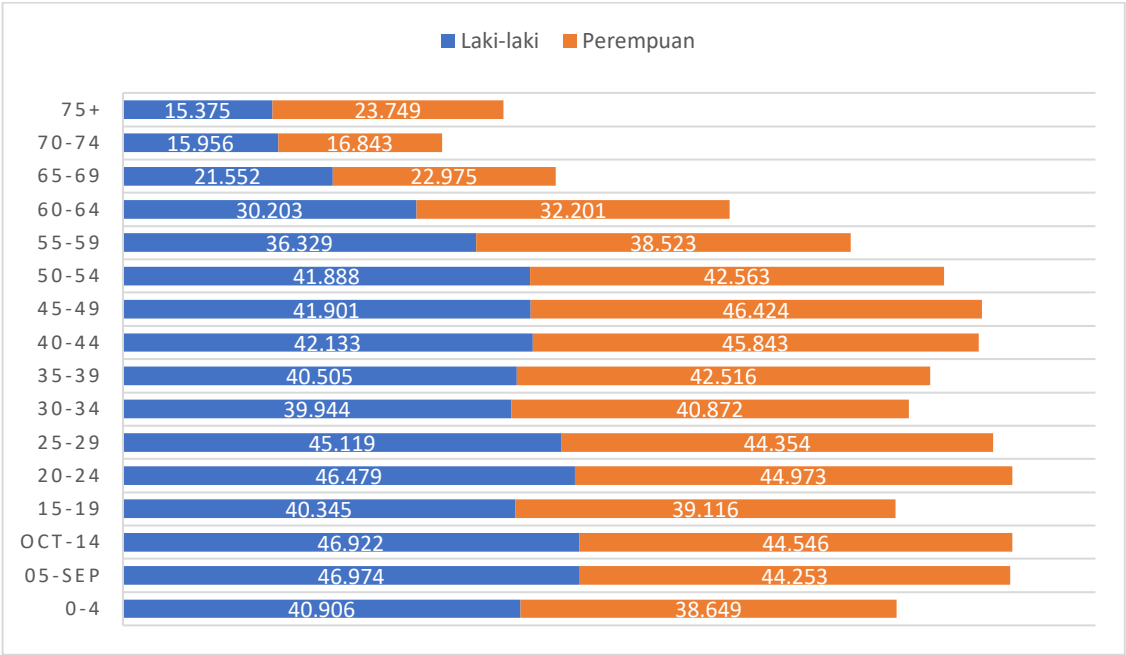
0-4 tahun lebih sedikit dari kelompok umur 5-9. Perbandingan ini menunjukkan pengaruh adanya tingkat kelahiran yang cenderung lebih rendah dalam 5 tahun terakhir.

Rasio penduduk Kabupaten Probolinggo menunjukkan jumlah pria cenderung lebih tinggi di kelompok usia muda, tetapi proporsi tersebut semakin menurun di kelompok usia yang lebih tua. Kesenjangan ini memberikan implikasi penting bagi kebijakan sosial dan kesehatan masyarakat, kebutuhan perawatan lanjut, serta pelayanan komunitas bagi populasi lansia. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perbedaan ini, yang bisa memberikan wawasan berharga dalam merancang program-program dukungan bagi penduduk yang lebih tua.

Tabel 2. 12 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Probolinggo Tahun 2024

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	40.906	38.649	79.555
5-9	46.974	44.253	91.227
10-14	46.922	44.546	91.468
15-19	40.345	39.116	79.461
20-24	46.479	44.973	91.452
25-29	45.119	44.354	89.473
30-34	39.944	40.872	80.816
35-39	40.505	42.516	83.021
40-44	42.133	45.843	87.976
45-49	41.901	46.424	88.325
50-54	41.888	42.563	84.451
55-59	36.329	38.523	74.852
60-64	30.203	32.201	62.404
65-69	21.552	22.975	44.527
70-74	15.956	16.843	32.799
75+	15.375	23.749	39.124
Jumlah	592.531	608.400	1.200.931

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, 2025



Gambar 2. 12 Piramida Penduduk Kabupaten Probolinggo 2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, 2025 (diolah)

c. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah jumlah rata-rata penduduk yang tinggal di suatu wilayah per satuan luas, biasanya dinyatakan dalam jiwa per kilometer persegi (jiwa/km²). Kepadatan penduduk di Kabupaten Probolinggo rata-rata 708 jiwa/km², dengan variasi yang cukup signifikan antar kecamatan. Kecamatan Sumberasih memiliki kepadatan tertinggi (2.197 jiwa/km²) karena menjadi lokasi yang strategis yakni dekat dengan pusat kota dan jalur transportasi utama, sementara Kecamatan Sumber memiliki kepadatan terendah (188 jiwa/km²) dikarenakan karakteristiknya secara geografis di daerah yang lebih jauh dari pusat kota dan mungkin memiliki medan yang lebih terjal.

Tabel 2. 13 Jumlah Penduduk Menurut dan Kecamatan di Kabupaten Probolinggo Tahun 2024

Kecamatan	Penduduk		Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk
	2023	2024		
Sukapura	19.732	19.925	1,66	195
Sumber	26.248	26.665	2,22	188
Kuripan	30.545	31.258	2,60	468
Bantaran	43.996	45.235	3,77	1.074
Leces	57.721	58.473	4,87	1.589

Kecamatan	Penduduk		Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk
	2023	2024		
Tegalsiwalan	37.912	38.519	3,21	923
Banyuanyar	56.452	57.565	4,79	1.260
Tiris	70.459	72.188	6,01	436
Krucil	57.591	58.989	4,91	291
Gading	54.830	55.677	4,64	379
Pakuniran	45.429	46.282	3,85	407
Kotaanyar	37.543	38.206	3,18	897
Paiton	69.726	71.227	5,93	1.337
Besuk	51.528	52.376	4,36	1.495
Kraksaan	69.335	70.733	5,89	1.871
Krejengan	41.828	42.409	3,53	1.232
Pajarakan	34.857	35.244	2,93	1.652
Maron	67.685	68.696	5,72	1.337
Gending	42.899	43.387	3,61	1.185
Dringu	53.641	53.948	4,49	1.733
Wonomerto	42.708	43.768	3,64	958
Lumbang	32.781	33.362	2,78	360
Tongas	69.450	70.332	5,86	902
Sumberasih	65.471	66.467	5,53	2.197
Kabupaten Probolinggo	1.180.367	1.200.931	100,00	708

Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2025

c. Tren Demografi Dan Proyeksi Penduduk 2025 - 2030

Proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur akan memperlihatkan kecenderungan piramida penduduk kabupaten yang menggambarkan kebutuhan-kebutuhan layanan sebagai implikasi dominasinya kelompok penduduk produktif, usia sekolah, usia balita, atau pun penduduk usia lanjut, serta rasio ketergantungan penduduk.

Tabel 2. 14 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2030

Jumlah Penduduk 2024 (Ribu Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Ribu Jiwa)					
	Tahun					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.200.931	1.193,31	1.201,00	1.208,37	1.215,49	1.222,22	1.228,62

Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2025

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur telah melakukan proyeksi penduduk di kabupaten/kota provinsi hingga tahun 2030. Jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1.185,27 ribu jiwa. Berdasarkan proyeksi, jumlah penduduk diperkirakan terus mengalami peningkatan setiap

tahunnya. Pada tahun 2025 penduduk diproyeksikan mencapai 1.193,31 ribu jiwa, kemudian naik menjadi 1.201,00 ribu jiwa pada tahun 2026. Tren pertumbuhan ini berlanjut hingga tahun 2027 sebesar 1.208,37 ribu jiwa, tahun 2028 sebanyak 1.215,49 ribu jiwa, tahun 2029 sebesar 1.222,22 ribu jiwa, dan diperkirakan mencapai 1.228,62 ribu jiwa pada tahun 2030. Kenaikan jumlah penduduk ini relatif stabil dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 6–7 ribu jiwa per tahun, mencerminkan adanya pertumbuhan alami maupun migrasi yang berdampak terhadap dinamika kependudukan di Kabupaten Probolinggo.

Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2024 hingga 2030. Hal ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan strategi pembangunan jangka menengah dan panjang, terutama dalam aspek penyediaan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, serta perumahan. Dengan perencanaan yang matang, pertumbuhan jumlah penduduk dapat diimbangi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Tabel 2. 15 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2030

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2024 (Ribu Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Ribu Jiwa)					
		Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Laki-laki	592,53	603,28	614,23	625,37	636,71	648,26	660,03
Perempuan	608,40	618,57	628,92	639,43	650,13	661,00	672,05
Rasio	97,39	97,53	97,66	97,80	97,94	98,07	98,21

Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2025

Proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin memperlihatkan kecenderungan jumlah perempuan semakin mendominasi. Rasio jenis kelamin yang cenderung meningkat memperlihatkan bahwa jumlah penduduk perempuan semakin tinggi, melebihi jumlah laki-laki. Hal ini berimplikasi bahwa dalam periode perencanaan, isu pemberdayaan perempuan menjadi sangat penting dalam rangka penciptaan kesetaraan gender dalam pembangunan. Isu

pelayanan kesehatan yang baik selama usia produktif perempuan hingga penciptaan keluarga sehat dan sejahtera juga muncul seiring dominasi perempuan di masa mendatang.

Tabel 2. 16 Proyeksi Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2030

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2024 (Ribuan Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Ribuan Jiwa)					
		Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0-4	87,34	86,37	85,72	85,08	84,44	83,81	83,20
5-9	87,09	87,73	87,87	87,83	87,57	87,02	86,06
10-14	85,72	85,89	86,08	86,31	86,60	87,01	87,65
15-19	85,44	85,36	85,31	85,31	85,38	85,49	85,65
20-24	86,74	85,92	85,36	84,98	84,78	84,66	84,58
25-29	89,24	89,27	88,80	87,94	86,89	85,87	85,06
30-34	86,99	86,68	86,89	87,46	88,16	88,64	88,68
35-39	87,32	88,20	88,31	87,80	86,98	86,27	85,96
40-44	82,39	81,69	82,04	83,28	84,96	86,46	87,35
45-49	87,05	87,13	86,27	84,65	82,75	81,23	80,55
50-54	79,44	80,40	81,64	83,05	84,39	85,22	85,32
55-59	71,63	73,10	74,28	75,22	76,01	76,84	77,81
60-64	58,76	60,63	62,51	64,36	66,14	67,77	69,2
65-69	45,34	46,79	48,38	50,08	51,85	53,65	55,43
70-74	32,15	34,12	35,43	36,62	37,76	38,95	40,27
75+	32,63	34,03	36,11	38,40	40,83	43,33	45,85
Angka Ketergantungan	0,45	0,46	0,46	0,47	0,47	0,47	0,48

Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2025

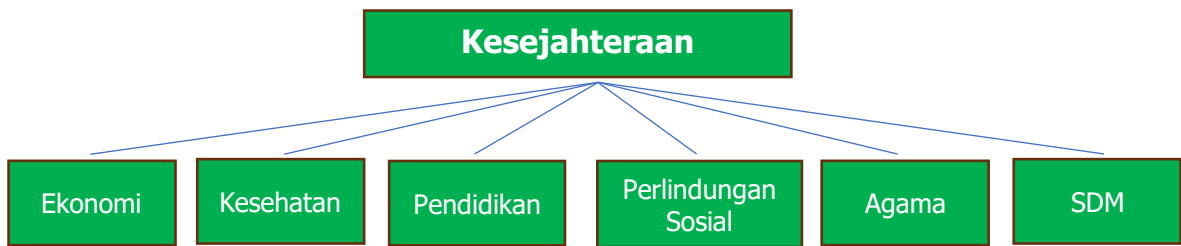
Struktur penduduk Kabupaten Probolinggo tahun 2024 hingga 2030 memperlihatkan dinamika yang menarik. Jumlah penduduk anak-anak atau usia muda (0–14 tahun) cenderung menurun dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan adanya tren penurunan angka kelahiran. Sementara itu, penduduk usia produktif (15–64 tahun) masih mendominasi, meskipun komposisinya mulai bergeser ke kelompok usia yang lebih tua. Beberapa kelompok usia produktif muda menunjukkan penurunan, sedangkan kelompok usia menengah dan tua justru relatif stabil atau meningkat. Pada saat yang sama, jumlah penduduk lanjut usia (60 tahun ke atas) terus mengalami

peningkatan cukup signifikan, bahkan beberapa kelompok hampir mendekati dua kali lipat dalam kurun waktu enam tahun. Kondisi ini mendorong angka ketergantungan naik dari 0,45 pada tahun 2024 menjadi 0,48 pada tahun 2030, yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 48 penduduk usia non-produktif.

Dalam kurun 2024 hingga 2030, struktur penduduk Kabupaten Probolinggo mengalami perubahan yang cukup nyata. Jumlah anak-anak cenderung menurun, sementara kelompok usia produktif masih mendominasi tetapi mulai bergeser ke usia yang lebih tua. Di sisi lain, jumlah penduduk lanjut usia meningkat cukup pesat, sehingga beban ketergantungan masyarakat juga ikut bertambah. Perubahan ini memberi sinyal bahwa Kabupaten Probolinggo sedang menuju masyarakat yang menua. Artinya, di satu sisi ada peluang besar memanfaatkan usia produktif yang masih cukup banyak, tetapi di sisi lain juga muncul tantangan baru, yaitu bagaimana menyiapkan layanan kesehatan, jaminan sosial, dan lapangan kerja yang memadai agar kualitas hidup masyarakat tetap terjaga.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan menjadi indikator penting untuk menilai apakah individu atau kelompok masyarakat telah mencapai kondisi hidup yang sejahtera. Sesuai dengan Inmen No.5 Tahun 2025 dilakukan analisis yang tercermin melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kesehatan yang baik, kualitas pendidikan dan merata, perlindungan sosial yang memadai, penguatan peran agama sebagai landasan moral untuk pembangunan, dan memastikan sumber daya manusia sebagai motor penggerak pembangunan. Sebagai salah satu tujuan utama *Sustainable Development Goals* (SDGs), kesejahteraan masyarakat menjadi indikator kunci yang mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial secara terintegrasi. Dalam hal ini, Kabupaten Probolinggo berperan sebagai bagian penting dalam mendukung pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan di masa mendatang.

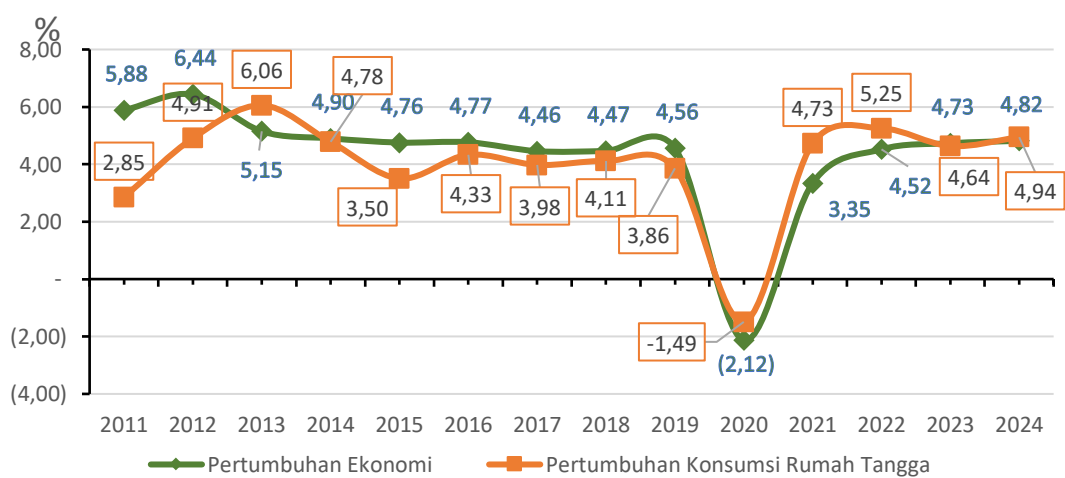


Gambar 2.13 Peta Pembahasan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 (diolah)

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Sejatinya, ekonomi suatu daerah secara alami mengalami dinamika tahunan yang dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang terus berlangsung dan diupayakan untuk tumbuh lebih baik dari periode sebelumnya. Perekonomian Kabupaten Probolinggo menunjukkan dinamika yang mencerminkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan ekonomi penting karena dapat mengukur prestasi dari perkembangan suatu daerah. Daerah mengalami kesejahteraan secara ekonomi didukung oleh beberapa faktor, antara lain dapat melihat Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, PDRB Per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Gini, dan Indeks Modal Manusia/Indeks Pembangunan Manusia.



Gambar 2. 14 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2025

Pertumbuhan ekonomi yang stabil menjadi dasar utama dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan angka

pertumbuhan sebesar 4,82% pada tahun 2024, Kabupaten Probolinggo menunjukkan potensi yang baik untuk mempercepat pembangunan lewat pertumbuhan ekonomi. Meskipun sempat mencapai di titik terendah sebesar 2,12% pada 2020, hal ini dikarenakan situasi dan kondisi COVID-19 yang berdampak negatif pada aktivitas ekonomi. Setelah mengalami kontraksi sebesar tahun 2020, Kabupaten Probolinggo berhasil menunjukkan *rebound* ekonomi dengan kenaikan lajunya sampai 5,27%. Salah satu capaian ini merupakan hal yang patut di apresiasi karena merupakan usaha seluruh lapisan di Kabupaten Probolinggo dalam konsistensinya memulihkan perekonomian dari pasca pandemi dan mempertahankan di titik tertinggi di tahun 2024 demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah. Data pada Gambar 2.17 ini juga mencerminkan hubungan yang erat antara pertumbuhan ekonomi dan konsumsi rumah tangga. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, konsumsi rumah tangga cenderung mengikuti tren positif, dan sebaliknya, saat pertumbuhan ekonomi menurun, konsumsi rumah tangga juga terpengaruh.

Tabel 2. 17 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Probolinggo Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha/Industri	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,02	1,03	2,11	3,33	1,58
B	Pertambangan dan Penggalian	-7,51	-0,02	3,06	8,49	6,35
C	Industri Pengolahan	-1,14	6,44	5,33	5,58	7,16
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,72	1,85	5,96	4,74	5,83
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,24	0,99	0,44	3,01	-3,80
F	Konstruksi	-6,11	2,07	7,25	6,28	6,38
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-7,46	6,23	6,34	4,96	4,11
H	Transportasi dan Pergudangan	-4,90	8,34	15,05	11,64	12,31
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan/Minum	-11,39	2,00	12,76	5,57	6,23
J	Informasi dan Komunikasi	6,98	4,77	4,44	4,41	6,53
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,33	0,31	1,84	7,44	5,07
L	Real Estate	1,78	0,85	3,78	4,71	3,93
M,N	Jasa Perusahaan	-6,61	1,52	4,32	8,31	7,94

O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2,21	-0,37	1,05	0,92	7,25
P	Jasa Pendidikan	2,41	0,88	0,07	6,72	4,74
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,61	4,74	3,56	1,17	4,50
R,S,T,U	Jasa lainnya	-15,52	3,01	16,51	1,20	7,77
Produk Domestik Regional Bruto		-2,12	3,35	4,52	4,73	4,82

Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2025

Namun, untuk memahami lebih jauh implikasi dari pertumbuhan ini, diperlukan analisis terhadap Laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator yang lebih rinci. Laju PDRB tidak hanya mencerminkan nilai tambah dari berbagai sektor ekonomi, tetapi juga memberikan wawasan tentang kontribusi sektor-sektor unggulan dalam mendorong pertumbuhan. Analisis ini penting untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Berdasarkan Tabel 2.17 laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Probolinggo berdasarkan lapangan usaha pada tahun 2020 hingga 2024 memberikan gambaran penting untuk mengevaluasi sektor-sektor ekonomi yang berkembang maupun yang mengalami perlambatan. Secara keseluruhan, pertumbuhan PDRB Kabupaten Probolinggo yang stabil di kisaran 4–5% per tahun menyembunyikan pergeseran struktural serta ketimpangan manfaat yang membutuhkan perhatian lebih mendalam.

Sektor-sektor yang tumbuh pesat seperti industri pengolahan dan transportasi menunjukkan bahwa ada peningkatan di area yang lebih modern dan berbasis infrastruktur. Industri pengolahan (misalnya manufaktur) berkembang stabil, dengan kontribusi yang lebih besar pada laju PDRB, sementara transportasi berkembang sangat cepat pada 2022 dan 2023. Namun, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh sangat lambat, hanya sekitar 1-2% di 2024. Sektor ini masih menyerap banyak tenaga kerja, namun belum berkembang dengan pesat. Hal ini mencerminkan bahwa perekonomian daerah lebih bergantung pada sektor yang lebih modern, sementara sektor tradisional yang mengandalkan pertanian belum mendapatkan perhatian yang memadai untuk berinovasi atau berkembang lebih cepat.

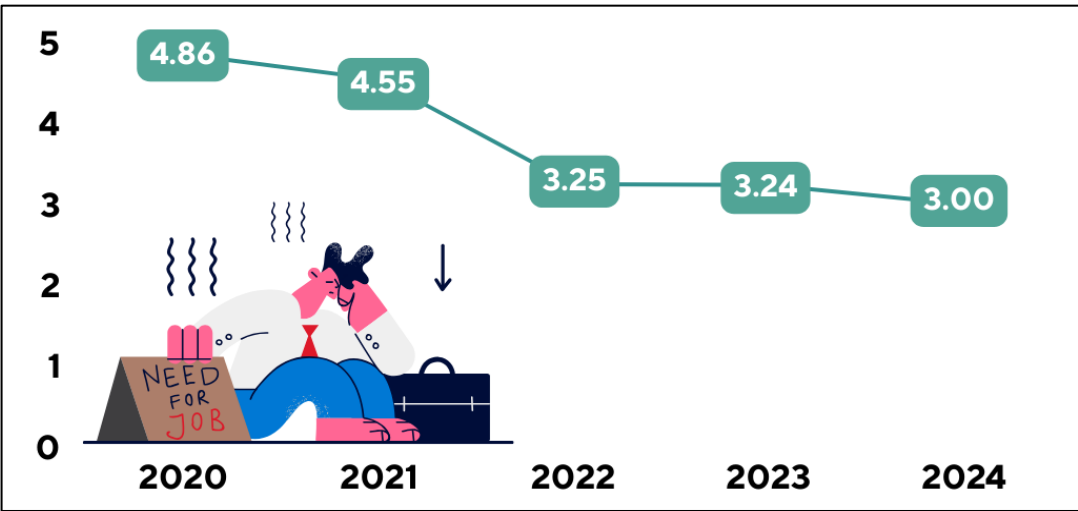
Tabel 2. 18 Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Probolinggo Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi (Ideal = menurun)
Jumlah Penduduk Miskin		218.35	223.32	203.23	205.02	197.11	
Persentase Penduduk Kemiskinan		18,61	18,91	17,12	17,19	16,45%	
	2020- 2021		+0,30%				Meningkat
	2021- 2022			- 1,79%			Menurun
	2022- 2023				+0,07%		Meningkat
	2023- 2024					-0,74%	Menurun

Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2025 (diolah)

Selanjutnya, linearitas antara PDRB dan Angka Kemiskinan juga perlu diperhatikan. Meskipun PDRB Kabupaten Probolinggo tumbuh sebesar 4,82% pada tahun 2024 penurunan tingkat kemiskinan di tahun 2024 hanya mencapai 0,74 poin persentase (dari 17,19% ke 16,45%). Ketimpangan ini menegaskan bahwa setiap satu persen pertumbuhan PDRB hanya menghasilkan penurunan kemiskinan sebesar 0,13 poin persentase, yang menunjukkan elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan yang rendah. Tren fluktuatif jumlah penduduk miskin (218,35 ribu menjadi 197,11 ribu) juga mengindikasikan bahwa lonjakan PDRB tidak selalu menjangkau kelompok paling rentan. Hal ini sejalan dengan analisis laju PDRB, di mana sektor Industri Pengolahan (C) dan Transportasi dan Pergudangan (H) yang mendominasi sebagian laju PDRB terhadap aktivitas ekonomi, namun sektor-sektor ini kurang menyerap angkatan kerja miskin. Sementara itu, sektor primer seperti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A) yang cenderung banyak menyerap tenaga kerja miskin karena cenderung berada di daerah rural, masih mengalami stagnasi, sebagaimana akan dijelaskan pada analisis LQ pada subbab berikutnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2020-2024 masih bersifat pro-kapital daripada pro-rakyat. Oleh karena itu, kebijakan ke depan harus lebih menitikberatkan pada peningkatan produktivitas sektor padat karya

dan penguatan mekanisme redistribusi sehingga pertumbuhan PDRB dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat terutama bagi penduduk miskin dan kelompok rentan.



Gambar 2. 15 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Probolinggo Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Probolinggo menunjukkan tren penurunan signifikan selama periode 2020 hingga 2024, dari 4,86% menjadi 3,00%. Penurunan sebesar 1,86 poin persentase dalam lima tahun ini mencerminkan perbaikan nyata dalam kapasitas pasar tenaga kerja daerah. Penurunan yang paling tajam terjadi pada 2021 hingga 2022, yakni sebesar 1,3 poin persentase, yang dapat dikaitkan dengan pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan meningkatnya aktivitas di sektor-sektor strategis seperti industri pengolahan dan transportasi. Selain itu, kontribusi dari sektor pertanian tetap penting, meskipun pertumbuhannya relatif lebih lambat, karena sektor ini menyerap sebagian besar tenaga kerja di wilayah tersebut.

Namun, dinamika penurunan ini tidak terlepas dari tantangan struktural. Sementara TPT turun stabil dari tahun 2022 hingga 2024 (dengan rata-rata penurunan 0,12 poin persentase per tahun), fluktuasi di sektor tertentu, seperti pertambangan dan pengelolaan air, menunjukkan potensi ketidakstabilan jangka panjang. Penurunan TPT juga perlu dikaji dari sisi kualitas pekerjaan yang diciptakan. Meski jumlah pengangguran terbuka berkurang, pertumbuhan lapangan kerja harus berorientasi pada produktivitas tinggi agar

mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Dengan demikian, data TPT ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi, tetapi juga menggarisbawahi perlunya kebijakan yang mampu memperkuat sektor-sektor penyerap tenaga kerja dan menciptakan pekerjaan yang lebih berkualitas secara berkelanjutan melalui kebijakan pasar kerja aktif.

Tabel 2. 19 Indeks Gini Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur dan Nasional 2020-2024

Wilayah	Tahun	Indeks Gini					Kondisi (Ideal = menurun)
		2020	2021	2022	2023	2024	
Kabupaten Probolinggo		0,326	0,326	0,275	0,319	0,339	
Prov. Jawa Timur		0,366	0,374	0,371	0,387	0,372	
Indonesia		0,381	0,384	0,384	0,388	0,379	
	2020-2021		0%				Stagnan
	2021-2022			-0,05%			Menurun
	2022-2023				+0,04%		Meningkat
	2023-2024					+0,20%	Meningkat

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

Indeks Gini Kabupaten Probolinggo selama periode 2020–2024 mencerminkan dinamika ketimpangan yang perlu diperdalam. Lonjakan dari 0,326 pada 2020 menjadi 0,374 pada 2021 mengindikasikan peningkatan ketimpangan, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19. Guncangan ekonomi tersebut memperlebar jurang pendapatan antara sektor formal, seperti industri pengolahan yang relatif tangguh terhadap krisis, dan sektor tradisional, seperti pertanian dan perikanan, yang lebih rentan. Fenomena ini menunjukkan adanya *reinforcing feedback loop* pada distribusi ekonomi, di mana pertumbuhan sektor yang berorientasi teknologi dan kapital intensif memperkuat kesenjangan tanpa diimbangi pemerataan manfaat ke sektor informal.

Pada 2024, Indeks Gini menurun ke 0,372 setelah mencapai puncaknya di 0,388 pada 2023. Penurunan ini dapat dilihat sebagai sinyal awal perbaikan distribusi pendapatan, tetapi tidak sepenuhnya mencerminkan transformasi struktural. Redistribusi pendapatan melalui intervensi pemerintah, seperti program perlindungan sosial dan subsidi langsung, tampaknya menjadi penyebab utama perbaikan

ini. Namun, tanpa penguatan *balancing feedback loop* melalui investasi produktif di sektor tradisional, seperti modernisasi pertanian atau integrasi rantai nilai lokal, perbaikan ini berisiko hanya bersifat sementara. Keterlambatan (*delay effect*) dalam kebijakan struktural juga memainkan peran krusial, di mana manfaat dari upaya diversifikasi ekonomi atau peningkatan daya saing baru akan terlihat dalam jangka panjang.

Hal yang cukup positif adalah pada indeks ketimpangan di mana Kabupaten Probolinggo memiliki indeks Gini lebih rendah dibandingkan rata-rata Jawa Timur dan rata-rata Nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerataan Pembangunan sudah berjalan dengan cukup baik, hanya saja dalam konteks yang rendah. Artinya, sebagian besar Masyarakat Kabupaten Probolinggo secara merata masih hidup dengan standar yang rendah. Hal ini terkait dengan posisi Kabupaten Probolinggo yang berada pada Tingkat ke-4 daerah dengan angka kemiskinan paling tinggi di Jawa Timur.

Tabel 2. 20 Nilai IPM Kabupaten Probolinggo dan Komponennya Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Harapan Lama Sekolah/HLS (Tahun)	12.35	12.36	12.58	12.63	12.64
2.	Rata-Rata Lama Sekolah/RLS (Tahun)	6.11	6.12	6.13	6.29	6.31
3.	Usia Harapan Hidup/UHH (Tahun)	73.22	73.32	73.58	73.80	73.93
4.	Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan (Ribuan Rupiah)	10.859,00	10.969,00	11.254,00	11.756,00	12.258,00
5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68.77	68.94	69.56	70.36	70.85
6.	Pertumbuhan IPM (Persen)	0,72	0,25	0,90	1,15	0,70

Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2025

Selanjutnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Probolinggo terus menunjukkan peningkatan positif, dari 68,77 pada 2020 menjadi 70,85 pada 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan kemajuan di tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Dimensi kesehatan terlihat dari usia harapan hidup (UHH) yang meningkat dari 73,22 tahun pada 2020 menjadi 73,93 tahun pada 2024. Dimensi pendidikan menunjukkan peningkatan harapan

lama sekolah (HLS) dari 12,35 tahun menjadi 12,64 tahun, sementara rata-rata lama sekolah (RLS) meningkat dari 6,11 tahun menjadi 6,31 tahun, yang meskipun kecil, mencerminkan akselerasi akses pada pendidikan dasar. Pada dimensi standar hidup, pengeluaran per kapita riil disesuaikan tumbuh signifikan, mencapai Rp12.258.000 pada 2024.

Kaitan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan hal yang perlu dilihat secara bersamaan. Hubungan antara peningkatan IPM dan penurunan angka kemiskinan Kabupaten Probolinggo masih menghadapi tantangan besar. Tingkat kemiskinan yang menurun secara perlahan, menunjukkan adanya *time lag effect* dalam dampak langsung pembangunan manusia terhadap pengurangan kemiskinan. Salah satu cara strategis yang harus *digenjot* adalah *human capital investment* melalui peluncuran inisiatif *Sekolah Rakyat*. Di satu sisi bisa meningkatkan berupa komponen pendidikan, di sisi lainnya bisa menurunkan angka kemiskinan di masa mendatang. Dengan begitu, tetapi juga menciptakan *multiplier effect* terhadap upaya untuk memutus transmisi kemiskinan di masa mendatang.

2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua

Kondisi kesehatan di Kabupaten Probolinggo selama periode 2020–2024 menunjukkan hubungan saling memengaruhi antar indikator yang mencerminkan dinamika sistem kesehatan daerah. Usia harapan hidup terus meningkat dari 67,2 tahun pada 2020 menjadi 68,12 tahun pada 2024, mencerminkan keberhasilan layanan kesehatan dasar yang berkontribusi pada penurunan angka kematian akibat penyakit menular dan kronis. Namun, peningkatan ini tidak sepenuhnya selaras dengan angka kelangsungan hidup bayi yang justru menurun dari 991,89 menjadi 987 per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini dapat mengindikasikan adanya tantangan pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, terutama dalam pemantauan kehamilan dan akses terhadap fasilitas bersalin.

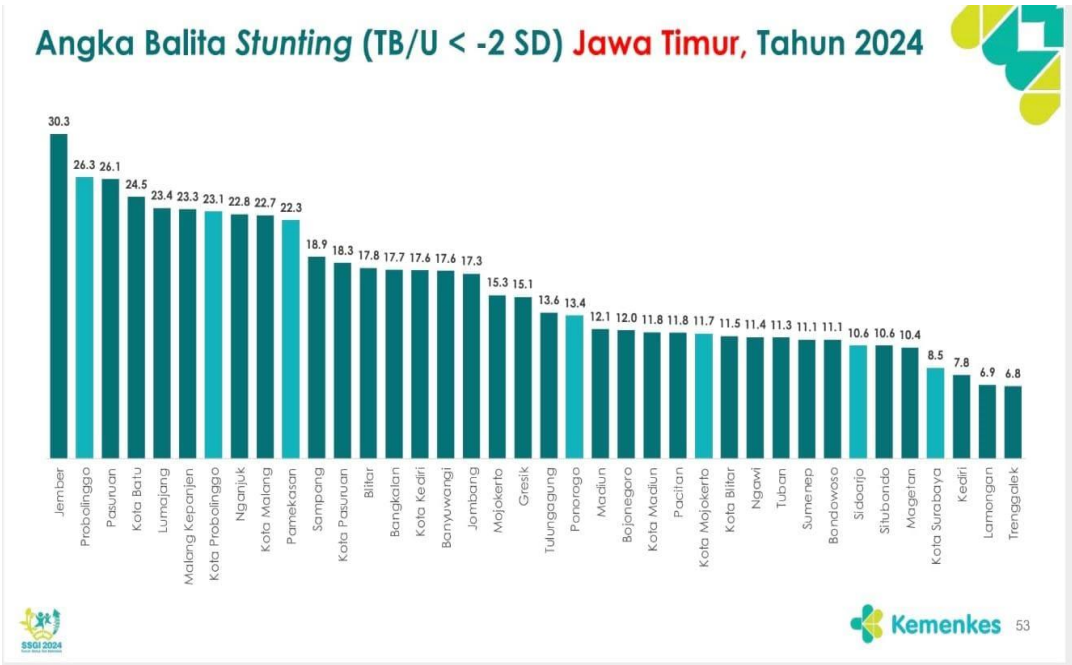
Tabel 2. 21 Capaian Pembangunan Kesehatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kelangsungan Hidup bayi per 1000 KH	991,89	989,6	987,4	987	984,76
2	Angka Usia Harapan Hidup	73,22	73,32	73,58	73,8	73,93
3	Prevalensi Gizi Buruk	1,89	1,25	1,15	1,02	0,91
4	Prevalensi Gizi Kurang	12,1	7,34	8,1	7,6	7,8
5	Prevalensi Stunting	N/A	23,30	17,30	35,40	26,3
6	Indeks Kesehatan	0,73	0,73	0,82	0,83	0,83

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2025

Meskipun usia harapan hidup di Kabupaten Probolinggo menunjukkan peningkatan yang positif dari 73,32 tahun pada 2020 menjadi 73,93 tahun pada 2024, serta prevalensi stunting sempat menurun dari 54,7 persen (2019) menjadi 17,3 persen (2022), dinamika kesehatan daerah ini menunjukkan tantangan signifikan. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 mengungkapkan bahwa prevalensi stunting melonjak tajam menjadi 35,4 persen dan tahun 2024 menjadi 26,3, menjadikan Kabupaten Probolinggo sebagai wilayah dengan angka stunting nomor urut 37 dari 38 Kabupaten Kota di Jawa Timur.

Fakta ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap program pencegahan stunting, terutama terkait intervensi gizi ibu dan anak, pelayanan kesehatan primer, dan monitoring tumbuh kembang balita. Tingginya angka stunting juga menjadi tantangan besar dalam mencapai target nasional 14 persen pada 2024, sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021.



Gambar 2. 16 Perbandingan Prevelansi Stunting di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2025

Peningkatan indeks kesehatan dari 0,73 menjadi 0,83 menjadi indikator agregat yang mencerminkan hubungan antara perbaikan indikator lain seperti status gizi, kelangsungan hidup bayi, dan usia harapan hidup. Namun, dinamika sistem kesehatan daerah juga mengungkap bahwa keberhasilan dalam satu indikator belum tentu sepenuhnya tercermin dalam yang lain. Sebagai contoh, meskipun indeks kesehatan meningkat, tren penurunan kelangsungan hidup bayi dapat menandakan adanya tekanan sistemik, seperti keterbatasan tenaga kesehatan atau infrastruktur yang tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat. Perlunya pendekatan terpadu dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan kesehatan di Kabupaten Probolinggo untuk memastikan keberlanjutan peningkatan kualitas hidup masyarakat karena kesehatan juga merupakan salah satu aspek *human capital* (modal manusia) demi pembangunan berkelanjutan.

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan di Kabupaten Probolinggo menunjukkan tren yang terus berkembang dari tahun 2020 hingga 2024, pada tabel 2.22 didapatkan capaian kinerja sebagai berikut:

**Tabel 2. 22 Capaian Pembangunan Aspek Pendidikan
Kabupaten Probolinggo Tahun 2020-2024**

Tahun	Harapan Lama Sekolah	Rata-Rata Lama Sekolah	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
2020	12.35	6.11	-
2021	12.36	6.12	-
2022	12.58	6.13	-
2023	12.63	6.29	35,9200
2024	12.64	6.31	58,2700

Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2025

Berdasarkan tabel dapat dijelaskan Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat dari 12,35 tahun 2020 menjadi 12,64 tahun 2024 dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang bertambah dari 6,11 menjadi 6,31 tahun. Meskipun ada kemajuan, angka RLS masih jauh di bawah HLS, menunjukkan adanya kesenjangan antara aspirasi pendidikan masyarakat dan kenyataan partisipasi sekolah. Hal ini diperkuat oleh munculnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang baru mulai diukur pada 2023, dengan kenaikan dari 35,92 menjadi 58,27 pada 2024. Meskipun masih di bawah capaian Jawa Timur yang sebesar 75,18 (2023) dan 78,6 (2024) namun lonjakan IPLM ini mencerminkan mulai terbangunnya kesadaran literasi di masyarakat, tetapi juga mengindikasikan bahwa infrastruktur pendukung dan akses pendidikan berkualitas masih perlu ditingkatkan untuk mendorong partisipasi penuh siswa.

Secara diagnostik, tantangan pendidikan berkualitas di daerah ini dapat dilihat sebagai hasil dari interaksi dinamis antara beberapa faktor. Kenaikan RLS yang lambat dibandingkan HLS mengisyaratkan hambatan struktural, misalnya keterbatasan akses ke jenjang pendidikan menengah dan atas, serta kebutuhan ekonomi yang memaksa sebagian penduduk memasuki pasar kerja lebih awal. Dalam sistem dinamik, ini menciptakan "loop penghambat" di mana rendahnya tingkat pendidikan memengaruhi daya saing tenaga kerja lokal, yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (human capital). Di sisi lain, IPLM yang meningkat menunjukkan potensi "loop penguat" yang dapat mempercepat peningkatan kualitas pendidikan melalui kebijakan yang tepat, seperti penguatan literasi digital dan peningkatan pelatihan untuk guru.

Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu intervensi strategis yang dapat memecahkan lingkaran masalah ini. Dengan menyediakan akses pendidikan gratis berkualitas bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu, program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan RLS, tetapi juga mendorong pembentukan human capital jangka panjang. Pendidikan yang lebih inklusif dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja masa depan, menciptakan multiplier effect berupa peningkatan kesejahteraan keluarga, pengurangan angka kemiskinan, dan daya saing ekonomi daerah. Ke depannya perlu benar-benar memastikan keberhasilannya, Sekolah Rakyat harus diintegrasikan dengan pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, sehingga dapat mengatasi kendala lokal seperti keterbatasan infrastruktur dan tenaga pendidik.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kabupaten Probolinggo menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan antara tahun 2020 hingga 2024. Data capaian kinerja Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 17 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo 2020-2024

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo, 2025

Pada tahun 2020, angka kepesertaan masih sangat rendah, hanya 0,2%, dan meskipun meningkat sedikit pada tahun-tahun

berikutnya (0,4% pada 2021 dan 0,5% pada 2022), lonjakan besar terjadi pada 2023, dengan angka mencapai 10,0%. Peningkatan tersebut terus berlanjut pada tahun 2024, di mana angka kepesertaan mencapai 24,2%.

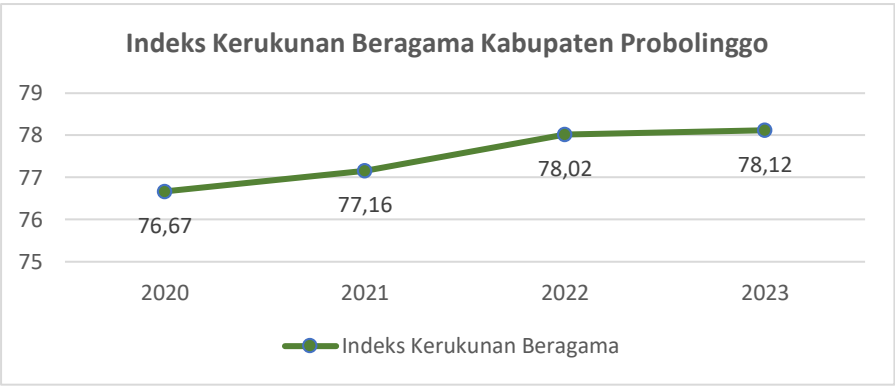
Perubahan tajam ini tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor kebijakan dan kondisi sosial-ekonomi yang berkembang di daerah tersebut. Salah satu faktor utama yang memengaruhi perubahan ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan sosial, terutama setelah pandemi COVID-19. Selama pandemi, banyak pekerja di sektor informal dan sektor pertanian yang terdampak langsung, dan pada saat yang sama, pemerintah pusat maupun daerah meluncurkan berbagai bantuan sosial serta kebijakan yang mendorong pekerja untuk terdaftar dalam sistem jaminan sosial.

Selain itu, kebijakan pemerintah daerah yang lebih aktif dalam menyosialisasikan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja juga turut berperan. Program-program penyuluhan yang lebih intensif, serta insentif bagi pekerja informal dan mikro, memberikan kemudahan akses dan pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat jaminan sosial. Hal ini penting, mengingat sebagian besar pekerja di Kabupaten Probolinggo berada di sektor pertanian dan informal, yang sebelumnya sulit dijangkau oleh program-program jaminan sosial yang bersifat formal.

Peningkatan kepesertaan ini menunjukkan adanya pergeseran dalam struktur sosial-ekonomi daerah, di mana lebih banyak pekerja yang mulai menyadari pentingnya jaminan sosial dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Dengan meningkatnya jumlah peserta, ini menunjukkan bahwa perlindungan sosial yang lebih adaptif mulai berjalan di Kabupaten Probolinggo, yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat, termasuk di sektor informal yang mendominasi. Namun, meskipun terjadi lonjakan signifikan, tantangan ke depan adalah memastikan program ini tetap inklusif dan bisa mengakomodasi seluruh lapisan pekerja di daerah tersebut, khususnya mereka yang bekerja di sektor-sektor yang rentan dan tidak terdata dalam sistem formal.

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Selama empat tahun terakhir, kehidupan beragama di Kabupaten Probolinggo mengalami pasang surut, hal tersebut dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 2. 18 Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Probolinggo Tahun 2020-2023

Sumber: Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo, 2025

Indeks Kerukunan Umat Beragama sempat mencapai 4,3 pada 2020, namun turun tajam ke 2,5 pada 2021, sebelum perlahan naik ke 3,5 pada 2022 dan 4,5 pada 2023. Penurunan tajam pada 2021 mengindikasikan adanya dinamika sosial yang tidak bisa dilepaskan dari konteks pasca-Pilkada 2020. Suasana politik lokal yang memanas saat kontestasi politik kerap berimbas ke ranah sosial, termasuk hubungan antar umat beragama. Polarisasi, gesekan antar pendukung, dan perbedaan pilihan politik menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga harmoni. Pada tahun 2024 nilai IKUB sudah tidak dihitung karena sudah tidak menjadi IKU Kepala Daerah

Meski begitu, perbaikan indeks dalam dua tahun terakhir menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk merawat kebersamaan. Peran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah dalam membuka ruang dialog, mendorong rekonsiliasi sosial, dan memperkuat kerja sama lintas agama mulai membuahkan hasil. Capaian ini tentu menjadi 100% kabar baik, tetapi juga pengingat bahwa kerukunan bukan sesuatu yang bisa dibiarkan tumbuh sendiri. Kerukunan perlu terus dirawat melalui komunikasi terbuka, edukasi toleransi sejak dini, serta kegiatan sosial bersama yang melibatkan semua golongan. Kerukunan beragama bukan hanya soal

hubungan baik antar umat beragama, tetapi juga menjadi dasar penting untuk membangun masyarakat yang maslahat, saling menghormati, dan berbudaya maju.

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Dalam lima tahun terakhir, capaian Kabupaten Probolinggo di bidang perlindungan anak, kesetaraan gender, dan inklusivitas menunjukkan dinamika yang perlu mendapat perhatian serius.

Tabel 2. 23 Capaian Pembangunan Aspek Pembangunan Keluarga dan Gender Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks Perlindungan Anak	Persentase Korban Kekerasan Anak Tertangan i	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks Pembangunan Gender
2020	72,5	100%	0,532	85,38
2021	64,59	100%	0,527	85,39
2022	59,99	100%	0,485	86,02
2023	59,26	100%	0,479	86,34
2024	60,72	100%	0,442	85,63

Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2025

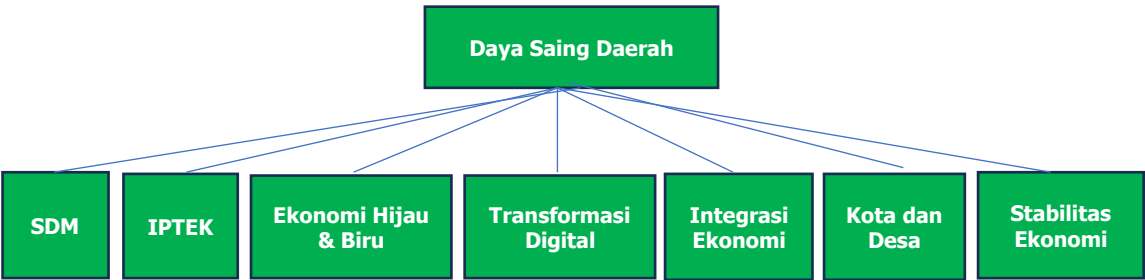
Indeks Perlindungan Anak (IPA) mengalami penurunan dari 72,5 pada 2020 menjadi 60,72 pada 2024, meskipun persentase korban kekerasan anak tertangani tetap 100%. Penurunan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan kasus tidak diikuti dengan penguatan sistem pencegahan di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menurun dari 0,532 menjadi 0,442, yang berarti ketimpangan gender semakin mengecil. Namun, kenaikan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dari 85,38 ke 86,63 masih relatif lambat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akses perempuan terhadap layanan dasar membaik, kontrol dan pemanfaatan hasil pembangunan belum optimal, terutama di tingkat keluarga dan komunitas.

Data ini menunjukkan perlunya pergeseran kebijakan dari fokus penanganan kasus (kuratif) ke penguatan pencegahan (preventif), dengan pendekatan lintas sektor yang terintegrasi.

Program perlindungan anak perlu didukung edukasi pengasuhan positif, pembentukan sekolah ramah anak, dan penguatan forum anak hingga tingkat desa. Di sisi lain, pengarusutamaan gender perlu diperluas tidak hanya pada akses, tetapi juga partisipasi dan kontrol perempuan dalam pengambilan keputusan, terutama di wilayah pedesaan. Upaya ini perlu didukung inovasi, seperti sistem pelaporan kekerasan berbasis teknologi, mekanisme deteksi dini, dan layanan berbasis komunitas. Interaksi indikator ini menunjukkan bahwa upaya membangun keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan inklusi sosial harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan ekosistem pembangunan. Tanpa penguatan di satu aspek, aspek lainnya akan terdampak.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari fokus kemampuan ekonomi daerah. Indikator variabel aspek daya saing daerah terdiri dari:



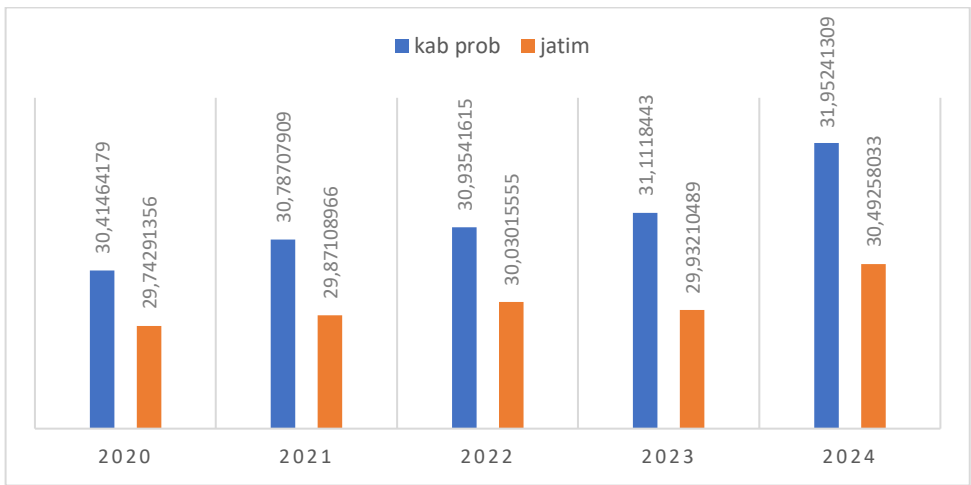
Gambar 2. 19 Peta Pembahasan Aspek Daya Saing Daerah

Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 (diolah)

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Menjelaskan kondisi daya saing SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah. Fokus Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu indikator strategi pembangunan bangsa Indonesia ke depan, pilihan strategi tersebut diupayakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Urgensi pembangunan sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan global, yang membawa konsekuensi semakin ketatnya persaingan.

Pada Kabupaten Probolinggo, tingkat SDM dalam kemandiriannya dapat dilihat pada tingkat ketergantungan, Angka ketergantungan daerah adalah indikator yang menunjukkan beban ekonomi yang ditanggung oleh penduduk produktif (usia 15-64 tahun) untuk menopang penduduk yang tidak produktif (usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Angka persentase tingkat ketergantungan SDM di Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada data berikut.



Gambar 2. 20 Rasio Ketergantungan Kabupaten Probolinggo 2020 -2024

Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo dan Provinsi Jawa Timur, 2025

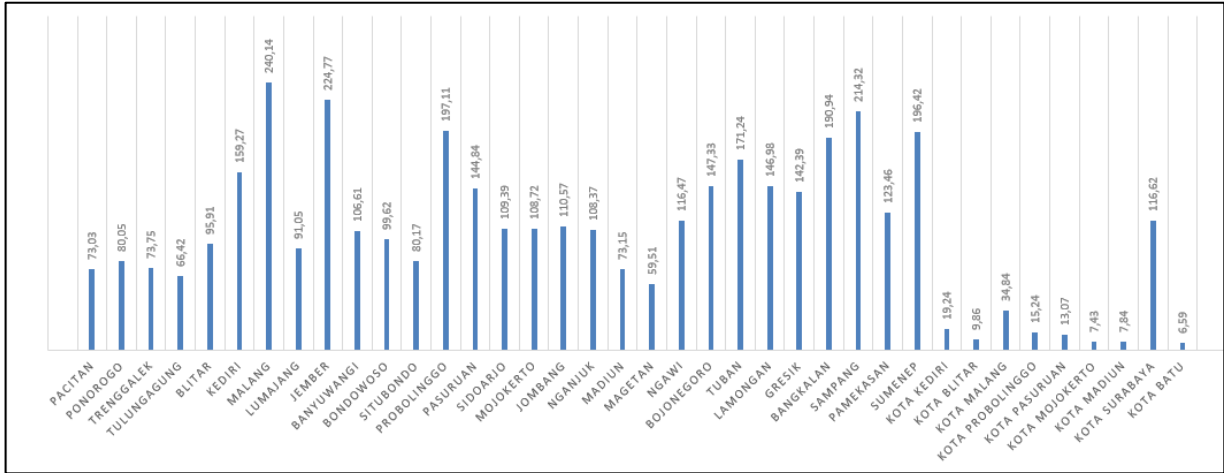
Data di atas menunjukkan bahwa angka ketergantungan di Kabupaten Probolinggo lebih tinggi dibandingkan rata-rata di Jawa Timur. Artinya, beban penduduk usia produktif cukup tinggi dalam menopang kehidupan total penduduk yang ada. Sehingga, ke depan tanggung jawab pemerintah untuk mengoptimalkan produktivitas (termasuk di dalamnya membuka lapangan pekerjaan) penduduk usia produktif menjadi lebih besar. Salah satu strategi yang tepat untuk mengatasi tingginya angka ketergantungan ini adalah dengan menekankan pada Pembangunan Human Capital dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu alternatif kebijakan yang dapat diambil adalah kebijakan pasar kerja aktif dengan menggunakan model *welfare-to-work* yang dapat memastikan keterlibatan multi-pihak dalam mengatasi masalah produktivitas angkatan kerja.

Tabel 2. 24 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Probolinggo 2020-2024

Tahun	RLS		HLS		UHH		IPM		IPG	
	Kab Probolinggo	Prov Jatim	Kab Probolinggo	Prov Jatim	Kab Probolinggo	Prov Jatim	Kab Probolinggo	Prov Jatim	Kab Probolinggo	Prov Jatim
2020					73,22	71,3			85,61	
2021					73,32	71,38			85,63	91,67
2022	6,13	8,03	12,58	13,37	73,58	71,74	69,56	74,05	86,33	92,08
2023	6,29	8,11	12,63	13,38	73,8	72,11	70,36	74,65	86,76	92,15
2024	6,31	8,28	12,64	13,43			70,85	75,35		

Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo dan Provinsi Jawa Timur, 2025

Pembangunan Human Capital menjadi lebih penting mengingat di indikator-indikator kinerja Pembangunan manusia lainnya posisi Kabupaten Probolinggo masih membutuhkan banyak perhatian. Aspek Pendidikan yang diukur melalui Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) posisi Kabupaten Probolinggo secara umum masih berada di bawah rata-rata Jawa Timur. Demikian pula untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Di sisi lain, Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Probolinggo lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Timur. Dari Gambaran di atas, dan dikaitkan dengan tingginya angka ketergantungan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka tuntutan untuk fokus Pembangunan pada aspek Human Capital/Investment makin kuat dalam rencana Pembangunan 5 tahun ke depan.



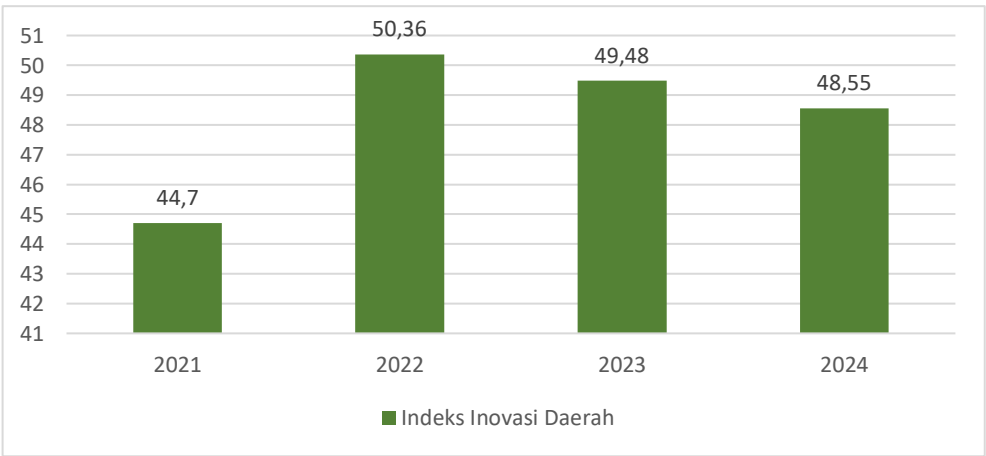
Gambar 2. 21 Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

Dengan posisi tingkat kemiskinan Kabupaten Probolinggo yang cukup tinggi, maka pembangunan Human Capital menjadi semakin

urgent dan dapat diintegrasikan dengan program-program Pembangunan di berbagai sektor dengan prinsip kolaborasi dan *joint-outcomes*. Data kemiskinan yang saat ini ada perlu dilakukan updating dengan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan menggunakan pendekatan graduasi kemiskinan dengan berbasis pada desil terendah menuju pada pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin.

Penyelenggaraan pemerintahan pada era desentralisasi (otonomi daerah) juga berdampak besar terhadap peningkatan kemandirian daerah yang berimplikasi pada pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat. Dalam kerangka ini, pembangunan SDM menjadi pilar utama, baik melalui penguatan kapasitas aparatur pemerintahan maupun pemberdayaan masyarakat agar pemerintah daerah mampu mandiri dan mensejahterakan warganya, diperlukan pengelolaan sumber daya manusia yang profesional, strategis, dan berkelanjutan. Salah satu indikator penting dalam mendorong efektivitas pembangunan SDM di tingkat lokal adalah Indeks Inovasi Daerah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menghasilkan dan menerapkan kebijakan serta program inovatif yang berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.



Gambar 2. 22 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021-2024

Sumber: SK Menteri Dalam Negeri Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Probolinggo dari tahun 2021 hingga 2024 memperlihatkan adanya perkembangan dengan catatan khusus pada tahun 2020. Nilai IID pada tahun tersebut tercatat sangat tinggi, yaitu 2.417, namun angka ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya. Hal ini disebabkan karena mekanisme penilaian yang digunakan saat itu masih berbasis banyaknya inovasi yang dikirimkan. Sementara mulai tahun 2021, penilaian sudah menggunakan metode baru yang lebih terukur melalui penghitungan tingkat kematangan inovasi dengan rumus dan bobot sesuai pedoman IGA dari Kemendagri.

Dengan mekanisme baru tersebut, capaian IID Kabupaten Probolinggo pada tahun 2021 berada di angka 44,7 poin, kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 50,36 poin. Namun, pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan dengan capaian 48,49 poin, dan pada tahun 2024 turun tipis lagi menjadi 48,55 poin.

Dari tren tersebut, terlihat bahwa meskipun inovasi daerah sudah mulai berjalan cukup baik, konsistensi peningkatan nilai masih menjadi tantangan. Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada strategi yang lebih kuat, kesinambungan program, serta dukungan dari berbagai pihak agar capaian inovasi tidak hanya stabil, tetapi juga dapat terus meningkat dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

2.1.3.2. Kondisi Ekosistem Riset Inovasi Daerah

Di Kabupaten Probolinggo, ekosistem riset dan inovasi terus diperkuat sebagai salah satu cara meningkatkan daya saing daerah. Upaya ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, hingga media. Semua pihak bekerja sama untuk mengembangkan riset yang berangkat dari potensi lokal sekaligus menjawab persoalan strategis yang dihadapi daerah.

Salah satu potensi unggulan yang menjadi fokus adalah sektor agroindustri, khususnya mangga dan produk olahan hasil pertanian. Melalui riset dan inovasi, berbagai langkah dilakukan untuk meningkatkan produktivitas, menjaga kualitas, dan menciptakan variasi produk mangga unggulan. Harapannya, mangga Probolinggo tidak hanya dikenal di pasar lokal, tetapi juga mampu menembus

pasar ekspor dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan petani.

Di sisi lain, riset dan inovasi juga diarahkan untuk menjawab permasalahan penting daerah. Salah satu isu yang menjadi prioritas adalah peningkatan kualitas layanan pendidikan dan penurunan angka stunting, yang masuk dalam program super prioritas kepala daerah. Untuk itu, ekosistem riset didorong agar mampu melahirkan inovasi kebijakan, model intervensi berbasis teknologi, serta kerja sama lintas sektor. Dengan cara ini, penurunan angka stunting bisa berjalan lebih cepat, berkelanjutan, dan memberi manfaat besar bagi masyarakat.

2.1.3.3 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Iptek dan inovasi menjadi pendorong untuk tidak hanya menjaga, melainkan juga mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang. Substansi Rencana Induk Pengembangan Jaringan Inovasi dan Penelitian Daerah (RIPJPID) sebagai kerangka kerja strategis untuk mengembangkan riset dan inovasi di daerah, dapat memperkuat ekosistem inovasi di Kabupaten Probolinggo. Melalui kolaborasi, pengembangan SDM, dan inovasi yang berfokus pada kebutuhan lokal dan dukungan kebijakan seperti regulasi yang memfasilitasi kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat membangun Kabupaten Probolinggo menjadi daerah yang inovatif dan kompetitif.

Tabel 2. 25 Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Indeks Inovasi Daerah tahun 2020-2024.

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72,89	73,24	71,56	69,48	73,18
2	Indeks Inovasi Daerah (BRIN)	2.417	44,70	50,36	48,49	48,55

Sumber : BPS Kabupaten Probolinggo dan Kementerian Dalam Negeri, 2025

Dalam hal ini, perlu dilakukan analisis daya saing daerah dengan menggunakan metode *Location Quotient* (LQ) dalam melihat posisi Kabupaten Probolinggo baik di level provinsi Jawa Timur maupun secara Nasional.

Tabel 2. 26 Persentase Rasio Kabupaten Probolinggo dan Jawa Timur Tahun 2010 & 2024

No	Sektor	Kab. Probolinggo	
		2010	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	38,66%	29,03%
2	Pertambangan dan Penggalian	2,82%	2,16%
3	Industri Pengolahan	20,93%	27,19%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,91%	1,03%
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,12%	0,10%
6	Konstruksi	6,72%	7,83%
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,79%	13,09%
8	Transportasi dan Pergudangan	0,87%	1,22%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,41%	1,57%
10	Informasi dan Komunikasi	2,89%	3,99%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,71%	1,84%
12	Real Estate	2,33%	2,46%
13	Jasa Perusahaan	0,32%	0,34%
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,60%	2,88%
15	Jasa Pendidikan	2,39%	2,67%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,49%	0,71%
17	Jasa Lainnya	2,03%	1,89%
		100,00%	100,00%

Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2025

Dari Tabel 2.26 Rasio PDRB di sektor industri Kabupaten Probolinggo cukup tinggi yaitu diangka 27,19% hampir setara dengan sektor tradisional seperti pertanian, kehutanan dan perikanan yang berada pada angka 29,03%. Untuk sektor pariwisata yang digambarkan dengan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum juga Nampak ada tren peningkatan dari 1,41% menjadi 1,57%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pengembangan potensi wisata yang ada di Kabupaten Probolinggo selama ini. Demikian pula dengan sektor lain yang terkait penggunaan Iptek yang memiliki rasio cukup besar dibandingkan dengan total PDRB.

Hal Ini merupakan potensi yang cukup besar, terlebih jika dikaitkan dengan persoalan di aspek sumber daya manusia. Sehingga arah kebijakan dalam mengembangkan SDM di Kabupaten Probolinggo dapat diarahkan pada pemanfaatan sektor yang memiliki proporsi PDRB yang tinggi, yaitu dengan menciptakan identitas (*branding*) yang kuat untuk Kabupaten Probolinggo sebagai daerah destinasi wisata, daerah penghasil pertanian, kehutanan, dan

perikanan, menciptakan identitas yang kuat untuk Kabupaten Probolinggo sebagai destinasi wisata, termasuk logo, slogan, dan tema yang mencerminkan keunikan dan daya tarik daerah pusat industri dan pengolahan. Termasuk membentuk logo, slogan, dan tema yang mencerminkan keunikan dan daya tarik daerah. Selain itu, pengembangan infrastruktur transportasi yang memadai untuk memudahkan akses ke lokasi-lokasi wisata dan Industri, termasuk perbaikan jalan dan penyediaan transportasi umum juga dapat dilakukan.

Tabel 2. 27 Rasio PDRB Kabupaten Probolinggo dan Provinsi Jawa Timur
Tahun 2010 dan 2024

No	Sektor	Kab. Probolinggo		Jawa Timur	
		2010	2024	2010	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.810,03	7.883,57	133.504,56	177.789,80
2	Pertambangan dan Penggalian	423,22	586,55	54.020,53	72.588,57
3	Industri Pengolahan	3.145,60	7.383,31	292.708,39	588.589,26
4	Pengadaan Listrik dan Gas	136,76	280,12	4.491,98	6.727,74
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	18,70	28,29	1.075,88	1.898,56
6	Konstruksi	1.009,16	2.124,92	89.693,03	181.967,62
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.771,65	3.554,90	174.755,50	368.883,68
8	Transportasi dan Pergudangan	130,11	331,61	27.082,43	66.044,11
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	211,95	426,35	47.096,42	108.833,45
10	Informasi dan Komunikasi	434,70	1.082,22	47.548,21	135.143,73
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	256,71	500,52	22.070,51	46.483,85
12	Real Estate	350,17	666,69	16.306,30	33.414,39
13	Jasa Perusahaan	48,45	91,14	7.774,01	15.316,23
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	541,70	782,76	26.534,09	37.780,98
15	Jasa Pendidikan	359,78	724,42	24.944,81	51.184,27
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	73,81	191,50	5.408,94	14.399,03
17	Jasa Lainnya	305,64	514,21	15.633,25	28.764,88
	Total PDRB	15.028,14	27.153,08	990.648,84	1.935.810,15

Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2025 (diolah)

Tabel 2. 28 Trend Rasio PDRB Kabupaten Probolinggo 2010 dan 2024

No	Sektor	Kab. Probolinggo		Trend	defisit/surplus
		2010 (%)	2024 (%)		
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,87	3,16	Meningkat	0,292
2	Pertambangan dan Penggalian	0,52	0,58	Meningkat	0,060
3	Industri Pengolahan	0,71	0,89	Meningkat	0,186
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,01	2,97	Meningkat	0,961
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,15	1,06	Menurun	-0,083
6	Konstruksi	0,74	0,83	Meningkat	0,091
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,67	0,69	Meningkat	0,019
8	Transportasi dan Pergudangan	0,32	0,36	Meningkat	0,041
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,30	0,28	Menurun	-0,017
10	Informasi dan Komunikasi	0,60	0,57	Menurun	-0,032
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,77	0,77	Meningkat	0,001
12	Real Estate	1,42	1,42	Meningkat	0,007
13	Jasa Perusahaan	0,41	0,42	Meningkat	0,013
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,35	1,48	Meningkat	0,131
15	Jasa Pendidikan	0,95	1,01	Meningkat	0,058
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,90	0,95	Meningkat	0,049
17	Jasa Lainnya	1,29	1,27	Menurun	-0,014
		Surplus		1,30	
		Defisit		0,46	
		S-D		1,76	

Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2025 (diolah)

Tabel di atas adalah analisis bauran dan daya saing daerah Kabupaten Probolinggo di tingkat provinsi. Dari analisis LQ di atas terlihat bahwa posisi Kabupaten Probolinggo di Jawa Timur sebenarnya memiliki daya saing yang cukup baik. Di mana perkembangan dalam 14 tahun terakhir menunjukkan bahwa sektor yang surplus ($LQ > 1$) di tahun 2010 terdapat 6 sektor (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan daur Ulang; Real Estate; Administrasi Pemerintahan; dan Jasa Lainnya). Dengan catatan bahwa sektor Pengadaan Air dan Jasa Lainnya mengalami penurunan. Sedangkan di tahun 2024 terdapat penambahan satu sektor yang mengalami surplus yaitu Jasa Pendidikan. Total produktivitas dari seluruh sektor usaha (S-D) menunjukkan angka positif (1,76) yang mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan produktivitas. Hanya empat sektor yang mengalami penurunan daya saing dari total 17 sektor basis ekonomi daerah. Kondisi ini menjadi pondasi yang sangat kuat untuk pembangunan di Kabupaten Probolinggo ke depan.

2.1.3.4 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Menjelaskan kondisi tentang penerapan ekonomi hijau dan biru dalam transformasi ekonomi yang ditujukan dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Ekonomi Hijau dan ekonomi biru merupakan terobosan dalam pengembangan ekonomi Masyarakat yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Indeks Ekonomi Hijau sebagai alat untuk mengukur pertumbuhan dan capaian transformasi ekonomi menuju Ekonomi Hijau secara tangible, representative, dan akurat. Indeks Ekonomi Hijau Daerah terdiri dari 16 (enam belas) indikator terpilih yang terbagi ke dalam 3 (tiga) pilar, yaitu:

1. Pilar ekonomi terdiri dari 6 indikator: intensitas emisi GRK, intensitas energi final, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, produktivitas pertanian, serta produktivitas tenaga kerja sektor industri dan jasa.

2. Pilar sosial terdiri dari 4 indikator: rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran.
3. Pilar lingkungan terdiri dari 6 indikator: tutupan hutan, energi baru terbarukan, kualitas air permukaan, kualitas udara, penurunan emisi GRK kumulatif dari base line, serta penurunan lahan gambut.

Penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru di Kabupaten Probolinggo merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada, kedua konsep ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Ekonomi hijau berfokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dalam konteks ini, Kabupaten Probolinggo memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor energi terbarukan. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal seperti energi matahari dan angin, daerah ini dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang berpotensi merusak lingkungan. Salah satu langkah awal dalam penerapan ekonomi hijau adalah pengembangan energi terbarukan. Kabupaten Probolinggo memiliki potensi besar dalam hal energi matahari, mengingat banyaknya sinar matahari yang diterima sepanjang tahun. Dengan memanfaatkan teknologi panel surya, masyarakat dapat menghasilkan energi listrik yang bersih dan terjangkau.

Selain itu, sektor pertanian juga menjadi fokus utama dalam penerapan ekonomi hijau. Praktik pertanian organik dan urban farming dapat meningkatkan hasil pertanian tanpa merusak lingkungan. Program pelatihan dan pendampingan bagi petani akan sangat penting untuk mengedukasi mereka tentang teknik pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Penggunaan pupuk organik dan pestisida alami dalam pertanian akan membantu menjaga kesuburan tanah dan mengurangi pencemaran. Dengan demikian, hasil pertanian tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga aman untuk dikonsumsi. Hal ini akan meningkatkan daya saing produk pertanian Kabupaten Probolinggo di pasar lokal dan nasional.

Di sisi lain, ekonomi biru menawarkan potensi besar bagi Kabupaten Probolinggo yang memiliki garis pantai yang panjang. Pengembangan perikanan berkelanjutan dan budidaya rumput laut dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat pesisir. Dengan menerapkan praktik perikanan yang bertanggung jawab, ekosistem laut dapat terjaga dan sumber daya laut tetap tersedia untuk generasi mendatang. Budidaya rumput laut, misalnya, tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Rumput laut dapat menyerap karbon dioksida dan membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Selain itu, budidaya ini juga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat pesisir.

Ekowisata bahari juga dapat menjadi pendorong ekonomi biru di Kabupaten Probolinggo. Dengan mempromosikan keindahan alam dan keanekaragaman hayati laut, daerah ini dapat menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan daerah. Pengembangan infrastruktur yang mendukung ekowisata harus dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Pentingnya integrasi antara ekonomi hijau dan biru tidak dapat diabaikan. Pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan yang mendukung sinergi antara kedua sektor ini. Program-program yang menggabungkan pelestarian lingkungan dengan pengembangan ekonomi lokal harus menjadi prioritas dalam RPJMD.

Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha juga menjadi kunci keberhasilan penerapan kedua ekonomi ini. Melalui seminar, workshop, dan kampanye publik, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya ekonomi hijau dan biru. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program akan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan lembaga non-pemerintah, juga sangat diperlukan. Kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat menciptakan inovasi dan solusi yang lebih efektif dalam penerapan ekonomi hijau dan biru. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan dapat tercipta ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Monitoring dan evaluasi secara berkala juga harus dilakukan untuk menilai efektivitas program-program yang telah diterapkan. Dengan data yang akurat, pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal. Hal ini juga akan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan. Penerapan ekonomi hijau dan biru juga harus melibatkan penelitian dan pengembangan. Inovasi dalam teknologi ramah lingkungan dan praktik berkelanjutan harus didorong untuk meningkatkan daya saing daerah. Kerja sama dengan universitas dan lembaga penelitian dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif dan efisien.

Pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan juga harus menjadi perhatian utama. Pengawasan yang ketat terhadap aktivitas penangkapan ikan dan eksploitasi sumber daya laut harus dilakukan untuk mencegah kerusakan ekosistem. Dengan demikian, keberlanjutan sumber daya laut dapat terjaga untuk kepentingan generasi mendatang. Selain itu, pengembangan kebijakan yang mendukung ekonomi hijau dan biru harus melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan agar kebijakan yang dihasilkan dapat lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Penerapan ekonomi hijau dan biru juga harus memperhatikan aspek sosial. Program-program yang dirancang harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan peluang ekonomi, diharapkan kesenjangan sosial dapat diminimalisir.

Keterlibatan generasi muda dalam penerapan ekonomi hijau dan biru juga sangat penting. Pendidikan dan pelatihan yang relevan dapat membekali mereka dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang mendorong penerapan prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan. Akhirnya, penerapan ekonomi hijau dan biru di Kabupaten Probolinggo bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat

dan lingkungan. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, diharapkan Kabupaten Probolinggo dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah yang tepat dan kolaborasi yang baik, Kabupaten Probolinggo dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang diinginkan. Penerapan ekonomi hijau dan biru akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, lingkungan, dan perekonomian daerah. Melalui RPJMD yang komprehensif, diharapkan semua program dan kebijakan yang dirumuskan dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif. Dengan demikian, Kabupaten Probolinggo akan mampu menghadapi tantangan masa depan dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk generasi mendatang.

2.1.3.5 Transformasi Digital

Menjelaskan tentang pengarusutamaan transformasi digital meliputi pengembangan super platform, percepatan transformasi digital, dan produksi talenta digital.

Tabel 2. 29 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas di Jawa Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota dan yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir dan Jenis Kelamin 2022 - 2024

Tahun	L	P	Total
2022	51,2	42,66	46,86
2023	55,48	46,56	50,9
2024	59,76	50,46	54,94

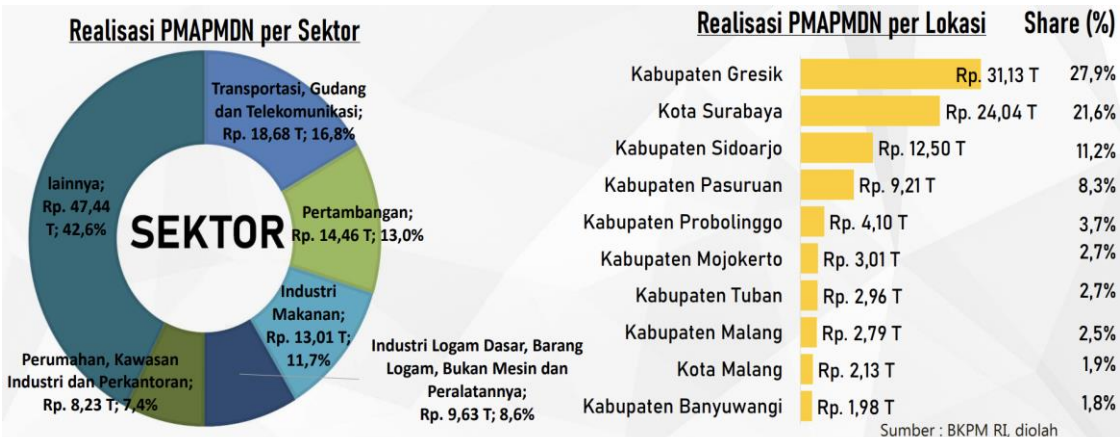
Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2025

Dari data yang ada, akses masyarakat terhadap internet sebagai proxy dari transformasi digital terlihat mengalami peningkatan dari tahun 2022 (46,86%) ke tahun 2023 (50,9%), dan kembali naik pada tahun 2024 menjadi 54,94%. Meski menunjukkan tren positif, capaian ini masih berada di bawah rata-rata Jawa Timur yang telah mencapai 66,17% pada tahun 2023. Kondisi ini menandakan bahwa masyarakat Kabupaten Probolinggo masih menghadapi kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi digital.

Hal tersebut semakin tergambar dari capaian Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Probolinggo tahun 2024 yang baru berada pada angka 42,68. Angka ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan teknologi digital masih perlu diperkuat. Tantangan ini tidak hanya terkait dengan ketersediaan infrastruktur internet, tetapi juga menyangkut literasi digital, pemerataan akses, serta dorongan pemanfaatan teknologi untuk kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Ke depan, peningkatan akses dan kualitas pemanfaatan internet akan menjadi kunci dalam mempercepat transformasi digital daerah, sekaligus mendukung pembangunan yang inklusif dan berdaya saing.

2.1.3.6 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global dalam mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global.



Gambar 2. 23 Realisasi PMA-PMDN

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

Nampak bahwa posisi Kabupaten Probolinggo di Jawa Timur menduduki posisi ke-5 tertinggi untuk PMA-PMDN di bandingkan dengan seluruh kabupaten Kota di Jawa Timur dengan total nilai investasi sebesar Rp.4,1 triliun dengan share (3,7%). Pertumbuhan realisasi investasi daerah pada tahun 2024 meningkat dari target Rp.90,82 milyar menjadi Rp.334,46 milyar (LPPD, Kab Probolinggo 2024). Hal ini menunjukkan bahwa potensi investasi yang masuk di Kabupaten Probolinggo cukup besar, hanya saja ke depan perlu

ditekankan untuk mengembangkan ekonomi padat karya serta penerapan model pasar kerja aktif (*active labour market policy/ ALMP*). Sehingga, potensi SDM yang ada di Kabupaten Probolinggo dapat terserap secara maksimal. Jika dikaitkan dengan analisis LQ sebelumnya, maka sektor yang dapat dikembangkan untuk investasi ke depan adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan; dan pengadaan Listrik dan gas.

- Angka sebaran investasi berdasarkan sub sektor, data dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) 2024 menunjukkan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih di dominasi oleh sektor pergudangan, transportasi dan industri kayu, setelah itu disusul oleh sektor perikanan dan sektor perdagangan, dan sektor pertanian. hal ini selaras dengan kondisi sektor perindustrian yang mengalami sunset industri yang terjadi dikabupaten probolinggo, minimnya inovasi, daya saing industri dan penggunaan teknologi, sektor pertanian perikanan dan perdagangan belum banyak diminati. sedangkan investasi penanaman modal asing (PMA) didominasi oleh sektor listrik gas dan air, hal ini sejalan dengan wajah kabupaten probolinggo, dimana investasi asing (belanda dan amerika dll) disektor energi pengangkit listrik yang masih dominan.

PMDN



PMA



Sumber : BKPM 2025 data diolah

- Bagaimana angka pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran
 - pengeluaran konsumsi rumah tangga (70.52%):

pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dalam Pdrb Kabupaten Probolinggo, mencapai 70.52%. hal ini menunjukkan bahwa perekonomian kabupaten ini sangat didorong oleh konsumsi domestik dari rumah tangga. tingginya persentase ini mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki daya beli yang cukup kuat, yang dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. tapi jangan lupa terdapat satu hal yang menjadi highlight dari sisi konsumsi, tingginya konsumsi mengindikasikan bahwa rendahnya pengeluaran untuk kebutuhan investasi/ belanja produktif. pendapatan sama dengan konsumsi ditambah saving, saving sama dengan investasi, konsep mahzab keynesian.
 - pengeluaran konsumsi lnprt (lembaga non-profit yang melayani rumah tangga) (1.18%):

kontribusi lnprt terhadap pdrb relatif kecil, hanya 1.18%. ini menunjukkan bahwa aktivitas lembaga non-profit yang melayani rumah tangga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perekonomian kabupaten.

- pengeluaran konsumsi pemerintah (4.97%):
pengeluaran pemerintah menyumbang 4.97% terhadap pdrb. angka ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran yang cukup moderat dalam mendorong perekonomian melalui belanja pemerintah. namun, kontribusinya masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan konsumsi rumah tangga.
- pembentukan modal tetap bruto (26.70%):
pembentukan modal tetap bruto (investasi) menyumbang 26.70% terhadap pdrb. ini merupakan komponen kedua terbesar setelah konsumsi rumah tangga. tingginya persentase ini mengindikasikan bahwa terdapat aktivitas investasi yang cukup signifikan di kabupaten probolinggo, baik dari sektor swasta maupun pemerintah, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
- perubahan inventori (0.23%):
Perubahan inventori hanya menyumbang 0.23% terhadap pdrb. ini menunjukkan bahwa fluktuasi stok barang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian kabupaten.
- net ekspor barang dan jasa (-3.61%):
net ekspor barang dan jasa menunjukkan nilai negatif sebesar -3.61%. ini mengindikasikan bahwa nilai impor barang dan jasa lebih besar daripada nilai ekspor. dengan kata lain, kabupaten probolinggo lebih banyak mengimpor daripada mengekspor, yang dapat menjadi tantangan bagi perekonomian jika tidak diimbangi dengan peningkatan produksi domestik. angka net ekspor yang diterbitkan oleh BPS masih relatif sangat bias untuk mencerminkan kondisi di daerah, akan tetapi secara makro defisit neraca perdagangan ini (net ekspor) mengindikasikan banyak masyarakat kabupaten probolinggo terutama kelas menengah yang belanja/ spending diluar kabupaten probolinggo, sehingga perputaran uang dan multiplier effect tidak maksimal.

2.1.3.7 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan

Ekonomi

Wilayah perkotaan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sekaligus menjadi kota yang inklusif dan berkelanjutan, serta pembangunan perdesaan mandiri yang berkelanjutan. Indeks Pembangunan infrastruktur Kabupaten Probolinggo pada tahun 2024 sebesar 65,86 (skala 0 – 100) lebih tinggi dari target sebesar 56,53. Akan tetapi angka ini lebih rendah dari rata-rata Jawa Timur yang pada tahun 2024 sebesar 75,35. Dengan demikian kualitas infrastruktur di Kabupaten Probolinggo masih masuk dalam kategori menengah dan berada jauh di bawah rata-rata Jawa Timur. Dengan demikian, masalah konektivitas perkotaan dan desa belum dapat diselenggarakan secara optimal.

Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2024 sebesar 58,27 %. Rumah tangga memiliki akses hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan apabila memenuhi kriteria luas tempat tinggal minimum per kapita, akses terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan sanitasi layak, serta ketahanan bangunan dan lingkungan permukiman yang aman dan sehat. Kriteria ini bertujuan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar penghuni secara nyaman dan tidak membebani secara ekonomi dalam jangka panjang, sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai ketiga aspek tersebut:

- Hunian Layak:
 - Luas Tempat Tinggal: Harus ada kecukupan luas tempat tinggal, misalnya minimal 7,2 meter persegi per kapita menurut Badan Pusat Statistik (BPS).
 - Akses Air dan Sanitasi: Tersedianya akses air minum yang layak dan sistem pembuangan limbah (sanitasi) yang memadai.
 - Ketahanan Bangunan: Bangunan memiliki struktur yang kuat dan aman, dengan atap, dinding, dan lantai yang kokoh menggunakan material yang sesuai.

- Lingkungan Sehat dan Aman: Permukiman harus bebas dari ancaman penyakit dan bencana, serta mendukung aktivitas penghuninya.
- Hunian Terjangkau:
 - Biaya kepemilikan rumah tidak boleh melebihi persentase tertentu dari pendapatan rumah tangga, agar masyarakat tidak terbebani secara ekonomi dalam jangka panjang.
 - Termasuk pemilihan bahan dan konsep pembangunan hunian yang efisien serta penyediaan fasilitas yang sesuai.
- Hunian Berkelanjutan:
 - Merujuk pada penyelenggaraan perumahan yang terencana dan terpadu, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga memperhatikan keberlanjutan jangka panjang.
 - Mencakup pembangunan infrastruktur dasar dan layanan publik yang memadai serta pengelolaan kawasan permukiman yang baik.

Dengan terpenuhinya ketiga aspek ini, rumah tangga dapat memiliki hunian yang tidak hanya aman dan nyaman, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan tanpa memberatkan keuangan mereka.

Persentase Desa Mandiri sebesar 28,22% sedangkan Provinsi Jawa Timur sebesar 23,36% di tahun 2024. Meskipun ke depan ukuran desa mandiri akan terjadi perubahan dengan menggunakan Indeks Desa, sesuai dengan Permendesa PDTT No. 9 tahun 2024 akan tetapi secara umum kemajuan kondisi keberdayaan Masyarakat desa di Kabupaten Probolinggo harus terus ditingkatkan. Kondisi tersebut sejalan dengan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) dari 100,38 tahun 2019 menjadi 107,85 di tahun 2023. Hal ini menunjukkan kondisi positif di Kabupaten Probolinggo di mana jumlah desa mandiri lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi Jawa Timur. Peningkatan status desa mandiri dan NTP sebagai representasi dari daya dukung sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ini belum berbanding lurus dengan kapasitas infrastruktur jalan yang sangat penting untuk

menunjang kesejahteraan Masyarakat, khususnya dalam meningkatkan integrasi dan konektivitas kota-desa.

Tabel 2. 30 Hasil Kinerja Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga per kapita	%	55,84	56,29	60,06	57,4	59,344
2.	Nilai tukar petani	Nilai	100,38	101	105,08	107,85	-
3.	Persentase PDRB Sub Sektor pertanian	%	-	-	-	-	1,58
4.	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	%	44,16	43,71	39,94	42,6	41,92

Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2025

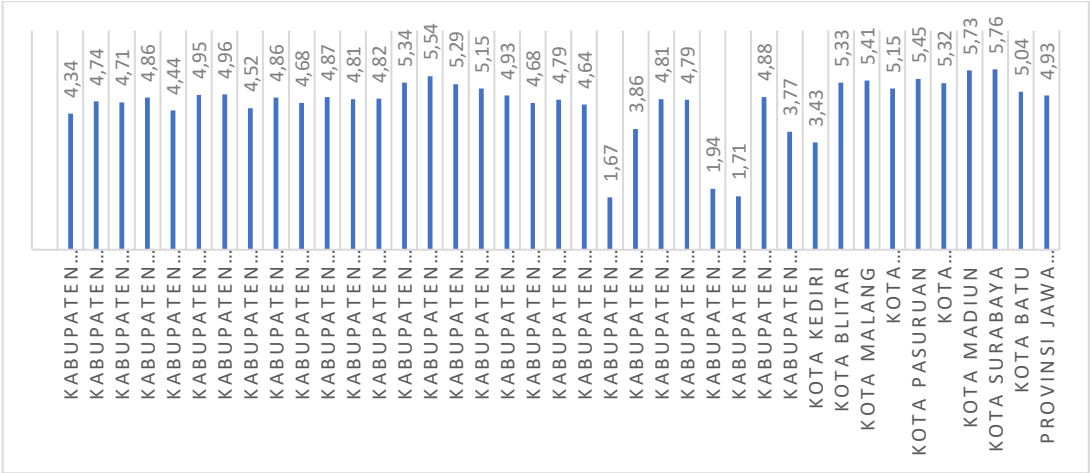
Perkembangan indikator kinerja pengeluaran konsumsi pangan per kapita di Kabupaten Probolinggo tahun 2019-2023 sebagaimana data di atas mengalami kondisi fluktuatif. Dimana pada tahun 2019 pengeluaran konsumsi pangan per kapita di Kabupaten Probolinggo sebesar 55,70% dan 2020 meningkat menjadi sebesar 55,84%. Kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 56,29% dan menjadi 60,06% pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 57,4%. Perkembangan indikator kinerja nilai tukar petani (NTP) di Kabupaten Probolinggo Pada tahun 2019 tidak terdapat data terkait dengan NTP. Kemudian pada tahun 2020 NTP Kabupaten Probolinggo mencapai 100,38. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 101. Kemudian meningkat kembali pada tahun 2022 nilai tukar petani menjadi 105,08. Pada tahun 2023 Nilai Tukar Petani Kabupaten Probolinggo meningkat menjadi 107,85. Nilai Tukar Petani sudah tidak dihitung untuk periode tahun 2024, maka dari itu nilai tersebut tidak dapat ditampilkan untuk Tahun 2024 Selanjutnya, Perkembangan indikator kinerja pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2019-2023 sebagaimana data di atas mengalami kondisi fluktuatif. Pada tahun 2019 pengeluaran konsumsi non pangan per kapita Kabupaten Probolinggo mencapai 44,3% dan di tahun 2020 turun menjadi dan

44,16%. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2021 menjadi 43,71%. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita Kabupaten Probolinggo kembali menurun pada tahun 2022 menjadi 39,94%. Kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2023 menjadi 42,6%.

Kebutuhan Pembangunan infrastruktur jalan di titik ini menemukan relevansi yang kuat, di mana Kabupaten Probolinggo secara daya saing daerah memiliki potensi besar di dua sektor yang utama yaitu sektor rural (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) dengan proporsi PDRB sebesar 29,03 dan sektor urban seperti industri pengolahan dengan proporsi PDRB sebesar 27,19% di tahun 2024. Untuk memastikan bahwa terjadi rantai pasok antara dua tipologi ini maka diperlukan konektivitas infrastruktur jalan yang kuat sebagai orientasi penting Pembangunan di masa depan. Berdasarkan dokumen kajian infrastruktur Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo tahun 2023 disebutkan bahwa dibutuhkan pembiayaan berkisar Rp.410 miliar untuk mengatasi permasalahan infrastruktur jalan. Dengan demikian diperlukan kajian terkait kapasitas fiskal Kabupaten Probolinggo dan menjajaga alternatif pembiayaan dengan menggali potensi dari berbagai sumber.

2.1.3.8 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro yang diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam mendukung kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro-pemerataan.

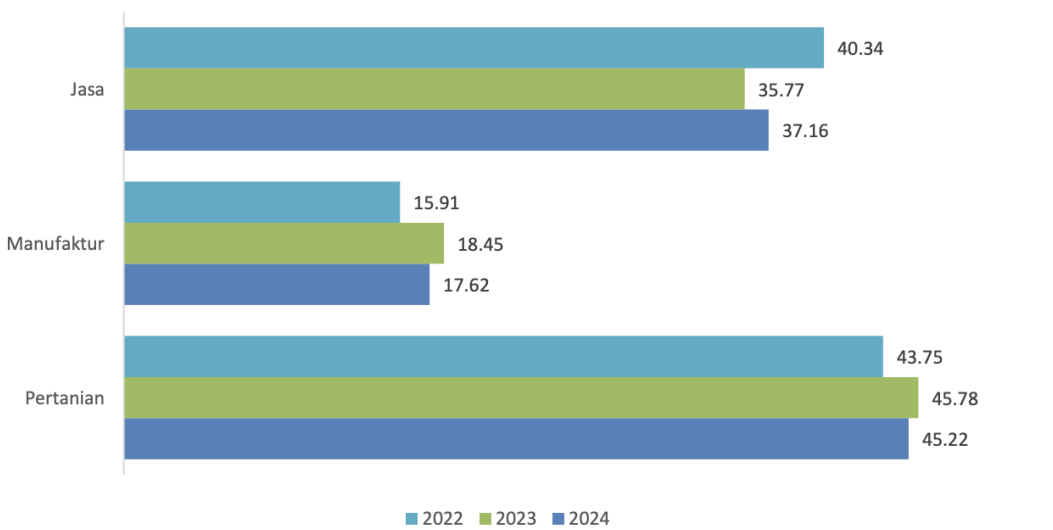


Gambar 2. 24 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

Stabilitas ekonomi di Kabupaten Probolinggo tahun 2024 secara umum menunjukkan kondisi yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 yang mencapai 4,82 persen, meningkat dari tahun 2023 yang sebesar 4,73 persen. Angka tersebut masih di bawah pertumbuhan Jawa Timur sebesar 4,93 persen pada tahun 2024. Posisi pertumbuhan ekonomi daerah ini menempatkan Kabupaten Probolinggo pada posisi tengah se-Jawa Timur. Secara lebih spesifik daya saing kinerja ekonomi Kabupaten Probolinggo di bandingkan dengan daerah eks Karesidenan Besuki, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo lebih tinggi daripada Kabupaten Situbondo, Banyuwangi, dan Lumajang, namun lebih rendah dibandingkan Kabupaten Jember, Bondowoso, dan Kota Probolinggo. Trend perbaikan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Probolinggo juga menunjukkan kondisi positif, meningkat dalam kurun waktu empat tahun terakhir hingga mencapai angka 4,82% di tahun 2024.

Pertumbuhan ekonomi yang positif ini jika dikaitkan dengan kondisi inflasi juga menunjukkan tendensi positif. Di mana Inflasi di Kabupaten Probolinggo cukup stabil sejak tahun 2020 (1,88), 2021 (1,76). Terjadi peningkatan di tahun 2022 sebesar 5,45 persen, akan tetapi Kembali landai sejak tahun 2023 sebesar 2,86 dan akhirnya Kembali pada kondisi normal pada tahun 2024 di angka 1,90.



Gambar 2. 25 Partisipasi Angkatan Kerja berbasis sektor di Kabupaten Probolinggo tahun 2022 2024

Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2025

Kondisi ekonomi makro tentu perlu dikaitkan dengan kondisi ketenagakerjaan yang masih membutuhkan perhatian serius. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Probolinggo pada Agustus 2024 bertambah 40.079 orang menjadi sebanyak 678.129 orang dibandingkan Agustus 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) diangka 69,48 persen, meningkat menjadi 3,7 poin pada Agustus 2023 dengan riil angka 657.798 orang. Lapangan pekerjaan di Kabupaten Probolinggo yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah sektor pertanian sedangkan yang paling sedikit adalah sektor manufaktur. Sektor pertanian mampu menyerap 45,22 persen penduduk yang bekerja, sedangkan sektor jasa menyerap 37,16 persen dan manufaktur menyerap 17,62 persen penduduk yang bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2024 sebesar 3,00 persen, turun 0,24 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja ekonomi makro di Kabupaten Probolinggo perlu lebih diarahkan pada sektor ekonomi padat karya. Rantai pasok antara masing-masing sektor ekonomi produktif seperti pertanian dalam arti luas dan industri perlu diperkuat dengan memperbaiki pemerataan Pembangunan dan meningkatkan konektivitas antar daerah salah satunya dengan penguatan infrastruktur khususnya jalan untuk membuka akses antar komoditas.

**Tabel 2. 31 Tabel Rasio Pajak daerah Terhadap PDRB
Kabupaten Probolinggo Tahun 2020-2024**

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Pajak daerah terhadap PDRB	%	0,28	0,28	0,34	0,34	0,38

Sumber: BPS dan BPPKAD Kabupaten Probolinggo, 2025

Rasio Pajak terhadap PDRB merupakan indikator yang menunjukkan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar peranan pajak daerah dalam mendukung kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Di Kabupaten Probolinggo, perkembangan rasio pajak terhadap PDRB selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

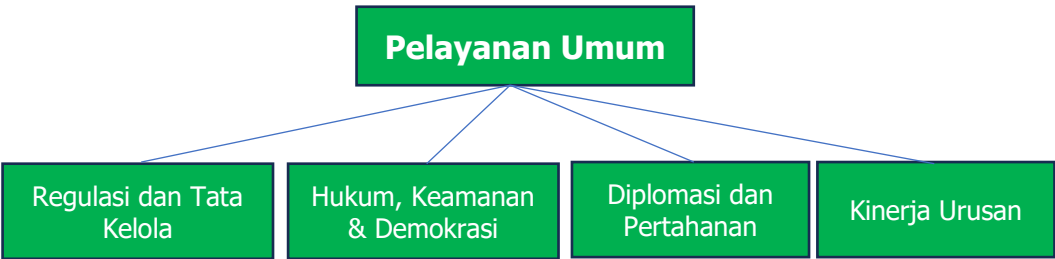
Dalam Tabel 2.31 pada tahun 2020, meskipun masih dalam kondisi pemulihan akibat pandemi, penerimaan pajak daerah mampu memberikan kontribusi terhadap PDRB dengan rasio tertentu. Hal ini mencerminkan bahwa basis ekonomi daerah masih cukup kuat untuk menopang pendapatan asli daerah dari sektor pajak. Tahun 2021, rasio pajak terhadap PDRB menunjukkan sedikit peningkatan seiring dengan membaiknya aktivitas ekonomi. Sektor-sektor utama seperti perdagangan, pariwisata, dan industri pengolahan mulai pulih, sehingga mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah.

Pada tahun 2022, kontribusi pajak daerah terhadap PDRB meningkat lebih signifikan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, pulihnya kunjungan wisatawan, serta geliat aktivitas ekonomi lokal pasca pandemi. Sedangkan tahun 2023, rasio pajak terhadap PDRB tetap terjaga pada tingkat yang sehat, menunjukkan adanya konsolidasi penerimaan daerah di tengah pertumbuhan ekonomi. Peningkatan efektivitas pemungutan pajak daerah serta kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak ikut berkontribusi terhadap capaian ini.

Ditahun 2024, realisasi penerimaan pajak daerah kembali meningkat, sehingga rasio pajak terhadap PDRB menunjukkan perbaikan. Kondisi ini menegaskan bahwa pajak daerah semakin berperan dalam menopang kapasitas fiskal daerah, sekaligus menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Probolinggo. Secara keseluruhan, periode 2020–2024 menggambarkan peranan pajak daerah yang semakin kokoh terhadap PDRB Kabupaten Probolinggo. Selain mencerminkan kinerja pemungutan pajak yang semakin baik, tren ini juga menandakan semakin kuatnya basis ekonomi daerah yang mampu mendukung kemandirian fiskal.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang atau jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Gambar 2. 26 Peta Pembahasan Aspek Pelayanan Umum

Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 (diolah)

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

a. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum merepresentasikan efektivitas kebijakan hukum, transparansi, dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Sebagai daerah yang dikenal inovatif dalam tata kelola pemerintahan, Kabupaten Probolinggo melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo dalam memastikan proses monitoring dan evaluasi dari regulasi yang telah berjalan, dengan harapan bahwa setiap regulasi yang dilaksanakan dapat tepat guna dan tepat sasaran dan tidak berbenturan dengan regulasi yang ada di tingkat atasnya. Berikut merupakan capaian indikator Reformasi Hukum di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2023 dan 2024.

Tabel 2. 32 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Probolinggo Tahun 2023-2024

No.	Indikator	Tahun Capaian	
		2023	2024
1.	Indeks Reformasi Hukum	44,9	87,32

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo, 2025

Hingga saat ini data yang tersedia hanya tahun 2023 dan 2024, sedangkan data indeks reformasi hukum untuk tahun 2019 hingga 2022 belum tersedia. Dan berdasarkan data di atas, capaian Indikator

Reformasi Hukum mengalami peningkatan yang signifikan hampir 100% pada tahun 2024, di mana pada tahun 2023 capaian menunjukkan sebesar 44,9%, selanjutnya pada tahun 2024 menjadi 87,32%. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Probolinggo berhasil mengimplementasikan setiap regulasi daerah dengan tepat guna dan tepat sasaran. Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari Kabupaten Probolinggo dalam digitalisasi layanan hukum serta keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.

b. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks SPBE merupakan salah satu indikator yang dapat membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo untuk mengatasi permasalahan di bidang komunikasi dan informatika. SPBE adalah nilai hasil pelaksanaan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE (Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Berikut merupakan capaian penyelenggaraan Indeks SPBE di Kabupaten Probolinggo Tahun 2020-2024.



Gambar 2. 27 Indeks SPBE Kabupaten Probolinggo Tahun 2020-2024

Sumber: Diskominfo Kabupaten Probolinggo, 2025

Berdasarkan data tersebut capaian indeks SPBE Kabupaten Probolinggo selama lima tahun dari 2020 sampai 2024. Secara keseluruhan, indeks SPBE Kabupaten Probolinggo mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, indeks SPBE mencapai nilai 2,85, lalu sempat mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 2,59 pada tahun 2021. Peningkatan kembali terjadi

pada tahun 2022, 2023 dan konsisten hingga 2024 dengan hasil akhir capaian 3,97, sekaligus menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Capaian tersebut mengindikasikan adanya dampak positif transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan terhadap peningkatan dan kualitas layanan publik di Kabupaten Probolinggo.

c. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan indikator yang digunakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) untuk mengukur kualitas layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat. Indeks Pelayanan Publik merupakan mandat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan bahwa masyarakat merasa puas dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Pengukuran ini bertujuan untuk mendorong perbaikan berkelanjutan menuju pelayanan prima. Indikator ini pada intinya untuk mencapai kepuasan dari masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah.

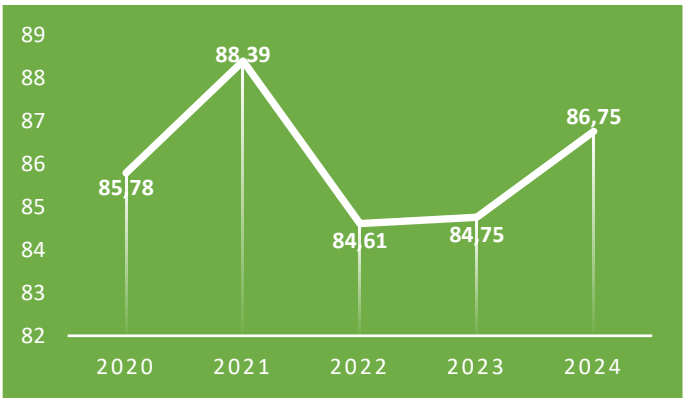
Berdasarkan penilaian Kementerian PANRB, skor Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 sebesar 4,2 atau dengan predikat A- (Sangat Baik). Capaian ini tidak hanya menunjukkan kualitas pelayanan yang telah memenuhi standar tinggi, tetapi juga mencerminkan adanya komitmen kuat dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk terus berinovasi, memperbaiki tata kelola layanan, dan menghadirkan pelayanan yang cepat, tepat, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Hasil tersebut juga menjadi bukti nyata bahwa upaya peningkatan kapasitas aparatur, penerapan standar pelayanan, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan budaya kerja pelayanan publik telah berjalan dengan baik. Predikat Sangat Baik yang diraih diharapkan mampu menjadi motivasi untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan di tahun-tahun mendatang, sehingga kepercayaan publik semakin meningkat dan pelayanan pemerintah daerah semakin dirasakan manfaatnya

oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan ini tidak hanya menjadi pencapaian administratif semata, tetapi juga cerminan keberpihakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo kepada masyarakat, sekaligus langkah konkret menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik (good governance) dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

d. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Pengukuran IKM dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif, dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat dengan pelayanan yang mereka terima.



Gambar 2. 28 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Probolinggo Tahun 2020-2024

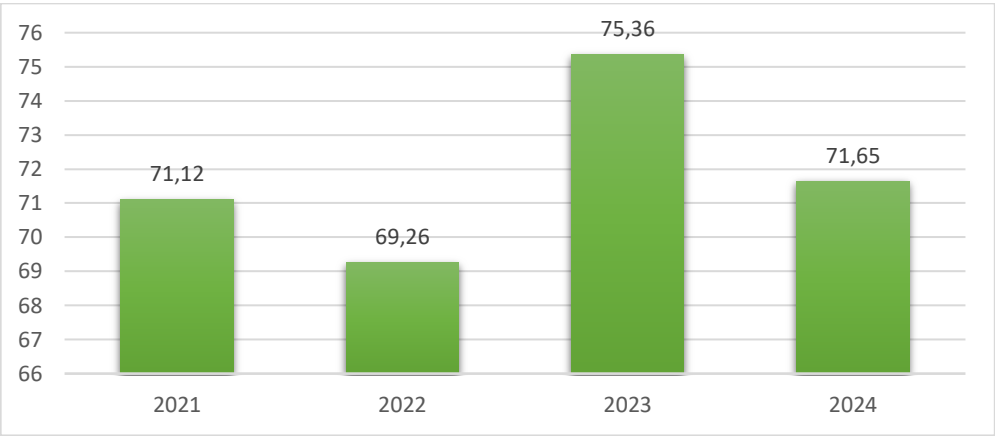
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo, 2025

Data di atas adalah capaian IKM Kabupaten Probolinggo tahun 2020 hingga 2024. Terlihat bahwa terjadi fluktuasi utamanya di rentang waktu 2021 hingga 2023 terjadi tren penurunan dan kemudian kembali membaik pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerjanya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

e. Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional merupakan sebuah alat pengukuran untuk menilai tingkat integritas yang mencerminkan risiko korupsi serta efektivitas upaya pencegahan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Indeks Integritas Nasional (IIN)

dihitung berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di bawah ini merupakan capaian Indeks Integritas Nasional di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2021-2024:



Gambar 2. 29 Indeks Integritas Nasional Kabupaten Probolinggo Tahun 2021-2024

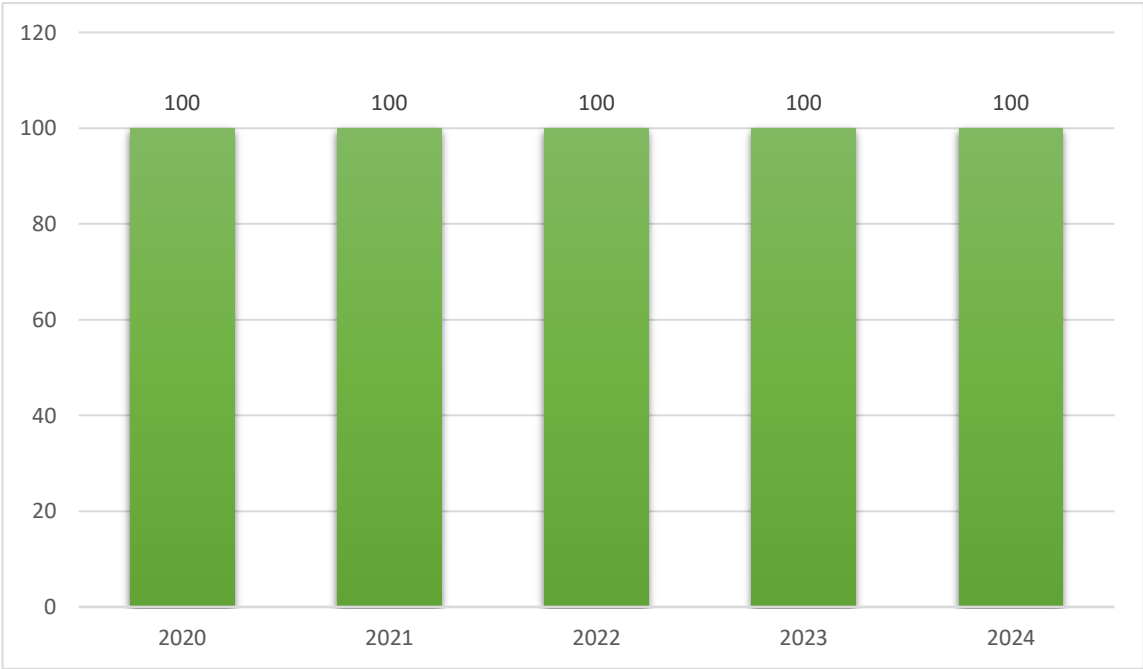
Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo, 2025

Tren capaian Indeks Integritas Nasional di Kabupaten Probolinggo mengalami tren fluktuatif dengan penurunan signifikan pada tahun terakhir. Capaian pada tahun 2021 menunjukkan predikat merah (rentan) dan kembali melemah di tahun 2024 menjadi merah (rentan), namun masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 71,65. Hasil SPI Tahun 2024 ini mencerminkan bahwa integritas pemerintahan masih menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Kabupaten Probolinggo memiliki peluang besar untuk berkembang dan berinovasi, namun tanpa transparansi dan akuntabilitas yang kuat, kemajuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat akan sulit terwujud.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Penegakan peraturan daerah (Perda) merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Persentase keberhasilan penegakan Perda dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti jumlah pelanggaran yang ditindak, efektivitas sanksi yang diberikan,

serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi yang telah ditetapkan. Penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Probolinggo menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini didukung oleh berbagai kegiatan penegakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam menciptakan stabilitas sosial-politik, berikut merupakan capaian persentase penegakan perda di Kabupaten Probolinggo dalam lima tahun terakhir:



Gambar 2. 30 Persentase Penegakan Perda di Kabupaten Probolinggo Tahun 2020-2024

Sumber: Satpol PP Kabupaten Probolinggo, 2025

Gambar di atas menyajikan capaian persentase penegakan Perda di Kabupaten Probolinggo selama lima tahun dari tahun 2020-2024. Berdasarkan grafik di atas Kabupaten Probolinggo menunjukkan tren positif dalam penegakan Perda, tercatat pada tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan hasil 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa aturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo benar-benar dijalankan dan ditaati oleh seluruh masyarakat. Lebih dari itu, capaian ini perlu dipertahankan dan tetap dengan mempertimbangkan aspek sosial serta edukasi bagi masyarakat terkait penegakan Perda.

Tabel 2. 33 Capaian Aksi HAM Tahun 2020-2024

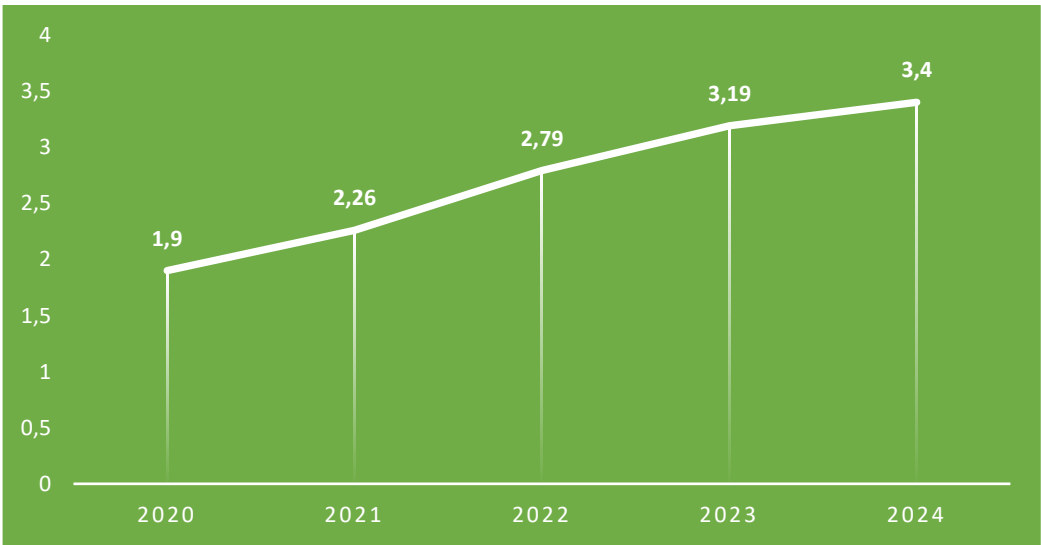
2020	2021	2022	2023	2024
100 %	71,01	38	87,14	87,5

Sumber data: Kementerian Hukum, 2025

Capaian Aksi HAM dalam kurun waktu 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, capaian berada di angka 100%, yang mencerminkan optimalisasi pelaksanaan program pada periode awal. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 71,01%, dan semakin menurun tajam pada tahun 2022 hanya mencapai 38%. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, sehingga banyak program, koordinasi lintas sektor, maupun kegiatan implementasi Aksi HAM tidak dapat berjalan maksimal. Memasuki tahun 2023, capaian kembali meningkat tajam menjadi 87,14%, menandakan adanya pemulihan kinerja, perbaikan strategi implementasi, serta optimalisasi koordinasi antar pemangku kepentingan. Pada tahun 2024, capaian relatif stabil di angka 87,5%, sedikit lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya konsistensi dan penguatan kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan Aksi HAM.

2.1.4.3 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tidak hanya mengukur kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonominya seperti produktivitas dan nilai tambah, tetapi juga sejauh mana daerah tersebut mampu bersaing secara efektif dalam pasar yang kompetitif. Indeks Daya Saing Daerah mencerminkan tingkat kemajuan ekonomi suatu daerah, serta seberapa mandiri dan produktifnya dalam mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan bagi penduduknya. Berikut merupakan capaian Indeks Daya Saing Daerah di Kabupaten Probolinggo periode tahun 2020-2024:



Gambar 2. 31 Indeks Daya Saing Kabupaten Probolinggo Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 2025

Berdasarkan data yang disusun oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Probolinggo menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, indeks berada di angka 1,9, lalu konsisten mengalami peningkatan signifikan menjadi 3,4 pada 2024. Selaras dengan capaian kategori “Baik” ini, diharapkan dapat memacu peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah secara keseluruhan. Secara umum, meskipun skor IDSD Kabupaten Probolinggo menunjukkan tantangan yang perlu diatasi, berbagai inisiatif dan program yang dijalankan pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing Kabupaten Probolinggo di masa mendatang.

2.1.4.4 Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian kinerja urusan pemerintah daerah adalah hasil atau output yang diperoleh dari pelaksanaan tugas dan fungsi suatu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib maupun pilihan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Capaian kinerja urusan pemerintah daerah menjawab pertanyaan sejauh mana pemerintah daerah berhasil menjalankan kewenangannya dalam bidang tertentu. Dalam hal ini, capaian diukur menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKK) yang

telah ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan. Capaian kinerja urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 2. 34 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Hasil
(Outcome) Urusan Pemerintah Kabupaten
Probolinggo Tahun 2020-2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Satuan	Capaian Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar								
1.	Pendidikan	1) Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	86,72	87,48	88,65	81,85	90,56
		2) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	97,48	103,27	98,72	99,67	99,56
		3) Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	89,69	98,42	95,53	96,90	90,74
		4) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	5,23	7,02	10,70	31.94	33.96
		5) Tingkat partisipasi warga negara usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dan menengah pertama	Persen	93,58	100,86	97,12	96,71	97,33
		6) Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang	Persen	N/A	N/A	4,79	5.48	N/A

		Berkualifikasi Pendidikan Tinggi						
		7) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca SD	Persen	N/A	53.67	64.65	73.01	77.03
		8) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca SMP	Persen	N/A	53,67	60,21	66,06	70,90
		9) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi SD	Persen	N/A	50,33	49,95	64,56	74,31
		10) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi SMP	Persen	N/A	53,67	44,34	64,48	70,34
		11) Proporsi PAUD Akreditasi Min B	Persen	N/A	79.38	69,45	63.84	63,79
		12) Proporsi Guru PAUD Formal S1/D IV	Persen	N/A	42,61	44,30	48,93	50,25
		13) Iklim Keamanan Pendidikan Dasar	Indeks	N/A	68,67	68,14	69.70	74.21
		14) Iklim Keamanan Pendidikan Menengah Pertama	Indeks	N/A	70,67	65.09	65,40	67.09
		15) Iklim Kebinekaan Pendidikan Dasar	Indeks	N/A	70,00	67,21	71,34	71,7
		16) Iklim Kebinekaan Pendidikan Menengah Pertama	Indeks	N/A	71,33	63,38	68,96	68,43

		17) Iklim Inklusivitas Pendidikan Dasar	Indeks	N/A	63,33	55,42	53,2	59,21
		18) Iklim Inklusivitas Pendidikan Menengah Pertama	Indeks	N/A	62,67	56,00	53,59	55,07
2.	Kesehatan	1) Rasio daya tampung rumah sakit rujukan terhadap jumlah penduduk	Persen	0,6	0,05	0,06	0,58	0,62
		2) Persentase RS rujukan tingkat kabupaten yang terakreditasi	Persen	100	50	83,33	100	100
		3) Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	88,43	87,73	85,55	99,32	92,74
		4) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	98,14	98,13	102,2 7	99,61	98,89
		5) Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	103,3 6	101,56	99	98,52	100
		6).Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	91,10	94,11	94,73	94,64	100
		7) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	19,97	29,23	80,87	100	93,70
		8) Persentase orang tua usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	14,52	22,47	31,13	70	79,15
		9) Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	44,10	53,91	73,44	91,39	91,12
		10) Persentase penderita	Persen	9,44	14,33	22,46	78,64	100

		hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						
		11) Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	61,01	51,68	82,08	100	100
		12) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	97,10	100	100	100
		13) Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	40,11	25,1	100	100	100
		14) Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	48,79	48,90	83,19	100	100
		15) Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	100	100	100	100	100
		16) Angka Kematian Ibu (AKI)	Persen	99,33	201,78	123,13	137,65	103,16
		17) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	92,49	91	91,3	90,7	83,9
		18) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	44,68	46,4	73,7	96,7	100
		19) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	81,1	84,24	95,53	98,85	99,42
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1) Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian	Persen	0	100	100	100	0

		banjir di WS Kewenangan Kabupaten						
		2) Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	Persen	0	0	100	100	100
		3) Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	70,22	4,49	3,8	100	100
		4) Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Persen	62,03	0,06	63,55	64,02	76,09
		5) Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	77,14	62,29	77,85	74,40	95,81
		6) Rasio kepatuhan IMB kab	Persen	44,32	100	100	100	100
		7) Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	Persen	0,01	79,38	83,58	79,56	71,75
		8) Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	0,218	50,65	96,22	100	42,46
		9) Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100	100	100	100	100

4.	Perumahan Rakyat	1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100
		2) Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Persen	0	0	0	0	0
		3) Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Persen	42,30	0,10	5,05	5,32	5,05
		4) Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	45,09	113,57	11,76	7,87	5,21
		5) Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	0,25	2,16	76,65	71,50	37,63
5.	Ketentraman , Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1) Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100
		2) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	58,82	23,53	100	52,63
		3) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	33.40 1	1.157.4 08	535.4 56	91.48 32	70.589
		4) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	36.57 4	182.90 0	783.6 63	914.8 32	57
		5).Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	14.38 1	7.457	11.36 0	175.7 71	67
		6).Persentase pelayanan	Persen	100	100	100	100	100

		penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran						
		7).Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	16,5	17,7	15,03	15	13
6.	Sosial	1) Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	24,02	21,41	100	100	100
		2) Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Persen	7,59	100	100	100	100
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar								
7.	Tenaga Kerja	1) Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	0	8,26	4,61	100	100
		2) Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	0,01	0,02	0,27	1,22	1,30
		3) Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	3.572,36	3.515,96	3.806.806.148,95	4.195.789.460,04	4.127.876.642,98
		4) Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	4,46	100	36,42	36,45	36,5
		5) Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme	Persen	88,07	87,46	75,24	75,29	77,74

		Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten						
8.	Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak	1) Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	2,88	3,77	0,47	3,10	5,00
		2) Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	Persen	100	100	100	100	100
		3) Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	3,62	5,63	6,82	0,84	0,71
9.	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Perse n	0	2,05	3,93	6,54	42,85
10.	Pertanahan	1) Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	0	0	0	100	0
		2) Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persen	0	0	0	0	0
		3) Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Persen	0	0	0	0	0
		4) Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	0	0	0	0	0

		5) Tersedianya tanah untuk masyarakat	Persen	0	0	0	0	0
		6) Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	0	0	0	3	0
11.	Lingkungan Hidup	1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	Persen	63,4	64,17	60,38	64,14	61,56
		2) Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten	Persen	14,54	18,75	64,17	65,24	28,89
		3) Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Persen	25,64	31,03	51,43	18,51	38,89
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1) Perekaman KTP Elektronik	Persen	97,87	99,17	99,06	99,58	99,35
		2) Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	19,84	30,66	29,42	34,91	37,46
		3) Kepemilikan akta kelahiran	Persen	74,75	88,61	89,89	92,49	89,06
		4) Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	4,41	9,09	10,91	24,07	43,75
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1) Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Persen	100	0	0	0	0
		2).Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	9,64	9,19	73,56	143,82	0
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1) TFR (Angka Kelahiran Total)	Persen	1,96	1,96	1,96	2,02	2,02
		2) Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive	Persen	74,93	76,60	79,77	81,29	70,22

		Prevalence Rate/mCPR)						
		3) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	7,10	23,47	13,19	3,56	3,5
15.	Perhubungan	1) Rasio konektivitas Kabupaten	Persen	47,5	47,5	47,5	0	71,3
		2) Kinerja lalu lintas kabupaten	Persen	16,53	0,001	0,0007	0,37	0,21
16.	Komunikasi dan Informatika	1) Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	27,27	27,27	44,44	55,77	57,69
		2) Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	0	17,59	18,47	18,47	93,58
		3) Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten	Persen	0	76,472	72,74	72,03	73,38
		4) Indeks Masyarakat Digital (IMDI)	Indeks	NA	NA	NA	NA	42,68
17.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1) Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	16,55	84,03	6,76	88,5	31,90
		2) Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persen	7,43	10,65	10,64	56,02	59,41
18.	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	Persen	-54,81	-30,66	165,04	266,71	56,46
19.	Kepemudaan dan Olahraga	1) Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	0,10	10,30	0,14	0,29	13,49
		2) Tingkat partisipasi pemuda dalam	Persen	0,15	167,45	0,14	11,66	15,17

		organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan						
		3) Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	27	102	54	1	13
20.	Statistik	1) Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	29,63	89,29	48,08
		2) Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	46,27	89,29	48,08
21.	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	0	0	8,75	65,58	52,56
22.	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	28	7,14	100	100	100
		Persentase Obyek Kebudayaan yang dilestarikan	Persen	N/A	N/A	28,57	42,86	57,14
23.	Perpustakaan	1) Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	0,72	53,49	60,9	63,6	68,3
		2) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	0	10,67	59,98	12,67	12,24
24.	Kearsipan	1) Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persen	1.225	75,43	97,03 5	100	100
		2) Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek	Persen	128,8 3	128,83	4	16,67	50

		kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat						
Urusan Pilihan								
25.	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Ton	39.16 4,35	41.234, 31	-	-	-
	Kelautan dan Perikanan”	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Perse n	-	-	5,8	6,07	0,74
26.	Pariwisata	1) Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	- 856,7 9	-54,07	5.422, 75	218,3 2	-39,95
		2) Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	Persen	- 48,25	-99,95	78,96	3,98	-22,32
		3) Tingkat Hunian Akomodasi	Persen	8,14	5,92	6,36	12.47 2, 94	38,78
		4).Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	3,16%	0	0	0	1,76
		5).Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	0,43	773.13 5 .500	0,007	4,92	3,58
27.	Pertanian	1).Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Persen	544	525,69	549,9 3	55,51	540,90
		2).Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	0,207	-4,18	262,1 0	- 92,16	1.633, 27
28.	Perdagangan	1) Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP Pusat Perbelanjaan dan	Persen	100	100	71,39	100	100

		IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)						
		2) Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	30,27	18,72	41,25	87,14	74,81
		3) Persentase alat- alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	92,76	88,39	82,64	67,48	70,63
29.	Perindustri an	1) Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	Persen	1,72	2,32	3,13	528,4 3	50,55
		2) Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	0	0	55,81	0	37,25
		3) Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100	0	100	0
		4) Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	0	0	0	0	0
		5) Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan	Persen	0	0	0	0	0

		Kawasan Industri (IPKI)						
		6) Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	0	0	40	95	100
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								
30.	Perencanaan dan Keuangan	1) Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan tenaga Kesehatan	Rasio	89,80	11,91	25,76	23,23	9,81
		2) Rasio PAD	Persen	921,183	1.253,516	11,18	13,06	14,22
		3) Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan	Level	3	3,07	3,117	3	3
		4) Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Level	2	2	2	2	3
		5) Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	57,15	53,49	59,29	62,75	82,71
		6) Opini Laporan Keuangan	Opini (WTP)	0	8	9	10	11
31.	Pengadaan	1) Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang Ditandatangani Pada Kuartal Pertama	Persen	1,02	0	0	0	0
		2) Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Persen	5,98	9,32	29,54	1,03	90,80
		3) Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	20,65	21,55	41,03	22,95	22,71
		4) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan	Persen	0	0	1,29	54,21	19,41

		Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Daerah.						
32.	Kepegawai an	1) Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	63,87	64,15	58,18	64,31	66,11
		2) Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	3,49	3,55	18,51	26,01	29,97
		3). Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	55,55	22,02	26,36	22,42	19,68
33.	Manajemen Keuangan	1) Budget Execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	92,01	19,52	223.4 94. 555.3 13. 682,5 3	8,74	5,85
		2) Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	102,7 1	85,53	30.03 9. 877.5 72. 992	1,99	3,76
		3) Assets Management	Persen	Ada	Ada	Ada	4	4
		4) Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Persen	7,78	9,18	12,67	11,04	7,32
34.	Transparan si dan Partisipasi Publik	1) Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Persen	92,49	86,95	85,53	89,96	92,01
		2) Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persen	100	100	100	100	100

		(Public access to fiscal information)						

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo, 2025 (diolah)

2.1.4.4.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Urusan pendidikan memiliki peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan suatu bangsa. Secara keseluruhan, urusan pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun masyarakat yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global. Tingkat partisipasi dan kelulusan siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah semakin meningkat, mencerminkan komitmen untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di tingkat lokal. Perkembangan capaian kinerja urusan pendidikan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo dapat dilihat dengan mengacu pada empat indikator kunci hasil. Keempat indikator tersebut menggambarkan partisipasi masyarakat di beberapa kelompok umur dalam berpartisipasi pada jenjang-jenjang pendidikan yang sesuai.

Indikator pertama terkait tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Paud memiliki capaian yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2024 menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun ke belakang yaitu sebesar 99,54%. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar ditahun 2022-2024 memiliki tren yang fluktuatif dengan capaian tertinggi terjadi tahun 2021 sebesar 103,27%. Capaian terakhir pada tahun 2024 yaitu sebesar 99,77%. Pada Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang menyelesaikan pendidikan menengah pertama memiliki tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Capaian tertinggi terjadi pada 2024 sebesar 98,58%. Indikator terakhir yaitu Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, dimana indikator ini yang mengalami peningkatan sangat drastis dengan capaian terakhir di tahun 2024 yaitu sebesar 94,24%, setelah pada tahun 2020 hanya 5,23%.

Indikator satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca dan numerasi pada tingkat SD dan SMP juga menjadi kinerja kunci urusan pendidikan. Capaian pada indikator tersebut mengalami tren kenaikan, terutama pada indikator satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi pada tingkat SD yang mengalami kenaikan secara signifikan dari 64,56 pada tahun 2023 menjadi 74,31 pada tahun 2024.

Selain akses, kualitas pendidikan juga menjadi perhatian di Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan hasil capaian iklim keamanan pada tingkat SD dan SMP, iklim kebhinekaan tingkat SD dan SMP, iklim inklusivitas tingkat SD dan SMP, peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal Akreditasi B serta pertumbuhan proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D4 menunjukkan tren peningkatan.

Dari capaian indikator kinerja kunci hasil urusan pendidikan, mengindikasikan bahwa Kabupaten Probolinggo menjadikan pendidikan sebagai pilar penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, harus mampu menjamin kesempatan pendidikan yang sama, kualitas pengajar, kurikulum sekolah, dan fasilitas pendidikan yang ada di setiap wilayah.

b. Kesehatan

Selama periode 2020 hingga 2024, kinerja urusan kesehatan di Kabupaten Probolinggo menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan pada sebagian besar indikator, meskipun terdapat dinamika fluktuatif pada beberapa capaian. Analisis atas Indikator Kinerja Kunci (IKK) menunjukkan bahwa secara umum terdapat perbaikan kualitas layanan kesehatan, khususnya dalam aspek pelayanan dasar yang menyangkut ibu dan anak, pengendalian penyakit tidak menular, serta layanan kesehatan kelompok rentan seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas mental.

Beberapa indikator menunjukkan capaian yang sangat baik dan konsisten, bahkan telah memenuhi target 100% pada tahun 2024. Capaian tersebut antara lain meliputi persentase bayi baru lahir

mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar, persentase penderita DM (diabetes melitus) dan hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, serta pelayanan bagi penderita gangguan jiwa berat, TBC, dan HIV. Konsistensi ini mencerminkan keberhasilan penguatan layanan primer melalui Puskesmas, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, dan efektivitas program nasional yang terintegrasi di daerah. Peningkatan signifikan juga tercatat pada indikator cakupan pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar, yang meningkat tajam dari 19,97% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2023, dengan sedikit penurunan menjadi 93,70% pada tahun 2024. Demikian pula halnya dengan cakupan skrining kesehatan usia produktif (15–59 tahun) dan lanjut usia (≥ 60 tahun) yang menunjukkan tren positif. Hal ini mencerminkan keberhasilan integrasi layanan promotif dan preventif melalui kegiatan Posbindu, Posyandu lansia, serta skrining penyakit tidak menular yang semakin masif dilakukan.

Pada indikator cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) dan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional juga mengalami tren kenaikan, namun sebaliknya mengalami tren penurunan pada indikator angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate). Angka Kematian Ibu (AKI) juga perlu mendapat perhatian, dan mengalami tren kasus yang fluktuatif. Mengalami peningkatan kasus tertinggi pada tahun 2021 sebesar 201.78 persen, dan selanjutnya mengalami penurunan sampai pada angka 103.16 persen pada tahun 2024.

Pembangunan kesehatan dilaksanakan sampai tingkat desa sehingga Kabupaten Probolinggo memastikan cakupan desa siaga aktif sebesar 100%. Masyarakat juga dipastikan untuk memiliki jaminan kesehatan nasional, sehingga Kabupaten Probolinggo selalu menaikkan cakupan jaminan kesehatan nasional untuk masyarakat. Namun demikian, beberapa indikator mengalami fluktuasi yang erat kaitannya dengan dampak pandemi COVID-19 pada awal periode. Rasio daya tampung rumah sakit rujukan terhadap jumlah penduduk sempat menurun drastis pada tahun 2021, mencerminkan keterbatasan kapasitas layanan rujukan akibat beban pandemi.

Selain itu, cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil menunjukkan penurunan pada tahun 2022, yang kemungkinan disebabkan oleh pembatasan mobilitas dan kekhawatiran masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan. Tren pemulihan dan akselerasi capaian pada tahun 2023–2024 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah berhasil melakukan adaptasi dan pemulihan layanan kesehatan pasca pandemi. Hal ini dicapai melalui penguatan sistem pelayanan kesehatan dasar, peningkatan kapasitas SDM kesehatan, pemanfaatan sistem informasi kesehatan (digitalisasi layanan), serta kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat.

Tantangan utama dalam bidang kesehatan adalah mempertahankan capaian yang sudah optimal, memperluas cakupan layanan bagi kelompok masyarakat yang belum terjangkau secara merata, serta memperkuat ketahanan sistem kesehatan menghadapi potensi krisis kesehatan baru. Strategi pembangunan kesehatan ke depan perlu difokuskan pada peningkatan akses dan mutu layanan berbasis komunitas, penguatan sistem surveilans dan respons kesehatan masyarakat, serta pengembangan inovasi pelayanan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam periode 2020 hingga 2024, kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Probolinggo menunjukkan dinamika yang cukup beragam, baik dalam bentuk peningkatan capaian indikator, stagnasi, maupun penurunan, yang dalam beberapa hal dapat dikaitkan dengan perubahan metode pengukuran indikator serta pengaruh kebijakan dan ketersediaan anggaran.

Pada indikator rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir serta rasio kawasan pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai, terjadi lonjakan capaian yang signifikan pada tahun 2022 dan 2023 hingga mencapai 100%. Namun, terjadi anomali penurunan kembali ke angka 0% pada tahun 2024 untuk indikator pertama. Anomali ini sangat mungkin disebabkan oleh perubahan

metode perhitungan atau redefinisi wilayah rawan berdasarkan data terbaru, yang menyebabkan penyesuaian total luasan kawasan rawan atau pelaporan infrastruktur. Sementara itu, indikator rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi sempat mengalami penurunan drastis pada tahun 2021 dan 2022, dari 70,22% pada tahun 2020 menjadi 4,49% di tahun 2021 dan 3,8% di tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 dan 2024 indikator ini kembali meningkat tajam menjadi mencapai 100%. Fluktuasi ini dapat dikaitkan dengan proses validasi ulang data teknis atau transisi pengelolaan kewenangan antar instansi, serta penyempurnaan sistem informasi pengairan.

Indikator yang menunjukkan tren yang fluktuatif dan stabil adalah persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik, dari 77,14% pada 2020 dan mengalami sedikit penurunan pada 2021 menjadi 62,29%, kemudian naik kembali menjadi 77,85% pada 2022 lalu sedikit menurun menjadi 74,40% di tahun 2023 kemudian kembali naik drastis menjadi 95,81% pada 2024. Hal ini mencerminkan efektivitas program sanitasi berbasis masyarakat dan peningkatan kesadaran akan pentingnya pengelolaan limbah domestik yang berkelanjutan. Demikian pula, akses terhadap air minum melalui SPAM perpipaan menunjukkan tren naik secara konsisten, dari 62,03% di tahun 2020 menjadi 76,09% di tahun 2024, menandakan perluasan jangkauan layanan air bersih yang signifikan meskipun masih perlu dioptimalkan.

Pada aspek penataan ruang, rasio kepatuhan terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mencapai 100% sejak tahun 2021, setelah berada di angka 44,32% pada tahun 2020. Peningkatan ini mengindikasikan keberhasilan reformasi perizinan dan pemanfaatan sistem berbasis digital serta peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap regulasi bangunan. Selain rasio kepatuhan terhadap izin mendirikan bangunan (IMB), kinerja penataan ruang pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dihitung menggunakan indikator % Meningkatnya Dokumen Penataan Ruang yang Terlegalisasi. Capaian indikator ini pada tahun 2021 sebesar 10 %, tahun 2022 sebesar 12 % dan pada tahun 2023 sebesar 20 %. Pada

tahun 2024 penilaian kinerja penataan ruang dihitung dengan menggunakan Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan capaian sebesar 64 %.

Indikator tingkat kemantapan jalan kabupaten menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2020 hanya sebesar 0,01% hingga tahun 2023 terus meningkat menjadi 83,58%. Pada 2 (dua) tahun yaitu tahun 2023 dan 2024 terjadi penurunan menjadi 79,56% dan 71,75%. Kondisi ini menunjukkan adanya kesalahan data atau perubahan metode penghitungan yang tidak proporsional terhadap target sebelumnya, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan harmonisasi metode pengukuran dan pelaporan untuk menjamin validitas data.

Indikator rasio tenaga teknis bersertifikat juga menunjukkan fluktuasi besar, dari 0,218% pada tahun 2020 turun drastis ke 50,65% pada 2021, lalu naik ke 96,22% pada tahun 2022 dan 100% pada tahun 2023, dan kembali menurun menjadi 42,46% di 2024. Hal ini kemungkinan besar berkaitan dengan pola pembaruan sertifikasi, jumlah tenaga aktif, atau rotasi pegawai teknis. Hal ini menekankan pentingnya kebijakan pengembangan SDM teknis yang berkelanjutan dan terstruktur.

Terakhir, indikator rasio proyek konstruksi yang diawasi tanpa kecelakaan kerja tetap konsisten berada di angka 100% sepanjang lima tahun. Hal ini menunjukkan keberhasilan penerapan standar keselamatan dan pengawasan proyek yang baik, meskipun validasi data lapangan tetap diperlukan untuk memastikan integritas pelaporan. Dinamika capaian indikator menunjukkan bahwa Kabupaten Probolinggo memiliki komitmen tinggi dalam peningkatan infrastruktur dasar dan penataan ruang. Namun demikian, fluktuasi data pada beberapa indikator menandakan perlunya penguatan sistem pengukuran kinerja, pembenahan basis data teknis, serta konsistensi dalam penerapan standar pelaporan.

d. Urusan Perumahan Rakyat

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, capaian indikator kinerja kunci urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Probolinggo menunjukkan dinamika yang mencerminkan tantangan implementasi

serta kemungkinan perubahan metode perhitungan pada beberapa indikator.

Indikator penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana menunjukkan konsistensi capaian sebesar 100% setiap tahunnya. Capaian ini menggambarkan respons cepat dan efektif Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam penanganan kebutuhan perumahan pasca bencana, serta menunjukkan kesiapsiagaan kelembagaan dan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung rehabilitasi hunian bagi kelompok terdampak. Namun demikian, indikator fasilitasi rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi hanya menunjukkan capaian pada tahun 2022 (5,05%), dan nol pada tahun lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan relokasi permukiman oleh pemerintah kabupaten hanya terjadi atau dilaksanakan secara terbatas pada tahun tersebut, kemungkinan karena terbatasnya lokasi relokasi, anggaran, atau program strategis nasional yang relevan. Tidak adanya capaian pada tahun-tahun lain dapat pula mencerminkan tidak adanya kebutuhan relokasi atau belum tersedianya skema fasilitasi yang tepat.

Untuk indikator penanganan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha, terdapat capaian signifikan di tahun 2020 (42,30%), yang kemudian menurun drastis pada 2021 menjadi 0,10%, dan kembali naik serta fluktuatif di tahun-tahun selanjutnya. Penurunan tajam pada 2021 sangat mungkin disebabkan oleh perubahan cara penghitungan atau redefinisi kawasan kumuh sesuai dengan Permen PUPR terbaru, serta keterbatasan kegiatan fisik akibat pandemi. Fluktuasi setelahnya menunjukkan bahwa program penanganan kawasan kumuh berjalan, namun dalam skala yang terbatas dan kemungkinan tergantung pada dukungan program nasional seperti Kotaku (Kota Tanpa Kumuh).

Indikator berkurangnya unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mengalami lonjakan tidak wajar pada tahun 2021 (113,57%), jauh lebih tinggi dari capaian 2020 (45,09%). Lonjakan ini patut diduga sebagai akibat dari perubahan metode penghitungan atau perbedaan basis data awal, mengingat capaian tahun-tahun selanjutnya justru menunjukkan penurunan drastis (hanya 5,21% pada tahun 2024).

Data ini mencerminkan adanya ketidakteraturan dalam perencanaan atau konsistensi program, yang berdampak pada tidak optimalnya pengurangan jumlah RTLH secara merata dari tahun ke tahun. Sementara itu, jumlah perumahan yang sudah dilengkapi dengan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) menunjukkan kenaikan pada tahun 2022 76,65% setelah ditahun sebelumnya cukup rendah capaiannya hanya sebesar 0,24% tahun 2020 dan 2,16% tahun 2022. Akan tetapi kenaikan yang terjadi pada tahun 2022 tidak dicapai pada tahun 2023 yang kembali menurun menjadi sebesar 71,50 dan semakin signifikan mengalami penurunan hingga tahun 2024 menjadi 37,63%. Penurunan ini dapat mencerminkan keterbatasan anggaran atau waktu pelaksanaan proyek-proyek pembangunan PSU, serta kemungkinan kendala administrasi dalam penyerahan PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah.

Capaian indikator urusan perumahan rakyat menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa capaian signifikan, stabilitas dan konsistensi program masih menjadi tantangan. Variasi capaian tahunan yang cukup tajam menandakan perlunya penataan sistem pengendalian kinerja dan validasi data yang lebih ketat, serta perlunya perencanaan yang lebih terstruktur dan berkesinambungan untuk mewujudkan permukiman layak dan berkelanjutan di Kabupaten Probolinggo.

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Capaian kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Probolinggo selama periode 2020–2024 secara umum menunjukkan performa yang cukup stabil pada beberapa indikator, namun juga mengalami fluktuasi signifikan pada indikator tertentu yang mengindikasikan adanya tantangan teknis, administratif, maupun operasional.

Indikator penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) menunjukkan capaian 100% secara konsisten selama lima tahun berturut-turut. Capaian ini menunjukkan adanya sistem respons yang efektif dalam menangani gangguan trantibum, serta kerja sama lintas sektor yang baik antara aparat penegak perda, Satpol PP, dan instansi terkait. Namun demikian, indikator penegakan

Perda dan Perkada mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Setelah mencatat capaian sempurna (100%) pada 2020, indikator ini turun drastis ke 58,82% pada 2021 dan 23,53% pada 2022, sebelum kembali naik pada 2023 (100%) dan turun kembali pada 2024 (52,63%). Penurunan tajam pada 2021–2022 kemungkinan besar disebabkan oleh keterbatasan kegiatan lapangan akibat pandemi COVID-19, dan bisa juga terjadi karena perbedaan metode pengukuran atau perubahan cakupan perda yang menjadi objek penegakan. Fluktuasi ini berdampak pada kepastian hukum dan efektivitas regulasi daerah dalam menjaga ketertiban umum.

Indikator jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana menunjukkan lonjakan anomali pada 2021 dengan capaian sangat tinggi (1.157.408 jiwa), dibandingkan tahun 2020 (33.401 jiwa) dan 2024 (70.589 jiwa). Peningkatan tajam ini kemungkinan merupakan akibat perubahan metode penghitungan atau cakupan layanan, misalnya dengan memasukkan penerima informasi dari berbagai media daring atau penyebaran massal melalui platform digital. Meski demikian, hal ini menunjukkan bahwa tahun 2021 terdapat upaya intensif dalam sosialisasi mitigasi bencana, yang berdampak positif pada peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Hal serupa terlihat pada indikator layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, yang juga melonjak pada 2023 (914.832 jiwa) dari hanya 36.574 pada 2020. Namun, capaian ini kemudian turun menjadi 57 jiwa pada 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa pemberian layanan tersebut sangat tergantung pada program/kegiatan tertentu dan kapasitas lapangan, serta kemungkinan kembali terjadi perubahan metode penghitungan atau cakupan kelompok sasaran.

Indikator layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana juga mengalami anomali, yakni tidak ada capaian pada tahun 2021 (7.457 jiwa), yang berbanding terbalik dengan capaian 14.381 jiwa pada 2020, 11.360 jiwa di 2022, dan 175.771 jiwa di 2023. Penurunan ekstrem ini dapat disebabkan oleh nihilnya kejadian bencana yang memerlukan evakuasi, atau hambatan administratif dan pelaporan dalam sistem pencatatan. Penurunan menjadi 21 pada tahun 2024 juga menandakan perlunya penguatan kapasitas respon darurat yang

berkelanjutan. Sementara itu, indikator pelayanan evakuasi korban kebakaran menunjukkan konsistensi capaian 100% dari 2020 hingga 2024, menandakan bahwa pelayanan damkar telah tersedia dengan baik dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.

Indikator waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran menunjukkan trend positif, yakni penurunan waktu dari 16,5 menit di tahun 2020 menjadi 13 menit di tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan peningkatan efisiensi layanan pemadam kebakaran yang mungkin didukung oleh peningkatan sarana/prasarana, kesiapsiagaan personel, dan penguatan koordinasi wilayah. Capaian urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat menunjukkan kecenderungan positif dalam respons terhadap gangguan ketertiban dan pelayanan kebencanaan. Namun, fluktuasi tajam pada beberapa indikator, terutama yang berbasis jumlah warga penerima layanan, menunjukkan pentingnya konsistensi dalam metodologi penghitungan serta perlunya penguatan data berbasis sistem informasi terpadu.

f. Sosial

Capaian kinerja urusan Sosial Kabupaten Probolinggo selama periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dan cenderung stabil pada dua indikator utama, yang mencerminkan peningkatan perhatian dan pelayanan terhadap kelompok rentan serta korban bencana sosial dan alam.

Pada indikator pertama, yakni persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan/pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, capaian menunjukkan peningkatan tajam dari 24,02% pada 2020 dan 21,41% pada 2021, menjadi 100% mulai tahun 2022 hingga 2024. Lonjakan signifikan yang terjadi pada tahun 2022 kemungkinan disebabkan oleh perubahan metode penghitungan indikator atau peningkatan cakupan layanan yang mencakup berbagai bentuk intervensi sosial non-panti seperti bantuan sosial tunai, layanan berbasis komunitas, dan pendekatan integratif dengan lintas sektor. Pencapaian 100% selama tiga tahun berturut-turut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu memastikan kebutuhan

dasar kelompok sasaran tersebut terpenuhi secara menyeluruh, yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan pengurangan kerentanan sosial di masyarakat.

Indikator kedua, yaitu persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat, juga menunjukkan perbaikan signifikan. Capaian awal pada 2020 sebesar 7,59% mengalami peningkatan drastis menjadi 100% sejak tahun 2021 hingga 2024. Perubahan ini sangat mungkin disebabkan oleh pembenahan sistem respons bencana, peningkatan kapasitas kelembagaan tanggap darurat, serta integrasi antara Dinas Sosial dan lembaga penanggulangan bencana dalam pemberian layanan selama masa krisis. Hal ini mencerminkan kesiapan daerah dalam merespons kejadian darurat secara komprehensif dan cepat, serta pemenuhan hak-hak dasar korban bencana secara optimal.

Capaian indikator pada urusan sosial menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan akses layanan sosial bagi kelompok rentan dan korban bencana. Namun, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan konsistensi capaian ini, terutama dalam hal keberlanjutan program, kualitas layanan, serta keakuratan data penerima manfaat. Fluktuasi pada tahun-tahun awal juga perlu dicermati sebagai bahan perbaikan sistem pendataan dan pelaporan.

2.1.4.4.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Kinerja urusan tenaga kerja Kabupaten Probolinggo selama periode 2020–2024 memperlihatkan dinamika yang cukup beragam, mencerminkan adanya perbaikan dalam perencanaan ketenagakerjaan serta upaya peningkatan kualitas tenaga kerja, meskipun masih terdapat tantangan pada aspek kompetensi dan produktivitas. Indikator pertama, yaitu persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada rencana tenaga kerja, menunjukkan peningkatan konsisten dari 0% pada 2020 menjadi 8,26% (2021),

4,61% (2022), dan mencapai 100% pada 2023 dan 2024. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam perencanaan dan implementasi program ketenagakerjaan yang lebih terarah dan selaras dengan rencana pembangunan tenaga kerja daerah. Capaian penuh pada dua tahun terakhir mencerminkan keterpaduan perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan lintas sektor. Indikator kedua, yakni persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi, masih menunjukkan capaian yang relatif rendah meskipun ada peningkatan dari 0,01% (2020) menjadi 1,30% pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan langkah awal menuju peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja, walaupun belum signifikan. Rendahnya capaian bisa disebabkan oleh keterbatasan akses pelatihan bersertifikasi atau belum optimalnya kolaborasi dengan lembaga pelatihan kerja dan dunia usaha/industri.

Indikator ketiga, tingkat produktivitas tenaga kerja, mengalami fluktuasi ekstrem. Angka awal menunjukkan capaian 3.572,36 di tahun 2020 dan 3.515,96 di 2021, kemudian naik drastis menjadi 3.806.806.148,95 pada 2022, tidak tersedia data pada 2023, lalu melonjak secara tidak wajar pada 2024 hingga mencapai 3.760.149.772,42. Kondisi penyimpangan ini sangat besar kemungkinannya disebabkan oleh perubahan metode penghitungan indikator atau kesalahan input data. Perubahan metodologi ini perlu dikaji ulang agar data produktivitas dapat menjadi alat ukur yang akurat dalam mengevaluasi kebijakan ketenagakerjaan. Indikator keempat, persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak, menunjukkan kemajuan signifikan. Dari hanya 4,46% pada 2020, meningkat drastis ke 100% pada 2021, menurun menjadi 36,42% pada 2022, dan kembali mencapai 100% di 2023 dan 2024. Perubahan drastis ini mungkin dipengaruhi oleh perubahan mekanisme pelaporan atau verifikasi data perusahaan yang mematuhi ketentuan ketenagakerjaan. Konsistensi dalam pengawasan dan pembinaan terhadap dunia usaha sangat penting untuk menjaga stabilitas capaian ini.

Indikator kelima, persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja, cenderung mengalami penurunan bertahap dari 88,07% (2020) ke 77,74% (2024).

Penurunan ini dapat disebabkan oleh pergeseran preferensi pencari kerja ke jalur mandiri (online, media sosial, atau jaringan pribadi), berkurangnya lowongan kerja lokal, atau pengaruh pandemi COVID-19 di awal periode yang berdampak pada sektor ketenagakerjaan secara umum. Dampaknya adalah menurunnya efektivitas peran pemerintah daerah sebagai fasilitator penempatan kerja, yang memerlukan penguatan strategi layanan penempatan tenaga kerja ke depan. Capaian urusan tenaga kerja menunjukkan kemajuan dalam aspek perencanaan dan tata kelola, namun masih perlu peningkatan pada aspek kompetensi dan akurasi data produktivitas. Perlu evaluasi terhadap metode penghitungan beberapa indikator agar data yang dihasilkan benar-benar dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian kinerja pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, yang mengindikasikan tantangan dalam hal keberlanjutan program dan validitas data yang digunakan dalam penghitungan indikator.

Indikator pertama, Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD, menunjukkan variasi nilai dari 2,88% pada 2020, meningkat ke 3,77% (2021), namun anjlok ke 0,47% di 2022, kemudian naik lagi ke 3,10% di 2023, lalu naik kembali menjadi sebesar 5% pada 2024. Fluktuasi ini mengindikasikan ketidakstabilan dalam pengarusutamaan gender dalam perencanaan anggaran. Penurunan tajam di 2022 kemungkinan disebabkan oleh minimnya program yang secara eksplisit menyasar isu gender atau perubahan dalam metode klasifikasi anggaran ARG. Dampaknya adalah potensi penurunan efektivitas intervensi pembangunan yang peka gender. Indikator kedua, persentase anak korban kekerasan yang ditangani oleh instansi terkait, mencatat bahwa seluruh anak korban kekerasan telah 100% tertangani.

Indikator ketiga, rasio kekerasan terhadap perempuan (termasuk TPPO) per 100.000 penduduk perempuan, menunjukkan tren peningkatan dari 3,62 (2020), 5,63 (2021), hingga 6,82 (2022), lalu turun drastis menjadi 0,84 (2023) dan 0,71 (2024). Peningkatan

pada periode 2020–2022 bisa mencerminkan membaiknya sistem pelaporan dan kesadaran korban untuk melapor, namun bisa juga akibat naiknya angka kekerasan pasca pandemi. Penurunan signifikan di dua tahun terakhir kemungkinan bukan hanya hasil dari pengurangan kasus riil, namun juga mungkin dipengaruhi oleh berkurangnya pelaporan atau perubahan metode pencatatan. Jika angka ini mencerminkan realita yang menurun, maka hal ini merupakan hasil dari penguatan perlindungan hukum dan edukasi publik. Namun jika tidak, ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjangkau korban dan dokumentasi data yang akurat.

Secara umum, capaian indikator urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih menghadapi tantangan besar terkait konsistensi perencanaan anggaran responsif gender, penguatan sistem pendataan, serta kapasitas layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Fluktuasi, terutama pada indikator ke-3, memperlihatkan bahwa reformasi dalam sistem pelaporan, pencatatan, serta penganggaran berbasis gender sangat dibutuhkan untuk memastikan perlindungan kelompok rentan berjalan efektif dan akuntabel.

c. Pangan

Berdasarkan data capaian indikator kinerja kunci bidang urusan pangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada tahun 2020 hingga 2024, terdapat fluktuasi signifikan dalam persentase ketersediaan pangan yang tercatat, dengan perubahan yang cukup mencolok pada tahun 2021, 2023, dan 2024

Pada tahun 2021, terjadi lonjakan yang cukup besar dengan pencapaian 2,05%. Hal ini dapat diartikan bahwa pada tahun tersebut, upaya peningkatan ketersediaan pangan telah menunjukkan hasil positif. Lonjakan ini bisa jadi disebabkan oleh perubahan dalam cara penghitungan indikator yang lebih memperhitungkan faktor-faktor baru dalam pengelolaan cadangan pangan, seperti peningkatan produksi pangan lokal, perbaikan distribusi, atau langkah-langkah mitigasi bencana yang lebih baik. Peningkatan penghitungan ini memberikan gambaran yang lebih optimis tentang keadaan ketahanan pangan di Kabupaten Probolinggo. Kemudian terdapat peningkatan

signifikan pada tahun 2023 menjadi 6,54%, yang menunjukkan bahwa sektor pangan mulai mengalami pemulihan atau perbaikan. Faktor-faktor yang memungkinkan peningkatan ini antara lain perbaikan dalam sistem distribusi pangan, kebijakan yang mendukung ketahanan pangan daerah, serta mungkin juga adanya proyek atau program pemerintah yang lebih efektif dalam mendukung produksi dan distribusi pangan secara merata.

Terakhir, terjadi lonjakan yang sangat tajam menjadi 42,85% di tahun 2024. Angka ini menunjukkan pencapaian yang luar biasa, namun perlu dicermati bahwa perubahan penghitungan indikator di tahun ini bisa menjadi penyebab utama lonjakan yang sangat signifikan. Mungkin saja ada perubahan metodologi atau penyesuaian dalam standar pengukuran yang lebih memperhitungkan cadangan pangan yang lebih banyak atau lebih luas lagi. Namun, jika angka ini mencerminkan kondisi yang sebenarnya, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Probolinggo mengalami pencapaian luar biasa dalam hal ketahanan pangan, yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor positif seperti teknologi pertanian yang lebih maju, peningkatan produktivitas, dan perencanaan yang lebih matang. Fluktuasi indikator ketersediaan pangan antara tahun 2020 hingga 2024 menggambarkan dinamika yang kompleks, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal, serta perubahan dalam penghitungan indikator yang perlu menjadi perhatian dalam evaluasi capaian.

d. Pertanian

Capaian indikator kinerja kunci bidang urusan pertanian Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2020-2024, terlihat adanya fluktuasi signifikan. Pada tahun 2020 hingga 2022, semua indikator tercatat nol persen, yang kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan kegiatan atau pengelolaan di sektor pertanian. Pada tahun 2020-2024 digunakan 2 indikator pertanian yaitu :

1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin yang diterbitkan dengan definisi operasional : ▪ Perbandingan Rincian luas tanah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan

Ruang dengan RTR terdiri dari kesesuaian kegiatan: a. berusaha; b. Non berusaha; dan c. yang bersifat strategis nasional berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

2. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi dengan definisi operasional Perbandingan Jumlah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau Lembaga yang tidak berdampak luas yang dibanding Jumlah pengaduan perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau Lembaga yang tidak berdampak luas.

Pada tahun 2023, terjadi lonjakan 100% pada indikator pemanfaatan tanah sesuai peruntukkan. Hal ini disebabkan oleh perubahan penghitungan indikator atau keberhasilan pemerintah dalam menata penggunaan tanah sesuai izin yang telah diberikan. Namun, pada 2024, sebagian besar indikator kembali tercatat nol, yang dapat mencerminkan penurunan capaian akibat kendala teknis atau perubahan prioritas. Satu-satunya indikator yang tercatat di 2024 adalah penanganan sengketa tanah yang melalui mediasi, dengan nilai 3%. Capaian indikator kinerja kunci hasil urusan pertanahan Pemerintah Kabupaten Probolinggo mencerminkan dinamika dalam pengelolaan pertanahan yang dipengaruhi oleh faktor teknis dan administrasi, serta perubahan dalam cara penghitungan indikator yang perlu diperhatikan untuk perencanaan ke depan.

e. Lingkungan Hidup

Berdasarkan data capaian indikator kinerja kunci bidang urusan lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten Probolinggo selama periode 2020 hingga 2024, dapat dianalisis fluktuasi yang terjadi pada masing-masing indikator, yang mencerminkan dinamika dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Probolinggo.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan hasil yang relatif stabil pada tahun 2020 dan 2021, dengan nilai sebesar 63,4 %. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 60,38

%, yang kemungkinan disebabkan oleh faktor eksternal seperti polusi atau pengelolaan lingkungan yang kurang optimal pada periode tersebut. Pada tahun 2023, IKLH kembali meningkat menjadi 64,14 %, menunjukkan adanya upaya perbaikan yang signifikan dalam kualitas lingkungan, baik melalui kebijakan atau program-program yang lebih efektif. Walaupun demikian, pada tahun 2024, terjadi sedikit penurunan menjadi 61,56 %, yang menandakan adanya tantangan dalam mempertahankan kualitas lingkungan yang konsisten. Penurunan ini perlu menjadi perhatian untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas kebijakan pengelolaan lingkungan.

Pengelolaan Sampah menunjukkan peningkatan signifikan dari 14,54 % pada tahun 2020 menjadi 65,24 % pada tahun 2023. Peningkatan ini dapat dijelaskan oleh diterapkannya kebijakan atau program yang lebih terstruktur dalam pengelolaan sampah, yang mungkin termasuk pengurangan sampah plastik, peningkatan daur ulang, atau pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih baik. Namun, penurunan yang terjadi pada tahun 2024 menjadi 28,89 % menunjukkan adanya kendala dalam implementasi kebijakan tersebut, baik karena kurangnya konsistensi dalam pengelolaan atau penurunan efektivitas program yang berjalan dan adanya penurunan ritasi pengambilan sampah dari pihak ketiga.

Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan Kegiatan terhadap Izin Lingkungan juga mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, capaian ketaatan tercatat sebesar 25,64%, yang meningkat tajam menjadi 51,43% pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan aturan terkait izin lingkungan serta kebijakan perlindungan lingkungan mulai memberikan dampak positif. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan drastis menjadi 18,52%, yang dapat disebabkan oleh penurunan tingkat kepatuhan atau adanya tantangan dalam pengawasan yang efektif terhadap kegiatan usaha yang berisiko terhadap lingkungan. Pada tahun 2024, capaian ini sedikit meningkat menjadi 38,89%, yang menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memperbaiki dan memperkuat pengawasan serta penegakan hukum terkait izin lingkungan dan peraturan perlindungan lingkungan hidup.

Capaian indikator kinerja kunci bidang lingkungan hidup Kabupaten Probolinggo mencerminkan tantangan dan kemajuan yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan hidup selama lima tahun terakhir. Meskipun ada peningkatan yang signifikan pada beberapa indikator, terutama pada pengelolaan sampah dan ketaatan terhadap izin lingkungan, fluktuasi yang terjadi mengindikasikan adanya kebutuhan untuk evaluasi lebih mendalam terhadap kebijakan dan implementasinya. Perlu adanya perbaikan berkelanjutan dan konsistensi dalam pelaksanaan program-program perlindungan lingkungan agar capaian indikator dapat lebih stabil dan efektif di masa mendatang, khususnya dalam mencapai tujuan jangka menengah-panjang dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kabupaten Probolinggo.

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan capaian indikator kinerja kunci bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Pemerintah Kabupaten Probolinggo selama periode 2020 hingga 2024, dapat dilakukan analisis terhadap dinamika pelaksanaan program dan pencapaian hasil yang terkait dengan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Probolinggo.

Perekaman KTP Elektronik menunjukkan angka yang sangat baik dan stabil sepanjang periode 2020 hingga 2024, dengan nilai yang dimulai dari 97,87% pada tahun 2020 dan terus meningkat hingga 99,35% pada tahun 2024. Pencapaian ini mencerminkan efektivitas dan keberhasilan program perekaman KTP Elektronik yang telah dilaksanakan dengan optimal. Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah berhasil mengimplementasikan kebijakan ini secara konsisten, sehingga hampir seluruh penduduk yang memenuhi syarat telah tercatat dalam sistem administrasi kependudukan. Peningkatan ini mencerminkan kualitas pelayanan publik yang semakin baik dan mendukung terciptanya basis data kependudukan yang lebih akurat untuk perencanaan pembangunan.

Persentase Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki KIA mengalami peningkatan yang signifikan dari 19,84% pada tahun 2020 menjadi 37,46% pada tahun 2024. Peningkatan ini menggambarkan adanya

upaya yang lebih besar dalam memberikan Kartu Identitas Anak (KIA) kepada anak-anak di Kabupaten Probolinggo. Pemberian KIA yang semakin luas ini merupakan langkah penting dalam melindungi hak anak dan memastikan mereka tercatat dalam administrasi kependudukan. Peningkatan tajam dalam beberapa tahun terakhir kemungkinan dipengaruhi oleh kebijakan yang lebih proaktif dan distribusi KIA yang semakin merata, meskipun ada kemungkinan perubahan penghitungan indikator yang mempengaruhi data tersebut.

Kepemilikan Akta Kelahiran juga mengalami peningkatan yang signifikan, dari 74,75% pada tahun 2020 menjadi 89,06% pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan pelayanan pendaftaran kelahiran. Pencatatan akta kelahiran yang lebih tinggi menandakan keberhasilan dalam memastikan setiap kelahiran tercatat secara resmi, yang merupakan hak dasar setiap warga negara dan mendukung validitas data kependudukan. Meskipun demikian, penurunan yang sedikit pada tahun 2024 dapat menunjukkan adanya beberapa tantangan atau hambatan yang perlu diatasi untuk menjaga kelancaran proses pendaftaran akta kelahiran di seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo.

Jumlah PD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama menunjukkan lonjakan yang signifikan dari 4,41% pada tahun 2020 menjadi 43,75% pada tahun 2024. Peningkatan yang tajam ini mencerminkan semakin banyaknya instansi pemerintah dan pihak terkait yang memanfaatkan data kependudukan untuk berbagai keperluan administratif dan perencanaan pembangunan. Pemanfaatan data ini sangat penting untuk mendukung kebijakan berbasis data, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan efisien. Lonjakan yang tajam ini juga menunjukkan adanya peningkatan kerja sama antara pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan berbagai pihak dalam pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan publik.

Capaian indikator kinerja kunci bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Probolinggo menunjukkan hasil yang sangat positif. Peningkatan signifikan pada

sebagian besar indikator menggambarkan keberhasilan pelaksanaan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Meskipun terdapat sedikit fluktuasi pada beberapa indikator, secara umum kinerja administrasi kependudukan di Kabupaten Probolinggo terus membaik.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian indikator kinerja kunci bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2020 hingga 2024, menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dalam kedua indikator yang dipantau, yaitu persentase pengentasan desa tertinggal dan persentase peningkatan status desa mandiri.

Persentase Pengentasan Desa Tertinggal menunjukkan angka yang sangat tinggi pada tahun 2020, yaitu 100%. Pencapaian ini menggambarkan bahwa pada tahun tersebut, seluruh desa tertinggal di Kabupaten Probolinggo telah berhasil diatasi, sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Namun, angka ini turun menjadi 0% pada tahun 2021 hingga 2024. Penurunan yang tajam ini kemungkinan disebabkan oleh tidak adanya program atau kegiatan yang difokuskan pada pengentasan desa tertinggal pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini juga bisa mengindikasikan perubahan dalam cara penghitungan indikator, yang mungkin lebih ketat atau berbeda dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga menyebabkan tidak adanya pencapaian yang terukur dalam pengentasan desa tertinggal di tahun-tahun tersebut.

Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 9,64% pada tahun 2020 menjadi 73,56% pada tahun 2022, dan mencapai angka yang sangat tinggi pada tahun 2023, yaitu 143,82%. Peningkatan yang pesat ini dapat dipengaruhi oleh keberhasilan program pemberdayaan desa yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan kemandirian desa dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, infrastruktur, dan pemerintahan. Namun, pencapaian yang sangat tinggi pada tahun 2023 kemungkinan disebabkan oleh perubahan cara penghitungan indikator yang lebih memperhitungkan pencapaian status desa mandiri secara lebih luas atau adanya penyesuaian dalam metode

evaluasi yang lebih menguntungkan hasil di tahun tersebut. Pada tahun 2024, capaian kembali turun menjadi 0%, yang bisa menunjukkan bahwa status desa mandiri yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya tidak tercatat atau tidak dipertahankan dalam evaluasi yang terbaru.

Capaian indikator kinerja kunci di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Probolinggo pada periode 2020-2024 menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan, dengan pencapaian yang sangat baik pada tahun 2020 dan 2023, namun diikuti oleh penurunan tajam pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program-program pemberdayaan yang telah dilaksanakan, serta memastikan bahwa perubahan dalam penghitungan indikator tidak mengganggu validitas dan konsistensi data yang digunakan untuk mengevaluasi capaian kinerja.

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan data capaian indikator kinerja kunci bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Pemerintah Kabupaten Probolinggo selama periode 2020 hingga 2024, terdapat fluktuasi yang cukup signifikan dalam pencapaian beberapa indikator yang relevan, seperti Angka Kelahiran Total (TFR), Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR), dan Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need).

Angka Kelahiran Total (TFR), yang menunjukkan jumlah kelahiran per wanita usia subur, tercatat stabil pada angka 1,96 pada tahun 2020 hingga 2022, dan mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2023 menjadi 2,02 dan 2,02 pada tahun 2024. Angka TFR yang stabil menunjukkan bahwa program pengendalian kelahiran berjalan cukup efektif dalam menahan angka kelahiran.

Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR) mengalami peningkatan signifikan dari 74,93% pada tahun 2020 menjadi 81,29% pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan besar dalam program keluarga berencana, dimana sebagian besar pasangan usia subur telah menggunakan kontrasepsi modern. Peningkatan tajam pada tahun 2023 ini kemungkinan disebabkan oleh perubahan cara penghitungan indikator yang lebih mencakup pemakaian

kontrasepsi yang lebih luas atau meningkatnya akses dan penyuluhan terkait program keluarga berencana. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan drastis menjadi 70,22%. Penurunan yang terjadi pada 2024 mungkin terkait dengan masalah distribusi atau aksesibilitas kontrasepsi, atau perubahan dalam kebijakan yang mempengaruhi tingkat penggunaan kontrasepsi.

Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need), yang mencerminkan proporsi pasangan usia subur yang menginginkan menunda atau menghentikan kelahiran namun tidak menggunakan kontrasepsi, menunjukkan fluktuasi yang besar. Pada tahun 2020, angka unmet need tercatat 7,10%, namun pada tahun 2021 meningkat tajam menjadi 23,47%. Peningkatan tajam ini kemungkinan dipengaruhi oleh perubahan cara penghitungan indikator yang lebih komprehensif atau adanya peningkatan kesadaran yang lebih besar terhadap kebutuhan kontrasepsi di masyarakat. Pada tahun 2022, angka unmet need menurun menjadi 13,19%, dan terus menurun hingga 3,56% pada tahun 2023 dan 3,5% pada tahun 2024, menunjukkan keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan ber-KB dan peningkatan cakupan pelayanan kontrasepsi. Penurunan signifikan pada tahun-tahun terakhir ini mengindikasikan peningkatan efektivitas program keluarga berencana dalam mengatasi kekurangan akses atau penggunaan kontrasepsi di masyarakat.

Capaian indikator kinerja kunci di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Probolinggo selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan hasil yang positif meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa indikator. Peningkatan yang tajam dalam penggunaan kontrasepsi modern dan penurunan unmet need mencerminkan keberhasilan dalam program keluarga berencana, meskipun ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam beberapa tahun, seperti penurunan penggunaan kontrasepsi pada 2023. Pemerintah Kabupaten Probolinggo perlu terus meningkatkan aksesibilitas dan penyuluhan mengenai keluarga berencana, serta mengevaluasi penghitungan indikator untuk memastikan data yang akurat dan konsisten.

i. Perhubungan

Berdasarkan data capaian indikator kinerja kunci bidang perhubungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2020 hingga 2024, terdapat fluktuasi yang cukup signifikan pada kedua indikator yang dipantau, yakni Rasio Konektivitas Kabupaten dan Kinerja Lalu Lintas Kabupaten. Fluktuasi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat eksternal maupun internal, termasuk perubahan cara penghitungan indikator.

Rasio Konektivitas adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu daerah atau wilayah terhubung dengan daerah lain melalui infrastruktur transportasi dan komunikasi. Rasio ini mencerminkan tingkat aksesibilitas dan mobilitas yang dimiliki oleh masyarakat dalam menjangkau berbagai layanan, fasilitas, dan sumber daya yang ada di sekitarnya. Komponen pembentuk indikator ini terdiri dari jaringan transportasi, aksesibilitas, frekuensi dan kualitas layanan transportasi, serta konektivitas digital. Rasio konektivitas dapat dihitung menggunakan rumus sesuai dengan pedoman penyusunan LPPD Kemendagri, yaitu Rasio konektivitas Kabupaten = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$.

Rasio Konektivitas Kabupaten menunjukkan angka yang stabil pada 47,5% dari tahun 2020 hingga 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pada tiga tahun pertama, rasio konektivitas infrastruktur transportasi di Kabupaten Probolinggo tidak mengalami perubahan signifikan, yang mungkin mencerminkan kurangnya pengembangan atau peningkatan jaringan transportasi pada periode tersebut. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan drastis menjadi 0%. Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh perubahan cara penghitungan atau metode evaluasi indikator yang lebih ketat atau berbeda pada tahun tersebut. Bisa juga karena adanya kendala dalam pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur transportasi yang mengurangi konektivitas antar wilayah dalam kabupaten. Pada tahun 2024, rasio konektivitas kembali meningkat menjadi 71,3%, yang menunjukkan pemulihan yang signifikan, kemungkinan besar akibat kebijakan atau proyek infrastruktur yang berhasil diterapkan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah.

Kinerja Lalu Lintas Kabupaten adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja ruas jalan, yang mencerminkan seberapa baik jalan tersebut berfungsi dalam memenuhi kebutuhan lalu lintas. Indikator ini membantu dalam menilai efisiensi, keamanan, dan kenyamanan berkendara di suatu ruas jalan. Komponen yang dinilai dalam indikator ini adalah volume lalu lintas, kecepatan rata-rata, tingkat kecelakaan, waktu tempuh, tingkat pelayanan (*Level Of Service*), dan lain-lain. Kinerja Lalu Lintas Kabupaten menunjukkan angka yang cukup tinggi pada tahun 2020, yakni 16,53, yang kemudian menurun drastis pada tahun 2021 menjadi 0,001, dan sedikit meningkat pada tahun 2022 menjadi 0,0007. Penurunan tajam pada tahun 2021 dan 2022 dapat mencerminkan masalah dalam pengelolaan atau pencatatan kinerja lalu lintas, atau bahkan adanya perubahan dalam metode penghitungan yang digunakan. Di sisi lain, angka yang meningkat sedikit pada tahun 2023 menjadi 0,37 menunjukkan adanya upaya yang lebih baik dalam mengelola kinerja lalu lintas meskipun pencapaian masih rendah. Namun, pada tahun 2024, capaian kinerja lalu lintas kembali menurun menjadi 0,21, yang menunjukkan bahwa meskipun ada upaya perbaikan, masih ada tantangan besar dalam pengelolaan lalu lintas yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Capaian indikator kinerja kunci bidang perhubungan menunjukkan adanya ketidakstabilan yang cukup signifikan dalam pengelolaan infrastruktur dan kinerja lalu lintas di Kabupaten Probolinggo selama periode 2020 hingga 2024. Penurunan tajam yang terjadi pada 2023 pada kedua indikator ini, diikuti oleh pemulihan yang tercatat pada 2024, menunjukkan bahwa ada beberapa perubahan atau pembenahan dalam cara evaluasi dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan.

Selanjutnya, Indeks Jalan Berkeselamatan (IJB) merupakan indikator penting yang mencerminkan tingkat keselamatan di jalan raya, yang berhubungan langsung dengan upaya mengurangi angka kecelakaan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Capaian indikator indeks jalan berkeselamatan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2020-2024 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, indeks jalan berkeselamatan di Kabupaten Probolinggo

mencapai 17%. Dan angka tersebut mengalami kenaikan menjadi 31% hingga tahun 2022. Sementara pada tahun 2023 indeks jalan berkeselamatan naik menjadi sebesar 32%. Kemudian pada tahun 2024 naik drastis menjadi 59,9%. Kenaikan ini mungkin dapat dipengaruhi oleh Peningkatan Infrastruktur Jalan, Pelaksanaan kampanye keselamatan lalu lintas yang efektif, dan Peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Untuk mempertahankan capaian Indeks Jalan Berkeselamatan di Kabupaten Probolinggo, beberapa kebijakan yang dapat diambil antara lain Melanjutkan investasi dalam perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan yang aman dan berkualitas, Mengimplementasikan kampanye keselamatan lalu lintas secara berkelanjutan, serta Membangun kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, untuk bersama-sama mengembangkan dan melaksanakan program keselamatan jalan.

j. Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan data capaian indikator kinerja kunci bidang komunikasi dan informatika Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan yang signifikan dalam beberapa indikator, yang mencerminkan langkah maju dalam digitalisasi dan penyebaran informasi publik.

Pada indikator persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo, terdapat peningkatan yang cukup stabil dari tahun ke tahun. Dimulai dengan 27,27% pada tahun 2020, angka ini terus meningkat hingga mencapai 57,69% pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya usaha yang konsisten dari Dinas Kominfo untuk memperluas jaringan internet ke OPD-OPD di Kabupaten Probolinggo. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh kebijakan dan program yang difokuskan pada penguatan infrastruktur digital, seperti perluasan jaringan internet berbasis fiber optic atau peningkatan anggaran untuk fasilitas tersebut. Peningkatan yang lebih tajam pada tahun 2022 dan 2023, yang beranjak dari 44,44% menjadi 55,77%, juga dapat menunjukkan adanya perubahan dalam cara

penghitungan indikator yang lebih mencakup, sehingga mencatatkan progres yang sebelumnya tidak terhitung.

Indikator persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi, terjadi lonjakan yang sangat signifikan. Dimulai dengan 0% pada tahun 2020, angka ini melonjak menjadi 17,59% pada tahun 2021, dan terus meningkat pesat hingga mencapai 93,58% pada tahun 2024. Peningkatan tajam ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan transformasi digital dalam pelayanan publik. Penerapan sistem layanan berbasis internet yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan administrasi dan informasi secara online menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi. Perubahan yang sangat cepat pada tahun 2024 kemungkinan dipengaruhi oleh penghitungan indikator yang lebih mencakup program-program digitalisasi yang sebelumnya tidak terhitung secara keseluruhan.

Indikator persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik dan mengetahui kebijakan serta program prioritas pemerintah daerah, terjadi peningkatan yang stabil. Pada tahun 2020, indikator ini tercatat sebesar 0%, dan pada tahun 2021 tercatat sebesar 76,472%, kemudian pada tahun 2022 angkanya turun menjadi 72,74%, dan terus menurun menjadi 72,03% pada tahun 2023, namun kembali meningkat menjadi sebesar 73,38% pada tahun 2024. Peningkatan pada tahun 2022 dan 2023 mencerminkan upaya pemerintah dalam memperluas kanal komunikasi, seperti penggunaan media sosial dan platform digital lainnya, untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Penurunan kecil pada tahun 2024 mungkin disebabkan oleh ketidaksesuaian dalam penghitungan indikator, yang tidak memperhitungkan perubahan dalam distribusi informasi pada tahun tersebut.

Kemudian, indikator Indeks Masyarakat Digital adalah salah satu indikator yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Indikator ini merupakan indikator baru yang digunakan di tahun 2024 sehingga nilai capaian tahun sebelumnya belum dapat diukur capaian.

Capaian kinerja bidang komunikasi dan informatika mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan infrastruktur dan layanan berbasis teknologi informasi di Kabupaten Probolinggo. Peningkatan tersebut didorong oleh kebijakan yang lebih terfokus pada digitalisasi pemerintahan dan penyebaran informasi yang lebih efektif kepada masyarakat. Namun, beberapa anomali peningkatan, terutama pada indikator layanan publik online dan terintegrasi, kemungkinan dipengaruhi oleh perubahan cara penghitungan yang lebih komprehensif.

k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan data capaian indikator kinerja kunci bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2020-2024, terdapat variasi yang signifikan. Indikator pertama, yaitu peningkatan koperasi yang berkualitas, menunjukkan lonjakan drastis dari 16,55% pada 2020 menjadi 84,03% pada 2021, yang mungkin disebabkan oleh kebijakan atau program pemberdayaan yang fokus pada peningkatan kualitas koperasi. Namun, penurunan tajam pada 2022 (6,76%) dan penurunan pada 2024 (31,90%) dapat terkait dengan perubahan cara penghitungan indikator dan tantangan internal yang dihadapi koperasi. dari total 814 koperasi di Kabupaten Probolinggo, 628 di antaranya tidak aktif, dan 49 direncanakan dibubarkan karena tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama tiga tahun berturut-turut serta tidak memenuhi ketentuan peraturan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya nasional untuk meningkatkan kualitas koperasi. Meskipun data spesifik untuk 2024 sulit ditemukan, tren ini kemungkinan berlanjut, menyebabkan penurunan jumlah koperasi berkualitas. Secara nasional, jumlah koperasi aktif juga mengalami penurunan signifikan dari 209.488 unit pada 2014 menjadi 130.119 unit pada 2023, dengan 82.000 koperasi bermasalah dibubarkan antara 2014-2019. Tren ini mencerminkan upaya Kementerian Koperasi dan UKM untuk membenahi koperasi dengan menghapus entitas yang hanya berbekal papan nama dan tidak berbadan hukum. Di Kabupaten Probolinggo, kebijakan ini

tampaknya diterapkan, yang menjelaskan penurunan koperasi berkualitas dari 2023 ke 2024.

Pada indikator kedua, peningkatan usaha mikro yang menjadi wirausaha, terdapat peningkatan dari 7,43% pada 2020 menjadi 56,02% pada 2023, menunjukkan keberhasilan program pemberdayaan usaha mikro. Meski begitu, penurunan kecil pada 2024 (59,41%) menunjukkan tantangan yang dihadapi sektor ini, mungkin dipengaruhi oleh perubahan penghitungan atau faktor eksternal seperti kondisi pasar. Secara keseluruhan, capaian kinerja bidang ini mencerminkan dinamika yang dipengaruhi oleh intervensi program dan perubahan cara penghitungan indikator. Untuk masa depan, penting untuk memastikan konsistensi penghitungan dan keberlanjutan program pemberdayaan agar kinerja di sektor koperasi dan usaha mikro dapat terus meningkat.

1. Penanaman Modal

Berdasarkan data capaian indikator kinerja kunci bidang penanaman modal Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2020-2024, terlihat fluktuasi yang signifikan pada persentase peningkatan investasi. Pada tahun 2020 dan 2021, terjadi penurunan yang signifikan, masing-masing -54,81% dan -30,66%, yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menghambat arus investasi. Namun, terjadi lonjakan drastis pada tahun 2022, mencapai 165,04%, yang mungkin dipicu oleh kebijakan yang lebih pro-investasi dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Peningkatan ini juga dapat disebabkan oleh perubahan cara penghitungan indikator. Tren positif berlanjut pada 2023 dengan capaian 266,71%, meskipun angka yang sangat tinggi ini perlu dianalisis lebih lanjut terkait kemungkinan faktor luar biasa. Pada tahun 2024, tercatat penurunan kembali menjadi 56,46%, yang bisa dipengaruhi oleh ketidakpastian global dan perubahan kebijakan yang memengaruhi investasi. Capaian ini mencerminkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan perubahan dalam cara penghitungan indikator.

m. Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan data capaian indikator kinerja kunci bidang kepemudaan dan olahraga Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2020-2024, terdapat fluktuasi yang signifikan pada tiga indikator utama yang mencerminkan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan, serta peningkatan prestasi olahraga.

Indikator pertama, yaitu tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, menunjukkan peningkatan dari 0,10% pada tahun 2020 menjadi 13,49% pada tahun 2024. Peningkatan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh kebijakan yang mendorong kewirausahaan pemuda dan pelatihan keterampilan yang lebih fokus pada pengembangan usaha mandiri. Lonjakan tajam pada tahun 2021 (10,30%) dapat disebabkan oleh perubahan cara penghitungan indikator yang lebih luas, serta meningkatnya minat pemuda untuk berpartisipasi dalam sektor ekonomi mandiri pasca-pandemi. Kemudian indikator kedua, tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan, terjadi lonjakan yang sangat besar pada tahun 2021 (167,45%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (0,15%). Lonjakan ini bisa jadi disebabkan oleh perubahan cara penghitungan yang mencakup lebih banyak jenis organisasi yang sebelumnya tidak terhitung. Setelah 2021, angka ini kembali menurun secara signifikan, mencerminkan kemungkinan ketidakstabilan atau perubahan dalam program atau kebijakan yang memengaruhi keterlibatan pemuda dalam organisasi sosial dan kemasyarakatan.

Untuk indikator ketiga, peningkatan prestasi olahraga, terjadi fluktuasi yang cukup tajam. Capaian pada tahun 2020 adalah 27, yang meningkat menjadi 102 pada tahun 2021, namun mengalami penurunan tajam pada tahun 2023 (1) sebelum kembali meningkat menjadi 13 pada tahun 2024. Penurunan yang tajam pada tahun 2023 kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu aktivitas olahraga, sementara peningkatan pada tahun 2024 menunjukkan upaya pemulihan dan peningkatan prestasi olahraga, meskipun tidak sebesar tahun 2021. Capaian kinerja bidang kepemudaan dan olahraga menunjukkan adanya fluktuasi yang

dipengaruhi oleh kebijakan, perubahan cara penghitungan indikator, serta dampak pandemi.

n. Statistik

Berdasarkan data capaian indikator kinerja kunci bidang statistik Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2020-2024, terlihat fluktuasi pada dua indikator utama yang mencerminkan penggunaan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Pada indikator pertama, yaitu persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, tercatat 100% pada tahun 2020 dan 2021. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan signifikan menjadi 29,63%, meskipun angka ini kembali meningkat pada 2023 menjadi 89,29% dan sedikit menurun lagi pada 2024 menjadi 48,08%. Penurunan pada 2022 kemungkinan disebabkan oleh perubahan dalam cara penghitungan indikator atau kendala dalam implementasi penggunaan data statistik di OPD. Meskipun ada pemulihan pada 2023, penurunan pada 2024 menunjukkan adanya fluktuasi dalam konsistensi penggunaan data statistik dalam perencanaan, yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal di masing-masing OPD.

Pada indikator kedua, yakni persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah, tercatat 100% pada tahun 2020 dan 2021. Angka ini kemudian turun menjadi 46,27% pada tahun 2022 dan kembali meningkat menjadi 89,29% pada tahun 2023, dengan penurunan kecil menjadi 48,08% pada tahun 2024. Penurunan pada tahun 2022 kemungkinan terkait dengan perubahan cara penghitungan atau ketidaksesuaian dalam implementasi evaluasi berbasis data statistik di OPD. Meski demikian, peningkatan yang terjadi pada 2023 menunjukkan bahwa penggunaan data statistik dalam evaluasi mulai mendapatkan perhatian yang lebih besar, meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2024. Capaian kinerja bidang statistik menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh perubahan cara

penghitungan indikator dan tantangan dalam penerapan penggunaan data statistik di tingkat OPD.

o. Persandian

Capaian indikator kinerja kunci bidang persandian Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2020-2024 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2020-2021, nilai indikator berada pada angka 0, mencerminkan kurangnya upaya pengelolaan persandian. Pada tahun 2022, terjadi lonjakan ke angka 8,75, kemungkinan karena perubahan metode penghitungan atau kebijakan baru. Pencapaian meningkat tajam lagi pada 2023 menjadi 65,58, menunjukkan upaya yang lebih serius dalam pengelolaan keamanan informasi. Namun, pada 2024, capaian menurun menjadi 52,56, meskipun tetap lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Fluktuasi ini menunjukkan perlunya perhatian untuk mempertahankan konsistensi capaian di masa depan.

p. Kebudayaan

Capaian indikator kinerja kunci bidang kebudayaan Pemerintah Kabupaten Probolinggo menunjukkan fluktuasi signifikan. Pada 2020, capaian indikator sebesar 28 mencerminkan upaya pelestarian cagar budaya yang belum maksimal. Penurunan tajam pada 2021 menjadi 7,14 mungkin disebabkan oleh perubahan cara penghitungan atau faktor eksternal seperti pandemi. Namun, sejak 2022 hingga 2024, capaian mencapai 100, menunjukkan keberhasilan dalam pelestarian cagar budaya, yang kemungkinan besar dipicu oleh kebijakan baru atau inisiatif pelestarian yang lebih intensif. Meskipun ada penurunan pada 2021, capaian menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pelestarian cagar budaya. Persentase Obyek Kebudayaan yang dilestarikan juga mengalami tren peningkatan, hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran dan upaya pelestarian warisan budaya, yang dapat diartikan sebagai keberhasilan program pelestarian, dukungan masyarakat yang lebih besar, dan potensi untuk mempertahankan identitas budaya.

Pembangunan kebudayaan di daerah mengacu pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). PPKD merupakan landasan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan upaya

pemajuan kebudayaan, seperti pelestarian bahasa daerah, adat istiadat, dan objek pemajuan kebudayaan lainnya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Namun, Nilai Pemantauan dan Evaluasi PPKD Kabupaten Probolinggo sampai dengan tahun 2024 sebagaimana Laporan Pemantauan dan Evaluasi PPKD Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2024 masih 0 (nilai E) disebabkan adanya kendala pengumpulan data / borang.

Kabupaten Probolinggo, sebagai salah satu daerah di Jawa Timur, memiliki kekayaan cagar budaya yang mencakup situs-situs bersejarah seperti Candi Jabung, masjid kuno (misalnya Masjid Genggong dan Masjid Nurul Jadid), gereja tua (seperti GKJW Kraksaan), pura (Pura Luhur Poten untuk ritual Yadnya Kasada), dan bangunan peninggalan Belanda seperti Gedung Pegadaian Kraksaan dan Pabrik Gula Wonolangan. Situs-situs ini tidak hanya penting untuk sejarah, tetapi juga untuk pariwisata budaya dan identitas lokal. Berdasarkan informasi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo 2025-2045, pelestarian cagar budaya merupakan bagian integral dari pembangunan daerah, dengan fokus pada pengembangan pariwisata, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

q. Perpustakaan

Capaian indikator kinerja kunci bidang perpustakaan Pemerintah Kabupaten Probolinggo menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak 2021. Pada 2020, nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat sangat rendah (0,72), namun melonjak pada 2021 menjadi 53,49, yang kemungkinan disebabkan oleh perubahan cara penghitungan atau kebijakan baru. Peningkatan berlanjut hingga 57,14 pada 2024, mencerminkan keberhasilan dalam meningkatkan minat baca masyarakat.

Indikator indeks pembangunan literasi masyarakat terlihat berbanding terbalik dengan nilai capaian tingkat kegemaran membaca masyarakat yang mengalami trend meningkat selama 5 tahun. Meskipun kegemaran membaca masyarakat meningkat, akan tetapi nilai indeks pembangunan literasi terus menurun dari tahun 2020

sebesar 0, kemudian meningkat pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 10,67 dan 59,98 dan terus menurun pada 2023 sebesar 12,67 berlanjut sampai tahun 2024 menjadi 12,24. Namun jika dilihat dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020 sampai dengan 2024 nilai indeks pembangunan literasi mengalami peningkatan, ini menunjukkan kemajuan dalam program literasi, meskipun ada fluktuasi. Capaian ini menunjukkan kemajuan dalam pembangunan literasi dan minat baca masyarakat yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan di masa depan.

r. Kearsipan

Capaian indikator kinerja kunci bidang kearsipan Pemerintah Kabupaten Probolinggo menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada 2020, tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja hanya 1.225, namun meningkat drastis hingga 100 pada 2023 dan 2024, kemungkinan karena perubahan cara penghitungan atau kebijakan baru. Sementara itu, untuk tingkat keberadaan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban, angka pada 2020 dan tahun 2021 mencapai 128,83 namun turun tajam pada 2022 menjadi 4, sebelum meningkat kembali pada 2023 dan 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan, meskipun konsistensi capaian perlu terus diperhatikan.

2.1.4.4.3 Urusan Pemerintah Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan data yang ada, kinerja sektor perikanan menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode 2020-2024. Meskipun ada capaian positif di awal, tahun-tahun berikutnya menghadapi tantangan signifikan yang memaksa penyesuaian target. Pada tahun 2020, sektor perikanan menunjukkan kinerja yang kuat. Target produksi sebesar 39.095 ton berhasil dilampaui dengan realisasi mencapai 39.164,35 ton. Ini menandakan bahwa produktivitas sektor perikanan masih stabil dan mampu memenuhi bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Namun, momentum positif tersebut mulai melambat. Pada tahun 2021, meskipun produksi meningkat menjadi 41.234,31 ton, angka ini tidak mencapai target 42.584,94 ton. Tren serupa berlanjut pada tahun 2022 dan 2023, di mana persentase pertumbuhan produksi tidak mencapai target 7%. Realisasinya hanya 5,8% pada tahun 2022 dan 6,07% pada tahun 2023. Capaian ini menunjukkan pertumbuhan yang belum optimal, meski masih ada tren peningkatan.

Puncak dari tantangan ini terlihat pada tahun 2024. Target pertumbuhan diturunkan drastis menjadi hanya 2%, dengan realisasi yang jauh lebih rendah lagi, yaitu 0,74%. Penurunan target ini bukanlah tanda kegagalan, melainkan bentuk penyesuaian yang realistis terhadap kondisi lapangan yang penuh tantangan.

Tambak intensif yang menjadi tulang punggung produksi budidaya, menyumbang 85-90% dari total produksi, mengalami masalah serius. Penurunan produktivitas yang semakin parah disebabkan oleh degradasi lingkungan, serangan penyakit, dan keterbatasan teknologi. Karena kontribusi tambak intensif yang sangat besar, masalah ini langsung berdampak signifikan pada total produksi perikanan.

Di sub sektor perikanan tangkap, faktor iklim, seperti fenomena El Niño dan kemarau panjang, menjadi penyebab utama. Kondisi ini sangat mempengaruhi hasil tangkapan di laut, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas nelayan. Meskipun produksi tetap meningkat, laju pertumbuhannya melambat dan tidak bisa lagi disamakan dengan tahun-tahun sebelumnya.

b. Pariwisata

Berdasarkan data capaian indikator kinerja kunci bidang pariwisata Kabupaten Probolinggo 2020-2024, terlihat adanya penurunan tajam di tahun 2020 dan 2021 akibat dampak pandemi COVID-19, terutama pada jumlah wisatawan dan tingkat hunian akomodasi. Penurunan ini seiring dengan pembatasan perjalanan yang berdampak langsung pada sektor pariwisata.

Pada 2022, terjadi pemulihan yang lebih baik, seiring dengan mulai longgarnya pembatasan dan upaya pemerintah untuk menggeliatkan kembali sektor ini. Lonjakan tajam pada indikator tertentu, seperti tingkat hunian akomodasi pada 2023, kemungkinan

disebabkan oleh perubahan dalam cara penghitungan indikator atau faktor eksternal lainnya. Meskipun begitu, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dan PAD masih menunjukkan pemulihan yang lambat. Pemulihan sektor pariwisata di Kabupaten Probolinggo masih rapuh dan rentan terhadap berbagai faktor eksternal. Perlu ada upaya yang lebih intensif untuk mempercepat pemulihan sektor pariwisata, dengan fokus pada perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan, serta pengembangan potensi lokal yang dapat mendukung pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan.

Capaian pengeluaran wisatawan Kabupaten Probolinggo pada periode 2022 hingga 2024 menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan. Pada tahun 2022, target pengeluaran wisatawan ditetapkan sebesar Rp16,37 miliar, namun realisasi yang tercapai mencapai Rp31,67 miliar. Pencapaian lebih dari 190 persen ini menjadi penanda penting kebangkitan sektor pariwisata setelah terdampak pandemi, sekaligus menegaskan adanya peningkatan minat kunjungan wisatawan.

Memasuki tahun 2023, target pengeluaran wisatawan meningkat menjadi Rp18,37 miliar. Namun, realisasi justru melampaui ekspektasi dengan capaian Rp102,87 miliar atau lebih dari 560 persen dari target. Lonjakan yang sangat signifikan ini tidak terlepas dari keberhasilan strategi promosi destinasi wisata unggulan Kabupaten Probolinggo, khususnya daya tarik wisata Bromo dan wisata bahari yang semakin dikenal luas oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.

Pada tahun 2024, target pengeluaran wisatawan kembali ditetapkan lebih tinggi yaitu Rp104,93 miliar. Realisasi yang diperoleh mencapai Rp119,39 miliar atau sekitar 114 persen dari target. Meskipun persentase capaian relatif tidak setinggi pada tahun sebelumnya, namun hasil ini menandakan konsistensi pertumbuhan pariwisata sekaligus memperlihatkan proses konsolidasi menuju pengelolaan pariwisata yang lebih berkelanjutan.

Dengan demikian, capaian pengeluaran wisatawan selama tiga tahun terakhir tidak hanya menunjukkan pemulihan, melainkan juga pertumbuhan pesat sektor pariwisata Kabupaten Probolinggo. Perkembangan ini mengukuhkan posisi Kabupaten Probolinggo

sebagai salah satu destinasi wisata utama di Jawa Timur dengan potensi daya tarik yang terus berkembang.

Tabel 2. 35 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Lama Tinggal Wisatawan*	Hari			-	-	-
Pengeluaran Wisatawan**	Miliar	-	-	31,67	102,87	119,39
* Indikator kinerja urusan pariwisata pada tahun 2020 sampai dengan 2021 menggunakan lama tinggal wisatawan						
**Indikator kinerja urusan pariwisata pada tahun 2022 sampai dengan 2024 menggunakan pengeluaran wisatawan						

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo, 2025

c. Pertanian

Capaian indikator kinerja kunci bidang urusan pertanian Kabupaten Probolinggo tahun 2020-2024, menunjukkan beberapa tren yang mencerminkan dinamika sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Probolinggo. Pertama, terkait dengan produktivitas pertanian per hektar, terjadi fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, produktivitas mencapai angka 544, namun mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 525,69. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh kondisi cuaca yang kurang mendukung atau tantangan dalam penerapan teknologi pertanian. Pada tahun 2022, terjadi sedikit peningkatan menjadi 549,93, tetapi pada tahun 2023 terjadi penurunan tajam ke angka 55,51, yang bisa jadi disebabkan oleh perubahan cara penghitungan indikator atau faktor eksternal lainnya, seperti bencana alam atau gangguan besar yang mempengaruhi sektor pertanian. Meskipun ada pemulihan pada tahun 2024 dengan angka 540,90, tetapi produktivitas pertanian

masih belum kembali ke tingkat optimal yang tercatat pada 2020. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi cuaca, teknis, maupun sumber daya yang ada.

Kedua, Pada tahun 2020-2021, kondisi kesehatan ternak di Kabupaten Probolinggo relatif stabil. Tidak ditemukan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak. Situasi ini menunjukkan bahwa program kesehatan hewan dan biosekuriti yang diterapkan saat itu cukup efektif dalam menjaga populasi ternak dari ancaman penyakit menular. Peternak dapat beraktivitas secara normal dengan tingkat produktivitas yang baik karena tidak ada gangguan kesehatan hewan yang signifikan.

Memasuki tahun 2022, terjadi lonjakan kasus PMK yang sangat tinggi. Wabah ini sejalan dengan fenomena nasional di mana PMK kembali merebak di berbagai daerah Indonesia setelah sempat dinyatakan bebas selama bertahun-tahun. Kabupaten Probolinggo termasuk wilayah yang terdampak, dengan ribuan hewan ternak, khususnya sapi, terkena gejala PMK berupa lepuh pada mulut, air liur berlebihan, dan luka pada kuku. Kondisi ini berdampak pada penurunan produksi susu, penurunan bobot ternak, serta terganggunya aktivitas jual-beli ternak. Pemerintah daerah pun melakukan berbagai langkah darurat seperti pembatasan lalu lintas ternak, vaksinasi massal, serta penyemprotan desinfektan di kandang-kandang.

Tahun 2023, upaya pengendalian mulai menunjukkan hasil. Jumlah kasus PMK menurun secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi berkat program vaksinasi yang lebih luas, peningkatan kesadaran peternak terhadap biosekuriti, serta kerja sama lintas sektor dalam memutus rantai penularan. Meski masih ada laporan kasus di beberapa kecamatan, skalanya jauh lebih rendah dibandingkan puncak wabah 2022. Kondisi ini menandakan adanya pemulihan kesehatan ternak dan kembalinya kepercayaan peternak dalam memelihara sapi dan kambing.

Namun pada tahun 2024, muncul tantangan baru. Selain masih terdapat kasus PMK, ditemukan juga kasus penyakit cacing (helminthiasis) pada hewan ternak. Penyakit cacing menjadi masalah karena menurunkan daya tahan tubuh ternak, mengurangi efisiensi pakan, serta menurunkan produktivitas daging maupun susu. Kombinasi antara PMK dan penyakit cacing ini membuat beban kesehatan hewan semakin berat dan berpotensi mengurangi keuntungan ekonomi peternak. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengendalian yang lebih terpadu, tidak hanya fokus pada PMK tetapi juga pada penyakit parasit. Program pengobatan massal cacing, peningkatan sanitasi kandang, serta penyuluhan kepada peternak menjadi langkah penting untuk mencegah kerugian lebih besar di tahun-tahun mendatang terkait dengan persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular, data menunjukkan fluktuasi yang cukup mencolok.

Penurunan produktivitas pertanian dan fluktuasi tajam pada indikator penyakit hewan menular mencerminkan adanya tantangan besar yang harus dihadapi oleh sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Probolinggo. Diperlukan upaya yang lebih serius untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui teknologi yang lebih baik, pengelolaan sumber daya yang lebih efisien, serta penguatan sistem pemantauan dan pencegahan penyakit hewan.

d. Perdagangan

Data capaian indikator kinerja kunci bidang urusan perdagangan di Kabupaten Probolinggo untuk tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan beberapa tren yang dapat dianalisis terkait dengan dinamika sektor perdagangan di daerah ini.

Pada persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan, angka ini stabil pada 100% untuk tahun 2020 dan 2021, menunjukkan bahwa pelaku usaha di Kabupaten Probolinggo umumnya mematuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan signifikan menjadi 71,39%, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti penurunan aktivitas ekonomi atau perubahan kebijakan perizinan yang lebih ketat. Meskipun demikian, angka ini kembali pulih pada tahun 2023

dan 2024, masing-masing mencapai 100%, yang menunjukkan adanya pemulihan atau penyempurnaan dalam sistem perizinan yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Terkait dengan persentase kinerja realisasi pupuk, pada tahun 2020 tercatat 30,27%, dan menurun menjadi 18,72% pada tahun 2021. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh tantangan dalam distribusi atau keterbatasan pasokan pupuk yang mempengaruhi sektor pertanian. Namun, pada tahun 2022, kinerja ini meningkat tajam menjadi 41,25%, dan pada tahun 2023, mencapai 87,14%, menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam distribusi dan pemenuhan kebutuhan pupuk. Meski begitu, pada tahun 2024, angka ini sedikit menurun menjadi 74,81%, yang menunjukkan adanya fluktuasi dalam distribusi yang perlu diwaspadai.

Pada indikator persentase alat ukur, takaran, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku, tercatat 92,76% pada tahun 2020 dan 88,39% pada tahun 2021, menunjukkan bahwa mayoritas alat ukur di pasar mematuhi peraturan tera sah. Namun, terjadi penurunan yang lebih signifikan pada tahun 2022 menjadi 82,64%, dan terus menurun pada tahun 2023 menjadi 67,48%. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh kendala dalam proses tera ulang atau pengawasan yang tidak optimal terhadap alat ukur di pasar. Pada tahun 2024, angka ini terus naik menjadi 70,63%, yang menjadi perhatian besar, karena dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap perdagangan yang adil dan transparansi transaksi.

Sektor perdagangan di Kabupaten Probolinggo menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif selama periode 2020 hingga 2024. Meskipun ada pemulihan di beberapa indikator, seperti pada pelaku usaha yang memperoleh izin dan distribusi pupuk, penurunan yang signifikan pada indikator kepatuhan terhadap UTTP perlu mendapatkan perhatian khusus. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan, perbaikan proses perizinan, serta peningkatan efisiensi distribusi untuk memastikan sektor perdagangan yang lebih stabil dan transparan ke depannya.

e. Perindustrian

Data capaian indikator kinerja kunci bidang urusan perindustrian Kabupaten Probolinggo tahun 2020-2024 menunjukkan fluktuasi yang signifikan pada beberapa indikator. Pada pertambahan jumlah industri kecil dan menengah, terdapat lonjakan tajam pada tahun 2023 (528,43%), yang kemungkinan besar disebabkan oleh perubahan cara penghitungan indikator atau kebijakan yang mendorong pertumbuhan industri kecil. Namun, penurunan tajam di tahun 2024 (50,55%) menunjukkan ketidakstabilan sektor ini.

Pencapaian sasaran pembangunan industri tercatat 0% pada tahun 2020-2022, yang menunjukkan bahwa sasaran tersebut belum tercapai atau terukur dengan baik. Namun, naik mencapai angka 55,81% pada tahun 2023 mengindikasikan adanya perbaikan. Indikator lainnya terkait dengan pemantauan dan pengawasan izin usaha industri kecil dan menengah serta izin perluasan kawasan industri tidak tercapai sepanjang periode ini, yang mengindikasikan adanya kekurangan dalam sistem pengawasan dan administrasi yang perlu diperbaiki.

Tersedianya informasi industri mengalami peningkatan signifikan dari 0% pada 2020 hingga 100% pada 2024, yang menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam menyediakan data yang lebih lengkap dan terkini untuk pengembangan sektor industri. Sektor perindustrian di Kabupaten Probolinggo menghadapi tantangan dalam pengawasan izin usaha dan kestabilan industri kecil. Diperlukan upaya yang fokus pada penguatan sistem pengawasan izin, penyediaan dukungan yang berkelanjutan untuk industri kecil, dan perbaikan infrastruktur serta sumber daya manusia untuk mendukung sektor industri yang lebih stabil dan berkembang.

2.1.4.4.4 Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan dan Keuangan

Berdasarkan data capaian indikator kinerja kunci bidang urusan perencanaan dan keuangan Kabupaten Probolinggo tahun 2020-2024, terdapat beberapa tren yang mencerminkan dinamika perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Rasio belanja pegawai menunjukkan fluktuasi yang signifikan, dengan penurunan

drastis pada tahun 2024 (9,81%) setelah sempat naik pada tahun 2022 (25,76%). Penurunan ini mungkin mencerminkan upaya efisiensi belanja pegawai, namun perlu dicermati agar tidak mengurangi kualitas layanan publik. Rasio PAD terus meningkat dari 921.183 pada 2020 menjadi 1.253.51 pada 2021, dengan angka yang relatif stabil pada tahun 2024 (14,22%). Peningkatan ini menunjukkan upaya yang baik dalam menggali potensi pendapatan daerah, meskipun perlu terus dijaga konsistensinya. Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah tetap stabil di angka 3 selama lima tahun, menunjukkan penguatan pengendalian yang cukup baik, namun perlu ada peningkatan untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi.

Peningkatan kapabilitas pengawasan tidak menunjukkan perubahan signifikan, tetap berada di angka 2 sepanjang periode. Ini mengindikasikan bahwa masih diperlukan peningkatan kapasitas aparat pengawasan. Rasio belanja urusan pemerintahan umum mengalami peningkatan tajam pada tahun 2024 (81,71%), yang kemungkinan disebabkan oleh Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya dan Kebutuhan Infrastruktur, kebijakan infrastruktur, dan pemulihan ekonomi pasca *covid-19*, namun penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa peningkatan belanja tersebut dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan tantangan anggaran di masa depan. Opini laporan keuangan menunjukkan perbaikan yang signifikan, dengan nilai meningkat dari 2 menjadi 11, mencerminkan perbaikan kualitas laporan keuangan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Probolinggo perlu melanjutkan upaya efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan, memperkuat kapasitas pengawasan, dan menjaga stabilitas peningkatan PAD untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

b. Pengadaan

Capaian indikator kinerja kunci bidang urusan pengadaan di Kabupaten Probolinggo tahun 2020-2024 menunjukkan beberapa tren penting yang menggambarkan dinamika sektor pengadaan. Pada persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun

berikutnya, tercatat penurunan signifikan sejak 2021 hingga 2024, yang menunjukkan efisiensi dalam penyelesaian proyek atau perubahan perhitungan indikator. Pengadaan dengan metode kompetitif meningkat drastis dari 5,98% pada 2020 menjadi 90,80% pada 2024, mencerminkan langkah positif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa, meskipun lonjakan ini perlu dianalisis lebih lanjut terkait konsistensi pengukurannya.

Rasio belanja melalui pengadaan fluktuatif, dengan angka tertinggi di 2022 (41,03%) yang kemudian menurun di tahun 2023 dan 2024. Fluktuasi ini menunjukkan ketergantungan yang besar pada pengadaan dalam pengelolaan anggaran, yang harus dikelola lebih efisien. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan UMKM mengalami lonjakan tajam pada 2022 (54,21%), namun menurun pada 2024 (19,41%), yang menunjukkan adanya perubahan kebijakan atau faktor eksternal yang perlu ditinjau agar tetap mendukung ekonomi lokal. Capaian kinerja urusan pengadaan di Kabupaten Probolinggo menunjukkan perbaikan dalam transparansi dan efisiensi, meskipun fluktuasi perlu dicermati untuk memastikan pengelolaan yang lebih stabil dan berkelanjutan ke depan.

c. Kepegawaian

Berdasarkan data capaian indikator kinerja kunci bidang urusan kepegawaian Kabupaten Probolinggo tahun 2020-2024, terdapat beberapa tren signifikan dalam kualitas kepegawaian. Pada rasio pegawai dengan pendidikan tinggi, terjadi lonjakan tajam pada 2021 (226,26%), yang kemungkinan dipengaruhi oleh perubahan penghitungan indikator atau kebijakan peningkatan pendidikan pegawai. Namun, angka ini menurun pada tahun-tahun berikutnya, mencerminkan penyesuaian kebijakan atau efisiensi kepegawaian. Rasio pegawai fungsional terus meningkat secara stabil dari 3,22% pada 2020 menjadi 29,97% pada 2024, menunjukkan upaya memperkuat profesionalisme pegawai dengan keahlian khusus. Namun, rasio pegawai bersertifikat kompetensi mengalami penurunan signifikan, dari 55,55% pada 2020 menjadi 19,68% pada 2024. Penurunan ini mengindikasikan tantangan dalam memastikan

pegawai memiliki sertifikasi kompetensi yang sesuai. Peningkatan jumlah pegawai fungsional menunjukkan kemajuan, tetapi penurunan sertifikasi kompetensi perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme pegawai di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo.

d. Manajemen Keuangan

Data capaian kinerja indikator manajemen keuangan Kabupaten Probolinggo tahun 2020-2024 menunjukkan fluktuasi signifikan dalam pengelolaan anggaran dan penerimaan daerah. Deviasi realisasi belanja menunjukkan lonjakan tajam pada 2022 (223,49%) setelah penurunan pada 2021 (19,52%). Penurunan pada 2023 dan 2024 menunjukkan adanya stabilisasi, meskipun fluktuasi besar pada 2022 perlu dievaluasi. Deviasi realisasi PAD menurun tajam dari 102,71% pada 2020 menjadi 3,76% pada 2024, menunjukkan kesulitan dalam mencapai target penerimaan daerah, yang perlu perhatian lebih dalam meningkatkan penerimaan PAD. Manajemen aset terpantau baik dengan status "Ada" tiap tahun, menunjukkan pengelolaan yang memadai, namun perlu lebih ditingkatkan. Rasio anggaran sisa mengalami penurunan, menunjukkan perbaikan dalam penggunaan anggaran yang lebih efisien di tahun 2023 dan 2024. Pengelolaan keuangan menunjukkan perbaikan, namun fluktuasi yang terjadi perlu diantisipasi agar lebih stabil dan efisien di masa depan.

e. Transparansi dan Partisipasi Publik

Capaian indikator kinerja kunci bidang transparansi dan partisipasi publik Kabupaten Probolinggo tahun 2020-2024 menunjukkan beberapa fluktuasi dalam transparansi informasi. Pada informasi sumber daya untuk pelayanan, angka sedikit menurun dari 92,49% pada 2020 menjadi 86,95% pada 2021, namun kembali meningkat hingga 2023 (92,01%). Penurunan ini mungkin disebabkan oleh perubahan cara penghitungan indikator atau kebijakan yang memengaruhi akses informasi. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah menunjukkan penurunan tajam pada 2021 menjadi 0, kemudian meningkat secara signifikan pada 2022 menjadi 72,72%, dan tetap tinggi di 2023 (72,73%). Penurunan pada 2024 menjadi

66,67% mungkin mencerminkan beberapa pembatasan dalam akses informasi, namun perbaikan signifikan pada 2022 dan 2023 mencerminkan langkah positif dalam meningkatkan transparansi fiskal. Terdapat perbaikan dalam transparansi informasi sumber daya dan keuangan daerah, meskipun perlu ada upaya berkelanjutan untuk memastikan akses informasi yang konsisten dan transparan untuk masyarakat.

2.1.5 Kerja Sama Daerah

Kerja sama daerah adalah bentuk kolaborasi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah daerah lain, instansi vertikal, lembaga swasta, maupun masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Kerja sama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa daerah memiliki hak dan kewajiban untuk bekerja sama dalam mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Bagi pemerintah kabupaten, kerja sama daerah sangat penting untuk: Mengatasi Keterbatasan Sumber Daya khususnya pendanaan, Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Layanan Publik agar terjadi keselarasan (kolaboratif) antar instansi, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Wilayah untuk mengembangkan rantai pasok sektor-sektor unggulan, Memperkuat Ketahanan Wilayah khususnya dalam penanggulangan bencana, dan Mendukung Inovasi dan Transformasi Digital khususnya dalam transfer teknologi. Kerja sama daerah di Kabupaten Probolinggo didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Mengatur tentang kewenangan daerah dalam melakukan kerja sama dengan daerah lain dan/atau pihak lain.

Kerja sama daerah di Kabupaten Probolinggo dalam lima tahun ke depan diperlukan setidaknya untuk mengembangkan sektor unggulan seperti tanaman pangan, pengembangan kawasan agroindustri berbasis komoditas unggulan sektor pertanian, seperti mangga di Kecamatan Tongas, sapi potong di Kecamatan Kraksaan, dan perikanan laut di Kecamatan Paiton, Sektor industri pengolahan menyumbang 25,75% terhadap PDRB Kabupaten Probolinggo.

Pengembangan Obyek wisata seperti Gunung Bromo, Air Terjun Madakaripura, dan Pantai Bentar agar dapat dikembangkan secara lebih optimal melalui kerja sama daerah. Serta pembenahan Infrastruktur dan Konektivitas di mana Indeks Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Probolinggo pada tahun 2022 mencapai 45,56, menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan untuk peningkatan infrastruktur, terutama di bidang jalan penghubung antar kecamatan/desa, sanitasi, irigasi, dan fasilitas publik lainnya.

Terkait dengan kebutuhan peningkatan kualitas infrastruktur jalan Kabupaten Probolinggo memiliki total panjang jalan sekitar 905,813 km. Dari jumlah tersebut, 649,40 km (71,69%) dalam kondisi mantap, sementara 256,41 km (28,31%) dalam kondisi tidak mantap atau rusak. Untuk kerusakan berat: Terdapat 226,93 km jalan yang mengalami kerusakan berat, dengan 28,96 km dalam kondisi rusak sedang. Dengan masih besarnya permasalahan infrastruktur ini maka perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Probolinggo memerlukan pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan sektor swasta termasuk bank pembangunan daerah (BPD). Kerja sama antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam pembangunan infrastruktur memiliki legitimasi hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia, terutama melalui peraturan berikut:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: dalam Pasal 374 dan 391 mengatur bahwa pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga (termasuk lembaga keuangan milik daerah) untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dalam bentuk Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPBU).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: dalam Pasal 48 memberikan ruang bagi pemda untuk mengelola pembiayaan melalui pinjaman, termasuk dari BPD, sepanjang memenuhi prinsip kehati-hatian dan transparansi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: dalam Pasal 178-188 mengatur mekanisme pinjaman daerah, termasuk pinjaman dari

bank/lembaga keuangan yang salah satunya bisa berasal dari BPD.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020: Merinci tentang tata kelola pinjaman daerah untuk pembangunan infrastruktur, termasuk syarat administratif, teknis, dan yuridis yang harus dipenuhi.

2.1.6 Rencana Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Probolinggo

Rencana pembangunan infrastruktur di Kabupaten Probolinggo untuk periode 2025–2029 mencakup proyek strategis yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, kualitas hidup masyarakat, dan mitigasi bencana. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran dan koordinasi antar-pemangku kepentingan perlu diatasi melalui strategi yang tepat agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Terkait infrastruktur jalan, berdasarkan dokumen Rencana Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas di Kabupaten Probolinggo sebagai landasan dalam penetapan infrastruktur prioritas Kabupaten Probolinggo yang akan dilaksanakan Tahun 2024-2026 dinyatakan bahwa hasil Analisa Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo paket alokasi pembiayaan untuk pekerjaan Pemeliharaan berkala hotmix sebesar Rp 160.000,00 per M2 menggunakan standar harga yang digunakan berdasarkan HSPK Kabupaten Probolinggo Tahun 2022. Total alokasi kerangka anggaran pembangunan untuk kegiatan Penyelenggaraan Jalan dalam kewenangan kabupaten/kota di Kabupaten Probolinggo Tahun 2024–2026 sebesar Rp 410.416.280.472,99 dengan pendistribusian tiap tahun (rata-rata) sebesar ± Rp136.805.426.824,33 dengan target pembangunan tercapai 75 persen tiap tahunnya.

Ruas panjang jalan menurut fungsinya di Kabupaten Probolinggo merupakan elemen penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan SK Gubernur Nomor 188/207/KPTS/013/2023 tentang Penetapan ruas-ruas Jalan Menurut Fungsinya, ruas jalan di Kabupaten Probolinggo dibagi

menjadi beberapa kategori, yaitu fungsi sistem primer dan fungsi sistem sekunder. Berdasarkan data yang ada, total panjang ruas jalan di Kabupaten Probolinggo menurut fungsinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 36 Panjang Ruas – Ruas Jalan Kabupaten Probolinggo Menurut Fungsinya

JUMLAH				SISTEM PRIMER					SISTEM SEKUNDER			
RUAS		PANJANG (KM)		PANJANG (KM)					PANJANG (KM)			
PROV.	KAB/KOTA	PROV.	KAB/KOTA	JKP. 2	JKP. 3	JKP.4	JLP	J.Ling. P	JAS	JKS	JLS	J.Ling.S
1	432	19,25	1.160,84	-	19,25	337,326	759,027	6,237	-	4,853	51,665	1,736

Sumber : SK Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/201/013/2025

Total panjang ruas jalan di Kabupaten Probolinggo mencapai 1.160,84 kilometer. Dengan adanya pembagian ruas jalan sesuai dengan fungsinya, diharapkan dapat tercipta sistem transportasi yang efisien dan terintegrasi. Hal ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan aksesibilitas, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sedangkan panjang ruas jalan menurut kondisi jalan Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 37 Tingkat Kewenangan dan Kondisi Jalan Kabupaten Probolinggo Tahun 2021-2023

URAIAN		SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
(1)		(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Kondisi Jalan Kabupaten						
	Persentase Jalan Mantap	%	80,84	79,38	83,58	79.556,23	71,75
	Baik	Km	497,724	471,550	484,636	264,152	558,801
	Sedang	Km	137,505	152,250	172,187	343,530	91,122
	Rusak Ringan	Km	47,999	155,166	106,603	85,787	28,960
	Rusak Berat	Km	102,591	6,853	22,393	92,350	226,930
Jumlah		Km	785,819	785,819	785,819	785,819	905,813

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo, 2025

Jika dilihat dari kondisi infrastruktur jalan di seluruh kecamatan, menunjukkan bahwa pembangunan jalan di Kabupaten Probolinggo belum dilakukan secara maksimal dan merata. Ini dibuktikan dari data Tabel di atas bahwa masih terdapat 226,93 km jalan dalam kondisi rusak berat. Dinas PUPR (Probolinggo dalam angka 2024 hal. 324) yang menyebutkan bahwa 6 kecamatan dengan jumlah jalan kondisi sangat rusak terparah yaitu 1) Banyuwangi (17,88 km); 2) Krucil (17,15 km); 3) Tiris (13,66 km); 4) Sukapura (9,20 km); 5) Tongas (7,93 km); 6) Tegalsiwalan (5,10 km), tidak sebanding dengan kondisi jalan di Kecamatan lainnya. Dengan demikian dapat

dilakukan pekerjaan pemeliharaan jaringan jalan berkala *hotmix* di Kabupaten Probolinggo diprioritaskan di Kecamatan Krucil dan Kecamatan Tiris pada Ruas Manggis-Tiris dengan panjang 102.788.611 m^2 di Tahun 2024, Ruas Manggis-Krucil dengan panjang 28.520.652,68 m^2 di Kecamatan Krucil di Tahun 2025, dan di Kecamatan Gading pada Ruas Condong – Manggis dengan panjang 97.224.125,34 m^2 di Tahun 2026. Ke tiga kecamatan tersebut menjadi prioritas percepatan penyediaan infrastruktur jaringan jalan pada Tahun 2024 – 2026. Tentu saja untuk perencanaan ke depan perlu dilakukan pemutakhiran terkait dengan kondisi jalan dan kebutuhan pembiayaan.

Tantangan yang dihadapi ke depan adalah Keterbatasan Anggaran: Sebagian besar proyek infrastruktur memerlukan dana yang besar, sementara anggaran daerah terbatas. Selain itu, koordinasi Antar-Pemangku Kepentingan mencakup sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, pusat, dan masyarakat untuk mewujudkan proyek-proyek tersebut. Sehingga strategi yang dapat ditempuh adalah Pendanaan Alternatif: pertama, mencari sumber pendanaan dari pemerintah pusat, provinsi, dan sektor swasta melalui skema kerja sama. Kedua meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek untuk memastikan keberlanjutan dan keberterimaan. Dan ketiga adalah monitoring dan evaluasi untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk menjawab tantangan konektivitas dan mobilitas, Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah merumuskan dan mengusulkan beberapa inisiatif strategis di bidang transportasi, antara lain:

Jalan Lingkar Utara

Transportasi merupakan salah satu aspek yang berperan penting bagi manusia dalam menunjang aktivitas sehari-hari terutama kegiatan sosial-ekonomi. Pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor di Kabupaten Probolinggo terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut dapat menimbulkan permasalahan terhadap jalan-jalan di Kabupaten Probolinggo. Permasalahan tersebut antara lain

kemacetan, kecelakaan, penurunan tingkat keselamatan dan kerusakan jalan serta permasalahan lainnya.

Sebagaimana halnya kota-kota yang dilalui oleh jalan arteri jalan primer, Kota Kraksaan dilalui oleh jalan arteri primer yang menghubungkan Surabaya – Banyuwangi mengalami beberapa kendala yang identik yaitu meningkatnya arus lalu lintas yang melalui kota tersebut. Peningkatan volume lalu lintas yang terjadi tidak hanya terkait dengan pertumbuhan kota itu sendiri, namun juga terkait dengan pertumbuhan kota-kota yang dihubungkan oleh jalan arteri primer itu sendiri. Selain peningkatan volume lalu lintas, masalah transportasi yang banyak dihadapi oleh Kota Kraksaan ini adalah banyaknya mixed traffic yang dalam hal ini sebagai akibat dari banyaknya lalu lintas yang bersifat through traffic atau pergerakan lalu lintas outer to outer zone yang sebenarnya tidak perlu melewati Kota Kraksaan itu sendiri. Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah telah melakukan Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Kraksaan pada tahun anggaran 2007. Rencana pembangunan jalan lingkar Kota Kraksaan yang telah disusun perlu untuk di review atau dikaji kembali, hal tersebut dikarenakan pada saat ini di Kota Kraksaan terdapat proyek nasional Jalan Tol Trans Jawa Probolinggo – Banyuwangi dan terdapat salah satu exit tol di Kraksaan. Dengan adanya rencana exit tol tersebut diperkirakan akan menambah intensitas kendaraan yang berada di Kecamatan Kraksaan, terutama bagi pengguna kendaraan mobil dan kendaraan besar yang mengakses jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi.

Sampai saat ini telah disusun Laporan Akhir Penyusunan Dokumen Grand Design Jalan Lingkar Utara Perkotaan Kraksaan Probolinggo yang bertujuan untuk menentukan alternatif rute bagi moda transportasi darat dengan muatan besar, melalui review atau kaji ulang terkait dokumen Studi Kelayakan Jalan Lingkar Kota Kraksaan agar rencana rute yang telah disusun dapat sesuai dengan aspek yang harus dipenuhi dalam studi kelayakan berdasarkan data kondisi eksisting (guna lahan, rencana tata ruang, kelayakan teknis, kelayakan ekonomi). Untuk mewujudkan Jalan Lingkar Utara

Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah berupaya mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa timur dan Pemerintah Pusat melalui Program Inpres jalan. Dan kami berharap dapat segera terealisasi ataupun dapat diusulkan pada program yang lain.

Bus Trans Jatim

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Probolinggo yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah menjadi salah satu prioritas utama. Ketersediaan transportasi publik yang efisien, terjangkau, dan merata merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mempermudah mobilitas masyarakat, serta mendukung sektor pariwisata.

Sejalan dengan komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Probolinggo secara proaktif telah mengusulkan pengembangan layanan Bus Trans Jatim untuk melintasi wilayah Kabupaten Probolinggo kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Usulan ini merupakan langkah strategis untuk mengintegrasikan Probolinggo dalam jaringan transportasi massal regional yang lebih luas.

Rencana rute yang diusulkan sangat ambisius, membentang dari Kota Pasuruan hingga Besuki, Kabupaten Situbondo. Rute ini dirancang untuk melewati pusat-pusat keramaian, permukiman padat penduduk, serta destinasi wisata di Kabupaten Probolinggo, seperti kawasan pegunungan Bromo-Tengger-Semeru, pesisir utara, dan sentra-sentra ekonomi lokal lainnya. Dengan demikian, diharapkan dapat mempermudah aksesibilitas masyarakat Probolinggo menuju kota-kota tetangga dan sebaliknya, serta membuka peluang baru bagi pengembangan pariwisata dan perdagangan. Dalam proses pengusulan ini, Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah mengidentifikasi dua skema operasional yang potensial untuk dipertimbangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur:

Skema Pertama: Optimalisasi Dukungan Penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pada skema ini, diusulkan agar seluruh penyediaan armada bus dan biaya operasional sepenuhnya

ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Skema ini akan sangat meringankan beban fiskal daerah dan memastikan standar pelayanan Bus Trans Jatim yang seragam dan optimal di seluruh rute. Dengan dukungan penuh dari Provinsi, Kabupaten Probolinggo dapat fokus pada penyediaan infrastruktur pendukung seperti halte dan informasi rute yang memadai.

Skema Kedua: Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Subsidi Tarif dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Apabila skema pertama tidak dapat terealisasi secara penuh, alternatif yang diusulkan adalah dengan memanfaatkan armada bus dari pihak ketiga yang kemudian difungsikan sebagai Bus Trans Jatim. Dalam skema ini, Pemerintah Kabupaten Probolinggo berkomitmen untuk memberikan subsidi tarif kepada masyarakat. Subsidi ini bertujuan untuk menjaga keterjangkauan harga tiket bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga layanan Bus Trans Jatim tetap menjadi pilihan transportasi yang ekonomis dan menarik. Kemitraan ini diharapkan dapat mengoptimalkan aset transportasi yang sudah ada di Probolinggo, sekaligus menciptakan sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta.

Melalui kedua skema ini, Pemerintah Kabupaten Probolinggo bertekad untuk memastikan bahwa layanan Bus Trans Jatim dapat segera beroperasi di wilayahnya. Kehadiran Bus Trans Jatim tidak hanya akan meningkatkan konektivitas antar kabupaten, tetapi juga diharapkan dapat mengurangi kemacetan, menekan biaya transportasi pribadi, serta mendorong penggunaan transportasi publik yang lebih ramah lingkungan. Inisiatif ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam menyediakan infrastruktur dan layanan publik yang berkualitas demi kesejahteraan seluruh masyarakat.

Perlindungan Sebidang Kereta Api

Upaya Pemerintah Kabupaten Probolinggo Mengatasi Perlindungan Sebidang Tanpa Palang Pintu dihadapkan pada tantangan besar terkait keselamatan di perlindungan sebidang kereta api. Dari total 30 perlindungan yang melintasi jalan kabupaten, jalan desa,

bahkan jalan lingkungan, baru 17 perlintasan yang dilengkapi dengan palang pintu dan dijaga oleh petugas. Pemerintah Kabupaten Probolinggo menunjukkan komitmen kuat untuk menanggulangi masalah ini melalui alokasi dana APBD serta kerja sama dengan berbagai pihak. Saat ini, sebanyak 68 petugas yang berasal dari juru parkir dan tenaga kontrak telah dipekerjakan untuk menjaga perlintasan tersebut. Seluruh pembiayaan gaji mereka ditanggung penuh oleh APBD Kabupaten Probolinggo, menunjukkan prioritas pemerintah daerah dalam menjaga keselamatan warganya.

Berikut adalah rincian upaya yang telah dan sedang dilakukan:

- a. Tahun 2022: Pembangunan pos jaga dan palang pintu di JPL 15 Desa Kerpangan dialokasikan sebesar ±Rp300 juta dari APBD Kabupaten Probolinggo;
- b. Tahun 2023: Dana sebesar kurang lebih Rp500 juta dari APBD Kabupaten Probolinggo digunakan untuk membangun pos jaga dan palang pintu di 5 lokasi strategis, yaitu: JPL 12 A Warujinggo, Leces, JPL 17 Sumber Kedawung, Leces, JPL 18 Sumber Kedawung, Leces, JPL 180 Banjarsari, Sumberasih, JPL 168 Tongas Kulon;
- c. Tahun 2023 (Bantuan Provinsi Jawa Timur): Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur turut membantu melalui APBD Provinsi dengan membangun palang pintu di JPL 165 Desa Curah Tulis dan JPL 174 Desa Bayeman, keduanya di Kecamatan Tongas;
- d. Tahun 2024 (Bantuan Kemenhub dan Provinsi): Dukungan datang dari Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Surabaya (Kemenhub) dengan alokasi APBN untuk JPL 164, JPL 14, dan JPL 22. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali memberikan bantuan APBD Provinsi untuk pembangunan di JPL 170, JPL 172, JPL 169, JPL 177, JPL 183, dan JPL 184;
- e. Tahun 2025 Tiga perlintasan (JPL 176, JPL 178, JPL 182) sedang dalam proses pembangunan dengan bantuan dari APBD Provinsi Jawa Timur dan sudah mencapai 90% penyelesaian;

Melalui rapat koordinasi pada 15 Mei 2025, Pemerintah Kabupaten Probolinggo kembali mendapatkan komitmen bantuan dari

P-APBD I Provinsi Jawa Timur untuk pembangunan di JPL 179 Banjarsari, Sumberasih dan JPL 16 Leces. Dengan penambahan 5 perlintasan pada tahun 2025, total perlintasan yang terlindungi akan menjadi 22, menyisakan 8 perlintasan lagi yang masih membutuhkan perhatian. Pemerintah Kabupaten Probolinggo berharap adanya tambahan alokasi dana dari APBD Provinsi tahap II untuk menuntaskan pembangunan perlintasan sisanya, namun yang perlu perhatian semua pihak yakni penataan dan pengelolaan petugas jaga yang membutuhkan penyediaan anggaran.

Pemerintah Kabupaten Probolinggo memiliki tanggung jawab yang diatur dalam regulasi untuk mengelola perlintasan sebidang Kereta Api, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang peningkatan keselamatan perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan. Secara ringkas, dasar hukum ini menugaskan Pemerintah Daerah untuk mengelola, mengawasi, dan menyediakan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang. Tugas ini mencakup pemasangan peralatan keselamatan seperti palang pintu, rambu, dan sinyal, serta jika memungkinkan, pembangunan infrastruktur tidak sebidang seperti underpass atau flyover untuk menghilangkan risiko kecelakaan di masa depan.

2.1.7 BUMD yang Mendukung Kinerja Pemerintah Kabupaten

Probolinggo

BUMD merupakan entitas usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah guna menyediakan pelayanan publik, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD). BUMD menyeter dividen dari keuntungan usahanya ke kas daerah, memperkuat kapasitas fiskal dan mendukung pembiayaan pembangunan. BUMD dapat menciptakan rantai pasok lokal melalui kegiatan usaha seperti perdagangan, distribusi pangan (termasuk infrastruktur penunjangnya), energi, dan transportasi. Di

Kabupaten Probolinggo saat ini terdapat dua BUMD. Pada tahun 2024, Perumdam mencatatkan nilai kinerja sebesar 3,22 (Sehat) menurut penilaian Kementerian PUPR, meningkat dari 3,00 pada tahun 2023. Kedua, Perusda Rengganis yang mengelola sektor pariwisata termasuk GOR Sasana Krida di Kraksaan, Kolam Pemandian Jabung Tirta di Paiton, Wisma Pesanggrahan di Krucil, dan usaha perkebunan pisang di Desa Bermi, Kecamatan Krucil. Berbeda dengan Perumdam Tirta Argapura, Perusda Rengganis mengalami kondisi yang kurang sehat, sehingga diperlukan evaluasi yang mendalam terkait keberlanjutannya.

Potensi pengembangan BUMD ke depan adalah terkait dengan dibentuknya BUMD yang memiliki kapasitas lebih baik dalam sisi provitabilitas. PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD Membedakan dua bentuk BUMD: Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda). Perseroan Daerah adalah salah satu bentuk BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah (minimal 51%). Fungsi utamanya adalah mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan publik dengan pendekatan bisnis dan profesionalisme dengan menekankan tata kelola dan profesionalisme. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) merupakan payung hukum keberadaan Perseroda. Dengan demikian Perseroda tunduk pada UU PT sementara Perumda tidak tunduk pada UU PT ini. Selanjutnya, Permendagri No. 118 Tahun 2018. Mengatur perencanaan bisnis, pembentukan, penyertaan modal, dan evaluasi kinerja BUMD termasuk Perseroda. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) Memperkuat peran BUMD sebagai salah satu sumber PAD dan mitra pembangunan daerah. Kelebihan Perseroda dibandingkan Perumda adalah dapat membuka keterlibatan swasta, lebih fleksibel menjalin kerja sama investasi (misalnya KPBU) dengan BUMN, swasta, atau investor asing dan lebih Unggul untuk infrastruktur skala besar dan komersial. Di sisi lain, Perumda cocok untuk layanan dasar.

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Kondisi dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah akan mempengaruhi keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola pembangunannya. Pemerintah daerah memiliki pendapatan dari berbagai sumber yang sah yang kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa untuk belanja daerah, baik untuk membiayai operasional penyelenggaraan pemerintahan maupun program-program demi mencapai target-target tujuan pembangunan daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang tepat, baik dari kebijakan optimalisasi pendapatan daerah yang bisa dikendalikan oleh pemerintah daerah – dalam hal ini adalah yang berasal dari pendapatan asli daerah – maupun kebijakan alokasi belanja yang efektif dan efisien, diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunannya. Semakin tinggi kapasitas fiskal daerah, maka diharapkan semakin besar kuantitas maupun kualitas program-program pembangunan yang diimplementasikan untuk mencapai target indikator kinerja pembangunan yang ditetapkan.

Kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan (kapasitas fiskal daerah) di masa mendatang dapat diproyeksikan berdasarkan kinerja keuangannya di masa lalu. Untuk itu, dilakukan analisis kinerja pendapatan dan belanja daerah dalam lima tahun terakhir. Dari analisis ini akan tergambar: (1) perkembangan pendapatan daerah dari berbagai sumber beserta proporsi kontribusi masing-masing sumber terhadap total pendapatan daerah; (2) perkembangan belanja daerah dan distribusi pengeluaran di setiap komponen belanja; dan (3) perkembangan pembiayaan penerimaan, pengeluaran dan netto daerah. Selanjutnya, berdasarkan data kinerja masa lalu ini dapat diproyeksikan perkembangan pendapatan dan belanja daerah yang mencerminkan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan di masa mendatang. Selain itu, informasi tentang perkembangan neraca daerah akan memberikan gambaran kemampuan dan/atau kesehatan keuangan daerah dalam memenuhi berbagai kewajiban, termasuk hutang daerah, jika diperlukan dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas layanan publik.

2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo dilihat dari tiga aspek utama, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Penilaian terhadap kinerja keuangan masa lalu merupakan langkah pertama yang sangat penting untuk melihat gambaran efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah selama periode sebelumnya.

Gambaran secara umum tentang keuangan dapat juga mengevaluasi tentang bagaimana anggaran daerah telah dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan, serta juga mengidentifikasi kelemahan dan potensi yang perlu dioptimalkan dalam perencanaan periode berikutnya. Dengan mempelajari kesehatan dalam realisasi pendapatan, komposisi alokasi belanja, dan pengelolaan pembiayaan, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa kebijakan keuangan di masa depan lebih terarah, tepat sasaran, dan mampu mendukung pencapaian visi Kabupaten Probolinggo yang berkelanjutan.

Selain itu, pengelolaan keuangan yang baik adalah fondasi utama bagi keberhasilan pelaksanaan program-program prioritas yang tercantum dalam RPJMD. Dalam era otonomi daerah, kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat menjadi salah satu indikator penting kemandirian fiskal. Pada saat yang sama, efisiensi dalam belanja dan pembiayaan sangat diperlukan untuk memastikan setiap rupiah yang dianggarkan mampu memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. Berikut tabel 2.38 disajikan secara lebih rinci Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo tahun 2020-2024.

Tabel 2. 38 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	PENDAPATAN					
1	A. Pendapatan Asli Daerah	254.884.191.561,70	300.398.775.730,94	261.450.104.582,37	299.315.561.766,77	348.707.288.652,34
	B. Pendapatan Transfer	1.952.569.330.698,00	2.003.576.092.440,14	2.073.576.454.800,00	1.990.759.426.262,00	2.101.934.396.441,00
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	124.060.267.757,06	95.842.257.295,01	10.067.510.294,00	1.807.021.821,52	1.195.012.900,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.331.513.790.016,76	2.399.817.125.466,09	2.345.094.069.676,37	2.291.882.009.850,29	2.451.836.697.993,34
2	BELANJA					
	A. Belanja Operasi	1.372.728.814.272,96	1.451.288.134.136,72	1.512.657.938.777,63	1.605.258.501.526,26	1.768.005.833.840,99
	Belanja Pegawai	910.170.878.666,91	845.322.572.963,44	864.928.997.302,00	892.764.272.180,36	1.000.328.023.269,00
	Belanja Barang dan Jasa	405.582.241.215,05	499.424.157.999,68	524.490.332.803,63	593.558.138.248,90	585.772.857.759,99
	Belanja Subsidi	0,00	0,00	299.035.500,00	0,00	2.834.616.000,00
	Belanja Hibah	52.102.958.700,00	75.529.859.700,00	108.791.006.177,00	111.873.386.497,00	171.313.904.712,00
	Belanja Bunga	103.154.191,00	330.558.473,60	0,00	0,00	
	Belanja Bantuan Sosial	3.843.300.000,00	30.680.985.000,00	14.148.566.995,00	7.062.704.600,00	7.756.432.100,00
	Belanja Bantuan Keuangan	926.281.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Belanja Modal	254.602.152.790,75	175.518.233.417,06	230.171.344.385,99	231.030.373.629	270.139.109.894,00
	Belanja Modal Tanah	3.140.357.500,00	9.253.460.000,00	67.500.000,00	1.269.000.000	825.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.261.738.005,75	51.892.445.233,00	77.506.924.925,99	107.369.356.686	114.249.090.560,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.635.201.167,00	50.536.266.700,66	56.291.188.662,00	62.818.688.840	69.119.424.441,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	81.889.684.577,00	56.558.772.090,61	88.510.484.886,00	48.818.653.525	79.091.932.786,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.405.105.691,00	7.277.289.392,79	7.778.595.912,00	9.686.513.858	5.468.383.614,00

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Belanja Modal Aset Lainnya	2.270.065.850,00	0,00	16.650.000,00	1.068.160.720	1.385.278.493,00
	C. Belanja Tak Terduga	81.517.552.475,00	27.821.539.655,00	16.310.958.971,00	5.382.959.122,00	2.081.957.893,00
	D. Belanja Transfer	593.395.006.960,00	580.317.645.929,00	584.293.967.600,00	526.648.656.001,00	530.711.938.000,00
	Belanja Bagi Hasil	9.159.710.000,00	7.836.144.000,00	8.788.491.000,00	9.274.737.000,00	11.368.682.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan	584.235.296.960,00	572.481.501.929,00	575.505.476.600,00	517.373.919.001,00	519.343.256.000,00
	JUMLAH BELANJA	2.302.243.526.498,71	2.234.945.553.137,78	2.343.434.209.734,62	2.368.320.490.278,26	2.570.938.839.627,99
	SURPLUS/DEFISIT	29.270.263.518,05	164.871.572.328,31	1.659.859.941,75	-76.438.480.427,97	-119.102.141.634,65
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
	A. Penerimaan Pembiayaan	185.064.818.439,65	201.435.326.558,93	336.313.117.852,06	388.622.339.603,14	292.417.133.927,77
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	175.409.613.961,65	196.295.725.957,70	335.695.197.965,86	317.972.948.111,81	292.183.859.175,15
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	617.919.886,20	649.391.491,33	233.274.752,62
	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00		70.000.000.000,00	0,00
	B. Pengeluaran Pembiayaan	18.038.000.000,00	28.691.533.931,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0
	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0
	Penyertaan Modal Daerah	2.038.000.000,00	1.656.976.500,00	0,00	0,00	0
	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00		0,00	0,00	0
	Pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo	0,00	12.034.557.431,00	0,00	0,00	0
	PEMBIAYAAN NETTO	167.026.818.439,65	172.743.792.627,93	316.313.117.852,06	368.622.339.603,14	292.417.133.927,77
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	196.297.081.957,70	337.615.364.956,24	317.972.977.793,81	292.183.859.175,17	173.314.992.293,12

Sumber: BPPKAD Kabupaten Probolinggo, 2025 (*audited*)

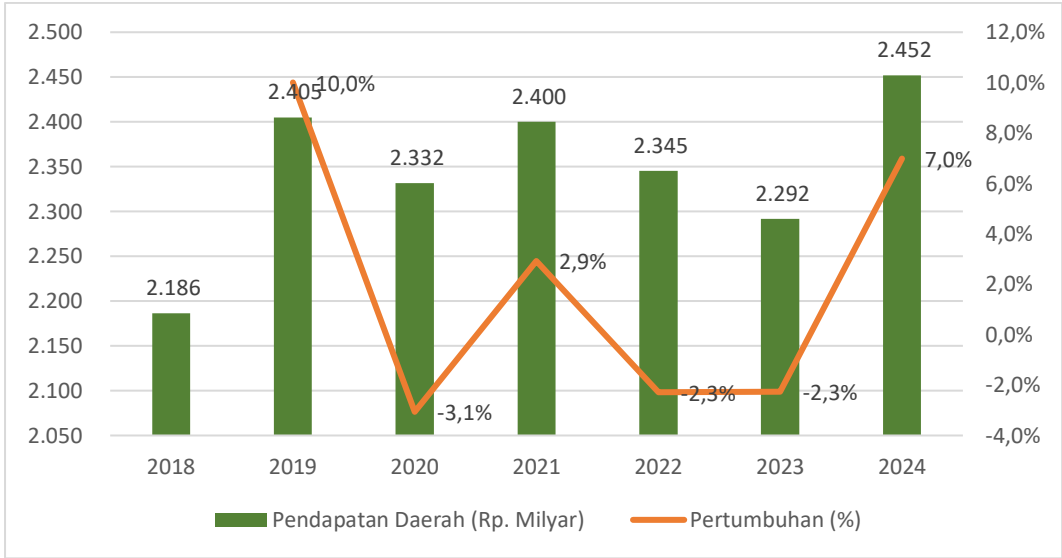
Tabel 2. 39 Neraca Daerah Tahun 2020-2024

No	Uraian	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ASET					
	A. Aset Lancar	339.779.763.499,18	433.540.982.087,21	395.184.785.536,28	360.546.123.889,73	243.492.934.742,29
	B. Investasi Jangka Panjang	52.128.853.378,21	47.971.057.118,23	41.105.358.444,85	34.735.823.596,62	36.164.150.899,00
	C. Aset Tetap	2.253.916.261.321,52	2.573.569.338.436,09	2.599.360.904.675,00	2.604.043.545.030,68	2.660.955.545.327,88
	D. Aset Lainnya	27.015.485.680,98	25.794.499.175,59	55.423.531.789,45	55.917.888.647,00	36.872.148.388,08
	E. Properti Investasi	-	-	21.835.182.836,58	21.865.176.914,40	23.938.284.414,96
	F. Dana Cadangan	15.748.065.495,57	31.919.889.208,38	52.961.919.740,89		
	JUMLAH ASET	2.688.588.429.375,46	3.112.795.766.025,50	3.165.871.683.023,05	3.077.108.558.078,43	3.001.423.063.772,21
2	KEWAJIBAN					
	A. Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
	B. Kewajiban Jangka Pendek	63.698.062.422,81	52.514.134.223,65	25.280.428.398,84	42.466.266.912,35	45.734.048.827,72
	JUMLAH KEWAJIBAN	63.698.062.422,81	52.514.134.223,65	25.280.428.398,84	42.466.266.912,35	45.734.048.827,72
	EKUITAS					
3	Ekuitas	2.624.890.366.952,65	3.060.281.631.801,87	3.140.591.254.624,21	3.034.642.291.166,08	2.955.689.014.944,49
	JUMLAH EKUITAS	2.624.890.366.952,65	3.060.281.631.801,87	3.140.591.254.624,21	3.034.642.291.166,08	2.955.689.014.944,49
	JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN	2.688.588.429.375,46	3.112.795.766.025,52	3.165.871.683.023,05	3.077.108.558.078,43	3.001.423.063.772,21

Sumber: BPPKAD Kabupaten Probolinggo 2020-2024 (audited)

2.2.1.1 Analisis Realisasi Pendapatan

Pendapatan daerah merupakan salah satu komponen utama dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencerminkan kemampuan fiskal suatu daerah. Perlu dilihat kesehatan dalam realisasi pendapatan yang menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber daya lokal, mengelola dana transfer dari pusat, serta memanfaatkan peluang pendapatan lainnya secara efektif.



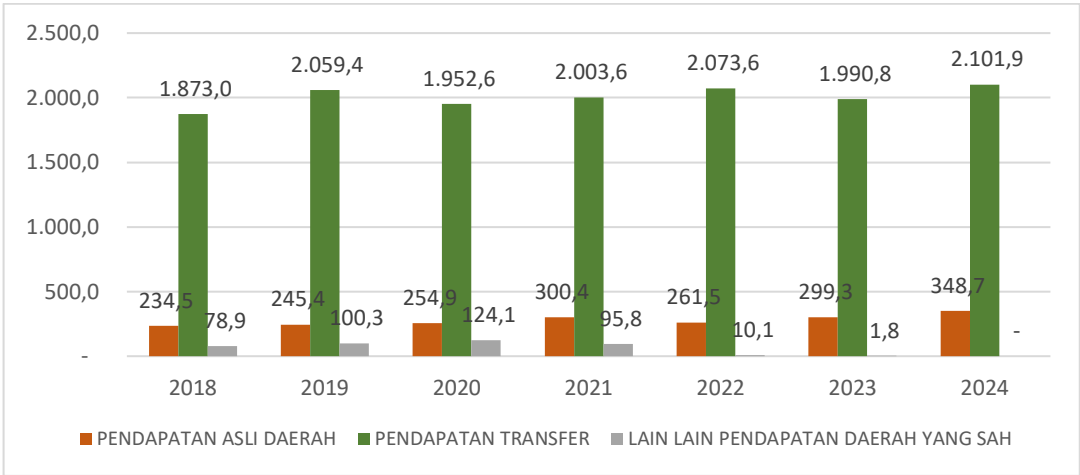
Gambar 2. 32 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2024 (Rp. Miliar) dan Pertumbuhannya (%)

Sumber : BPPKAD Kabupaten Probolinggo, 2025

Pendapatan daerah Kabupaten Probolinggo selama periode 2018–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan yang ditunjukkan pada Gambar 2.32. Pada tahun 2024, pendapatan daerah mencapai Rp 2,45 triliun, meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 2,29 triliun, sekaligus mencatatkan nilai tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Sebagai pembandingan, pendapatan daerah Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 mencapai Rp 1,77 triliun, sementara Kota Probolinggo hanya sebesar Rp 829,23 miliar.

Fluktuasi pendapatan daerah ini sebagian besar disebabkan oleh kontribusi pendapatan transfer, yang selama tujuh tahun terakhir memberikan rata-rata kontribusi sebesar 85,6%. Sebagai sumber utama pendapatan, pendapatan transfer bergantung pada kebijakan pemerintah pusat sehingga sulit untuk dikendalikan oleh pemerintah daerah. Selama periode ini, pendapatan transfer mengalami berbagai perubahan, termasuk

penurunan pada tahun 2020, peningkatan di tahun 2021 dan 2022, kembali menurun pada tahun 2023, dan mencapai puncaknya pada tahun 2024.



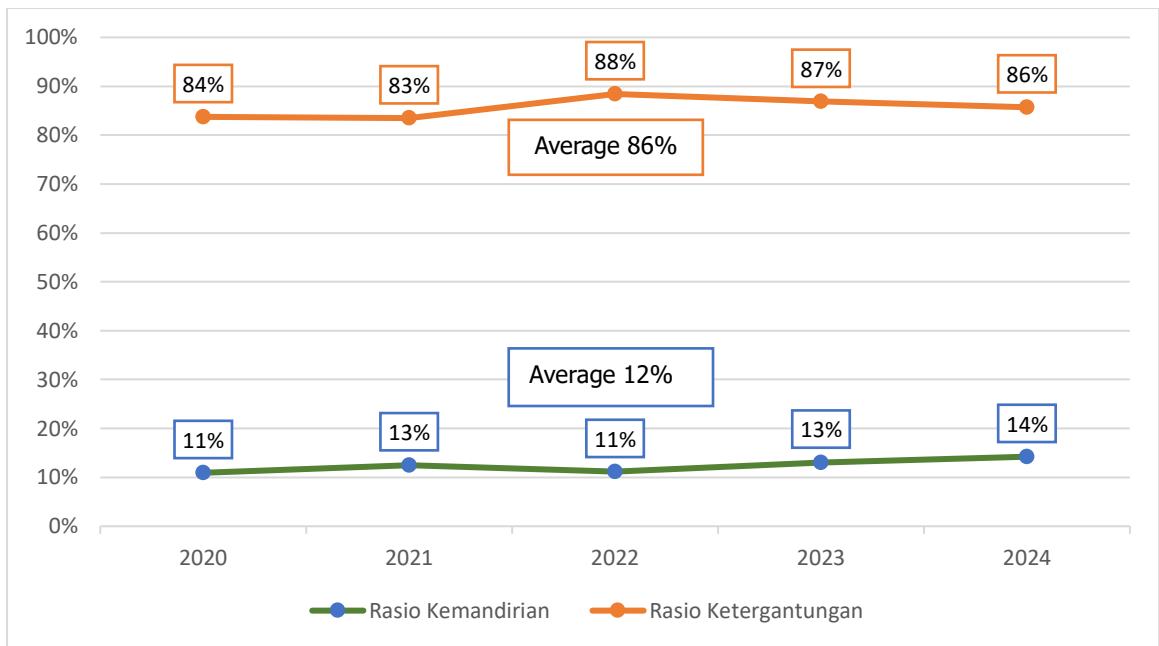
Gambar 2. 33 Perkembangan Tiap Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2024 (Rp. Miliar)
Sumber: BPPKAD Kabupaten Probolinggo, 2025 (diolah)

Dalam analisis kesehatan keuangan daerah, dapat dilakukan salah satunya dengan melihat rasio kemandirian dan rasio ketergantungan keuangan daerah dengan rumus:

Indikator	Rumus	Keterangan
Rasio Kemandirian	$\frac{PAD}{Total\ Pendapatan} \times 100\%$	Mengukur kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah.
Rasio Ketergantungan	$\frac{Pendapatan\ Transfer}{Total\ Pendapatan} \times 100\%$	Mengukur ketergantungan daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat/daerah lain.

Dari sisi hasil, kedua rasio ini memiliki hubungan yang saling berlawanan. Semakin tinggi rasio PAD terhadap total pendapatan, semakin tinggi tingkat kemandirian daerah. Sebaliknya, semakin tinggi rasio transfer terhadap total pendapatan, semakin rendah tingkat kemandirian daerah. Adapun kriteria ideal dalam melihat kemandirian daerah yaitu:

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan Keuangan
Rendah Sekali	0% – 25%	Instruktif
Rendah	25% – 50%	Konsultif
Sedang	50% – 75%	Partisipatif
Tinggi	75% – 100%	Delegatif



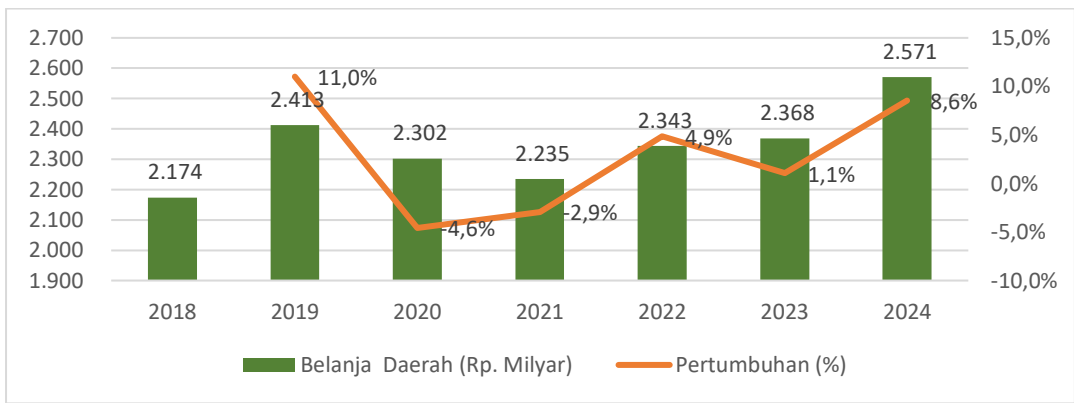
**Gambar 2. 34 Rasio Kemandirian dan Rasio Ketergantungan
Kabupaten Probolinggo 2020-2024**

Sumber: BPPKAD Kabupaten Probolinggo, 2025 (diolah)

Berdasarkan Gambar 2.34, pengelolaan keuangan dalam Kabupaten Probolinggo saat ini masih tergolong dalam kategori Rendah Sekali. Hal ini tercermin dari rata-rata rasio kemandirian yang hanya sebesar 12%, sedangkan rasio ketergantungan mencapai 86%. Tingginya rasio ketergantungan ini mengindikasikan pola hubungan keuangan daerah yang bersifat instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Namun, perlu diketahui bahwa pengaturan dalam pemberian transfer dari pusat bersifat “*given*”. Sehingga, pemerintah daerah tidak memiliki intervensi dan diskresi secara langsung serta penuh dalam mempengaruhi kebijakan besaran bantuan transfer. Artinya, kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Probolinggo perlu usaha lebih keras dalam mewujudkan otonomi daerah yang mandiri secara finansial, sehingga kedepannya perlu langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sifatnya inovatif, bukan membebani masyarakat serta sejalan dengan kualitas layanan publiknya.

2.2.1.2 Analisis Realisasi Belanja

Realisasi belanja daerah merupakan salah satu indikator utama yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan. Selanjutnya perlu dilihat komposisi realisasi belanja yang optimal sebagai evaluasi dalam melihat kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan dan merealisasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan.



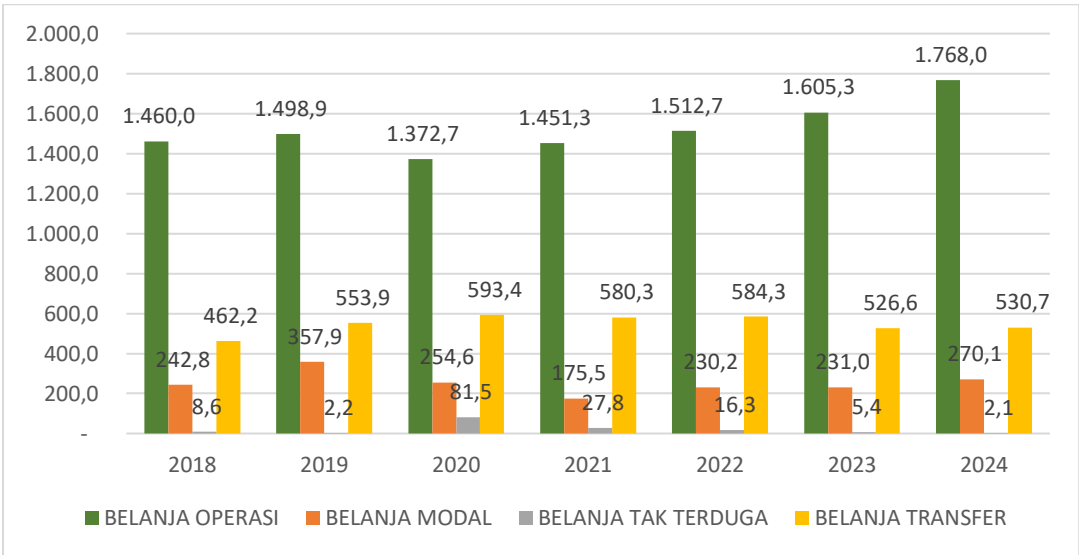
Gambar 2. 35 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 – 2024 (Rp. Miliar) dan Pertumbuhannya (%)

Sumber: BPPKAD Kabupaten Probolinggo, 2025 (diolah)

Kecenderungan besaran belanja daerah Kabupaten Probolinggo mengikuti kecenderungan pendapatan daerahnya. Hal ini bisa dipahami karena sumber dana untuk belanja daerah adalah penerimaan/atau pendapatan daerah. Setelah peningkatan signifikan pada 2019 sebesar 11%, terjadi penurunan pada 2020 sebesar 4,6% akibat dampak pandemi COVID-19, yang memaksa pemerintah untuk menyesuaikan prioritas belanja. Tren pemulihan terlihat pada 2021-2022 dengan pertumbuhan moderat, sementara pada 2023 terjadi perlambatan pertumbuhan menjadi 1,1%, yang dapat mengindikasikan adanya efisiensi anggaran. Namun, lonjakan belanja sebesar 8,6% pada 2024 menunjukkan adanya dorongan kuat untuk mendukung percepatan pembangunan di sektor prioritas menjelang akhir periode perencanaan.

Melihat angka fluktuasi ini, perlu dilihat diagnosa kesehatan belanja daerah Kabupaten Probolinggo sebagai acuan dalam menyusun kerangka proyeksi pendanaan di tahun 2025-2029. Secara umum ada beberapa cara dalam mengukur kinerja keuangan daerah dengan menggunakan rasio kinerja keuangan daerah, seperti rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian. Ditambah lagi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

(HKPD) mengamanatkan pembatasan proporsi belanja pegawai maksimal 30% dari total belanja APBD. Dalam dokumen RPJMD ini dilakukan hanya dengan menganalisis rasio keserasian agar memberikan gambaran keseimbangan antar komponen utama belanja daerah (belanja operasi & belanja modal), serta menghitung komponen rasio di dalam belanja operasi, yakni rasio belanja pegawai sesuai UU HKPD tahun 2022. Dengan demikian, analisis rasio ini dapat mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mengoptimalkan alokasi anggarannya antara belanja rutin dan belanja pembangunan sesuai prioritas yang ditetapkan.

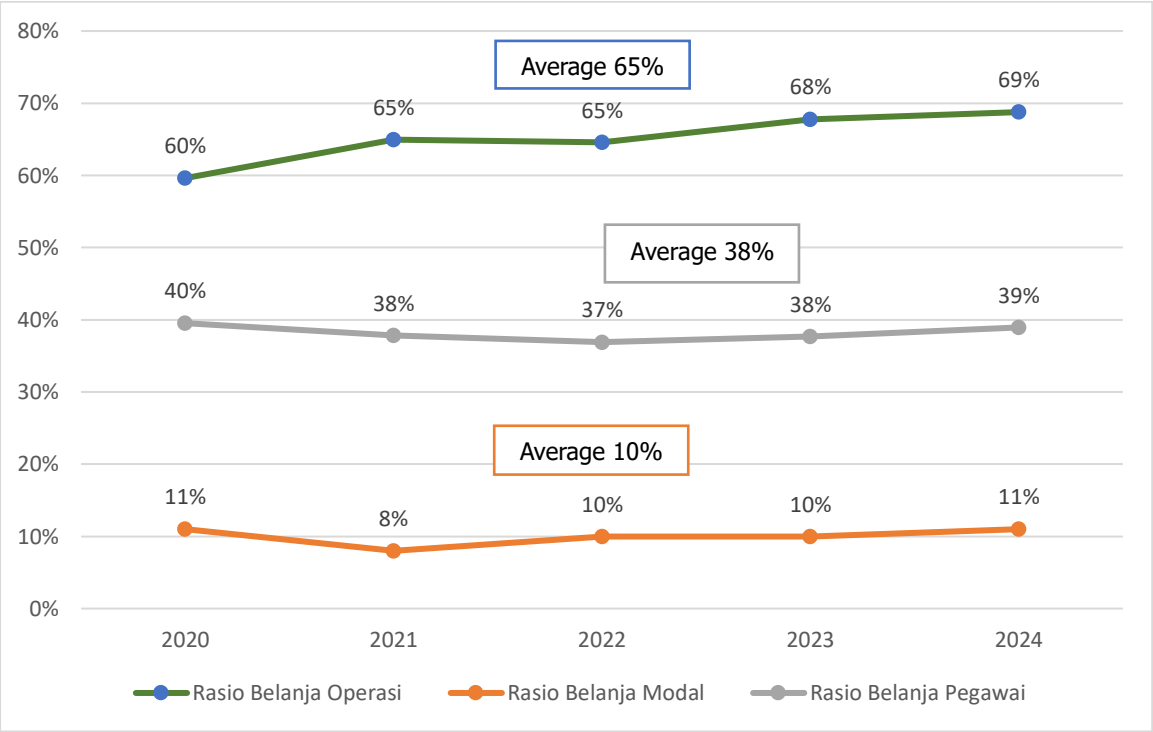


Gambar 2. 36 Perkembangan Tiap Komponen Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2024 (Rp. Miliar)
 Sumber: BPPKAD Kabupaten Probolinggo, 2025 (diolah)

Adapun rumus yang dipakai dalam menghitung rasio belanja operasi, rasio belanja modal, dan rasio belanja pegawai, di antaranya:

Indikator	Rumus	Keterangan
Rasio Belanja Operasi	$\frac{Belanja\ Operasi}{Total\ Belanja} \times 100\%$	Untuk mengetahui proporsi belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran (rutin)
Rasio Belanja Modal	$\frac{Belanja\ Modal}{Total\ Belanja} \times 100\%$	Untuk mengetahui proporsi anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan atau aset-aset yang memberikan manfaat dalam jangka waktu yang lebih lama
Rasio Belanja Pegawai	$\frac{Belanja\ Pegawai}{Total\ Belanja} \times 100\%$	Untuk mengukur seberapa besar anggaran daerah yang dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai

Dari sisi hasil perhitungan rasio secara umum pada banyak kasus, belanja operasi biasanya mendominasi total belanja daerah, berkisar antara 60-90%. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki proporsi belanja operasi yang lebih besar dibandingkan dengan daerah yang pendapatannya lebih rendah. Belum ada standar pasti mengenai besaran ideal rasio belanja operasi dan belanja modal terhadap APBD, karena hal ini sangat bergantung pada dinamika kegiatan pembangunan dan kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan. Namun, sebagai daerah di negara berkembang, Pemerintah Kabupaten Probolinggo masih memegang peran penting dalam mendorong pembangunan. Oleh sebab itu, rasio belanja modal yang relatif kecil perlu ditingkatkan untuk mendukung percepatan pembangunan di daerah.



Gambar 2. 37 Rasio Belanja Operasi, Rasio Belanja Modal, Rasio Belanja Pegawai Kabupaten Probolinggo 2020-2024
Sumber: BPPKAD Kabupaten Probolinggo, 2025 (diolah)

Proporsi belanja operasi yang dominan dengan gap 55% dibandingkan belanja modal di Kabupaten Probolinggo menunjukkan pola pengelolaan anggaran yang kurang berpihak pada pembangunan jangka panjang. Memang secara umum tidak ada aturan baku berapa besaran persentase khusus untuk kedua rasio ini. Namun, perlu diketahui bahwa belanja modal memiliki peran strategis sebagai investasi untuk pelayanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dasar

seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan, yang seharusnya menjadi prioritas, justru harus mendapatkan alokasi anggaran yang memadai. Ketimpangan dengan *gap* yang terlalu jauh berisiko memperbesar kesenjangan antarwilayah, terutama di daerah tertinggal yang membutuhkan akselerasi pembangunan.

Sebagian besar dari belanja operasi di antaranya digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang-jasa, dan belanja hibah. Akan tetapi, jika belanja hibah dan belanja barang-jasa dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai program pembangunan di Kabupaten Probolinggo, baik untuk daerah kabupaten maupun daerah otonom yang lebih kecil, serta pihak lain yang berkontribusi pada pencapaian kinerja pembangunan yang lebih baik, maka ini bisa menjadi indikasi yang positif dan perlu dilanjutkan.

Selanjutnya, belanja pegawai yang mencapai 38% dari total belanja daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Probolinggo belum optimal dalam memenuhi ketentuan UU HKPD 2022, yang menetapkan batas maksimal 30% untuk belanja pegawai. Kelebihan ini bukan sekadar angka, ini mencerminkan alokasi anggaran yang masih terjebak pada pola konsumtif, di mana belanja rutin lebih diutamakan daripada belanja produktif. Dengan batas waktu penyesuaian hingga 2027 yang hampir habis, langkah taktis perlu segera diambil, seperti pengendalian perekrutan, efisiensi pengelolaan SDM, hingga modernisasi sistem layanan untuk menekan beban belanja operasional.

Ketidakseimbangan ini menandakan adanya kelemahan dalam penyusunan prioritas anggaran. Pemerintah daerah harus berani merealokasi anggaran ke sektor-sektor yang bersifat produktif, terutama belanja modal. Tidak hanya soal jumlah, belanja modal harus diarahkan pada proyek-proyek strategis yang memiliki *multiplier effect*, seperti peningkatan kualitas jalan antarwilayah untuk mendorong mobilitas ekonomi, penguatan fasilitas pendidikan untuk membangun SDM unggul, dan pengembangan jaringan irigasi untuk mendukung sektor pertanian sebagai basis ekonomi lokal. Rasio yang timpang ini bukan sekadar masalah teknis anggaran, tetapi sinyal perlunya reformasi kebijakan keuangan daerah agar mampu menjawab tantangan pembangunan di tahun 2025-2029.

2.2.1.3 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan suatu kegiatan transaksi keuangan untuk menutupi kekurangan biaya antara pendapatan dan belanja daerah.

Sumber pembiayaan ini berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan, serta penerimaan piutang daerah. Penerimaan pembiayaan mencakup semua penerimaan yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang meliputi: SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang nantinya akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran mendatang. Ini termasuk: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Pembiayaan daerah, digunakan untuk menutup adanya defisit anggaran. Perkembangan defisit/surplus anggaran Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam kurun tahun dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 40 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Probolinggo

N o	Uraian	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2,345,094,069,676.37	2,291,882,009,850.29	2,451,836,697,993.34
2	Belanja Daerah	2,343,434,209,734.62	2,368,320,490,278.26	2,570,938,839,627.99
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	0,00
	Defisit Riil	(18,340,140,058.25)	(96,438,480,427.97)	(119,102,141,634.65)

Sumber: BPPKAD Kabupaten Probolinggo, 2022 - 2025

Tabel di atas menyajikan data mengenai defisit riil anggaran dalam tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2022, 2023, dan 2024 menunjukkan tren peningkatan defisit yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, meskipun terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah, adanya pengeluaran pembiayaan menyebabkan defisit. Keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah harus diimbangi dengan pengeluaran pembiayaan yang rasional agar tidak menambah beban anggaran.

Pada tahun 2023, ketidakseimbangan semakin mencolok dengan kenaikan belanja daerah yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan pendapatan daerah. Meskipun pengeluaran pembiayaan tetap sama, perbedaan yang lebih besar antara belanja dan pendapatan menyebabkan defisit yang lebih besar. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan belanja daerah yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan.

Pada tahun 2024, meskipun tidak ada pengeluaran pembiayaan, defisit tetap meningkat. Peningkatan belanja daerah yang jauh melebihi pendapatan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih tidak efisien, dengan belanja yang tidak proporsional terhadap pendapatan yang ada. Defisit yang terus meningkat ini memperlihatkan adanya potensi masalah keuangan yang harus diatasi untuk menjaga kestabilan anggaran daerah di masa yang akan datang.

Dalam analisis keseluruhan, perkembangan defisit anggaran Kabupaten Probolinggo menunjukkan adanya tren ketidakseimbangan yang cukup signifikan antara pendapatan dan belanja daerah, terutama di tahun 2023 dan 2024. Meskipun ada upaya untuk mengatur pengeluaran pembiayaan, peningkatan belanja yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan menyebabkan defisit yang semakin besar dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan perlunya kajian lebih mendalam terkait pengelolaan anggaran dan kemungkinan kebijakan penghematan atau peningkatan sumber pendapatan daerah.

Dari segi kebijakan, Pemerintah Kabupaten Probolinggo perlu mempertimbangkan langkah-langkah strategis untuk mengurangi defisit anggaran, seperti meningkatkan efisiensi dalam belanja daerah, meninjau kembali prioritas pengeluaran, serta mengeksplorasi sumber-sumber pendapatan yang lebih optimal. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan cara-cara untuk menarik investasi atau meningkatkan kontribusi sektor-sektor ekonomi yang dapat memperkuat pendapatan daerah agar defisit anggaran tidak terus berlanjut dan berisiko terhadap kestabilan fiskal daerah.

Tabel 2. 41 Komposisi Penutup Riil Defisit Anggaran Kabupaten Probolinggo

No	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil		
		2022	2023	2024
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	335,695,197,965.86	317,972,948,111.81	292,183,859,175.15
2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	70.000.000.000,00	0.00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	6,616,387,067.94	6,746,983,892.86	6,906,966,783.06
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	617,919,886.20	649,391,491.33	233,274,752.62
5	Penerimaan Pembiayaan lainnya Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	0.00	0.00	0.00

Sumber: BPPKAD Kabupaten Probolinggo, 2025

Tabel 2.41 menunjukkan komposisi penutup defisit anggaran Kabupaten Probolinggo selama tiga tahun anggaran menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam cara pemerintah daerah mengelola defisit anggaran dan sumber pendanaan yang digunakan. Pada tahun 2022, pengelolaan anggaran yang efisien terlihat dari kontribusi besar SiLPA, yang mencerminkan hasil positif dari tahun-tahun sebelumnya. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola anggaran dengan baik, menghasilkan cadangan dana yang cukup besar untuk menutupi defisit anggaran. Selain itu, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan turut memberikan kontribusi penting meskipun tidak sebesar SiLPA.

Namun, pada tahun 2023, terjadi perubahan dalam strategi pendanaan. Pencairan dana cadangan menjadi langkah utama dalam menutupi defisit anggaran, menunjukkan bahwa pemerintah daerah memanfaatkan dana yang sudah disiapkan sebelumnya. Penurunan kontribusi SiLPA dan meningkatnya penerimaan pinjaman daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai bergantung lebih banyak pada pinjaman eksternal untuk menutupi defisit. Hal ini menandakan adanya perubahan dalam kebijakan pendanaan yang sebelumnya lebih mengandalkan sisa lebih anggaran. Pada tahun 2024, terjadi penurunan signifikan pada beberapa sumber pendanaan, terutama SiLPA dan penerimaan pinjaman daerah. Penurunan ini bisa mengindikasikan pengelolaan anggaran yang lebih ketat atau tantangan dalam memperoleh pinjaman daerah. Meskipun demikian, hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan tetap tinggi, yang menunjukkan upaya optimalisasi aset daerah untuk mendukung keuangan daerah.

Pengelolaan defisit anggaran menunjukkan SiLPA berkontribusi cukup besar dalam menutup defisit anggaran di Kabupaten Probolinggo. Perlu diketahui, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa SiLPA adalah selisih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA memiliki makna ganda, yaitu bisa bersifat positif atau negatif. SiLPA dikategorikan positif jika merupakan hasil dari efektivitas penerimaan PAD yang melebihi target dan diikuti dengan efisiensi belanja anggaran pemerintah daerah. Sebaliknya, SiLPA dianggap negatif jika berasal dari penundaan belanja langsung untuk program dan kegiatan pemerintah daerah. Perlu catatan bahwa SiLPA negatif tidak selalu menjadi cerminan kinerja buruk, melainkan bisa menjadi strategi fiskal yang terukur jika pengelolaan dan tujuannya jelas. Dalam konteks pembangunan daerah, anggaran defisit sering kali digunakan untuk mendorong pertumbuhan melalui pembiayaan proyek strategis yang hasilnya berdampak jangka panjang.

Misalnya, SiLPA negatif dapat mencerminkan keberanian pemerintah daerah untuk mengambil langkah agresif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur atau investasi produktif lainnya. Proyek seperti perbaikan jaringan transportasi, revitalisasi fasilitas publik, atau digitalisasi layanan pemerintahan membutuhkan belanja besar di muka, yang mungkin melebihi pendapatan dalam tahun anggaran tertentu. Meski terlihat sebagai defisit di atas kertas, langkah ini dapat menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan—meningkatkan daya saing daerah, menarik investasi, dan membuka lapangan kerja baru.

Namun, tidak semua SiLPA negatif dapat dianggap sehat. Kunci pembeda antara defisit yang produktif dan yang destruktif terletak pada bagaimana alasan, eksekusi, dan hasil dari penggunaan anggaran tersebut dikelola. SiLPA negatif yang timbul karena kebocoran anggaran, pemborosan, atau ketidakefisienan belanja tentu menjadi tanda lampu merah. Sebaliknya, jika defisit muncul karena belanja modal yang efektif dan terukur, hal ini justru bisa menjadi indikasi keberanian pemerintah untuk mengambil langkah strategis demi pertumbuhan jangka panjang.

2.2.2 Kerangka Pendanaan

2.2.2.1 Proyeksi Pendanaan Masa Depan (2025-2029)

Penyusunan proyeksi pendanaan RPJMD 2025-2029 merupakan langkah strategis untuk memastikan pembangunan daerah berjalan efektif dan berkelanjutan. Berlandaskan evaluasi data historis dan analisis kesehatan APBD yang telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya, proyeksi ini dirancang dengan pendekatan yang mempertimbangkan tren masa lalu sekaligus kebutuhan masa depan.

Pendekatan ini dimulai dengan memanfaatkan data historis sebagai acuan (*baseline*) untuk memetakan tren pendapatan dan belanja, sekaligus mengidentifikasi pola yang dapat mendukung formulasi kebijakan. Selanjutnya, prinsip kesehatan APBD, seperti rasio kemandirian fiskal, keseimbangan belanja produktif, proporsi belanja pegawai, dan proporsi belanja modal, seperti analisis sub bab realisasi pendapatan belanja sebelumnya yang dijadikan panduan untuk memastikan struktur anggaran tetap berkelanjutan.

Dalam proses alokasi, pendekatan *money follows target* (program prioritas) menjadi landasan utama. Belanja diarahkan pada program-program prioritas yang berorientasi hasil dan memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat. Hal ini bertujuan menciptakan keterpaduan antara perencanaan anggaran dengan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, proyeksi pendanaan juga harus memenuhi amanat regulasi terkait alokasi belanja wajib dan minimal, seperti:

- a. Pendapatan pajak daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor, dialokasikan paling sedikit 10% untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi (UU No. 28 Tahun 2009).
- b. Pendapatan pajak daerah dari Pajak Rokok, dialokasikan paling sedikit 50% untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum (UU No. 28 Tahun 2009 & PP No. 55 Tahun 2016).
- c. Pendapatan pajak rokok, sebesar 75% dari 50% realisasi penerimaan digunakan untuk mendanai program Jaminan Kesehatan Nasional (Perpres No. 82 Tahun 2018).
- d. Anggaran Pendidikan, dialokasikan minimal 20% dari total belanja APBD (UU No. 20 Tahun 2003)

- e. Anggaran Kesehatan, dialokasikan minimal 10% dari total belanja APBD (UU No. 36 Tahun 2009).
- f. Anggaran Diklat ASN, sekurang-kurangnya 0,36% dari total belanja APBD Provinsi dan 0,16% dari total belanja APBD Kabupaten/Kota.
- g. Belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa, minimal 10% dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota (UU No. 6 Tahun 2014).
- h. Alokasi Dana Desa (ADD), minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi DAK (UU No. 6 Tahun 2014).

Selain itu, kerangka pendanaan Kabupaten Probolinggo dalam lima tahun ke depan juga dianalisis berdasarkan prioritas kedua yaitu, pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

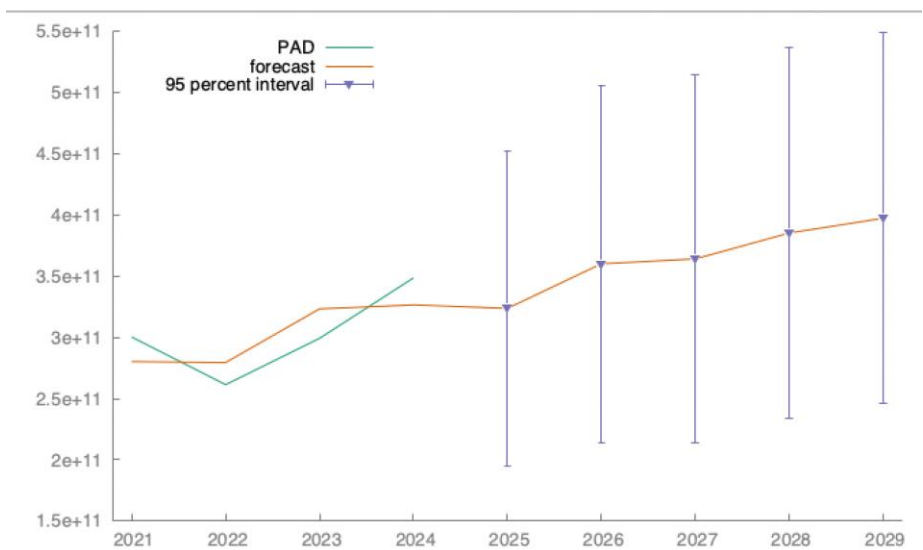
2.2.2.2 Analisis Hasil Proyeksi Keuangan Masa Depan (2025-2029)

Dalam penyusunannya proyeksi keuangan masa depan, digunakan *software* Gretl (*Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library*) melalui pendekatan analisis runtut waktu (*time series*), untuk memperoleh estimasi awal berbasis pola data masa lalu. Namun demikian, perlu dicatat bahwa hasil *forecast* yang dihasilkan melalui Gretl tidak diterima secara langsung sebagai angka final. *Forecast* tersebut diperlakukan sebagai *baseline projection*, yakni estimasi awal yang menjadi titik acuan. Selanjutnya, dilakukan evaluasi kritis terhadap hasil tersebut, dengan mempertimbangkan berbagai faktor non-statistik yang turut memengaruhi kapasitas fiskal daerah, antara lain:

1. indikator kesehatan APBD seperti rasio kemandirian, rasio ketergantungan, dan proporsi belanja operasional vs belanja modal, maupun rasio belanja pegawai, dan sebagainya;
2. tren historis yang menunjukkan pola-pola anomali atau deviasi tertentu yang tidak sepenuhnya *ter capture* oleh model statistik;
3. implikasi kebijakan *mandatory* dari pemerintah pusat yang bersifat mengikat, seperti ketentuan minimal belanja pendidikan dan kesehatan, maupun prioritas infrastruktur dasar;
4. pelaksanaan program prioritas kedua, yakni bupati terpilih sesuai dengan visi dan misi tahun 2025-2029.

2.2.2.2.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)



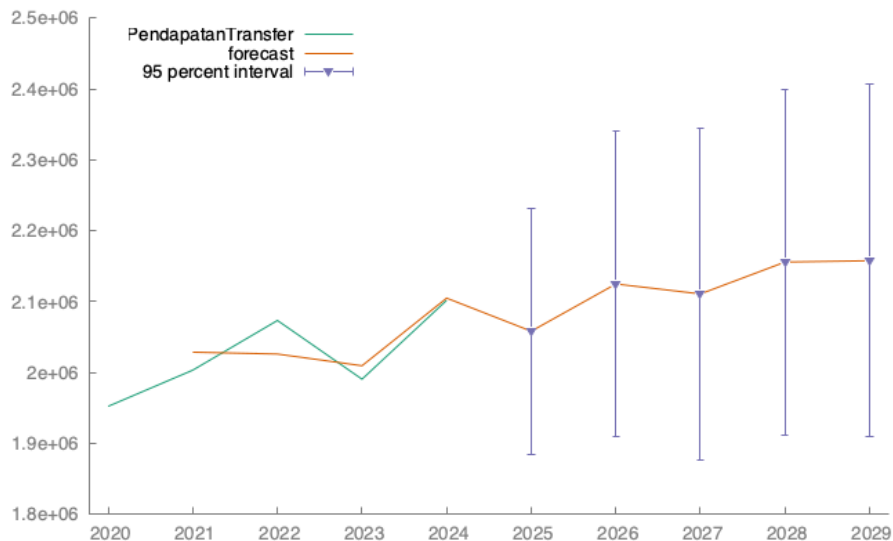
Gambar 2. 38 Hasil Forecast (peramalan) dengan Software Gretl
Pendapatan Asli Daerah Kab Probolinggo 2020 – 2024

Sumber: BPPKAD Kabupaten Probolinggo, 2025 (diolah)

Berdasarkan hasil forecast gambar di atas, tren PAD Kabupaten Probolinggo menunjukkan kecenderungan meningkat secara moderat dari tahun 2025 ke 2029, dengan proyeksi kisaran Rp 427 miliar pada 2025 hingga mendekati Rp 724 miliar pada 2029. Namun, meskipun mengalami pertumbuhan, hasil analisis rasio dengan data historis realisasi di sub bab sebelumnya menunjukkan bahwa rasio kemandirian fiskal masih tergolong rendah rata-rata hanya 12% selama 2020–2024, sedangkan rasio ketergantungan terhadap pendapatan transfer rata-rata mencapai 86%.

Jika PAD tetap mengikuti proyeksi *business as usual*, maka rasio kemandirian 2029 hanya naik sekitar 1-2%, artinya masih berada di level sangat rendah (kurang dari 15%). Untuk meningkatkan rasio kemandirian menuju 20% misalnya, PAD perlu tumbuh minimal 8-15% per tahun.

b. Pendapatan Transfer



**Gambar 2. 39 Hasil Forecast (peramalan) dengan Software Gretl
Pendapatan Transfer Kabupaten Probolinggo 2020 –
2024**

Sumber: BPPKAD Kabupaten Probolinggo, 2025 (diolah)

Berdasarkan Gambar 2.39 diperoleh proyeksi pendapatan transfer yang relatif stabil dengan tren sedikit meningkat, pendapatan transfer tetap menjadi komponen terbesar dalam struktur pendapatan daerah Kabupaten Probolinggo. Memang tingginya porsi pendapatan transfer ini menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat masih sangat dominan. Meskipun terjadi peningkatan nominal pendapatan transfer dari tahun ke tahun, hal ini tidak secara otomatis meningkatkan kemandirian fiskal. Justru, dominasi pendapatan transfer yang terlalu besar cenderung membuat rasio ketergantungan stagnan.

Dalam simulasi yang dilakukan, apabila pendapatan transfer naik sesuai proyeksi (*forecast baseline*), tanpa diimbangi peningkatan signifikan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka rasio ketergantungan fiskal diperkirakan tetap berada pada kisaran 85–87% hingga tahun 2029. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan transfer saja tidak cukup untuk memperbaiki kemandirian fiskal daerah.

Namun perlu diketahui bahwa pendapatan transfer, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan dana transfer lainnya, pada prinsipnya bersifat *top-down* atau ditetapkan oleh pemerintah pusat yang sifatnya *given*. Daerah tidak memiliki kewenangan langsung untuk meningkatkan maupun menurunkan pendapatan transfer ini secara mandiri, karena alokasinya ditentukan melalui

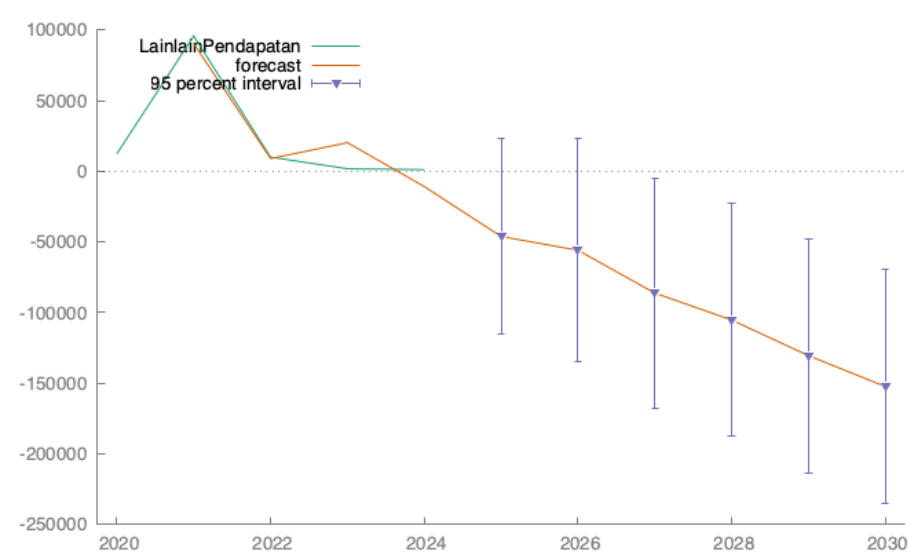
kebijakan nasional, formula perhitungan tertentu, dan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, dalam simulasi proyeksi keuangan daerah ini, pendapatan transfer tidak dilakukan penyesuaian (*adjustment*) secara teknis, kecuali terdapat kebijakan baru yang memungkinkan adanya peningkatan yang besar alokasi dari pusat maupun penurunan yang ekstrem demi menjaga kondisi ideal APBD. Contoh kebijakan yang dapat mempengaruhi besaran pendapatan transfer meliputi perubahan formula perhitungan DAU, kenaikan DBH akibat peningkatan pendapatan negara, atau adanya tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sektor tertentu. Ataupun bisa saja terjadi pengurangan karena adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi yang berakibat pada penurunan dana transfer.

Jika dalam perencanaan keuangan daerah diasumsikan adanya kenaikan pendapatan transfer, maka asumsi tersebut harus memiliki dasar kebijakan atau proyeksi makro yang jelas, misalnya “asumsi DAU naik 3% per tahun mengikuti proyeksi pertumbuhan APBN.” Atau “asumsi Pendapatan Transfer naik 1% hingga 2% karena adanya inflasi”. Tanpa dasar kebijakan tersebut, maka proyeksi pendapatan transfer yang digunakan hanya bersifat proyeksi teknis (*business as usual*) sesuai dengan tren historis atau model statistik yang digunakan.

Dengan mempertimbangkan sifat pendapatan transfer yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah daerah, strategi peningkatan kapasitas fiskal daerah lebih diarahkan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan sah lainnya yang tidak membebani masyarakat. Hal ini penting untuk mengurangi ketergantungan fiskal yang tinggi dan meningkatkan kemandirian fiskal secara berkelanjutan.

c. Lain-lain pendapatan yang sah



Gambar 2. 40 Hasil Forecast (peramalan) dengan Software Gretl
Lain-lain pendapatan yang Sah Kabupaten Probolinggo
2020 – 2024

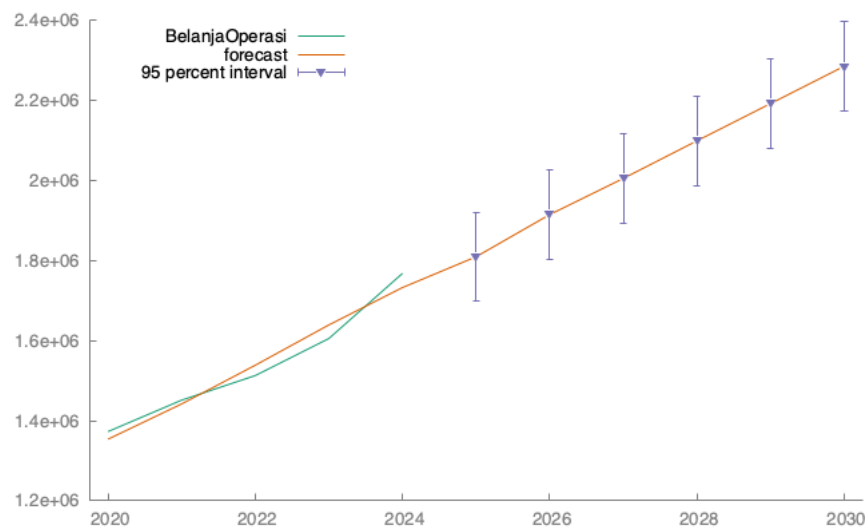
Sumber: BPPKAD Kabupaten Probolinggo, 2025 (diolah)

Hasil forecast pendapatan menunjukkan tren penurunan moderat mulai tahun 2025 hingga 2030, mengikuti pola historis pendapatan daerah yang digunakan sebagai dasar simulasi. Data pada periode 2020–2024 mencerminkan adanya fluktuasi, termasuk lonjakan signifikan pada tahun 2021 yang diikuti oleh stabilisasi dan penurunan bertahap di tahun-tahun berikutnya.

Proyeksi tren penurunan ini sejalan dengan implementasi Opsen Pajak Daerah berdasarkan UU HKPD yang mulai berlaku pada 2025. Kebijakan ini memindahkan sebagian komponen pendapatan ke dalam retribusi daerah, sehingga mengurangi kontribusi pada komponen lain-lain pendapatan yang sah. Meskipun demikian, pendekatan *"business as usual"* menunjukkan bahwa pendapatan tetap dapat dikelola secara positif, dengan tren penurunan yang tidak mencapai angka negatif. Simulasi ini menegaskan pentingnya strategi mitigasi, seperti optimalisasi retribusi daerah, penguatan sumber pendapatan alternatif, dan efisiensi pengelolaan pajak. Dengan persiapan yang matang, pemerintah daerah dapat meminimalkan dampak penurunan dan memastikan stabilitas keuangan daerah tetap terjaga.

2.2.2.2.2. Proyeksi Belanja Daerah

a. Belanja Operasi



Gambar 2. 41 Hasil Forecast (peramalan) dengan Software Gretl Belanja Operasi Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 – 2024

Sumber: BPPKAD Kabupaten Probolinggo, 2025 (diolah)

Belanja Operasi Kabupaten Probolinggo diproyeksikan terus mengalami peningkatan secara konsisten selama periode 2025–2030, sejalan dengan tren historis yang telah terbentuk sejak tahun 2020. Hasil *forecast* statistik yang disusun melalui software Gretl menunjukkan bahwa belanja operasi meningkat dengan laju yang stabil, mencerminkan pola pengeluaran yang linear dan terkendali secara nominal. Namun, dalam konteks perencanaan fiskal jangka menengah yang sehat dan berorientasi pada kinerja, proyeksi ini tidak dapat diterima begitu saja tanpa penyesuaian.

Penekanan utama dalam analisis ini adalah menjaga rasio belanja pegawai agar tidak melampaui batas maksimal 30% dari total belanja daerah sebagaimana ditargetkan dalam Undang-Undang HKPD tahun 2022 maupun Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Mengingat belanja operasi mencakup komponen terbesar dari belanja pegawai, maka kenaikan belanja operasi harus dikendalikan dengan pendekatan yang preskriptif. Bila tren belanja operasi dibiarkan mengikuti pola masa lalu tanpa koreksi, maka ruang fiskal daerah akan semakin sempit, terutama jika sasaran utamanya pada belanja pembangunan dan peningkatan layanan publik.

Maka dengan mempertimbangkan realisasi APBD 2020–2025, terlihat bahwa porsi belanja pegawai masih menjadi dominator dalam struktur belanja operasi. Oleh karena itu, dalam skenario proyeksi 2025–2030, pertumbuhan belanja pegawai perlu dibatasi maksimal pada kisaran 1-3% per tahun, sementara komponen lain dalam belanja operasi seperti belanja barang dan jasa dapat diarahkan tumbuh lebih progresif pada kisaran 6-9% sesuai dengan target kinerja pelayanan. Langkah ini akan menjaga proporsi belanja operasi tetap rasional tanpa mengorbankan efisiensi birokrasi.

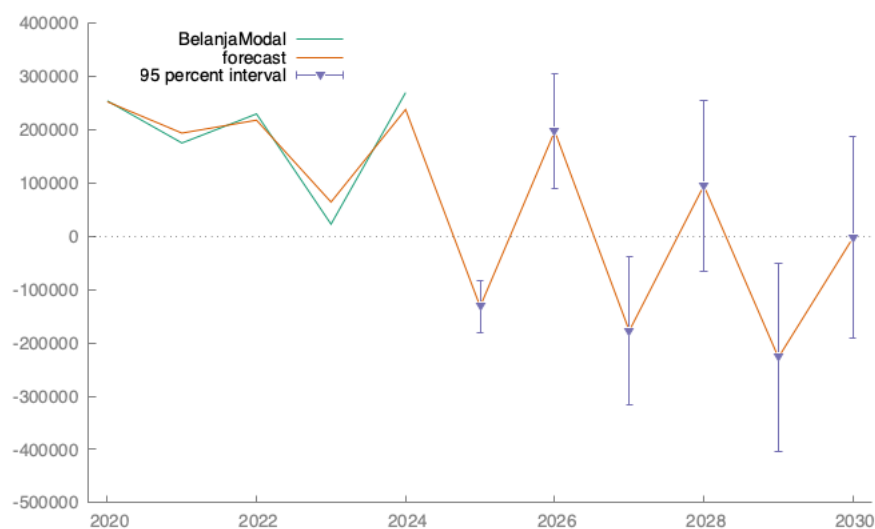
Untuk menjamin kesinambungan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan dasar, gap antara belanja operasi dan belanja modal perlu ditekan seminimal mungkin. Rasio belanja modal yang sehat, paling tidak berada di kisaran 20–25% dari total belanja yang hanya dapat dicapai jika belanja operasi tidak menyerap porsi anggaran yang terlalu besar. Oleh sebab itu, mulai tahun 2026, laju pertumbuhan belanja operasi kenaikan di stabilisasi 2-5% per tahun agar ruang belanja modal tetap tersedia dan mampu menopang target-target pembangunan daerah,

Selain isu rasio fiskal, komitmen terhadap *mandatory spending* menjadi kerangka yang tidak dapat ditawar. Belanja operasi secara struktural menjadi instrumen utama dalam memenuhi berbagai kewajiban regulatif seperti alokasi minimal 20% untuk pendidikan, 10% untuk kesehatan, hingga pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional yang diambil dari pajak rokok yang sifatnya rutin. Belanja operasi juga menjadi instrumen pelaksanaan kebijakan alokasi Dana Desa, diklat ASN, dan pelayanan publik berbasis kewenangan daerah. Artinya, forecast belanja operasi tidak hanya dipengaruhi oleh tren masa lalu, tetapi juga harus ditopang oleh kebutuhan eksternal yang sifatnya mengikat dan berbasis *output*.

Sebagai bagian dari transformasi pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja, pendekatan anggaran dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo 2026–2030 harus mengadopsi prinsip *money follows program*, bukan semata *money follows function* atau *money follows history*. Artinya, program-program prioritas yang dirancang untuk mendorong pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi dasar utama dalam menyusun alokasi belanja, baik operasi maupun modal.

Sebagai ilustrasi, jika target IKU yang ditetapkan adalah peningkatan capaian layanan pendidikan dasar, maka program yang dibutuhkan bisa mencakup penambahan guru di wilayah terpencil, pelatihan kompetensi tenaga pendidik, dan pengadaan media belajar digital. Belanja yang muncul dari kebutuhan ini tidak bisa dikotakkan hanya sebagai belanja pegawai atau barang dan jasa, melainkan sebagai satu paket kebijakan yang bermuara pada peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, belanja operasi yang menyertainya menjadi sah dan strategis, karena mendukung capaian program prioritas karena berorientasi pada *target-driven spending* sehingga forecast keuangan tidak lagi hanya sekadar ekstrapolasi data masa lalu, tetapi dimodifikasi berdasarkan kebutuhan sumber daya untuk mencapai *outcome* pembangunan.

b. Belanja Modal



Gambar 2. 42 Hasil Forecast (peramalan) dengan Software Gretl Belanja Modal Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 – 2024

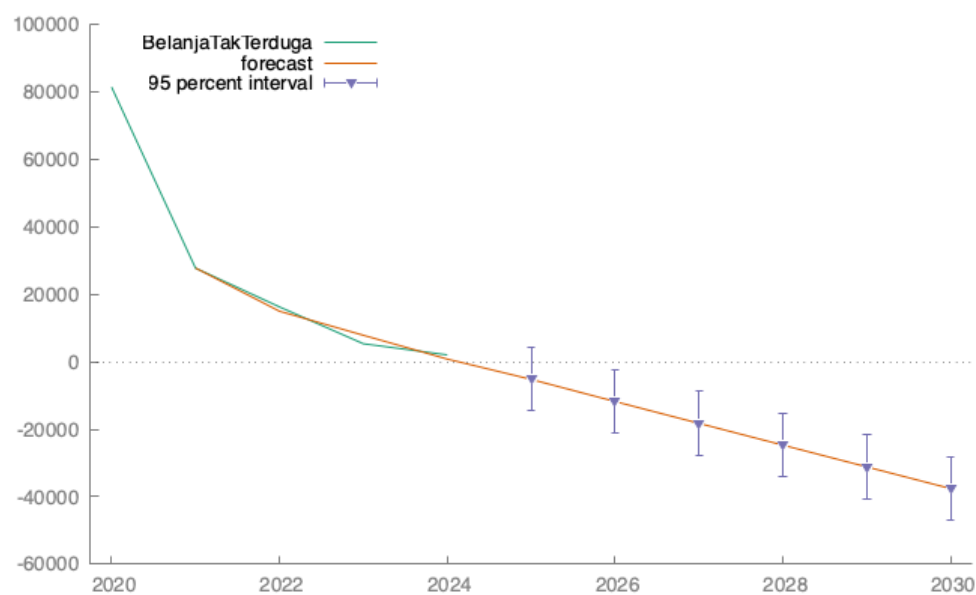
Sumber: BPPKAD Kabupaten Probolinggo, 2025 (diolah)

Forecast belanja modal Kabupaten Probolinggo periode 2025–2030 menunjukkan pola yang fluktuatif dan tidak stabil, bahkan cenderung menurun drastis hingga memunculkan angka negatif pada tahun-tahun tertentu seperti 2027 dan 2029. Jika tren ini dibiarkan tanpa intervensi, maka kapasitas fiskal daerah dalam mendanai pembangunan jangka menengah yang berkesinambungan akan terganggu. Padahal, dalam konteks dalam RPJMD ini dan prinsip *money follows program*, belanja

modal justru harus menjadi motor utama transformasi layanan publik dan pembangunan infrastruktur strategis.

Maka dari itu, untuk mendukung misi SAE Infrastruktur Kabupaten Probolinggo, yaitu percepatan pembangunan infrastruktur di daerah basis produksi, daerah terluar, terpencil, serta wilayah industri secara merata, dilakukan penyesuaian dalam proyeksi belanja modal. Proporsi belanja modal dirancang lebih besar pada tahun-tahun awal guna menggenjot pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama. Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap percepatan pembangunan strategis, yang diambil melalui refocusing anggaran dari pos-pos lain, termasuk belanja operasional dan program non-prioritas. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan fondasi yang kokoh dalam mendukung aktivitas ekonomi, meningkatkan konektivitas wilayah, serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh Kabupaten Probolinggo.

c. Belanja Tak Terduga



Gambar 2. 43 Hasil Forecast (peramalan) dengan Software Gretl Belanja Tak Terduga Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 – 2024

Sumber: BPPKAD Kabupaten Probolinggo, 2025 (diolah)

Forecast belanja tak terduga (BTT) Kabupaten Probolinggo menunjukkan tren penurunan tajam hingga negatif pada periode 2025–2030. Jika tren ini dibiarkan mengikuti ‘business as usual’ maka akan muncul implikasi serius bagi kemampuan daerah dalam merespons kondisi darurat dan kejadian luar biasa. Dalam kerangka pengelolaan

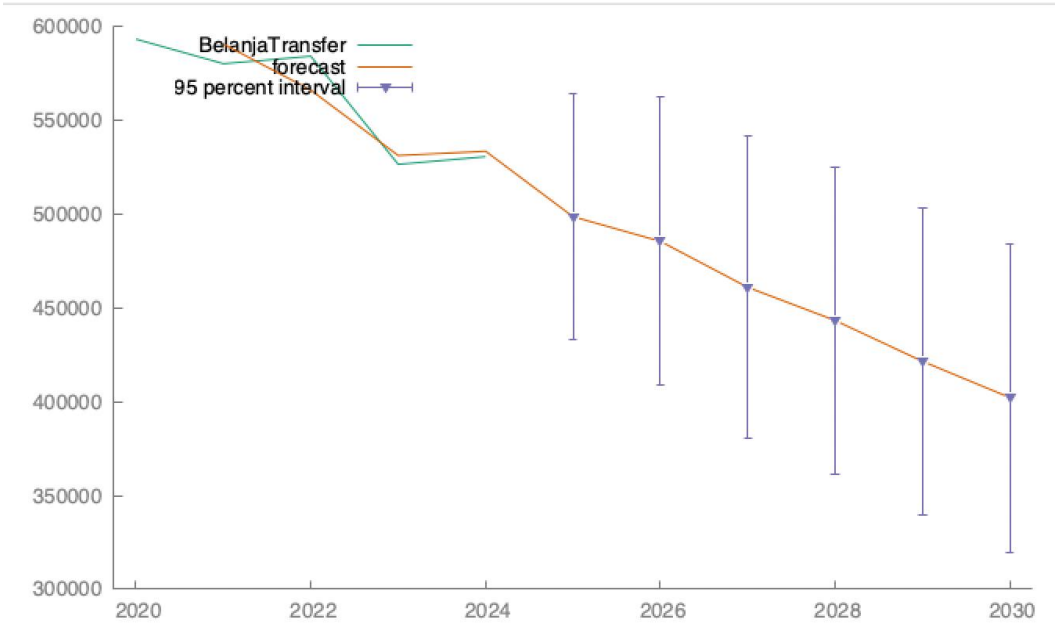
fiskal daerah yang akuntabel dan adaptif, BTT seharusnya tidak diperlakukan sebagai residu dari belanja, tetapi sebagai instrumen kunci manajemen risiko fiskal.

Secara normatif, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 telah menetapkan bahwa BTT digunakan untuk menanggulangi keadaan darurat, bencana, hingga kebijakan yang belum teranggarkan. Dengan karakteristiknya yang tak dapat diprediksi secara statistik, pendekatan proyeksi BTT tidak bisa hanya mengandalkan tren historis sebagaimana pada pos belanja lainnya. Oleh karena itu, proyeksi yang menghasilkan angka negatif harus dikoreksi dengan menetapkan porsi BTT secara normatif dan strategis.

Sesuai dengan Dokumen RPJPD, Kabupaten Probolinggo memiliki potensi risiko bencana geologis dan hidrometeorologis yang cukup tinggi, seperti tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta bencana lainnya. Oleh karena itu, alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) menjadi kebutuhan strategis, bukan sekedar pemenuhan kewajiban administratif. Di sisi lain, kompleksitas dalam proses pembangunan daerah juga berpotensi menimbulkan hambatan pelaksanaan program, serta munculnya kebutuhan belanja mendesak lainnya yang belum dapat diprediksi sebelumnya.

Sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian fiskal (*fiscal prudence*), maka dalam dokumen RPJMD ini dialokasikan BTT sebesar 0,5%–1% dari total belanja daerah setiap tahunnya. Penetapan ini sejalan dengan prinsip *standby budget* sebagaimana diatur dalam dokumen RPKD dan kerangka konsolidasi fiskal daerah. Meskipun terdapat kenaikan alokasi dibanding periode sebelumnya, besarnya tetap dijaga dalam batas wajar agar tidak mengendapkan terlalu banyak dana yang berpotensi tidak terserap. Dengan demikian, alokasi fiskal tetap optimal, karena ruang anggaran yang tersedia dapat lebih diarahkan untuk belanja-belanja yang produktif dan mendukung prioritas pembangunan daerah secara langsung, sambil tetap menjaga kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi darurat.

d. Belanja Transfer



Gambar 2. 44 Hasil Forecast (peramalan) dengan Software Gretl Belanja Transfer Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 – 2024

Sumber: BPPKAD Kabupaten Probolinggo, 2025 (diolah)

Forecast belanja transfer Kabupaten Probolinggo menunjukkan pola yang khas selama periode 2025–2030, dengan alokasi yang cenderung lebih rendah dibanding baseline awal 2024 di tahun-tahun awal, namun secara bertahap meningkat sebesar 1% setiap tahunnya hingga mencapai puncaknya di tahun terakhir. Dalam kerangka Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penurunan belanja transfer dapat dibenarkan selama tetap menjaga sinergi antar level pemerintahan dalam pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah. Tren ini menjadi peluang untuk mereformasi pengelolaan transfer ke desa agar lebih berorientasi pada hasil (outcome-oriented) dibandingkan pada input semata.

Adapun justifikasi utama penurunan ini adalah:

1. Efisiensi dan Optimalisasi Anggaran, desa didorong untuk lebih mandiri dalam mengelola sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap belanja transfer, serta memanfaatkan Dana Desa dan alokasi lainnya secara efektif.
2. Penguatan Akuntabilitas Desa, penurunan dengan tetap ada kenaikan 1% dapat menjadi mekanisme untuk memastikan bahwa

- belanja transfer digunakan secara transparan dan sesuai prioritas pembangunan, tanpa membebani fiskal daerah yang terbatas.
3. Sinkronisasi dengan Kebijakan Fiskal Pusat, dengan adanya Dana Desa yang terus meningkat dari pemerintah pusat, pengurangan belanja transfer dari kabupaten dapat diseimbangkan tanpa mengorbankan layanan dasar di tingkat desa.
 4. Transformasi Digital dan Inovasi Desa, tren penurunan ini mendorong desa untuk mengadopsi inovasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran, seperti integrasi dalam SIPD, yang dapat menciptakan efisiensi lebih tinggi dalam pengelolaan dana.

2.2.2.2.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Proyeksi pembiayaan daerah merupakan salah satu elemen penting dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Dalam kerangka RPJMD Kabupaten Probolinggo, pembiayaan diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, termasuk peningkatan kualitas layanan publik, penguatan ekonomi daerah, dan pembangunan infrastruktur strategis.

Pendekatan pembiayaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, efisiensi penggunaan anggaran, dan potensi sumber pembiayaan alternatif. Berdasarkan masukan dari Panitia Khusus RPJMD DPRD Kabupaten Probolinggo perlunya mengevaluasi tiga skema alternatif pembiayaan yang dapat digunakan, yaitu Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pinjaman Daerah.

Evaluasi terhadap skema ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang dipilih tidak hanya sesuai dengan kebutuhan daerah tetapi juga mampu mempercepat pencapaian target pembangunan dengan risiko yang terkelola. Setelah melalui kajian mendalam, pinjaman daerah dipilih sebagai alternatif utama karena dinilai paling relevan dalam konteks pembangunan prioritas di Kabupaten Probolinggo.

**Tabel 2. 42 Perbandingan Skema Alternatif Proyeksi
Pembiayaan**

Aspek	KPBU	DAK	Pinjaman Daerah
Sumber Dana	Swasta dan pemerintah	Pemerintah pusat	Lembaga keuangan
Beban Pemerintah	Minimal (bagi hasil risiko)	Tidak ada (hibah)	Tinggi (pengembalian pokok dan bunga)
Fleksibilitas	Tinggi, tapi hanya untuk proyek yang menghasilkan pendapatan (revenue)	Rendah, tergantung alokasi pusat	Tinggi, dapat digunakan langsung untuk proyek prioritas
Waktu Pelaksanaan	Lama (proses tender dan perjanjian)	Cepat (alokasi langsung)	Relatif cepat setelah persetujuan
Risiko Utama	Proyek gagal jika swasta mundur	Tidak dapat dipastikan karena sifatnya <i>given</i>	Beban utang dan risiko bunga yang harus dikelola
Kecocokan	Proyek yang menghasilkan pendapatan atau retribusi (jalan tol, fasilitas komersial, dll.)	Proyek prioritas pemerintah pusat	Proyek prioritas daerah seperti infrastruktur jalan
Justifikasi	Tidak relevan karena proyek ini bukan jalan tol dan tidak menghasilkan pendapatan	Angka dapat diandalkan karena sifatnya spekulatif	Mendukung percepatan pembangunan prioritas sesuai RPJMD

Setelah melakukan proses analisis peramalan (forecast), evaluasi terhadap realisasi APBD tahun sebelumnya, dan membuat skema pembiayaan alternatif berikut ini disajikan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2030. Proyeksi ini mencerminkan arah kebijakan fiskal daerah yang direncanakan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan, untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat di tahun mendatang. Berikut adalah rincian proyeksi yang lebih terperinci:

Tabel 2. 43 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2030

NO	URAIAN	BASELINE 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PENDAPATAN						
	A. Pendapatan Asli Daerah	348.707.288.652,34	460.087.599.015,78	506.096.358.917,36	556.705.994.809,09	612.376.594.290,00	673.614.253.719,00
	B. Pendapatan Transfer	2.101.934.396.441,00	2.030.370.690.612,64	2.050.674.397.518,77	2.071.181.141.493,96	2.091.892.952.908,90	2.112.811.882.437,98
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.195.012.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.451.836.697.993,34	2.490.458.289.628,42	2.556.770.756.436,12	2.627.887.136.303,05	2.704.269.547.198,89	2.786.426.136.156,98
2	BELANJA						
	Belanja Operasi	1.768.005.833.840,99	1.840.946.688.947,13	1.862.206.192.693,69	1.890.139.285.584,10	1.959.269.780.636,19	2.001.000.822.851,29
	Belanja Modal	270.139.109.894,00	180.186.335.215,44	183.199.719.835,12	213.787.534.153,03	265.760.243.665,46	285.458.604.721,53
	Belanja Tak Terduga	2.081.957.893,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	Belanja Transfer	530.711.938.000,00	501.351.330.601,30	516.364.843.907,31	523.960.316.565,92	536.739.522.897,24	539.966.708.584,16
	JUMLAH BELANJA	2.570.938.839.627,99	2.532.484.354.763,87	2.571.770.756.436,12	2.637.887.136.303,05	2.771.769.547.198,89	2.836.426.136.156,98
	SURPLUS/DEFISIT	-119.102.141.634,65	-42.026.065.135,45	-15.000.000.000,00	-10.000.000.000,00	-67.500.000.000,00	-50.000.000.000,00
3	PEMBIAYAAN						
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
	A. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	292.183.859.175,15	72.026.065.135,40	55.000.000.000,00	50.000.000.000,00	47.500.000.000,00	30.000.000.000,00
	B. Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	0,00	0,00				
	C. Pencairan Dana Cadangan					30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	292.183.859.175,15	72.026.065.135,40	55.000.000.000,00	50.000.000.000,00	77.500.000.000,00	60.000.000.000,00
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN						

NO	URAIAN	BASELINE 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
	A. Pembentukan Dana Cadangan	-	15.000.000.000	20.000.000.000	25.000.000.000	-	
	B. Penyertaan Modal Daerah	-	5.000.000.000	10.000.000.000	5.000.000.000		
	C. Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah (KPBU)	-	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	30.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	292.183.859.175,15	42.026.065.135	15.000.000.000	10.000.000.000	67.500.000.000	50.000.000.000
	SILPA	173.314.992.293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo, 2025 (diolah)

2.3 Permasalahan dan Isu-isu Strategis

Pada bagian sebelumnya telah tersaji data, fakta dan sedikit Analisa perkembangan tentang kondisi daerah dalam lima tahun terakhir, pada aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah maupun pengelolaan keuangan daerah. Dari penjelasan tersebut, maka selanjutnya akan disusun permasalahan dan isu strategis apa yang menjadi tantangan Pembangunan di Kabupaten Probolinggo dalam lima tahun ke depan. Dalam memformulasikan permasalahan, maka akan dilakukan dengan menggunakan *inward* dan *outward looking*. *Inward looking* digunakan dalam memformulasikan permasalahan Pembangunan dengan berangkat dari kondisi internal; sedangkan *outward looking* digunakan untuk mempertimbangkan kondisi eksternal (baik dalam skala regional, nasional maupun internasional) yang mempengaruhi kondisi sosio-ekonomi dan lingkungan yang ada di Kabupaten Probolinggo di masa yang akan datang. Perpaduan antara dua dimensi ini akan menjadi dasar dalam penajaman visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo terpilih untuk periode 2025–2029 adalah dr. Mohammad Haris (Gus Haris) dan Fahmi AHZ (Ra Fahmi). Keduanya resmi dilantik pada tanggal 20 Februari 2025, Kabupaten Probolinggo tahun 2025- 2029 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah – Religius serta Eksis Berdaya Saing”).

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Probolinggo pada dasarnya masih sejalan dengan jenjang kerangka logis dari dokumen-dokumen perencanaan daerah lainnya. Di mana di dalamnya terdapat dua level permasalahan; yaitu permasalahan yang bersifat lintas sektor dan permasalahan yang bersifat spesifik di masing-masing sektor atau urusan. Dalam dokumen RPJMD ini diharapkan masalah yang bersifat sektoral dapat saling terkait satu sama lain dalam menunjang ketercapaian target permasalahan yang bersifat lintas sektor. Dengan demikian masing-masing urusan dapat berkolaborasi dalam mencapai joint outcomes. Ketika permasalahan telah dirumuskan sebagai permasalahan bersama, maka harapannya ke depan berbagai

program kegiatan juga akan dapat terintegrasi permasalahan bersama. Bukan permasalahan sendiri-sendiri dan diselesaikan sendiri-sendiri tanpa ada kolaborasi baik antar instansi yang ada di internal Pemerintah Kabupaten Probolinggo maupun dengan elemen (multiple -helix) lain di luar pemerintahan daerah.

2.3.1.1 Permasalahan Pembangunan Makro Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa pada bagian ini akan menjadi dasar dirumuskannya masalah bersama, yang pada akhirnya akan bermuara pada upaya bersama untuk menyelesaikan masalah bersama (joint outcomes). Sehingga ketercapaian pembangunan bukan hanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, tetapi secara bertahap juga dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang tidak lagi bersifat ego-sektoral melainkan lebih bersifat kolaboratif. Adalah permasalahan bersama (atau makro) ini secara umum adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka kemiskinan dan ketergantungan.

Permasalahan kemiskinan di daerah masih menjadi tantangan utama pembangunan yang ditunjukkan dengan masih tingginya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Faktor penyebabnya bersifat multidimensi, antara lain rendahnya akses masyarakat miskin terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, terbatasnya lapangan kerja produktif, rendahnya keterampilan tenaga kerja, serta lemahnya akses terhadap modal dan pasar. Kondisi ini akan meningkatkan kerentanan terhadap guncangan ekonomi, bencana alam, maupun kenaikan harga kebutuhan pokok, yang membuat kelompok miskin semakin sulit meningkatkan taraf hidupnya. Selain itu, ketimpangan pembangunan antarwilayah juga berkontribusi menimbulkan kesenjangan kesempatan, sehingga sebagian masyarakat di daerah pedesaan atau terpencil tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Kemiskinan Kabupaten Probolinggo saat ini berada pada angka 16,45%, yang mana masih di atas rata-rata di Provinsi Jawa Timur (8.57%) dan rata-rata nasional (9,79%). Dalam masalah ini, pendekatan Modal Manusia (Human Capital) menjadi penting terutama dalam rangka memutus transmisi kemiskinan agar terjadi mobilitas sosial di masa yang akan datang. Di sisi lain, Kabupaten Probolinggo juga masih

memiliki masalah dengan angka ketergantungan yang tinggi, yang jika tidak dikelola dengan baik akan berpotensi meningkatkan masalah kemiskinan.

Jika permasalahan ini tidak ditangani secara terpadu, kemiskinan berpotensi menimbulkan masalah sosial lain seperti meningkatnya pengangguran, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif. Hal ini menunjukkan perlu adanya kebijakan yang lebih komprehensif, kolaboratif dan terintegrasi dalam menuntaskan masalah kemiskinan.

2. Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Permasalahan rendahnya kualitas sumber daya manusia ditunjukkan oleh rendahnya capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengindikasikan masih adanya tantangan fundamental dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Rendahnya IPM umumnya disebabkan oleh tiga dimensi utama yang belum optimal, yaitu pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Pada aspek pendidikan, masih tingginya angka putus sekolah, rendahnya rata-rata lama sekolah, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas menjadi kendala dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja. Sedangkan dari segi kesehatan, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dasar, tingginya angka stunting, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat turut menekan angka harapan hidup. Sementara itu, dari sisi ekonomi, keterbatasan lapangan kerja produktif dan rendahnya produktivitas menyebabkan daya beli masyarakat belum mampu meningkat secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia belum sepenuhnya inklusif, di mana sebagian kelompok masyarakat masih tertinggal dalam memperoleh akses terhadap layanan dasar. Jika tidak ditangani dengan strategi yang terintegrasi, rendahnya IPM akan berdampak pada rendahnya kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal, lambatnya pertumbuhan ekonomi, serta meningkatnya kesenjangan sosial.

3. Masih kurang optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan.

Salah satu ukuran kinerja tata kelola pemerintahan adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Di tahun 2020, IRB Kabupaten Probolinggo sebesar 65,72 dan berpredikat B atau terkategori Baik dan menurun di

tahun 2021 dan 2022, masing-masing menjadi 62,81 dan 63,05 meskipun tetap terkategori Baik. Pada tahun 2023, IRB Kabupaten Probolinggo meningkat tajam menjadi 77,26 atau 2024 81,9. Di sisi lain, nilai SAKIP naik menjadi 67,11 dan Indeks Pelayanan Publik 4,2. Kendati demikian, sebagaimana diamanatkan oleh Dokumen RPJPD Kabupaten Probolinggo 2025 – 2045 bahwa permasalahan tata kelola masih membutuhkan perhatian, terutama dalam hal pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, dan terintegrasi sehingga memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya terhadap layanan fasilitas – fasilitas publik.

Selain itu, kurang optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan juga nampak dari pengelolaan keuangan dalam Kabupaten Probolinggo yang saat ini masih kurang optimal. Hal ini tercermin dari rata-rata rasio kemandirian yang hanya sebesar 12%, sedangkan rasio ketergantungan mencapai 86%. Tingginya rasio ketergantungan ini mengindikasikan pola hubungan keuangan daerah yang bersifat instruktif. Proporsi belanja operasi yang dominan dengan gap 55% dibandingkan belanja modal di Kabupaten Probolinggo menunjukkan pola pengelolaan anggaran yang kurang berpihak pada pembangunan jangka panjang. Selanjutnya, belanja pegawai yang mencapai 38% dari total belanja daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Probolinggo belum optimal dalam memenuhi ketentuan UU HKPD 2022, yang menetapkan batas maksimal 30% untuk belanja pegawai.

4. Masih rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah.

Rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah mencerminkan masih besarnya ketergantungan terhadap transfer dana dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH). Rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah ditunjukkan oleh rata-rata rasio kemandirian fiskal yang hanya sebesar 12%, sedangkan rasio ketergantungan mencapai 86%. Rendahnya tingkat kemandirian fiskal ini akan berdampak pada terbatasnya ruang fiskal daerah untuk membiayai program prioritas sesuai kebutuhan dan karakteristik lokal. Ketergantungan fiskal yang tinggi juga membuat daerah rentan terhadap perubahan kebijakan pusat, sehingga fleksibilitas dalam perencanaan dan penganggaran menjadi terbatas. Dampak jangka panjangnya, daerah akan sulit

mencapai kemandirian pembangunan yang berkelanjutan dan rawan menghadapi ketidakstabilan fiskal ketika transfer pusat mengalami penyesuaian.

5. Masih rendahnya penyediaan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, salah satu hal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan penyediaan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan. Layanan infrastruktur dasar dimaksud meliputi infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, jaringan listrik dan telekomunikasi, air bersih, sanitasi, permukiman layak, serta infrastruktur sosial seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan. Data menunjukkan bahwa Angka kelangsungan hidup bayi yang justru menurun dari 991,89 menjadi 987 per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini dapat mengindikasikan adanya tantangan pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, terutama dalam pemantauan kehamilan dan akses terhadap fasilitas bersalin. Sementara penyediaan layanan pendidikan berkualitas di daerah ini dapat dilihat salah satunya dari kenaikan RLS yang lambat dibandingkan HLS mengindikasikan adanya hambatan struktural, misalnya keterbatasan akses ke jenjang pendidikan menengah dan atas, serta kebutuhan ekonomi yang memaksa sebagian penduduk memasuki pasar kerja lebih awal. Selain masalah pendidikan dan kesehatan, akses terhadap air bersih di Kabupaten Probolinggo masih terdapat defisit sebesar -211.707.135,98 m³/tahun. Akses rumah tangga terhadap air bersih dan sanitasi layak juga masih stagnan di bawah angka 65% serta ketersediaan pangan yang masih terdapat selisih sebesar 54.171.055,80 kg/tahun. Berdasarkan capaian kinerja indikator “Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten”, terjadi penurunan yang signifikan, dari 65,24% pada tahun 2023 menjadi hanya 28,89% di tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam sistem pengelolaan sampah, baik dari sisi kelembagaan, pembiayaan, infrastruktur, maupun partisipasi masyarakat.

Selama ini, permasalahan lingkungan yang termuat dalam dokumen perencanaan lebih menekankan pada konservasi, dengan rumusan permasalahan “Masih belum optimalnya pemanfaatan sumber

daya lokal untuk kesejahteraan dan konservasi”. Namun demikian, aspek pengelolaan sampah yang berdampak langsung terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat belum tergambar secara memadai. Padahal dalam isu strategis daerah telah termuat agenda penting yaitu “Penguatan pondasi penyelesaian permasalahan lingkungan hidup dan sumber daya alam”. Oleh karena itu, perlu penajaman dan penambahan isu permasalahan terkait pengelolaan sampah sebagai salah satu prioritas yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan. Hanya saja, untuk memenuhi kebutuhan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan ini diperlukan pembiayaan yang cukup besar sehingga keterbatasan biaya dan anggaran menjadi masalah yang harus diselesaikan. Untuk ini diperlukan inovasi pembiayaan agar dapat terpenuhinya kebutuhan anggaran dalam penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat.

6. Masih belum optimalnya pemanfaatan sumber daya lokal untuk kesejahteraan dan konservasi.

Kabupaten Probolinggo memiliki sumber daya alam dan manusia yang sangat besar dan diharapkan dapat menjadi modal dasar bagi pembangunan ke depan. Dalam konteks ekonomi pertanian, dengan hutan produksi seluas 33.193,27 hektar, sawah irigasi seluas 38.163 hektar dan sawah tadah hujan seluas 7.650 hektar, belum termasuk potensi perikanan. Daya saing Kabupaten Probolinggo dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan cukup tinggi meskipun dengan tren menurun. Dalam konteks pariwisata, Kabupaten Probolinggo memiliki Gunung Bromo, Gunung Argopuro, Pulau Gili Ketapang, Air Terjun Madakaripura, dan sebagainya. Akan tetapi kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah saat ini masih tergolong rendah. Potensi struktural seharusnya dapat dioptimalkan dengan berbagai program yang berorientasi pada tidak hanya intensifikasi, diversifikasi dan ekstensifikasi melainkan juga dengan adanya inovasi. Salah satunya dengan mengembangkan ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai program prioritas ke depan. Perlunya terobosan ini tidak hanya untuk menjawab pemanfaatan potensi ekonomi, tetapi juga untuk kebutuhan konservasi. Di mana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Probolinggo pada tahun 2024 mengalami penurunan (61,56)

dibandingkan tahun 2023 (64,14). Kendati posisi Kabupaten Probolinggo dalam Green Economy Indeks (GEI) saat ini masih tergolong rendah. Akan tetapi dengan komitmen dan kebijakan yang kuat ke depannya diharapkan dapat menopang pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Inisiasi pengembangan ekonomi biru dan ekonomi hijau ini juga merupakan amanat dari RPJMN 2024 – 2029.

7. Belum optimalnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Dalam lima tahun terakhir, capaian Kabupaten Probolinggo di bidang perlindungan anak, kesetaraan gender, dan inklusivitas menunjukkan dinamika yang perlu mendapat perhatian. Indeks Perlindungan Anak (IPA) mengalami penurunan dari 72,5 pada 2020 menjadi 60,72 pada 2024, meskipun persentase korban kekerasan anak tertangani tetap 100%. Penurunan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan kasus tidak diikuti dengan penguatan sistem pencegahan di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menurun dari 0,532 menjadi 0,47, yang berarti ketimpangan gender semakin mengecil. Namun, kenaikan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dari 85,61 ke 86,63 masih relatif lambat. Disabilitas Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti masih di bawah 1,5%.

Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Subbab II dokumen ini menjelaskan tentang kondisi capaian kinerja Aspek Pelayanan Umum atau penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo hingga tahun 2024. Permasalahan pembangunan daerah pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah muncul dari adanya celah/gap expectation antara kinerja pembangunan yang telah dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan. Celah tersebut juga dapat muncul antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut disusun. Berdasarkan data di sub Bab II pada Aspek Pelayanan Umum, dapat diidentifikasi permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Probolinggo.

**Tabel 2. 44 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten Probolinggo**

No	Urusan/Permasalahan
A	Urusan Pemerintah Wajib
1	Urusan Pendidikan ➤ Angka partisipasi murni, khususnya di PAUD dan SMP/MTs/ sederajat, di Kabupaten Probolinggo perlu ditingkatkan. Angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun juga perlu ditingkatkan. Pun demikian dengan angka putus sekolah masih perlu ditekan, baik di tingkat SD dan SMP. Adanya anak tidak sekolah (ATS) juga harus diatasi. ➤ Kebutuhan tenaga pendidik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, belum sepenuhnya terpenuhi. ➤ Secara keseluruhan, indikator penting bidang pendidikan pendukung IPM di Kabupaten Probolinggo masih relatif rendah. Rata-rata lama sekolah memang meningkat dari tahun ke tahun, namun masih relatif rendah, Pun demikian harapan lama sekolah relatif rendah. ➤ Keterbatasan ketersediaan “sekolah/pendidikan inklusif”
2	Urusan Kesehatan ➤ Capaian hampir seluruh indikator-indikator standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di Kabupaten Probolinggo masih relatif rendah. Cakupan layanan terhadap ibu hamil, bayi baru lahir, balita, usia produktif yang memerlukan layanan kesehatan, terutama terkait prevelansi stunting harus ditingkatkan atau minimal keluar dari peringkat tertinggi dari rata-rata Jawa Timur ➤ Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup berfluktuasi dan cenderung meningkat. Pun demikian, dengan Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup yang cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kuantitas (akses atau cakupan) dan kualitas layanan kesehatan harus ditingkatkan.
3	Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ➤ Masih perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang berbasis penataan ruang. Jalan berkeselamatan menjadi prasyarat dasar dalam jumlah sesuai kebutuhan. ➤ Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi aman masih rendah. ➤ Budaya masyarakat pedesaan yang masih memanfaatkan sungai sebagai tempat BAB, meskipun telah tersedia tangki septik komunal, menyebabkan pencemaran air sungai. Kondisi ini perlu menjadi perhatian, terutama karena sungai juga digunakan sebagai sumber irigasi, sehingga berdampak pada kualitas air dan keberlanjutan pertanian. ➤ Masih rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan kelompok ataupun badan pengelola air minum ➤ Pembangunan jaringan air bersih masih terkendala akan dana dan juga biaya pemeliharaan yang tergolong cukup besar, permasalahan bertambah dengan potensi debit air yang kecil sehingga tidak sesuai dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. ➤ Perda RTRW Kabupaten Probolinggo belum ditetapkan karena sampai saat ini sedang berproses yaitu berada pada tahapan

No	Urusan/Permasalahan
	pembahasan lintas sektor provinsi dan pusat, ditargetkan materi teknis akan rampung pada tahun 2025 ➤ Permasalahan akan pendirian sanksi masih terkendala akan peraturan yang berlaku, masih belum ada sanksi yang tegas dalam menindaklanjuti pelanggaran tata ruang. ➤ Penanganan dan pengelolaan air limbah yang belum optimal (IPAL Komunal, Septic Tank Komunal, Sarana pengangkutan lumpur Tinja Terjadwal) ➤ Masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistem air limbah Rumah Tangga dan industri Rumah Tangga di perkotaan dan perdesaan ➤ Pemahaman masyarakat tentang pentingnya sanitasi masih rendah ➤ Penyelenggaraan sarana prasarana persampahan yang belum memadai khususnya sampah regional ➤ Belum tersusunnya RTBL beberapa kawasan sebagai acuan Pemerintah Daerah dan Swasta dalam mengembangkan lingkungan permukiman ➤ Kurangnya pengawasan dan pengendalian proses penyelenggaraan BG di Kab/Kota ➤ Perlu peningkatan SDM yang memiliki kapasitas Ahli bangunan Gedung pemeriksa bangunan ➤ Belum diberlakukannya Surat Layak Fungsi (SLF) pada bangunan gedung lama ➤ Masih Banyak saluran irigasi yang sudah tua dan tidak terawat, menyebabkan kebocoran dan pemborosan air ➤ Beberapa daerah masih kekurangan akses ke jaringan irigasi yang memadai, mengakibatkan ketidakmerataan distribusi air ➤ Limbah dari industri dan pertanian mencemari sumber air, mengurangi kualitas air yang digunakan untuk irigasi dan berdampak pada kesehatan tanaman ➤ Peningkatan salinitas di daerah pesisir mengancam kesuburan tanah, yang berdampak pada hasil pertanian
4.	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	➤ Rata-rata kebutuhan masyarakat akan RLH (Rumah Layak Huni) tergolong sangat tinggi namun belum semuanya terpenuhi ➤ Persentase rumah tangga pengguna air bersih, berlistrik maupun bersanitasi juga masih relatif rendah. ➤ Masih terdapatnya kawasan permukiman kumuh di kabupaten Probolinggo yang perlu penataan maupun peremajaan ➤ Belum adanya Perda yang mengatur tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman ➤ Masih adanya kawasan rawan bencana alam serta belum tertanganinya rumah rusak akibat bencana terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ➤ Masih banyaknya Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) menempati RTLH ➤ Belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman (PSU) ➤ Masih banyak pengembang yang belum menyerahkan fasum/fasos ke Pemerintah daerah, sehingga pemeliharaan tidak optimal.

No	Urusan/Permasalahan
5	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	➤ belum sepenuhnya pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) serta terhadap Perda terselesaikan; tingkat waktu respon bencana kebakaran belum mencapai 100%. ➤ Belum adanya Peraturan Daerah yang Khusus tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dan kebencanaan ➤ Indikator SPM dalam bidang ini, khususnya pada layanan kebencanaan, yaitu layanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, dan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, masih belum mencapai 100%. ➤ Kurangnya pemahaman masyarakat, aparatur dan stakeholder dalam penegakan trantibum-linmas, pengurangan Resiko Bencana, Kurangnya sarana dan prasarana serta peralatan penanggulangan bencana, Belum optimalnya penanganan darurat bencana, dan Banyaknya lokus yang harus diperbaiki atau dibenahi sebagai dampak terjadinya bencana
6	Urusan Sosial
	➤ Kemiskinan masih menjadi permasalahan daerah, sehingga penurunan tingkat kemiskinan harus menjadi prioritas pembangunan di kabupaten Probolinggo. ➤ Layanan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial masih belum optimal. ➤ Capaian indikator SPM bidang kesejahteraan sosial pun perlu ditingkatkan.
7	Urusan Tenaga Kerja
	➤ Terbatasnya aksesibilitas dan kesempatan kerja bagi angkatan kerja (Kurangnya lapangan pekerjaan) ➤ Perlu adanya peningkatan kompetensi tenaga kerja. Rendahnya kompetensi tenaga kerja menjadi salah satu faktor tingginya angka pengangguran, dengan demikian Pendidikan life skill perlu dimasifkan pada angkatan kerja yang belum bekerja. ➤ Rendahnya perlindungan terhadap pekerja/buruh
8	Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	➤ Masih adanya permasalahan kesetaraan gender. ➤ Permasalahan dalam pemenuhan hak-hak anak. Masih terdapat tenaga kerja di bawah umur di kabupaten Probolinggo
9	Urusan Pangan
	➤ Cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat / desa masih kurang. ➤ Masih banyak wilayah di Probolinggo rentan pangan ➤ OKKPD/UPT Pengawasan dan sertifikat hasil pertanian belum optimal sehingga pengawasan pangan belum berjalan ➤ Sumber Daya Manusia di urusan pangan masih sangat kurang
10	Urusan Pertanahan
	➤ Belum terpenuhinya data kebutuhan perencanaan pembangunan di bidang pertanahan dan tata bangunan

No	Urusan/Permasalahan
	➤ Pengembangan paradigma baru dalam perencanaan kota dan desain lingkungan yang lebih inklusif dan ramah lingkungan belum sejalan / belum ditindaklanjuti dengan pemenuhan data rencana kebutuhan tanah Pemerintah Daerah 5 tahun kedepan ➤ Kecenderungan pertumbuhan investasi di Kabupaten Probolinggo khususnya berdampak pada permintaan izin lokasi untuk perolehan tanah dalam rangka investasi ➤ Adanya potensi konflik pertanahan seiring meningkatnya kebutuhan pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum ➤ Tumpang tindih urusan pertanahan antara Bidang Aset Badan Keuangan Daerah, Dinas PMPTSP dengan Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
11	Urusan Lingkungan Hidup
	➤ Kualitas lingkungan hidup yang perlu ditingkatkan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berfluktuasi. Pada tahun 2020, IKLH berada pada angka 63,4 % dan mengalami sedikit peningkatan menjadi 64,17 % pada tahun 2021. Namun, terjadi penurunan cukup signifikan di tahun 2022 menjadi 60,38 % sebelum kembali naik ke angka 64,14 % pada tahun 2023. Di tahun 2024, IKLH kembali menurun menjadi 61,56 %. ➤ Peningkatan kualitas lingkungan perlu dilakukan terhadap seluruh komponen lingkungan, khususnya pada kualitas air dan tutupan lahan yang memiliki indeks rendah. penurunan tajam pada Indeks Kualitas Air, yang turun dari 47,78 % di tahun 2023 menjadi hanya 36,25 % pada tahun 2024. Indeks ini bahkan menunjukkan tren menurun sejak tahun 2020, dari angka 50 % ke 36,25 % di 2024, mencerminkan tantangan serius dalam pengelolaan kualitas air. ➤ Rasio jumlah timbulan sampah yang relatif besar dibandingkan dengan sarpras persampahan yang tersedia ➤ Kurangnya kapasitas SDM bidang sanitary landfill dan pengelolaan sampah ➤ Terdapat industri RT / Kecil yang belum menerapkan IPAL ➤ Rendahnya kualitas air permukaan dan kerusakan lahan ➤ Banyaknya alih fungsi lahan ke pemukiman dan industri
12	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	➤ Belum optimalnya pelayanan sehingga kepemilikan administrasi kependudukan (KTP, KK, Akte kelahiran, akta kematian serta kartu identitas anak) belum mencakup semua pemerlunya. ➤ Belum memadainya perangkat teknologi informasi dan sarana prasarana pendukung pelayanan publik ➤ Jumlah Sumber Daya Manusia masih kurang ➤ Kurangnya Pendanaan untuk pelaksanaan Diklat/ Bimbingan Teknis guna peningkatan Kapasitas Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan Pelayanan Administrasi Kependudukan ➤ Sarana Mobil Pelayanan Keliling yang belum memadai untuk Kegiatan Jemput Bola Administrasi Kependudukan di 24 Kecamatan, 330 Desa/ Kel ➤ Belum optimalnya sosialisasi tentang administrasi kependudukan
13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	➤ Pemberdayaan masyarakat dan desa masih relatif rendah.

No	Urusan/Permasalahan
	➤ Kuantitas pemerintah desa dalam membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan benar juga perlu ditingkatkan.
14	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	➤ Pengendalian jumlah penduduk dan pelaksanaan Keluarga Berencana yang belum optimal dan perlu ditingkatkan ➤ Kegiatan BOKB yang penyerapannya tidak maksimal. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan kegiatan BOKB jadwal tidak sesuai dengan yang telah direncanakan. ➤ Keterbatasan kerja sama/kolaborasi antar sektor (perangkat daerah) dalam pengelolaan urusan pengendalian penduduk dan KB
14	Urusan Perhubungan
	➤ Capaian indeks jalan berkeselamatan di Kabupaten Probolinggo masih relatif rendah ➤ Layanan penyediaan sarana-prasarana transportasi yang berkualitas juga masih terbatas. ➤ Meningkatnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi dan Kinerja Pelayanan Transportasi yang kurang cepat ➤ Menurunnya pelayanan angkutan umum ➤ Meningkatnya angka kecelakaan dan gangguan keamanan, di darat maupun laut ➤ Kurangnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda/multimoda
15	Urusan Komunikasi dan Informatika
	Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat menciptakan kebutuhan-kebutuhan baru penyediaan sistem, infrastruktur pendukung, maupun SDM penyelenggara pelayanan pemerintahan berbasis TIK yang terus berkembang
16	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	➤ Masih rendahnya persentase koperasi aktif maupun sehat. ➤ Usaha mikro yang berkembang pun masih relatif rendah. Usaha mikro yang naik kelas juga relatif rendah. ➤ Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian yang kompeten untuk melakukan pembinaan ➤ Terbatasnya fasilitas bagi peningkatan akses permodalan usaha mikro ➤ Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian dan usaha kompeten mikro yang ➤ Tingkat kualitas produk Usaha Mikro, Kurang Modal, terbatasnya akses permodalan dan pemasaran UM ➤ Pelaku Usaha Mikro yang kurang memiliki daya juang dan daya tahan berusaha
17	Urusan Penanaman Modal
	➤ Daya tarik investasi daerah yang masih perlu ditingkatkan. ➤ Meskipun jumlah investasi cenderung meningkat, namun dari sisi nilai investasinya berfluktuasi.
18	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
	➤ Keterlibatan pemuda dalam pembangunan daerah belum optimal.
19	Urusan Kebudayaan
	➤ Pembinaan seni, budaya dan keagamaan yang masih terbatas.

No	Urusan/Permasalahan
20	Urusan Perpustakaan
	➤ Belum optimalnya layanan perpustakaan. ➤ Belum tersedianya payung hukum tentang perpustakaan ➤ Banyak desa yang belum mengalokasikan dana desa untuk perpustakaan desa
21	Urusan Kearsipan
	➤ Belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku. ➤ SDM arsip/pengelola arsip yang masih terbatas ➤ Sarpras masih belum mendukung
22	Urusan Perikanan
	➤ Rendahnya produktivitas dan efisiensi usaha perikanan tangkap, budidaya perikanan, maupun usaha pengolahan hasil perikanan ➤ Penurunan SDI dan daya dukung lingkungan dikarenakan Adanya praktek IUU karena kurangnya kesadaran terhadap perikanan berkelanjutan, lemahnya penegakan hukum dalam bidang perikanan karena belum optimalnya koordinasi antar lembaga
23	Urusan Pariwisata
	➤ Jumlah objek wisata masih terbatas meskipun ada kecenderungan meningkat. ➤ Potensi wisata alam yang ada di Kabupaten Probolinggo sebagian besar berada di lokasi milik Perhutani ➤ Belum optimalnya pemasaran pariwisata secara digital ➤ Keterbatasan kolaborasi antar sektor (perangkat daerah) atau stakeholders dalam pembangunan pariwisata lainnya ➤ Keterbatasan pengelolaan pengembangan objek-objek/destinasi wisata yang ada maupun potensial ➤ Wisata belum berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan sektor ini masih rendah/terbatas
24	Urusan Pertanian
	➤ Daya dukung terhadap pengembangan pertanian secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat masih belum optimal. ➤ Harga sarana pertanian (pupuk) semakin mahal dan sulit diperoleh petani ➤ Ketersediaan air irigasi semakin terbatas untuk memenuhi kebutuhan budidaya pertanian yang semakin tinggi. ➤ Luas lahan pertanian semakin berkurang akibat beralih ke lahan non pertanian ➤ Belum optimalnya ketersediaan dan kemandirian pakan ternak pada kelompok tani ➤ Adanya ancaman penyakit hewan dan terbatasnya ketersediaan pangan asal hewan yang memiliki jaminan kelayakan pangan
25	Urusan Perdagangan
	➤ Pengembangan terhadap sektor strategis lainnya masih belum optimal. ➤ Belum tersedia kebijakan penetapan harga yaitu penetapan harga acuan yang berfungsi sebagai upaya dalam menjaga stabilitas harga melalui importasi dan penetapan harga eceran tertinggi yang digunakan untuk meredakan gejolak harga

No	Urusan/Permasalahan
	➤ Belum optimalnya aktivitas pasar rakyat dalam meningkatkan pendapatan para pedagang juga pelaku-pelaku ekonomi yang ada di masyarakat dan memudahkan akses transaksi jual beli dengan nyaman ➤ Keterbatasan ekspor komoditi potensial ➤ Kurangnya daya saing di sektor perdagangan dalam persaingan pembangunan ekonomi era global
26	Urusan Perindustrian
	➤ Pengembangan terhadap sektor strategis lainnya, yaitu sektor industri, masih belum optimal. ➤ Keterbatasan kawasan industri guna meningkatkan peran industri potensi lokal ➤ Kurangnya vokasi dan pendidikan dalam rangka membangun sumber daya manusia di bidang industri yang bisa memenuhi kebutuhan industri di Kabupaten Probolinggo ➤ Kurangnya daya saing di sektor industri dalam persaingan pembangunan ekonomi era global
27	Urusan Pemerintahan
	➤ Peningkatan Akuntabilitas dan reformasi birokrasi belum sesuai dengan harapan ➤ Kinerja penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah belum optimal ➤ Kualitas pelayanan belum optimal ➤ Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal ➤ Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD ➤ Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia ➤ Masih rendahnya kualitas laporan kinerja SKPD ➤ Berkembangnya paham radikalisme dan paham anti Pancasila terutama paham radikal internasional ➤ Belum optimalnya peran DPRD dalam penataan produk hukum ➤ Keterbatasan kemandirian keuangan daerah (keterbatasan Penghasilan Asli Daerah), khususnya dalam membiayai pembangunan ➤ Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan kepada masyarakat maupun dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
28	Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	➤ Belum disusun rencana kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta rencana strategis Instansi Pemerintah ➤ Pengembangan Karier pegawai belum dijadikan dasar penempatan pegawai melalui mutasi dan / atau promosi pegawai ➤ Penilaian kinerja pegawai belum dikelola dan dijadikan dasar pertimbangan pengembangan kompetensi dan pengembangan karier pegawai ➤ Belum memiliki data base kepegawaian yang akurat dan mutakhir serta terintegrasi dengan semua layanan kepegawaian

No	Urusan/Permasalahan
	➤ Pengembangan kompetensi pegawai (ASN) belum memenuhi Standar Kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier, serta dalam pemberian pelayanan kepada Masyarakat
29	Urusan Pengawasan
	➤ Kurangnya kompetensi yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten ➤ Peningkatan kapasitas SDM perangkat daerah penunjang pelaksanaan SPI ➤ Alokasi penempatan SDM tidak sesuai dengan yang dibutuhkan ➤ "Zona Integritas dipandang sebagai proyek semata untuk mendapatkan Predikat, sehingga upaya continuous improvement masih rendah ➤ - Kinerja belum menjadi dasar pembangunan Zona Integritas ➤ - Inovasi yang dibangun tidak sesuai / berdampak langsung pada kinerja, penguatan integritas maupun kemudahan pelayanan" ➤ Pelaksanaan SPI perangkat daerah belum berjalan secara optimal ➤ Masih terbatasnya kegiatan pembinaan terhadap perangkat daerah dan pemerintahan desa ➤ Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan zona integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo ➤ Tuntutan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel serta bersih dari KKN ➤ Masyarakat masih belum puas terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan
30	Urusan Penelitian dan Pengembangan
	➤ Data tentang kelitbang dan inovasi PD belum terpetakan berdasarkan isu dan prioritas ➤ Perlunya pemantapan arah dan kebijakan bidang litbang ➤ Perlu peningkatan integrasi pengembangan litbang lintas PD ➤ Hasil kelitbang dan inovasi belum optimal dimanfaatkan ➤ Belum optimalnya kerjasama pengembangan kelitbang dengan pihak strategis (swasta/perusahaan) ➤ Belum tersedianya kapasitas SDM pengembangan Litbang di Bapelitbang dan PD ➤ Keterbatasan daya dukung sarpras Litbang

2.3.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang atau tantangan suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Dalam pembangunan daerah, isu strategis dapat berasal dari permasalahan-permasalahan internal (*inward looking*) pembangunan daerah maupun isu eksternal (*outward looking*). Isu strategis Kabupaten Probolinggo juga dibangun dari arahan dari dokumen perencanaan acuan seperti RPJMN 2025 – 2029, RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2029, RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045, dan laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang masih berlaku. Telaah terhadap isi-isu internasional (global) menghasilkan isu-isu tingkat global yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, yaitu:

2.3.2.1. Isu Strategis Global / Internasional

2.3.2.1.1. Isu *Sustainable Development Goals*

1. Isu Perubahan Iklim dan SDGs

Kerusakan lingkungan global memicu perubahan iklim yang mengancam kehidupan manusia. Dunia merespons melalui agenda SDGs 2030, termasuk Indonesia. Kabupaten Probolinggo perlu memasukkan komitmen penurunan emisi GRK dalam RPJMD 2024–2029. Selain itu, tuntutan ekonomi hijau, energi bersih, dan standar ESG mendorong daerah untuk beradaptasi cepat agar tidak tertinggal dalam arus investasi global.

2. Globalisasi Ekonomi dan Proteksionisme

Konflik internasional, proteksionisme, dan ketidakpastian ekonomi global berdampak pada harga barang, nilai tukar, dan aliran investasi. Hal ini menjadi tantangan bagi daerah yang bergantung pada ekspor, namun sekaligus membuka peluang memperkuat ketahanan pangan, energi, dan industri ramah lingkungan.

3. Disrupsi Teknologi Informasi

Kemajuan TIK mengubah perilaku masyarakat dan cara berusaha. Pemerintah daerah perlu memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi pelayanan publik, serta kualitas SDM agar siap menghadapi revolusi industri 4.0.

4. Isu Geopolitik dan Geoekonomi

Ketegangan global dan regional berdampak pada stabilitas dan investasi. Namun, meningkatnya permintaan energi bersih, mineral strategis, dan pangan memberi peluang besar bagi daerah. Pemerintah perlu memperkuat strategi hilirisasi, kerjasama regional, serta ketahanan energi dan pangan.

5. Perubahan Demografi Global

Negara maju mengalami penuaan penduduk, sementara Indonesia masih memiliki bonus demografi. Kondisi ini membuka peluang bagi daerah untuk memenuhi kebutuhan produk dan layanan bagi lansia serta mengembangkan sektor pariwisata ramah lansia.

2.3.2.1. Isu Strategis Nasional

Pembangunan Kabupaten Probolinggo tahun 2025–2029 tidak bisa dilepaskan dari arah pembangunan nasional yang tertuang dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN. Dokumen tersebut menegaskan visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dengan delapan misi utama pembangunan (asta cita), mulai dari penguatan ideologi dan pertahanan, kemandirian ekonomi, pengembangan SDM, hingga pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Agar selaras dengan visi besar tersebut, RPJMD Kabupaten Probolinggo perlu mengintegrasikan strategi nasional ke dalam program daerah. Selain itu, penggunaan indikator kinerja yang sejalan dengan RPJMN penting agar hasil pembangunan daerah dapat terukur secara nasional. Salah satu isu mendesak yang harus dijawab adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk benar-benar memastikan masyarakat mendapatkan layanan dasar sesuai standar yang telah ditetapkan.

Dengan diterbitkannya Permendagri nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) maka pemenuhan layanan dasar (SPM) di Kabupaten Probolinggo akan terlaksana sampai level Pemerintahan Desa. Capaian SPM Kabupaten Probolinggo pada tahun 2024 sudah mencapai rata-rata 97,09% tidak terlepas dari kerja bersama enam urusan perangkat daerah utama. Menariknya, keenam urusan tersebut tidak hanya bekerja pada bidangnya masing-masing, tetapi juga saling menopang dalam memperkuat keberadaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai ujung tombak pelayanan dasar di tingkat desa.

Bidang pendidikan, misalnya, turut berperan melalui kegiatan penyuluhan gizi, literasi kesehatan anak, hingga dorongan terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini yang kerap terintegrasi dengan Posyandu. Sementara itu, bidang kesehatan menjadi pilar utama dengan menghadirkan layanan ibu dan anak, imunisasi, serta pencegahan penyakit langsung di tengah masyarakat. Dukungan infrastruktur dasar dari bidang pekerjaan umum juga sangat penting, karena keberadaan air bersih, sanitasi, dan akses jalan yang memadai menentukan lancarnya pelayanan Posyandu.

Tidak kalah penting, bidang perumahan rakyat ikut memastikan lingkungan hunian masyarakat tetap layak dan sehat sehingga Posyandu bisa berfungsi optimal. Dari sisi keamanan, bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat menjaga agar seluruh kegiatan berjalan tertib dan aman. Sementara bidang sosial memperkuat peran kader, pemberdayaan keluarga, dan perlindungan bagi kelompok rentan agar Posyandu benar-benar menjadi ruang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan sinergi keenam urusan ini, Posyandu di Kabupaten Probolinggo tumbuh bukan hanya sebagai tempat layanan kesehatan, melainkan juga sebagai pusat layanan masyarakat yang terintegrasi. Kehadirannya memperkuat pencapaian SPM, memperluas jangkauan pelayanan publik, sekaligus memastikan setiap warga, hingga di desa-desa, mendapatkan layanan dasar sesuai standar yang ditetapkan.

Tabel 2. 45 Persentase Capaian SPM 2024

NO	URUSAN	% CAPAIAN SPM
1	PENDIDIKAN	96,92
2	KESEHATAN	94,63
3	PEKERJAAN UMUM	90,97
4	PERUMAHAN RAKYAT	100
5	TRANTIBUMLINMAS	100
6	SOSIAL	100
TOTAL		97,09

Sumber data : Bina Bangda Kemendagri, 2025

Berdasarkan data capaian SPM dari Web e-SPM Bangda Kemendagri, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan SPM di berbagai urusan telah menunjukkan hasil yang sangat baik dengan total capaian rata-rata sebesar 97,09%.

- Urusan Pendidikan mencapai 96,92%, menunjukkan adanya optimalisasi layanan pendidikan dasar meskipun masih terdapat sedikit ruang perbaikan.
- Urusan Kesehatan mencatat capaian 94,63%, yang relatif tinggi namun tetap memerlukan penguatan terutama dalam akses layanan kesehatan dasar masyarakat.
- Urusan Pekerjaan Umum memperoleh capaian 90,97%, merupakan capaian terendah dibandingkan urusan lainnya, mengindikasikan perlunya peningkatan dalam penyediaan infrastruktur dasar.
- Sementara itu, urusan Perumahan Rakyat, Trantibumlinmas (Ketertarikan, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat), serta Sosial berhasil mencapai 100%, yang berarti target SPM telah terpenuhi secara penuh.

Perubahan kebijakan fiskal melalui UU Nomor 1 Tahun 2022 menuntut daerah, termasuk Kabupaten Probolinggo, untuk mampu menyesuaikan tata kelola keuangan secara lebih efisien dan berbasis kinerja. Hal ini sekaligus membuka peluang untuk meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih tepat sasaran. Dengan posisi strategis di kawasan Tapal Kuda, Probolinggo juga menjadi bagian

penting dalam mendukung Proyek Strategis Nasional di sektor pangan, air, dan energi melalui peningkatan irigasi, pengelolaan sumber daya air, intensifikasi pertanian, hingga riset lokal. Selain itu, keberadaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) mendorong penguatan konservasi, mitigasi bencana, sekaligus pariwisata berkelanjutan yang bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah.

Ke depan, potensi besar Probolinggo juga terlihat dari usulan pengembangan Tol Laut melalui Pelabuhan Tanjung Tembaga. Kehadiran Tol Laut diharapkan mampu menekan biaya logistik, memperluas pasar bagi produk unggulan daerah seperti hasil perikanan, gula, hortikultura, hingga produk UMKM, serta memperkuat keterhubungan perdagangan antarwilayah. Dengan berbagai peluang tersebut, Kabupaten Probolinggo berpotensi menjadi simpul penting dalam konektivitas nasional sekaligus pendorong pemerataan pembangunan di Jawa Timur dan Indonesia.

2.3.2.2. Telaah terhadap arahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029

Dokumen pembangunan Provinsi Jawa Timur yang menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Probolinggo adalah RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 yang menjabarkan visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2025-2030. Isu strategis, visi, dan misi RPJMD Kabupaten Probolinggo harus selaras dengan isu strategis, visi dan misi dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029. Arah kebijakan maupun program prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029 pun harus selaras, diacu, dan didukung oleh arah kebijakan maupun program prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029. RPJMD Provinsi Jawa Timur telah mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan pada periode 2025-2029, yaitu:

1. Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah, meliputi peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal dalam rangka menggerakkan perekonomian regional, memanfaatkan potensi lokal secara maksimal, serta mengoptimalkan sumber daya ekonomi melalui peningkatan akses pembiayaan, kapasitas sumber daya manusia, dan perluasan akses pasar.

Pemerataan ekonomi, dibutuhkan percepatan keseimbangan Pembangunan antara koridor pertumbuhan wilayah utara-selatan dan kepulauan sebagai upaya mengurangi disparitas antar wilayah di Provinsi Jawa Timur.

2. Penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja; Perluasan akses layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup; Perluasan akses pasar kerja untuk pekerjaan yang layak dan meningkatkan pendapatan; Perluasan akses fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin; Pengembangan program-program ekonomi dan kewirausahaan serta program-program yang efektif untuk mengatasi kemiskinan.
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak dan berkualitas;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik, difokuskan untuk perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan serta menyederhanakan prosedur administratif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana, Lingkungan hidup beserta sumber daya alam yang ada di dalamnya memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Adanya peningkatan jumlah penduduk menyebabkan ketersediaan sumber daya alam menjadi semakin terbatas seiring dengan meningkatnya kebutuhan makhluk hidup melebihi ketersediaan sumber daya alam yang ada. Hal tersebut menyebabkan terjadinya penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
6. Kedaulatan Pangan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani, Untuk menjaga kedaulatan pangan Jawa Timur dan mendukung swasembada pangan nasional ke depan, perlu dilakukan upaya regenerasi petani sebagai produsen komoditas pangan pertanian.

Untuk menjawab isu-isu strategis di atas, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur memiliki Visi “Bersama Jawa Timur Maju yang Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini dicapai melalui Misi Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa

Timur Tahun 2025-2030 yang disebut **Nawa Bhakti Satya** dan sekaligus menjadi program prioritas Jawa Timur, yaitu:

1. **Jatim Sejahtera**, Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan.
2. **Jatim Kerja**, Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas.
3. **Jatim Akses**, Memperkuat Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah dan Intra Aglomerasi yang Berkualitas, Modern, Terpadu, dan Berkeadilan.
4. **Jatim Agro**, Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan.
5. **Jatim Cerdas**, Memperkuat Akses dan Mutu Pendidikan yang Berkualitas, Merata, dan Berkeadilan.
6. **Jatim Sehat**, Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas, Merata, Mudah Diakses dan Berkeadilan.
7. **Jatim Berkah-Amanah**, Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif.
8. **Jatim Harmoni**, Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.
9. **Jatim Lestari**, Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.

Sementara itu, arah kebijakan pembangunan kewilayahan Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029 yang melibatkan Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu lokasinya adalah sebagai berikut:

1. Pada rencana pengembangan lokasi prioritas wilayah metropolitan Surabaya dan Pengembangan Industri Gresik-Surabaya-Sidoarjo-Mojokerto-Pasuruan, maka salah satu intervensi yang harus dilakukan adalah Inisiasi Pengembangan TPST Regional Pasuruan-Probolinggo;
2. Pada pengembangan Kawasan Perkotaan Malang, Batu, Kawasan Pengembangan Industri malang-Singosari-Lawang dan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bromo-Tengger-Semeru dan Lingkar Kawi (Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo- Tengger-Semeru), maka salah satu intervensi yang melibatkan Kabupaten Probolinggo adalah: (i) Peningkatan Pariwisata Malang-Bromo-Tengger-Semeru; (ii) Preservasi jalan ruas Malang-Batu dan

Malang-Bromo; (iii) Pembinaan melalui pelatihan kapasitas SDM Pariwisata berbasis pariwisata berkelanjutan; (iv) Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah;

3. Pada pengembangan kawasan Swasembada pangan, air, dan energi di Tapal Kuda, intervensi yang melibatkan Kabupaten Probolinggo adalah Pengembangan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Pengembangan SPAM Regional Probolinggo-Lumajang dan peningkatan Kapasitas SPAM Umbulan;
4. Pengembangan Kawasan Konservasi TN Bromo-Tengger-Semeru, salah satunya di Geopark Probolinggo.

Sebagai bagian wilayah dari Provinsi Jawa Timur, maka arahan atau fokus pembangunan tahun 2025-2029 Provinsi Jawa Timur ini harus diperhatikan dan diacu oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam menjalankan pembangunan daerahnya. Dengan demikian akan terjadi keselarasan rencana pembangunan kabupaten dengan Provinsi Jawa Timur dan saling menguatkan.

2.3.2.3. Isu Strategis Berdasarkan Dokumen Perencanaan Lain di Kabupaten Probolinggo

a. Arahan RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045 pada Tahap Pertama (2025-2029).

RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045 telah memberikan arah kebijakan pembangunan lima tahunan selama periode tersebut. Arah kebijakan RPJPD tahap pertama akan menjadi acuan bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029. Pada tahap ini pembangunan Kabupaten Probolinggo difokuskan pada penguatan pondasi penyelenggaraan setiap misi. Pondasi yang dimaksud dapat berupa penguatan kebijakan, sistem kelembagaan, maupun modal dasar pembangunan, meliputi SDM, tata kelola, Infrastruktur, Regulasi yang mendukung kemantapan ekonomi inklusif, sosial, budaya, ketentraman, dan ketertiban umum.

RPJPD Kabupaten Probolinggo telah menetapkan misi pembangunan jangka panjang dan pada setiap misi telah diuraikan fokus

pembangunan pada periode/tahap lima tahun pertama (2025-2029). Fokus pengembangan tahun 2025-2029 untuk setiap misi pembangunan jangka panjang diuraikan sebagai berikut:

- a. Misi 1, Mewujudkan transformasi sosial menuju Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkarakter, difokuskan pada Penguatan pondasi dan pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan sosial yang merata.
- b. Misi 2, Menciptakan masyarakat tentram, tertib dan terlindungi, difokuskan pada Penguatan pondasi dan pemenuhan pelayanan stabilitas keamanan dan ketertiban umum yang merata
- c. Misi 3, Menciptakan Ketahanan Sosial yang mantap, difokuskan pada Penguatan pondasi dan pemenuhan pelayanan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta kesatuan bangsa yang merata
- d. Misi 4, Mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif, difokuskan pada Penguatan pondasi peningkatan produktifitas sektoral dan ekonomi daerah yang merata
- e. Misi 5, Menyediakan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan, yang difokuskan pada Pemenuhan Infrastruktur dasar dan wilayah yang merata.
- f. Misi 6, Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata, difokuskan pada penciptaan dan mulai implementasi pembangunan kewilayahan (Implementasi RTRW) dengan pendekatan THIS dengan memanfaatkan hasil riset, inovasi dan Iptek
- g. Misi 7, Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, difokuskan pada Penguatan pondasi peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang merata
- h. Misi 8, Mewujudkan Transformasi Tata Kelola menuju Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang Prima, difokuskan pada Penguatan sumber daya tata kelola dan Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

b. Arahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045 pada periode Tahun 2025-2029

Rancangan RTRW Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2045 telah memberikan arahan tentang pengaturan pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten sesuai dengan potensi dan kaidah yang berlaku. Fokus arahan RTRW yang menjadi perhatian dan acuan dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 adalah pada penetapan lokasi kawasan-kawasan strategis maupun zonasi lainnya, khususnya pada indikasi program yang akan diimplementasikan pada periode tahun tersebut. Rencana Kawasan Strategis, Khususnya Strategis Kepentingan EKONOMI menjadi acuan untuk perencanaan yang THIS (tematik, holistik, Integratif dan Spasial) di masa mendatang untuk percepatan pembangunan ekonomi kabupaten. Sementara itu, Rencana zonasi lainnya menjadi acuan penyediaan infrastruktur / sarana prasarana yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan merata di seluruh wilayah kabupaten.

Pun demikian dengan arahan dokumen rencana pembangunan jangka panjang atau masterplan pembangunan sektoral yang saat ini tersedia. Tercatat terdapat dokumen Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Probolinggo Tahun 2017-2037, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 – 2052, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 – 2034, Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 – 2036, , Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2039, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Tahun 2018 - 2038, Masterplan Persampahan Tahun 2017 – 2037 serta Masterplan Drainase Kabupaten Probolinggo Tahun 2017 – 2037. Arahan rencana pengembangan dari berbagai dokumen ini, khususnya indikasi program yang dilaksanakan pada periode tahun 2025-2029 dapat menjadi acuan kebijakan pembangunan kewilayahan di Kabupaten Probolinggo. Kebijakan kewilayahan pada Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok) yaitu:

1. Peningkatan fungsi jalan menjadi kolektor primer

2. Pelebaran jalan pada jalan nasional, pada jalan kolektor primer
3. Pengembangan kawasan tempat pelelangan ikan di pelabuhan Kalibuntu
4. Menghidupkan kembali jalur angkutan umum pada titik titik pusat transportasi
5. Pengembangan perlengkapan jalan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku

Kebijakan kewilayahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) antara lain :

- a. Perencanaan ruang dan pembangunan terintegrasi
- b. Pengendalian alih guna lahan ruang hijau
- c. Pengembangan fisik bangunan atau pendirian bangunan pendukung fungsi badan air untuk menjaga kualitas air
- d. Peningkatan fungsi ruang hijau sebagai upaya perbaikan kualitas udara
- e. Pengembangan sistem deteksi dini bencana dan pembangunan untuk kepentingan mitigasi bencana serta pengembangan jaringan evakuasi bencana
- f. Penataan pengembangan permukiman dan lahan terbangun sebagai pengendali arus urbanisasi

Kebijakan kewilayahan Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARDA) antara lain :

- a. Pembangunan aksesibilitas pariwisata
- b. Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata

Kebijakan kewilayahan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) antara lain :

1. Peningkatan cakupan dan kualitas air minum bagi seluruh penduduk Kabupaten Probolinggo
2. Pengembangan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM dari berbagai sumber dana yang tersedia
3. Pengembangan kelembagaan, peraturan-peraturan untuk SPAM
4. Peningkatan pengamanan air baku secara berkelanjutan
5. Peningkatan peran dan kemitraan dunia usaha, swasta dan masyarakat.

Kebijakan kewilayahan pada Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (RISPALD) antara lain :

1. Melakukan sosialisasi dan advokasi secara berkesinambungan untuk mengawal program dan kegiatan sanitasi.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pada sistem pengolahan air limbah domestik dengan melibatkan Pokja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
3. Peningkatan pengelolaan sistem air limbah domestik.
4. Evaluasi dan revisi terhadap kebijakan yang mendukung pembangunan sanitasi.

Kebijakan kewilayahan pada Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) antara lain :

1. Peningkatan kualitas permukiman kumuh Kabupaten Probolinggo dengan prioritas Kecamatan Kraksaan, Kecamatan Dringu, Kecamatan Paiton, Kecamatan Sumberasih.
2. Pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo
3. Pemenuhan perumahan dan kawasan permukiman sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU)

Kebijakan kewilayahan pada Masterplan Persampahan meliputi pengumpulan, pemilahan dan pemrosesan sampah antara lain :

1. Melaksanakan pengumpulan sampah secara door to door, mendirikan tempat penukaran sampah, penyediaan kontainer umum
2. Melakukan pemilahan sampah dengan melibatkan masyarakat, menciptakan infrastruktur pemilahan yang memadai serta peningkatan kesadaran masyarakat
3. Melakukan pemrosesan sampah melalui teknik pengomposan serta budidaya BSF (maggot)

Kebijakan kewilayahan Masterplan Drainase antara lain :

1. Pengendalian banjir akibat limpasan pada daerah hulu
2. Penggunaan alur saluran /sungai yang sudah ada
3. Mengkonversi saluran irigasi menjadi saluran drainase bila sudah tidak ada lahan sawah yang harus diairi, dengan persetujuan pihak terkait

4. Membuat/menormalisasi saluran tepi jalan sesuai debit yang dialirkan

c. Arahan dari Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

KLHS RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 menghasilkan beberapa hal yang harus diacu oleh RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 untuk memperkuat upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pertama, hasil kajian atau evaluasi terhadap capaian berbagai indikator tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten. Berdasarkan hasil ini, analisis mendalam dilakukan untuk merumuskan hal kedua, yaitu, isu strategis KLHS yang diharapkan selaras dengan isu strategis RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, yaitu:

- a. Pengelolaan Sampah yang Kurang Optimal
- b. Pengelolaan Sumber Daya Air yang Kurang Optimal
- c. Kerentanan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim
- d. Potensi Degradasi Ekosistem
- e. Tingkat Kemiskinan dan Daya Saing Daerah yang rendah
- f. Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintah yang belum Optimal
- g. Tingkat Pembangunan Infrastruktur yang Rendah

Hal ketiga adalah rekomendasi tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) yang harus diprioritaskan pencapaiannya di masa mendatang, khususnya pada periode 2025-2029. Terdapat 5 (lima) TPB prioritas yang dimaksud, yaitu: (i) Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; (ii) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun; (iii) Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan; (iv) Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati; dan (v) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Upaya

pencapaian TPB prioritas di atas harus diakomodasi dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029. Hal terakhir adalah rekomendasi upaya pencapaian dan/atau mempertahankan TPB di berbagai pilar yang harus dilakukan oleh setiap penyelenggara urusan pemerintahan (perangkat daerah/PD) sesuai tugas dan fungsinya. Setiap PD di lingkungan Kabupaten Probolinggo diharapkan memperhatikan rekomendasi hasil KLHS ini dan mengakomodasikannya ke dalam Rencana Strategis perangkat daerahnya Tahun 2025-2029.

2.3.3. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

Berdasarkan isu-isu strategis yang berasal dari kondisi internal (permasalahan pembangunan daerah) maupun eksternal (isu strategis internasional, nasional, regional/provinsi Jawa Timur) Kabupaten Probolinggo, maka dapat dirumuskan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Memutus transmisi kemiskinan melalui berbagai upaya penurunan kemiskinan yang masih tinggi, penghentian adanya kecenderungan pemerataan kemiskinan, serta menekan penambahan jumlah penduduk miskin. Berbagai upaya yang dapat dilakukan antara lain peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, serta peningkatan pemberdayaan dan perlindungan terhadap kelompok rentan melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar yang berkualitas dan terjangkau, penyediaan program perlindungan sosial yang adaptif, serta pemberdayaan ekonomi melalui peningkatan keterampilan, akses modal, dan fasilitasi lapangan kerja;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di antaranya dengan perluasan dan pemerataan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta peningkatan standar hidup layak dan berkualitas bagi semua masyarakat. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan

berdaya saing untuk menjawab tuntutan zaman, namun tetap memegang teguh nilai-nilai agama dan berkarakter;

3. Percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi yang bebas korupsi, kolaboratif, dan inovatif melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang gesit (agile), kolaboratif, disertai dengan pelayanan publik yang adaptif sesuai dengan kebutuhan, peningkatan clean and good governance yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal;
 4. Peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengelolaan belanja yang lebih efisien. Upaya ini meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kepatuhan wajib pajak, menggali potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan, seperti sektor pariwisata, industri kreatif, pertanian, dan UMKM, yang dapat menjadi sumber penerimaan baru. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perpajakan dan pengelolaan keuangan juga penting untuk meningkatkan transparansi, akurasi data, dan kepatuhan masyarakat;
 5. Peningkatan ketersediaan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah untuk mengurangi disparitas antar wilayah, pemeliharaan infrastruktur secara berkala, penyediaan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan aman bencana, serta penerapan teknologi ramah lingkungan dan inovasi digital dalam pengelolaan sarana prasarana;
 6. Pemanfaatan dan pemeliharaan potensi lingkungan hidup dan sumber daya alam melalui optimalisasi aktivitas ekonomi hijau dan biru berbasis sumber daya lokal Kabupaten Probolinggo. Isu belum optimalnya mitigasi dan penanganan pencemaran lingkungan maupun degradasi ekosistem lainnya, termasuk pengelolaan sampah serta sumber daya air, menjadi strategis untuk diselesaikan lima tahun mendatang, sebagaimana direkomendasikan oleh KLHS RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029;
- Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 di atas telah mengakomodasi seluruh permasalahan daerah baik isu internal maupun eksternal daerah.

Tabel 2. 46 Perumusan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dari Permasalahan Internal maupun Isu Eksternal Pembangunan Daerah

Potensi Daerah	Permasalahan Makro Daerah	ISU KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Kabupaten Probolinggo
			Global	Nasional	Jawa Timur	
Letak geografis yang strategis serta kondisi topografi yang bervariasi, mulai dari kawasan pesisir hingga pegunungan	Belum optimalnya penyediaan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan	Tingkat Pembangunan Infrastruktur yang Rendah Pengelolaan Sampah yang Kurang Optimal	Isu Sustainable Development Goals (SDGs) yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi gas rumah kaca.	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada pelayanan dasar.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana dengan Mengutamakan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	Peningkatan ketersediaan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan
	Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya lokal untuk kesejahteraan dan konservasi	Kerentanan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim Potensi Degradasi Ekosistem Pengelolaan Sumber Daya Air yang Kurang Optimal				Pemanfaatan dan pemeliharaan potensi lingkungan hidup dan sumber daya alam
Potensi pendanaan dari Pihak Luar masyarakat maupun swasta (CSR)	Masih rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah		Isu globalisasi ekonomi dengan meningkatnya proteksionisme yang mempengaruhi perdagangan dan investasi.	Kebijakan Fiskal atau Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang mempengaruhi kapasitas fiskal daerah.	Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah. Kedaulatan Pangan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani.	Peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengelolaan belanja yang lebih efisien

Potensi Daerah	Permasalahan Makro Daerah	ISU KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Kabupaten Probolinggo
			Global	Nasional	Jawa Timur	
Potensi sumber daya alam, seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, serta pariwisata berbasis alam	Masih tingginya angka kemiskinan dan ketergantungan	Tingkat Kemiskinan dan Daya Saing Daerah yang rendah	Disrupsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kebutuhan.	Pengembangan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas.	Penanggulangan Kemiskinan dengan Perluasan Kesempatan Kerja; Perluasan Akses Layanan Dasar Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup; Perluasan Akses Pasar Kerja Untuk Pekerjaan Yang Layak dan Meningkatkan Pendapatan; Perluasan Akses Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin; Pengembangan Program-Program Ekonomi dan Kewirausahaan serta Program-Program Yang Efektif Untuk Mengatasi Kemiskinan	Memutus transmisi kemiskinan melalui berbagai upaya penurunan kemiskinan yang masih tinggi, penghentian adanya kecenderungan pemerataan kemiskinan, serta menekan penambahan jumlah penduduk miskin
	Belum optimalnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap kelompok rentan					

Potensi Daerah	Permasalahan Makro Daerah	ISU KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Kabupaten Probolinggo
			Global	Nasional	Jawa Timur	
	Masih belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan	Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintah yang belum Optimal	Isu geopolitik dan geoekonomi yang mempengaruhi stabilitas global dan akses pendanaan.	Penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi.	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik.	Percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi yang bebas korupsi, kolaboratif, dan inovatif
Potensi Sumber daya Manusia dengan Jumlah Penduduk 1,2 Juta Jiwa	Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia		Demografi global dengan porsi penduduk lanjut usia yang meningkat.		Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas Melalui Peningkatan Akses Pendidikan, Kesehatan dan Standar Hidup yang Layak dan Berkualitas	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia

Sumber : Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo, 2025 (Diolah)

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, program prioritas, serta strategi pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih. RPJMD ini menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah, serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi, misi, dan agenda pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo yang terpilih melalui Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada bulan November 2024.

Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo terpilih untuk periode 2025–2029 adalah **dr. Mohammad Haris Damanhuri Romly (Gus Haris)** dan **Fahmi Abdul Haq Zaini (Ra Fahmi)**. Keduanya resmi dilantik pada tanggal **20 Februari 2025**, dan sejak saat itu mulai menjalankan amanah kepemimpinan untuk membawa perubahan positif dan berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo. Visi, misi, program unggulan, dan kerja prioritas yang telah disampaikan akan dijabarkan dan diterjemahkan ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 dan akan menjadi rujukan dalam menyelaraskan seluruh kegiatan pembangunan di berbagai sektor, baik yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, pemerintah pusat, dunia usaha, maupun masyarakat. Penyusunan dokumen ini mengacu pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional, memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005–

2045, serta diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

3.1.1 Visi Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

Visi pembangunan daerah merupakan gambaran kondisi Kabupaten Probolinggo yang ingin dicapai oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam jangka lima tahun ke depan. Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah-Religius serta Eksis Berdaya Saing)”

Visi Kabupaten Probolinggo menjadi dasar yang sistematis bagi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Probolinggo pada tahun 2025-2029. Penjabaran dari visi tersebut akan dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 3. 1 Penjelasan Pokok-Pokok Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah-Religius serta Eksis Berdaya Saing)	Sejahtera	Keadaan dimana terwujud pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Keadaan dimana pembangunan manusia di Kabupaten Probolinggo ditandai dengan terwujudnya individu-individu masyarakat yang sejahtera baik secara sosial maupun ekonomi, dalam lingkungan sosial yang kondusif bagi pembangunan. Secara eksplisit, makna "sejahtera" merujuk pada Kabupaten Probolinggo yang "SAE" (baik), baik dari segi kualitas sumber daya manusianya, khususnya dalam hal pendidikan dan kesehatan (SAE Pendidikan dan Kesehatan) maupun aspek ketahanan sosialnya (SAE Sosial).
	Amanah-Religius	Keadaan di mana Pemerintah Kabupaten Probolinggo mampu menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas tinggi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai anti-korupsi sehingga menjadi pemerintah yang amanah dan dipercaya oleh masyarakat. Selain itu, Pemerintah daerah juga mampu menyelenggarakan pembangunan secara efektif melalui kolaborasi yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan sehingga terwujud pemerintahan yang SAE (baik)
	Eksis-Berdaya Saing	Keadaan ini merupakan hasil dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia dan lingkungan sosial yang sehat dengan budaya yang maju. Menggunakan cara-cara baru dan inovatif untuk perbaikan Pembangunan. Memperhatikan kualitas dan keberlanjutan lingkungan hidup menjadi bagian penting dalam setiap langkah pembangunan. Kabupaten Probolinggo memiliki daya saing yang kuat dan dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam keberhasilan capaian pembangunannya. SAE ekonomi dan infrastrukturnya , yaitu maju secara ekonomi, didukung infrastruktur yang berkualitas, merata, serta berpijak pada prinsip pembangunan berwawasan lingkungan

3.1.2 Misi Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

Misi disusun dalam rangka untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah dijabarkan sebelumnya. Rumusan misi merupakan gambaran dari visi yang ingin di capai dengan menguraikan beberapa upaya yang harus dilakukan, memberikan arah yang jelas, sekaligus batasan pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah direncanakan, maka rumusan Misi harus memiliki keterkaitan

dengan Pokok-pokok visi sebagaimana diuraikan dalam tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Keterkaitan Pokok – Pokok Visi Terhadap Misi

No.	Pokok – Pokok Visi	Misi
1.	Sejahtera	Membangun SDM Unggul, religius, berdaya saing melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya yang terjangkau
		Pemberdayaan perempuan, masyarakat adat, masyarakat rentan dan disabilitas
2.	Amanah - Religius	Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif
3.	Eksis – Berdaya Saing	Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di daerah basis produksi, daerah terluar, daerah terpencil, serta perwilayahan industri secara merata
		Menciptakan ketahanan ekonomi lokal yang kreatif dan inovatif di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan berbasis desa dan komunitas untuk menciptakan lapangan kerja dan memberantas kemiskinan

Adapun penjelasan misi, sebagaimana disajikan dalam uraian berikut :

1. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi, Kolaboratif dan Inovatif (SAE Pemerintahan)

Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat sampai pada level pemerintahan desa. Yang dilakukan dengan memastikan kualitas aparatur organisasi pemerintah daerah yang kompeten prestasi, berkinerja dan loyal. Didukung dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Menciptakan Ketahanan Ekonomi Lokal yang Kreatif dan Inovatif di Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Berbasis Desa dan Komunitas Untuk Menciptakan Lapangan Kerja dan Memberantas Kemiskinan (SAE Ekonomi)

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat memperkuat daya saing daerah terutama dalam meningkatkan nilai investasi, salah satunya melalui revitalisasi BUMD. Pembangunan ekonomi dilakukan melalui peningkatan produktivitas para pelaku ekonomi maupun sektor-sektor unggulan daerah seperti pariwisata, pertanian, industri, dan perdagangan yang terstandarisasi secara global, berakar pada budaya lokal dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

3. Membangun SDM Unggul, Religius, Berdaya Saing Melalui Peningkatan Akses Serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar lainnya yang Terjangkau (SAE Pendidikan dan Kesehatan)

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pembangunan daerah. Tingkat keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah dapat dilihat melalui angka Indeks Pembangunan Manusia, yang diukur melalui tiga dimensi yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Tantangan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya, membutuhkan komitmen dan kerja sama dari para pemangku kepentingan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan melaksanakan program pengembangan karakter (religius dan berbudi pekerti luhur) bersama dengan Lembaga Pendidikan formal dan non formal berbasiskan agama dan kepercayaan secara bertahap dan terukur.

4. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di Daerah Basis Produksi, Daerah Terluar, Daerah Terpencil, serta Perwilayahan Industri secara Merata (SAE Infrastruktur)

Infrastruktur yang baik merupakan kunci untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan Pembangunan ekonomi daerah.

Penguatan Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah akan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan sebagainya. Infrastruktur yang kuat akan mempercepat respon pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan daerah seperti ketimpangan akses dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan Infrastruktur dilaksanakan dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk memperhatikan kualitas dan keberlanjutan lingkungan hidup. Pemerataan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi dan lapangan kerja.

5. Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat Adat, Masyarakat Rentan dan Disabilitas (SAE Sosial)

Peningkatan akses layanan publik yang inklusif dan responsif harus diwujudkan, khususnya bagi perempuan, masyarakat adat, pemuda, masyarakat rentan dan disabilitas. Penyelenggaraan pemerintahan yang menegakkan keadilan sosial, dengan mendorong kesetaraan gender dan keberpihakan terhadap kelompok marginal dan rentan dapat diwujudkan baik dalam bentuk program maupun regulasi atau kebijakan. Dengan memberdayakan kelompok rentan, tidak hanya menyelesaikan persoalan ketidaksetaraan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi mereka dalam pembangunan daerah. Selain itu, dapat pula menciptakan kondisi sosial yang aman, tertib, dan harmonis, dengan memperkuat nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama, sehingga terwujud masyarakat yang adil, inklusif, dan damai sebagai dasar pembangunan berkelanjutan.

Visi dan misi pembangunan Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 diharapkan mampu menjawab isu strategis pembangunan dalam lima tahun mendatang, sekaligus menjadi pondasi penting dalam membangun Kabupaten Probolinggo yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Gambaran kesesuaian misi dalam menjawab isu strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 3 Misi Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 Untuk Menjawab Isu Strategis

No.	Isu Strategis	Misi
1.	Memutus transmisi kemiskinan melalui berbagai upaya penurunan kemiskinan yang masih tinggi, penghentian adanya kecenderungan pemerataan kemiskinan, serta menekan penambahan jumlah penduduk miskin	Misi 5: SAE Sosial Misi 2: SAE Ekonomi
2.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di antaranya dengan perluasan dan pemerataan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta peningkatan standar hidup layak dan berkualitas bagi semua masyarakat.	Misi 3: SAE Pendidikan dan Kesehatan Misi 2: SAE Ekonomi
3.	Percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi yang bebas korupsi, kolaboratif, dan inovatif	Misi 1: SAE Pemerintahan
4.	Peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengelolaan belanja yang lebih efisien	Misi 1: SAE Pemerintahan Misi 2: SAE Ekonomi
5.	Peningkatan ketersediaan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah	Misi 4: SAE Infrastruktur
6.	Pemanfaatan dan pemeliharaan potensi lingkungan hidup dan sumber daya alam	Misi 4: SAE Infrastruktur Misi 2: SAE Ekonomi

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, visi dan misi Kabupaten Probolinggo tahun 2025–2029 juga disusun dengan memperhatikan prinsip harmonisasi dan sinkronisasi terhadap arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur. Keselarasan ini menjadi landasan

penting agar pelaksanaan pembangunan di daerah tidak berjalan secara parsial, melainkan menjadi bagian yang terintegrasi dari pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah dan panjang secara menyeluruh. Selain itu, keselarasan ini juga memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Probolinggo mampu berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan di tingkat provinsi maupun nasional, sekaligus menjawab tantangan dan isu strategis daerah. Berikut merupakan keselarasan visi dan misi Kabupaten Probolinggo terhadap Nasional dan Provinsi Jawa Timur:

Tabel 3. 4 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Probolinggo Dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur

RPJMN		RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR		RPJMD KABUPATEN PROBOLINGGO	
VISI	ASTA CITA	VISI	NAWA BHAKTI SATYA	VISI	MISI
Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045	ASTA CITA 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Bersama Jawa Timur maju yang adil, makmur, unggul dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045	NAWA BHAKTI 7: Jatim Berkah Amanah Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah-Religius serta Eksis Berdaya Saing)	Misi 1: SAE PEMERINTAHAN Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif.
	ASTA CITA 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.		NAWA BHAKTI 1: Jatim Sejahtera Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan.		Misi 2: SAE EKONOMI Menciptakan ketahanan ekonomi lokal yang kreatif dan inovatif di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan berbasis desa dan komunitas untuk menciptakan lapangan kerja dan memberantas kemiskinan.
	ASTA CITA 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di		NAWA BHAKTI 2: Jatim Kerja Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas.		
			NAWA BHAKTI 4: Jatim Agro Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan.		

RPJMN		RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR		RPJMD KABUPATEN PROBOLINGGO	
VISI	ASTA CITA	VISI	NAWA BHAKTI SATYA	VISI	MISI
	sentra produksi melalui peran aktif koperasi. ASTA CITA 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri ASTA CITA 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.				
	ASTA CITA 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) ASTA CITA 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas		NAWA BHAKTI 5: Jatim Cerdas Memperkuat Akses dan Mutu Pendidikan yang Berkualitas, Merata, dan Berkeadilan. NAWA BHAKTI 6: Jatim Sehat Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas, Merata, Mudah Diakses dan Berkeadilan.		Misi 3: SAE PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Membangun SDM Unggul, religius, berdaya saing melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya yang terjangkau
	ASTA CITA 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. ASTA CITA 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai		NAWA BHAKTI 3: Jatim Akses Memperkuat Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah dan Intra Aglomerasi yang Berkualitas, Modern, Terpadu, dan Berkeadilan. NAWA BHAKTI 9: Jatim Lestari Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.		Misi 4: SAE INFRASTRUKTUR Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di daerah basis produksi, daerah terluar, daerah terpencil serta perwilayahan industri secara merata.

RPJMN		RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR		RPJMD KABUPATEN PROBOLINGGO	
VISI	ASTA CITA	VISI	NAWA BHAKTI SATYA	VISI	MISI
	masyarakat yang adil dan Makmur.				
	ASTA CITA 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.		NAWA BHAKTI 8: Jatim Harmoni Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.		Misi 5: SAE SOSIAL Pemberdayaan perempuan, masyarakat adat, masyarakat rentan dan disabilitas.

Di samping hal di atas, arahan kebijakan Pembangunan Wilayah sebagaimana RPJMN Tahun 2025-2029 Lampiran IV di mana terdapat *highlight* indikasi intervensi dengan lokus di Kab. Probolinggo, antara lain:

- WM Surabaya dan Kawasan Pengembangan Industri Gresik Surabaya Sidoarjo- Mojokerto-Pasuruan terdapat poin Inisiasi Pengembangan TPST Regional Pasuruan-Probolinggo
- Kawasan Perkotaan Malang-Batu, Kawasan Pengembangan Industri malang-Singasari-Lawang dan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bromo-Tengger-Semeru dan Lingkar Kawi (Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo-Tengger-Semeru), terdapat mandat: Pembangunan infrastruktur pengendalian sedimen dan lahar Gunung Semeru, Pengurangan risiko bencana gunung api di Gunung Semeru
- Kawasan Swasembada pangan, Air, dan Energi Tapal Kuda, terdapat mandat Pengembangan SPAM Regional Probolinggo-Lumajang serta Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata Ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan Konsolidasi lahan pertanian, optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida) pakan organik.

- Kawasan Konservasi TN Bromo-Tengger-Semeru terdapat poin Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi, Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana dan Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana
- Kawasan Geopark (Taman Bumi) BTS yang di dalamnya juga tercakup Kabupaten Probolinggo seperti Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi serta Peningkatan resilient masyarakat terhadap bencana alam geologi dan bencana lainnya.

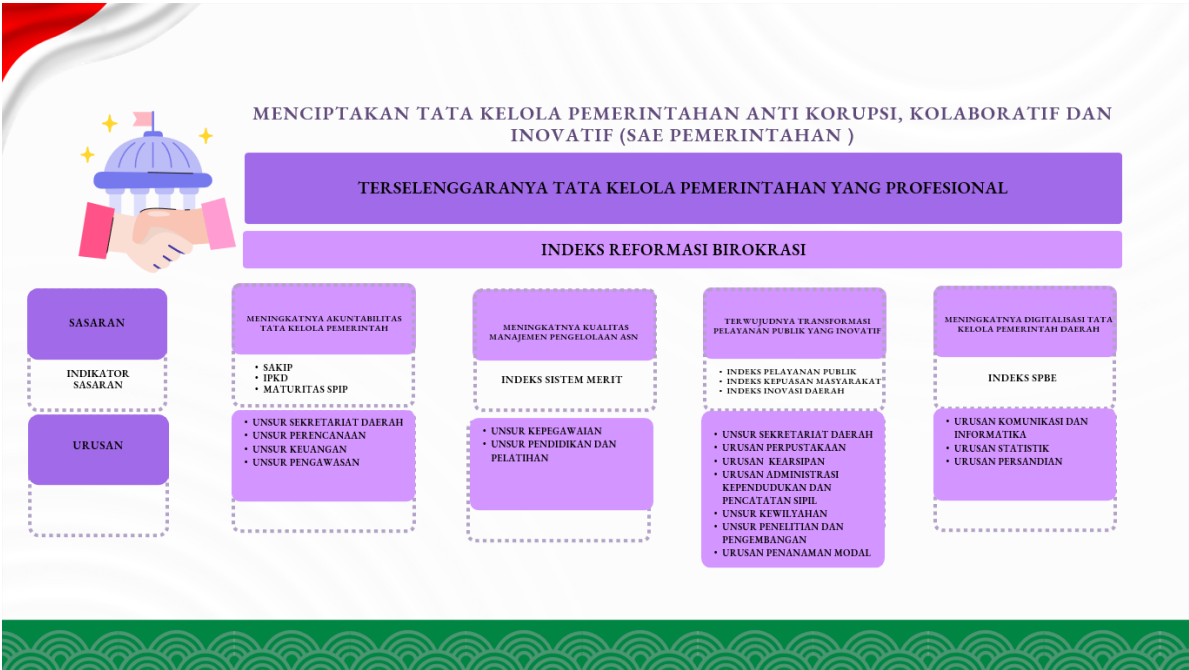
3.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang dapat menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan merupakan pernyataan hal-hal yang perlu untuk dilakukan agar mencapai visi dan misi dengan melalui isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari setiap tujuan dengan indikator yang telah terukur dan terarah secara fokus agar pencapaiannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Berikut adalah uraian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029:

Tujuan dan Sasaran Misi 1:

Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dengan indikator tujuannya adalah meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi dan terciptanya kolaborasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan (*joint outcomes*).



Gambar 3. 1 Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional.

Berdasarkan gambar di atas, tujuan ini diturunkan menjadi empat sasaran yaitu:

- 1. Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah;
- 2. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan ASN;
- 3. Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif; dan
- 4. Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Pemerintah Daerah.

Tujuan dan Sasaran Misi 2:

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusi dan Berdaya Saing Dalam Upaya Memberantas Kemiskinan, dengan indikator tujuannya adalah Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan.



Gambar 3. 2 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusi dan Berdaya Saing Dalam Upaya Memberantas Kemiskinan.

Berdasarkan gambar di atas, tujuan ini diturunkan menjadi 4 sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya Investasi Daerah;
2. Meningkatnya Pengembangan Sektor Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah;
3. Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif;
4. Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif.

Tujuan dan Sasaran Misi 3:

Terciptanya Masyarakat yang Berkualitas Unggul dan Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesejahteraan, dengan indikator ketercapaian tujuannya adalah Indeks Pembangunan Masyarakat.



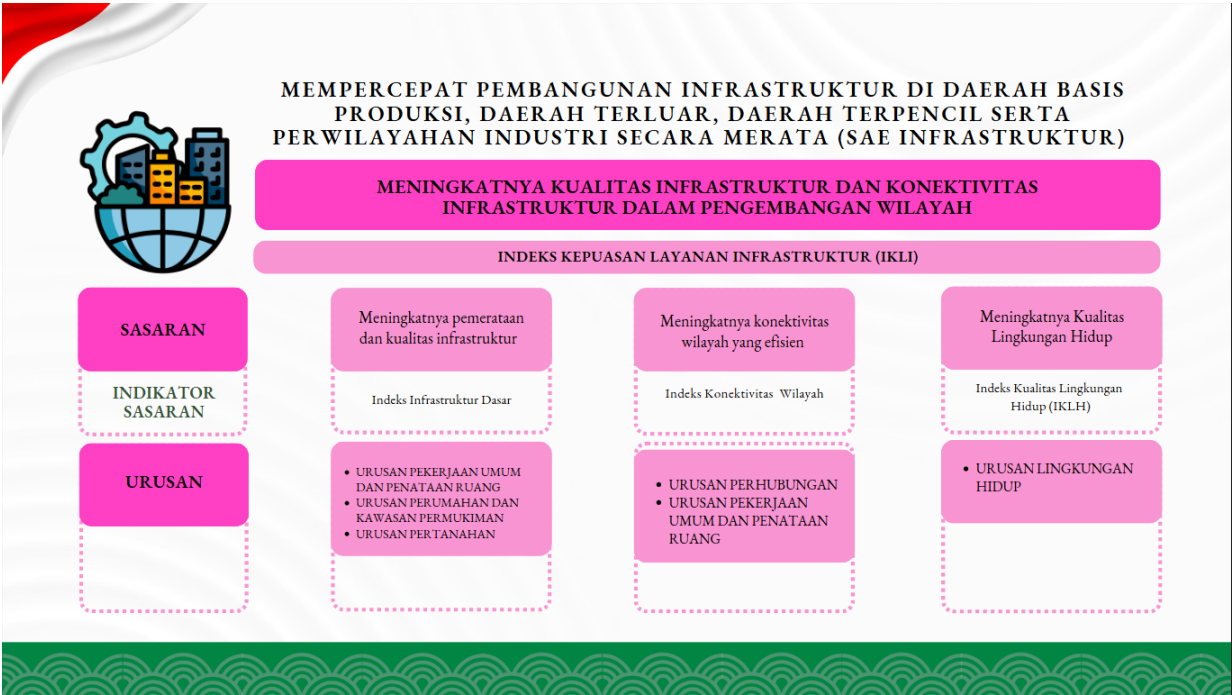
Gambar 3. 3 Terciptanya Masyarakat yang Berkualitas Unggul dan Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesejahteraan.

Berdasarkan gambar di atas, tujuan ini diturunkan menjadi empat sasaran yaitu:

- 1. Meratanya Akses Pendidikan;
- 2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
- 3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemuda; dan
- 4. Meningkatnya Kualitas Desa.

Tujuan dan Sasaran Misi 4:

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Infrastruktur Dalam Pengembangan Wilayah, dengan indikator tujuannya adalah Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI).



Gambar 3. 4 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Infrastruktur Dalam Pengembangan Wilayah.

Berdasarkan gambar di atas, tujuan ini diturunkan menjadi tiga sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur;
2. Meningkatnya Konektivitas Wilayah yang Efisien; dan
3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Tujuan dan Sasaran Misi 5 :

Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Daerah Berbasis Kesenjangan Gender dan Kearifan Lokal dengan indikator tujuannya adalah Indeks Kesejahteraan Sosial dan Rasio Gini.



Gambar 3. 5 Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Daerah Berbasis Kesenjangan Gender dan Kearifan Lokal

Berdasarkan gambar di atas, tujuan ini diturunkan menjadi tiga sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Kesenjangan Gender;
2. Meningkatnya Ketahanan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat rentan dan Disabilitas; dan
3. Meningkatnya Pelestarian Budaya Kearifan Lokal.

Keterkaitan antara Misi, Tujuan, dan Sasaran sebagai sebuah kerangka kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo perlu dijabarkan ke dalam sebuah skema untuk menjamin konsistensi kerja pemerintah, sekaligus acuan dalam menyelenggarakan program pembangunan sehingga memiliki capaian yang terukur. Adapun penjabaran Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran pembangunan beserta indikator kinerjanya ditunjukkan melalui Tabel 3.5, kemudian penjelasan masing-masing Indikator dijabarkan Pada Tabel 3.6.

Tabel 3. 5 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Probolinggo Beserta Indikator dan Target

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan	
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
VISI: "Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah- Religius serta Eksis Berdaya Saing)"													
MISI 1: SAE PEMERINTAHAN	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	81,9	82,4	82,9	83,4	83,9	84,4	85		
Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif		Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah	1	Nilai SAKIP	Nilai	67,11	70,5	71	71,5	72	72,5	73	
			2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	70	71	72	73	74	75	76	
MISI 2: SAE EKONOMI			3	Maturitas SPIP	Nilai	3,117	3,137	3,157	3,177	3,197	3,217	3,237	
Menciptakan ketahanan ekonomi lokal yang kreatif dan inovatif di sektor pertanian, perkebunan,		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Manajemen ASN	1	Indeks Sistem Merit	Indeks	0,79	0,80	0,81	0,82	0,84	0,86	0,87	
	Terwujudnya Transformasi Pelayanan	1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,20	4,20	4,30	4,40	4,45	4,51	4,55		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
peternakan dan perikanan berbasis desa dan komunitas untuk menciptakan lapangan kerja dan memberantas kemiskinan		Publik Yang Inovatif	2 Indeks kepuasan Masyarakat	Indeks	86,75	87,50	88,25	89,00	89,5	90,00	91,00	
			3 Indeks Inovasi Daerah	Indeks	48,55	52	54	56	58	60	62	
		Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Pemerintah Daerah	1 Indeks SPBE (a)	Indeks	3,51	4,27	1,67	1,77	1,87	1,97	2,07	
MISI 3: SAE PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusi dan Berdaya Saing Dalam Upaya Memberantas Kemiskinan		Pertumbuhan Ekonomi	%	4.82	5,09	5.22	5.36	5.48	5.61	5.76	
			Tingkat Kemiskinan	%	16,45	15,15	13,85	12,55	11,25	9,95	8,65	
Membangun SDM Unggul, religius, berdaya saing melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan		Meningkatnya Investasi Daerah	1 Nilai Realisasi Investasi	Juta	6.549.724 .40	1.570.7 55,98	1.604.5 67,13	1.639. 178.7 1	1.674. 613,38	1.710.8 94,61	1.748. 046.77	
		Meningkatnya Pengembangan Sektor Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah	1 Pertumbuha n PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	1,58	1,85	2,11	2,38	2,64	2,91	3,17	
			2 Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	27,19	27,35	27,43	27,44	27,45	27,47	27,48	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Dasar Lainnya yang terjangkau MISI 4: SAE INFRASTRUKTUR Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di daerah basis produksi, daerah terluar, daerah terpencil serta perwilayahan industri secara merata			Persentase PDRB Perdagangan	%	4,11	4,67	5,23	5.78	6,34	6,9	7.46	
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,57	1,84	1,9	1,95	2,01	2,06	2,12	
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,00	2,80	2,60	2,40	2,20	2,00	1,80	
			Persentase penurunan PPKS	%	3,99	4,02	4,44	4,94	5,54	6,3	7,26	
MISI 5: SAE SOSIAL Pemberdayaan perempuan, masyarakat adat, masyarakat rentan dan disabilitas	Terciptanya Masyarakat yang Berkualitas Unggul dan Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesejahteraan	Meratanya Akses Pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,85	71,86	72,56	73,47	74,37	75,38	76,44	
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,64	12,88	13	13,2	13,4	13,6	13,9	
			Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	6,31	6,7	6,9	7,1	7,4	7,7	8	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia 1 Harapan Hidup	Tahun	73,93	74,13	74,38	74,63	74,89	75,14	75,39	
			Prevalensi 2 Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	%	11,83	9,61	9,2	8,79	8,38	7,97	7,56	
		Meningkatnya Pemberdayaan pemuda	Indeks 1 Pembangunan Pemuda	Indeks	55	55,2	55,4	55,6	55,8	56	56,2	
		Meningkatnya Kualitas Desa	Persentase 1 Desa Mandiri	%	32,31	40,00	42,46	44,92	47,38	49,85	52,31	
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Infrastruktur Dalam Pengembangan Wilayah		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	72,70	75,50	76,11	76,73	77,39	78,09	78,84	
		Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur	Indeks 1 Infrastruktur Dasar	Indeks	69,49	70,28	70,84	71,40	71,99	72,63	73,30	
		Meningkatnya Konektivitas	Indeks 1 Konektivitas Wilayah	Indeks	67,67	68,26	68,90	69,93	70,70	72,07	73,14	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Wilayah yang Efisien										
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks 1 Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	61,56	74,77	74,85	74,93	75,00	75,08	75,16	
	Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Daerah berbasis Kesenjangan Gender dan Kearifan Lokal		Indeks Kesejahteraan Sosial	Puluhan	0,5	0,51	0,52	0,54	0,56	0,58	0,6	
			Rasio Gini	Angka	0,339	0,334	0,329	0,324	0,319	0,314	0,309	
		Meningkatnya Kesenjangan Gender	Indeks 1 Pembangunan Gender	Indeks	86,63	87,46	87,81	88,16	88,51	88,86	89,21	
		Meningkatnya Ketahanan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat rentan dan disabilitas	Indeks 1 Pembangunan Kualitas keluarga	Indeks	61,19	71,29	72,29	72,54	72,80	73,06	73,32	
			Indeks 2 Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Indeks	44,91	48,07	53,64	57,51	60,77	66,11	68,6	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			3 Persentase Disabilitas yang Berdaya (bekerja di sektor formall)	%	2	2,1	2,5	3	3,5	4	4,2	
			4 Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSB UD	%	25,10	27,36	30,09	33,10	36,58	40,42	44,87	
		Meningkatnya Pelestarian Budaya Kearifan Lokal	1 Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	59	59,5	60	60,5	61	61,5	62	

Keterangan:
 (a) : Instrumen evaluasi akan mengalami perubahan menjadi Indeks Pemerintah Digital mulai tahun 2026 sehingga target disesuaikan

Tabel 3. 6 Definisi Operasional Indikator Utama Pembangunan RPJMD Kabupaten Probolinggo

NO	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitungan
1	Indeks Reformasi Birokrasi	1) <u>Definisi operasional</u>: Indikator komposit yang menggambarkan hasil pelaksanaan RB. Indikator ini digunakan sebagai ukuran keberhasilan kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan RB. Penilaian dilakukan secara kolaboratif pada Tingkat terimplementasinya kebijakan (immediate outcomes) oleh para instansi pengampu kebijakan	RB General, penilaian pada: 1) <u>Rencana Aksi Pembangunan RB General</u>: Menilai kualitas rencana aksi Pembangunan RB General yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda), misalnya legal hukum RB General yang dikeluarkan, bentuk kolaborasi yang dibangun, serta strategi-strategi atas kegiatan utama yang ditetapkan. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Nasional. 2) <u>Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General</u>: Menilai kualitas implementasi rencana aksi Pembangunan RB General yang telah disusun dengan menganalisis capaian rencana aksi. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Nasional. Nilai Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General dipengaruhi oleh Nilai Kualitas Rencana Aksi Pembangunan RB General.

NO	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitungan
		dan capaian sasaran strategis yang merupakan outcomes dari implementasi kebijakan (intermediate outcomes). 2) <u>Instansi penanggung jawab pengukuran</u>: Kementerian PANRB, yaitu Deputi RBKUNWAS selaku koordinator (UPRBN) dan Kementerian/ lembaga yang menjadi leading institution kebijakan RB pada tingkat meso. 3) <u>Sumber data</u>: Hasil penilaian implementasi kebijakan oleh	RB Tematik: 1. <u>Strategi Pelaksanaan RB Tematik</u>: Evaluasi RB Tematik dilakukan kepada Pemerintah Provinsi dengan mengukur upaya inisiatif atau terobosan yang termuat dalam rencana aksi tema terkait, capaian atas rencana aksi, serta capaian indikator dampak RB Tematik. 2. <u>Capaian Indikator Dampak RB Tematik</u>: Mengukur capaian dampak dari pembangunan RB Tematik yang telah dilakukan pada empat tema yang telah ditetapkan. (Sumber: KepMENPAN RB No 182 Tahun 2024)

NO	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitungan
		leading institution, capaian target indikator kinerja utama organisasi dan kontribusinya pada indikator kinerja pembangunan serta Survei Eksternal dan Internal yaitu: Survei Penilaian Integritas (SPI), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei ASN BerAKHLAK, Survei Employer Branding ASN. (Sumber: PermenPANRB No 3 Tahun 2023)	

NO	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitungan
2	Nilai SAKIP	Rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdiri dari 4 komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal Nilai Evaluasi AKIP dikeluarkan oleh Kementerian PAN RB
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah : Satuan Ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai	Penilaian dilakukan oleh kementerian dalam negeri melalui aplikasi dengan mengisi data/angka dan dokumen pengelolaan keuangan daerah

NO	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitungan
		kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu	
4	Maturitas SPIP	Maturitas SPIP adalah evaluasi penjaminan kualitas atas hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang terdiri dari (Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses serta Pencapaian Tujuan SPIP)	Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi diperoleh dari penilaian mandiri oleh APIP yang selanjutnya dilakukan Quality Assurance (QA) oleh BPKP dengan hasil akhir diterbitkannya surat laporan hasil Evaluasi oleh BPKP yang akan menjadi Nilai Maturitas SPIP
5	Indeks Sistem Merit	1) Sistem Merit adalah penyelenggaraan sistem Manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi, yakni prinsip pengelolaan sumber	Indeks = Target Nilai/Total Nilai Merit

NO	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitungan
		daya manusia yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus. (Pasal 1 UU No 20 Th 2023) 2) Terdapat 8 aspek dalam Sistem Merit : a) Perencanaan Kebutuhan	

NO	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitungan
		b) Pengadaan c) Pengembangan Karier d) Promosi dan Mutasi e) Manajemen Kinerja f) Penggajian, Penghargaan dan Disiplin g) Perlindungan dan Pelayanan h) Sistem Informasi (Permen PAN&RB No 40 th 2018)	
6	Indeks Pelayanan Publik	Hasil pengukuran dari kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik dalam jangka waktu tertentu yang diberikan oleh	1) Menentukan Nilai untuk setiap Indikator: Nilai per indikator= (Nilai F-01+ Nilai F-02 + Nilai F-03)/3 X Bobot per indikator. 2) Menentukan nilai setiap aspek: Nilai per Aspek= Jumlah Nilai per Indikator.

NO	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitungan
		pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. IPP digunakan untuk menilai kualitas pelayanan publik berdasarkan berbagai aspek seperti kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi dan pengaduan, inovasi (Sumber: Berdasarkan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi	3) Menentukan Indeks: Nilai Indeks = Jumlah (Nilai Aspek n X Bobot Aspek n). 4) Menentukan Nilai Indeks Pelayanan Publik: Nilai Indeks Pelayanan Publik= (75% X Nilai Indeks Formulir-02) + (25% X Nilai Indeks Formulir-03) (Sumber: Berdasarkan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik)

NO	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitungan
		Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik)	
	Indeks kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan hasil pengolahan data dari pengisian survei kepuasan masyarakat. Indeks ini digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan yang telah diterima oleh masyarakat.	Perhitungan indeks kepuasan masyarakat dalam 9 (Sembilan) unsur diolah menggunakan perhitungan sebagai berikut. $SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$
7	Indeks Inovasi Daerah	Sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah	IID = (Skor Total / Skor Total Maksimum) x 100 Keterangan: • Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID). • Skor Total Maksimum adalah 250. • Skala IID adalah 0 s.d. 100.

NO	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitungan
8	Indeks SPBE	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara	Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut, dimana: • NDj adalah nilai indeks domain ke-j; • BDj adalah nilai bobot domain ke-j. Nilai Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) dihitung berdasarkan skor tingkat kematangan di setiap indikator, selanjutnya dari skor di setiap indikator dilakukan pembobotan. Hasil dari pembobotan di setiap indikator dilakukan Perhitungan Rata-rata dari seluruh indikator untuk menghasilkan skor/nilai Indeks. Adapun Komponen Indeks Pemerintah Digital beserta bobot di setiap indikator sesuai dengan Surat Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah KemenpanRB tanggal 21 April 2025 Nomor B/66/PD.02/2025 Perihal Pembinaan kepada Instansi Pemerintah

NO	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitungan
		keseluruhan. SPBE terdiri dari 4 domain, aspek dan 47 indikator, meliputi: • Domain 1 kebijakan SPBE (Aspek kebijakan internal tata kelola SPBE); • domain 2. Tata Kelola SPBE (Aspek perencanaan strategis, teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan SPBE); • domain 3 manajemen SPBE (Aspek penerapan manajemen SPBE, audit TIK);	pada Tahun 2025 dalam Rangka Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital sebagai Penguatan Kebijakan SPBE Perhitungan Indeks Pemerintah Digital dengan Skala 5:1 s.d < 1,8 = Predikat "Kurang" 1,8 s.d < 2,6 = Predikat "Cukup" 2,6 s.d < 3,5 = Predikat "Baik" 3,5 s.d < 4,2 = Predikat "Sangat Baik" 4,2 s.d 5 = Predikat "Sangat Memuaskan"

NO	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitungan
		domain 4 Layanan SPBE (Aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, layanan publik) Mengacu pada Surat Kementerian PANRB tanggal 21 April 2025 Nomor: B/66/PD.02/2025 Perihal Pembinaan kepada Instansi Pemerintah pada Tahun 2025 dalam Rangka Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital sebagai Penguatan Kebijakan SPBE, bahwa mulai tahun 2026 dilakukan penguatan	

NO	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitungan
		Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) dengan kerangka indikator baru dimana memiliki 35 indikator yang dikelompokkan menjadi 9 aspek. Selanjutnya sebagaimana target pembangunan nasional pada Lampiran Perpres RPJMN 2025-2029, target Indeks SPBE di tahun 2025 masih menggunakan indikator lama dan pada tahun 2029 telah tertulis target yang telah	

NO	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitungan
		disesuaikan. 9 aspek pemerintah digital meliputi: strategi dan rencana, tata kelola dan manajemen, teknologi digital, audit teknologi digital, keamanan siber, kapabilitas dan budaya digital, pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi, keterpaduan layanan digital Pemerintah, dan kepuasan pengguna layanan digital pemerintah.	
9	Pertumbuhan Ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi diperoleh dari perhitungan Persentase Produk	$(PDRB_t / PDRB_{t-1}) - 1 \times 100\%$

NO	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitungan
		Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha	
10	Tingkat Kemiskinan	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan y_i = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i = 1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$ q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk

NO	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitungan
		Makanan(GKNM). Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran dibawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk.	
11	Nilai Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi adalah total nilai investasi yang direalisasikan oleh investor dalam suatu periode tertentu (biasanya per tahun, semester, atau triwulan) berdasarkan sub sektor ekonomi baik PMA (Penanaman Modal Asing) maupun	$\text{Nilai Realisasi Investasi} = \sum (\text{Semua Proyek Investasi yang direalisasikan baik PMA maupun PMDN})$

NO	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitungan
		PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)	
12	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persentase perubahan atau pertumbuhan nilai tambah bruto sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dibandingkan periode sebelumnya dalam suatu periode waktu tertentu.	$\text{Pertumbuhan} = ((\text{PDRB ADHK Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun } n - \text{PDRB ADHK Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun } n-1) / \text{PDRB ADHK Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun } n-1) * 100\%$
13	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Menunjukkan kontribusi PDRB atas dasar harga berlaku (adhb) dari sektor industri pengolahan terhadap PDB Nasional. Semakin besar nilai PDRB adhb sektor industri pengolahan, maka nilai Rasio PDRB	$\text{Rasio PDRB Industri Pengolahan} = (\text{PDRB ADHB industri pengolahan} / \text{PDRB ADHB total}) \times 100\%$

NO	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitungan
		Industri Pengolahan akan semakin tinggi (ceteris paribus)	
14	Persentase PDRB Perdagangan	Persentase Produk Domestik Regional Bruto Sub Sektor Perdagangan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha	$(\text{PDRB\_pertanian } t / \text{PDRB\_Pertanian } t-1) - 1 \times 100\%$
15	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Rasio PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) adalah persentase kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makanan-minuman terhadap total PDRB suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku.	$\text{Rasio PDRB Penyedia Akmamin} = (\text{PDRB ADHB Penyedia Akmamin} / \text{Total PDRB ADHB}) \times 100\%$

NO	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitungan
16	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat pengangguran terbuka Adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja Adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: 1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, 2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru,	$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka} = \frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$

NO	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitungan
		3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta 4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.	
17	Persentase penurunan PPKS	Penurunan PPKS dapat diukur dengan mengumpulkan data tentang jumlah PPKS sebelum dan sesudah intervensi atau program tertentu yang mendukung kesejahteraan sosial. Penurunan ini diukur dengan	$\frac{\Sigma \text{PPKS (N-1)} - \Sigma \text{PPKS (N)}}{\Sigma \text{PPKS (N)}} \times 100$

NO	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitungan
		membandingkan jumlah PPKS pada periode tertentu dengan jumlah PPKS pada periode sebelumnya	
18	Indeks Pembangunan Manusia	Ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat pembangunan manusia di suatu wilayah, dengan mempertimbangkan tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$ $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ $I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$
19	Harapan Lama Sekolah	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.	$Harapan\ Lama\ Sekolah = FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: FK = Faktor koreksi pesantren E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (7, 8, ..., n)

NO	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitungan
20	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata- rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan Tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas.	$\text{Rata - rata Lama Sekolah 15+} = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ Keterangan: P_{15+} = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas X_i = Lama sekolah penduduk ke - i

NO	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitungan
		Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut: - Tidak punya ijazah = 0 tahun; - SD = 6 tahun; SMP = 9 tahun; - SMA = 12 tahun; - D1/D2 = 14 tahun; - D3 = 15 tahun; - D4 = 16 tahun; - S1 = 17 tahun; - S2 = 19 tahun; - S3 = 22 tahun.	

NO	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitungan
		Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini: - Tidak pernah sekolah = 0 tahun; - Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1; - Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1; - Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir;	

NO	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitungan
		- Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 5 Harapan Lama Sekolah Lamanya waktu	
21	Usia Harapan Hidup	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack

NO	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitungan
22	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah sampai level kabupaten/kota yang mengonsumsi kalori kurang dari yang dibutuhkan berdasarkan standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif yang dinyatakan dalam bentuk persentase.	$PoU = \int_{x < MDER} f(x)dx$ PoU: Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal. MDER: Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (Minimum Dietary Energy Requirement). c : Fungsi kepadatan probabilitas Tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu
23	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks komposit yang memberikan gambaran tentang status pembangunan pemuda berdasarkan 3 lapisan yaitu:	Total Nilai (Domain Pendidikan; Domain Kesehatan dan Kesejahteraan; Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja; Domain Partisipasi dan Kepemimpinan serta Domain Gender dan Diskriminasi) dibagi 5

NO	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitungan
		1) pembangunan individu; 2) penghidupan dan kesejahteraan; dan 3) partisipasi dalam berbagai kehidupan.	
24	Persentase Desa Mandiri	Indeks pengukuran terhadap Tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia, dengan Dimensi layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang	$ID = \text{Jumlah Desa Mandiri} / \text{Total Seluruh Desa se Kabupaten} \times 100 \%$

NO	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitungan
		dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT.	
25	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	INDEKS KEPUASAN LAYANAN INFRASTRUKTUR (IKLI). IKLI adalah sebuah indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah atau penyedia layanan publik lainnya. IKLI memberikan gambaran tentang seberapa baik pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan dari perspektif masyarakat. IKLI bertujuan untuk mengukur persepsi masyarakat	Proses penyusunan formulasi indeks kepuasan layanan infrastruktur, yaitu : 1. Menentukan Bobot penilaian terhadap 6 variabel. Pembobotan dilakukan sebagai berikut: a. Ketersediaan Fisik (availability) = 30% b. Kualitas Fisik (quality) = 20% c. Kesesuaian (Appropriateness) = 10% d. Efektifitas Pemanfaatan (Utility) = 10% e. Penyerapan Tenaga Kerja (Job Creation) = 15% f. Kontribusi pada Perekonomian = 15% Pembobotan dilakukan dengan cara melakukan FGD (Focus Group Discussion) yang dihadiri oleh responden dengan kriteria sebagai berikut:

NO	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitungan
		terhadap kinerja pembangunan infrastruktur, mengidentifikasi harapan dan keinginan masyarakat terkait infrastruktur, serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan infrastruktur di masa depan. Manfaat IKLI antara lain: • Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur. • Memberikan informasi tentang aspek-aspek infrastruktur yang perlu ditingkatkan.	(1) tingkat kepentingan responden terhadap belanja infrastruktur (2) tingkat keahlian/pengetahuan bidang infrastruktur (3) Praktisi yang secara langsung menangani bidang pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, responden yang dipilih adalah instansi yang menjadi perencana dan pelaksana dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Probolinggo. 2. Pengolahan data hasil survey primer Untuk mendapatkan respon kepuasan masyarakat terhadap kepuasan kinerja infrastruktur, data yang digunakan adalah data primer (data survey) yang diperoleh dengan cara pemberian Kuesioner kepada responden dan wawancara secara langsung kepada sumber informasi yaitu masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi dan pengguna infrastruktur yang telah terbangun.

NO	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitungan
		- Menjadi acuan dalam penyusunan rencana dan strategi perbaikan kinerja infrastruktur. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam penyediaan layanan infrastruktur. Terdapat 6 unsur utama untuk mengukur Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI), yaitu - Ketersediaan Fisik (availability) - Kualitas Fisik (quality) - Kesesuaian (Appropriateness)	Data hasil survey setiap jenis infrastruktur dilakukan penilaian dengan menggunakan 6 Variabel dan di rata-rata. Rata-rata 6 variabel dikalikan dengan bobot masing-masing variabel yang telah ditentukan, menghasilkan IKLI masing-masing jenis infrastruktur. 3. Melakukan pembobotan proporsi anggaran masing-masing infrastruktur yang telah terbangun, yaitu: - Infrastruktur Jalan dan jembatan, - sumber daya air, - rumah layak huni, - bangunan gedung dalam kondisi baik, - air minum layak, - sanitasi, - penanganan sampah, - Pendidikan dan

NO	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitungan
		d. Efektivitas Pemanfaatan (Utility) e. Penyerapan Tenaga Kerja (Job Creation) f. Kontribusi pada Perekonomian IKLI di kab Probolinggo merupakan agregat dari infrastruktur jalan dan jembatan, sumber daya air, rumah layak huni, bangunan gedung dalam kondisi baik, air minum layak, sanitasi (air limbah domestik), penanganan sampah, Pendidikan dan Kesehatan.	i. Kesehatan. Pembobotan dilakukan dengan mempertimbangkan proporsi anggaran dari masing-masing infrastruktur pada tahun anggaran berkenaan. 4. Perhitungan indikator kepuasan layanan infrastruktur (IKLI) Perhitungan indeks kepuasan layanan infrastruktur merupakan Penjumlahan dari hasil perkalian nilai IKLI masing-masing infrastruktur dengan bobot proporsi anggaran $\text{IKLI} = (\text{IKLI 1} \times \text{Bobot}) + (\text{IKLI 2} \times \text{Bobot}) + (\text{IKLI 3} \times \text{Bobot}) + (\text{IKLI 4} \times \text{Bobot}) + (\text{IKLI 5} \times \text{Bobot}) + (\text{IKLI 6} \times \text{Bobot}) + (\text{IKLI 7} \times \text{Bobot}) + (\text{IKLI 8} \times \text{Bobot}) + (\text{IKLI 9} \times \text{Bobot})$

NO	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitungan
26	Indeks Infrastruktur Dasar	Indeks infrastruktur dasar adalah ukuran yang digunakan untuk menilai ketersediaan dan kualitas fasilitas dasar di suatu wilayah. Indeks ini mencerminkan tingkat kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan akses terhadap layanan-layanan penting seperti air bersih, sanitasi, kesehatan, dll. Di Kabupaten Probolinggo indeks infrastruktur dasar dihitung berdasarkan ketersediaan jalan dan jembatan, air minum layak, sanitasi, rumah layak huni bangunan gedung,	Indeks infrastruktur dasar adalah rata-rata persentase jalan dan jembatan mantap + Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan + Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) + Persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni+Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik + Persentase ketersediaan sarana pendidikan + Persentase ketersediaan sarana kesehatan+Persentase penanganan sampah + Persentase kenaikan pengelolaan sumber daya air kondisi baik

NO	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitungan
		ketersediaan sarana pendidikan, kesehatan, penanganan sampah serta pengelolaan sumber daya air.	
27	Indeks Konektivitas Wilayah	Indeks konektivitas wilayah adalah ukuran yang menggambarkan tingkat keterhubungan suatu wilayah melalui berbagai moda transportasi dan jaringan, seperti jalan, rel, laut, dan udara. Indeks ini digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu wilayah terhubung dengan wilayah lain, yang memungkinkan terjadinya pergerakan orang, barang, dan informasi.	Indeks konektivitas wilayah = 50% persentase jalan dan jembatan mantap + 40% rasio konektivitas kabupaten + 10% persentase keselamatan transportasi

NO	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitungan
		Konektivitas wilayah dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk infrastruktur transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara), sistem transportasi yang ada (moda transportasi yang tersedia) dan regulasi terkait. Indeks konektivitas wilayah adalah agregat dari ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan mantap, rasio konektivitas kabupaten serta persentase keselamatan transportasi.	

NO	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitungan
28	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Pengukuran kualitas lingkungan di suatu wilayah yang diwakili oleh nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL)	IKLH Kab/Kota = (IKA x 37,6%)+(IKU x 40,5%)+(IKL x 21,9%)
29	Indeks Kesejahteraan Sosial	Alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan suatu masyarakat, baik secara keseluruhan maupun pada aspek-aspek tertentu. IKESOS mencerminkan keberhasilan suatu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai	$IKESOS_{Kabupaten/Kota} = \sum_{i=1}^3 Dimensi_i \times Bobot_{Dimensi_i} = (Dimensi_1 \times Bobot_{Dimensi_1}) + (Dimensi_2 \times Bobot_{Dimensi_2}) + (Dimensi_3 \times Bobot_{Dimensi_3})$

NO	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitungan
30	Rasio Gini	Indeks Gini merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi. Nilainya berkisar antara 0 hingga 1, di mana 0 menunjukkan kesetaraan sempurna (semua orang memiliki pendapatan yang sama) dan 1 menunjukkan ketidaksetaraan sempurna (satu orang memiliki semua pendapatan). Indeks Gini dihitung menggunakan Kurva Lorenz, yang menggambarkan distribusi pendapatan dalam suatu populasi. Rumus umumnya adalah	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ dimana: Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-I Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi

NO	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitungan
31	Indeks Pembangunan Gender	Alat ukur yang digunakan untuk menilai kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki dalam suatu wilayah, dengan mempertimbangkan tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi	$IPG = \text{IPM Perempuan} / \text{IPM Laki-laki}$
32	Indeks Pembangunan Kualitas keluarga	Alat ukur yang digunakan untuk menilai pencapaian kualitas keluarga dan keberhasilan pembangunan keluarga	Nilai IPKK dihitung sebagai rata - rata dari nilai dimensi ketentraman, kemandirian, kebahagiaan keluarga, kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya
33	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas dihasilkan dari penghitungan 4 (empat) Indeks yaitu Indeks Penyelenggaraan	$IPT = (W_{IPKKU} \times I_{IPKKU}) + (W_{satlinmas} \times I_{satlinmas})$ $+ (W_{kebakaran} \times I_{kebakaran}) + (W_{bencana} \times I_{bencana})$

NO	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitungan
	dan Perlindungan Masyarakat	Trantibumlinmas sub urusan bencana, Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum, Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran dan Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas	
34	Persentase Disabilitas yang Berdaya (bekerja di sektor formal)	Ukuran yang menunjukkan proporsi penyandang disabilitas yang telah memperoleh dan aktif bekerja di sektor formal, dibandingkan dengan total penyandang disabilitas yang berpotensi bekerja (usia kerja dan mampu secara fungsional)	Pencari kerja penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan ULD Ketenagakerjaan dibagi pencari kerja penyandang disabilitas yang datang ke Disnaker dikali 100 %

NO	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitungan
35	Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD	Suatu ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa besar penurunan jumlah atau intensitas konflik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dari suatu periode waktu ke periode waktu berikutnya. Penurunan ini dihitung berdasarkan perbandingan jumlah/intensitas konflik pada periode awal dan periode akhir. Persentase penurunan konflik ipoleksosbud mengukur seberapa efektif upaya yang dilakukan untuk meredam atau menyelesaikan konflik-konflik yang berkaitan	Jumlah konflik thn (n-1) - Jumlah konflik thn (n) / Jumlah konflik thn (n-1) X 100%

NO	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitungan
		dengan konflik Ipoleksosbud. Misalnya, ketika persentase penurunan konflik naik dari 20% menjadi 30% di tahun berikutnya, itu menunjukkan bahwa upaya penyelesaian konflik semakin efektif dan situasi sosial-politik menjadi lebih stabil dan kondusif. Hal ini sering menjadi indikator positif bagi stabilitas suatu negara atau wilayah. Semakin tinggi persentase penurunan konflik ipoleksosbud, semakin baik. Ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah dan pencegahan konflik di berbagai aspek	

NO	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitungan
		kehidupan masyarakat berjalan dengan sukses, sehingga masyarakat menjadi lebih harmonis dan stabil	
36	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Instrumen untuk mengukur capaian kinerja Pembangunan kebudayaan, diharapkan dapat memberikan Gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: 1) dimensi ekonomi budaya; 2) dimensi pendidikan;	$IPK = \sum_{j=1}^7 (W_j \times indeks D_j)$ Keterangan: IPK = Indeks Pembangunan Kebudayaan W_j = Bobot dimensi ke-j D_j = Dimensi ke-j Rumus menghitung indeks dimensi (D_j): $Indeks D_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) \times 100$ Keterangan: D_j = Dimensi ke-j SX_{ji} = Nilai indikator i pada dimensi ke-j yang sudah dinormalisasi n_j = Jumlah indikator dimensi ke-j

NO	Indikator	Definisi Operasional	Formula Perhitungan
		3) dimensi ketahanan sosial budaya; 4) dimensi warisan budaya; 5) dimensi ekspresi budaya; 6) dimensi budaya literasi; dan 7) dimensi kesetaraan gender	

3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

Strategi pembangunan merumuskan langkah dan tahapan untuk mencapai sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal daerah. Sedangkan arah kebijakan menetapkan waktu pelaksanaan strategi tersebut dalam periode lima tahun RPJMD. Arah kebijakan yang tepat akan menjadi dasar penentuan tema pembangunan tahunan dalam RKPD. Dengan demikian, strategi yang diterjemahkan ke dalam arah kebijakan dan program yang terukur akan menunjukkan keterkaitan logis terhadap pencapaian visi dan misi RPJMD. Selanjutnya akan dibahas secara terperinci strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 - 2029.

3.2.1 Strategi Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

Strategi pembangunan merupakan rumusan arah umum dan langkah-langkah utama yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun. Strategi ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor penting, seperti isu strategis dan prioritas pembangunan daerah, kondisi aktual baik internal maupun eksternal, keselarasan dengan visi dan misi kepala daerah, serta sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Strategi pembangunan berperan sebagai panduan arah bagi perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan yang tepat sasaran. Strategi ini juga menjelaskan secara sistematis dan terukur bagaimana setiap tujuan dan sasaran pembangunan akan dicapai. Selain itu, strategi menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan tema pembangunan tahunan serta menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan programnya agar berjalan lebih efektif dan efisien. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada pembahasan bab sebelumnya, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan maka dirumuskan strategi pada tiap sasaran RPJMD sebagai berikut:

Tabel 3.7 Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan Kualitas Manajemen Tata Kelola, Keuangan dan Kepegawaian yang berorientasi kinerja	Membangun pemerintah yang bersih dan anti korupsi (Zona Integritas) dengan penilaian kinerja pegawai yang lebih terukur.
			Menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan secara terbuka bersama masyarakat.
		Peningkatan Komunikasi dan Koordinasi Antar Skala-Pemerintahan	Sinkronisasi dan integrasi substansi perencanaan pembangunan pusat, provinsi dan daerah lainnya
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan, pembangunan
	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan ASN	Meningkatkan pengelolaan manajemen ASN yang professional, akuntabel, adaptif, dan berbasis merit untuk mendukung kinerja birokrasi yang efektif dan pelayanan publik yang berkualitas	Peningkatan kualitas aparatur organisasi pemerintah daerah berbasis kompetensi dan prestasi, serta pengukuran kinerja dan loyalitas.
			Memastikan implementasi sistem meritokrasi secara menyeluruh melalui pengembangan kompetensi pegawai agar memenuhi Standar

			Kompetensi Jabatan, memastikan kualifikasi dan tingkat pendidikan pegawai sesuai dengan persyaratan jabatan, dan penempatan pegawai melalui mutasi dan /atau promosi didasarkan pada perencanaan yang matang.
	Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif	Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik, penguatan infrastruktur layanan informasi dan telekomunikasi digital yang terintegrasi	Menjamin terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik didukung teknologi informasi yang inovatif untuk meningkatkan kemudahan dan kualitas pelayanan publik sampai tingkat desa.
	Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Pemerintah Daerah	Penguatan infrastruktur layanan informasi dan komunikasi digital yang disertai dengan peningkatan kapasitas SDM dan penguatan keamanan siber dan perlindungan data	Optimalisasi transformasi digital tata kelola yang terintegrasi, efisien, dan transparan dalam meningkatkan kualitas layanan publik digital yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berdaya Saing Dalam Upaya Memberantas Kemiskinan	Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatkan kemudahan pelayanan investasi sesuai SOP serta giat melakukan promosi dan sosialisasi investasi, didukung dengan penyediaan infrastruktur dan akses pasar yang mudah. Peningkatan nilai investasi daerah yang mendukung	Peningkatan realisasi investasi terutama pada sektor-sektor unggulan daerah yang produktif.

		percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.	
Meningkatnya Pengembangan Sektor Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah		Mendukung dan menjamin Petani Sejahtera, melalui peningkatan produktivitas hasil pertanian, penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang berkualitas, menjaga stabilitas harga hasil produksi pertanian, serta hilirisasi produk pertanian untuk menjangkau pasar yang lebih luas	Perluasan akses pasar komoditas unggulan daerah
			Pengembangan sektor industri bagi komoditas unggulan daerah dalam rangka hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah
			Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya)
			Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global
		Peningkatan daya Tarik pariwisata berbasis potensi daerah dan desa wisata	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural yang dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif.
Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif		Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan keahlian bersertifikasi	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i>
Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif		Perlindungan sosial yang tepat sasaran melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang layak	Perluasan penyediaan bantuan dan perlindungan sosial terutama bagi masyarakat miskin, kelompok marjinal, dan masyarakat rentan yang

			merata dan tepat sasaran
			Memberikan kemudahan akses terhadap fasilitas dan pelayanan kesehatan serta pendidikan dasar bagi seluruh masyarakat miskin, rentan, dan kelompok marjinal
			Peningkatan akses terhadap layanan infrastruktur dasar (jalan, air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik, telekomunikasi, persampahan)
		Meningkatkan pendapatan kelas bawah melalui pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada peningkatan akses permodalan dan kapasitas pelaku usaha sebagai upaya pengentasan kemiskinan	Peningkatan kapasitas dan diversifikasi usaha bagi buruh tani
			Fasilitasi masyarakat terhadap akses permodalan yang mudah
			Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat, khususnya di sub wilayah kantong kemiskinan di Kabupaten Probolinggo
			peningkatan kapasitas tenaga kerja dan menghubungkan kerja sama dengan perusahaan
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terciptanya Masyarakat yang Berkualitas Unggul dan Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesejahteraan	Meratanya Akses Pendidikan	Pemerataan Kualitas dan Pemenuhan Akses Penunjang Layanan Pendidikan	Pemerataan penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata baik dari segi infrastruktur, tenaga pendidik dan kependidikan, serta kurikulum yang berbasis kompetensi

			dan kearifan lokal agar semua anak mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan.
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Layanan Kesehatan	Meningkatkan cakupan jaminan kesehatan, menyediakan kemudahan akses layanan kesehatan bagi semua masyarakat, yang didukung oleh penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang berkualitas dan kompeten.
	Meningkatnya Pemberdayaan Pemuda	Peningkatan kapasitas SDM pemuda melalui pengembangan kewirausahaan dan ekonomi kreatif pemuda, fasilitasi ruang dan komunitas kreatif, serta penguatan jejaring dan kolaborasi antar pemuda guna meningkatkan partisipasi dalam pembangunan	Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan industri, pemberdayaan organisasi dan komunitas kepemudaan, pembangunan pusat kegiatan pemuda, serta mendorong peran pemuda sebagai agen of change dalam pembangunan
	Meningkatnya Kualitas Desa	Memperlancar mobilitas penduduk di wilayah desa dan Membangun desa yang produktif serta tangguh bencana	Pengembangan Desa Produktif yang dapat membangun potensi desa untuk peningkatan tata kelola pemerintah desa, pemerataan akses terhadap layanan dasar, dan pemanfaatan sumber daya yang bertanggungjawab.
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Infrastruktur Dalam	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas infrastruktur	Peningkatan kualitas dan pemerataan akses infrastruktur dasar melalui jalan dan jembatan, penyediaan rumah	Pemenuhan akses perumahan dan permukiman layak huni Percepatan pemerataan dan peningkatan akses terhadap layanan air minum dan sanitasi

Pengembangan Wilayah		layak huni, air minum, sanitasi serta perbaikan dan penambahan saluran jaringan irigasi	Perbaikan dan penambahan jaringan irigasi dalam rangka peningkatan ketahanan pangan
	Meningkatnya Konektivitas Wilayah yang Efisien	Peningkatan akses antar wilayah yang layak, berkualitas dan merata baik dari segi infrastruktur, jalan dan jembatan, untuk menunjang aktivitas perekonomian, penyaluran bahan-bahan kebutuhan dasar, penyaluran bantuan sosial, serta pengembangan transportasi publik berkualitas yang sejalan dengan perencanaan tata ruang dan didukung sinergi antarwilayah untuk pemerataan pembangunan	Pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar berupa jalan dan jembatan serta perlengkapannya untuk mendukung konektivitas wilayah berbasis tata ruang. Di samping itu konektivitas dalam hal ini juga terkait dengan infrastruktur non-fisik seperti jaringan internet maupun komunikasi lainnya
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan tangguh bencana melalui penguatan tata ruang berbasis ekosistem optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, serta peningkatan sistem mitigasi dan adaptasi bencana	Perencanaan tata ruang dengan dan peningkatan ketahanan bencana dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi dan perubahan iklim. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu

			Dukungan peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Daerah berbasis Kesetaraan Gender dan Kearifan Lokal	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Memprioritaskan pengarusutamaan Gender dalam setiap program Organisasi Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa	Pemberdayaan Perempuan melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan Keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang Pembangunan.
	Meningkatnya Ketahanan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat rentan dan disabilitas	Peningkatan kesiapsiagaan dan resiliensi terhadap bencana, baik yang bersifat bencana alam maupun non alam, serta kondisi keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data terkait penanganan gangguan Trantibumlinmas dan pemetaan kondisi potensi bencana di seluruh wilayah
		Peningkatan kesempatan bagi kaum rentan dan marginal untuk ikut berpartisipasi dan aktif dalam kegiatan perekonomian melalui program – program pemberdayaan yang diselenggarakan tidak hanya oleh Pemerintah Daerah tetapi juga para stakeholder lainnya.	Pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang Pembangunan

	Meningkatnya Pelestarian Budaya Kearifan Lokal	Peningkatan partisipasi pemuda dalam Upaya melestarikan budaya melalui keikutsertaan dalam event-event budaya yang diselenggarakan dan meningkatkan pembentukan sanggar budaya	Peningkatan pemuda dalam event kebudayaan
			Peningkatan kesadaran pemuda dalam melestarikan budaya lokal

3.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

Arah kebijakan pembangunan merupakan landasan utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029. Arah kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dengan fokus pada prioritas-prioritas yang akan dilaksanakan sepanjang periode perencanaan. Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan jangka menengah, arah kebijakan dirancang untuk memastikan adanya kesinambungan antar tahapan pembangunan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Arah kebijakan menjelaskan bagaimana implementasi strategi pembangunan dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan potensi, kebutuhan, serta tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Probolinggo.

Arah kebijakan pembangunan juga disusun berdasarkan Sasaran Pokok dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2045. Oleh karena itu, tahapan-tahapan yang digariskan dalam RPJMD ini berfungsi sebagai penanda titik - titik pencapaian penting yang harus diwujudkan pada setiap periode perencanaan.

**Tabel 3. 8 Pentahapan Pembangunan Kabupaten Probolinggo
Tahun 2025-2029**

Tahun	Tahapan Pembangunan
2026	Penguatan pondasi layanan infrastruktur dasar yang berkelanjutan menuju Kabupaten Probolinggo berdaya saing
2027	Percepatan penguatan pondasi layanan infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan disertai penguatan pondasi transformasi sosial ekonomi inklusif berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi
2028	Pemantapan pondasi infrastruktur yang berkualitas dan percepatan penguatan pondasi transformasi sosial ekonomi yang didukung oleh tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, bersih dan akuntabel
2029	Pemantapan pondasi transformasi sosial ekonomi serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas
2030	Perwujudan percepatan transformasi sosial, ekonomi serta tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik didukung oleh infrastruktur yang berkelanjutan

Untuk mendukung tahapan pembangunan Kabupaten Probolinggo, maka dirumuskan arah kebijakan sektoral dan spasial. Program lintas sektoral merujuk pada program atau kegiatan pembangunan yang melibatkan kerja sama antar berbagai sektor atau instansi dalam pemerintahan, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang lebih holistik dan efektif. Sementara itu, program spasial atau kewilayahan adalah implementasi konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), berupa program lintas sektor yang dilaksanakan bersama oleh perangkat daerah terkait di lokasi spesifik untuk mewujudkan peruntukan kawasan tersebut. Melalui program kewilayahan, sebuah tema pembangunan disepakati untuk diimplementasikan secara spasial. Kebutuhan program dan kegiatan pembangunan wilayah didaftarkan secara holistik dan dikerjakan secara

integratif oleh perangkat daerah terkait. Diharapkan, program ini memicu pertumbuhan cepat di kawasan potensial Kabupaten Probolinggo dan memberikan efek berganda bagi wilayah sekitarnya.

Dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo, arah kebijakan untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan adalah melalui implementasi program lintas sektoral dan program kewilayahan yang terencana dan terkoordinasi.

1. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Probolinggo

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Probolinggo menyebutkan bahwa kawasan strategis dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu wilayah - wilayah aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas kawasan agropolitan, kawasan minapolitan, dan kawasan peruntukan industri, dan kawasan pariwisata. Hal ini juga merupakan tujuan penataan ruang Kabupaten Probolinggo yaitu Terwujudnya Kabupaten Probolinggo sebagai sentra komoditas pertanian yang berdaya saing dengan mengembangkan agropolitan serta minapolitan yang didukung oleh Industri dan pariwisata.

Kawasan penyangga ekonomi Kabupaten Probolinggo dipetakan menjadi kawasan agropolitan, kawasan minapolitan, kawasan pariwisata yang dikenal sebagai 4-B (Bromo, Bentar, Breml, Binor), ikon pariwisata baru Bromo yaitu jembatan kaca di area Seruni Point, Kampung Kerapu Gili Ketapang, Kawasan Industri utamanya industri hasil tembakau. Pengembangan kawasan – kawasan ini perlu dilakukan agar menjadi daerah penopang dan secara riil mampu berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama lintas sektoral yang diwujudkan melalui program - program di kawasan tersebut, yaitu :

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan mendukung kemudahan dan jangkauan akses ke kawasan-kawasan tersebut;

- 2) Penguatan kapasitas sumber daya ekonomi potensial di kawasan tersebut, meliputi penguatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan aktivitas ekonomi, dengan fokus pada peningkatan produktivitas sektor pertanian secara komprehensif, serta upaya untuk meningkatkan nilai tambah dari sektor tersebut. Selain itu, mendorong pertumbuhan usaha-usaha baru, terutama yang memiliki nilai tambah tinggi dan berbasis ekonomi kreatif melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam setiap proses pengembangan ekonomi.
- 3) Peningkatan nilai investasi di kawasan tersebut melalui layanan kemudahan berinvestasi yang didukung oleh kebijakan yang mendukung iklim investasi yang kondusif, dengan didasari oleh peraturan daerah yang relevan dan adaptif terhadap kebutuhan pasar.

2. Peningkatan Dan Perluasan Akses Terhadap Hak-Hak Dasar Masyarakat (Miskin, Rentan, Dan Termarginalkan) Dalam Rangka Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan, Khususnya Kemiskinan Ekstrem

Penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara komprehensif, dengan fokus pada pemenuhan hak-hak dasar bagi masyarakat miskin atau terpinggirkan, seperti akses terhadap layanan wajib dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan layak, perlindungan sosial, serta rasa aman dan tenteram, yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai untuk meningkatkan pendapatan agar mereka lebih berdaya. Untuk itu, perlu dilaksanakan program terkait peningkatan akses terhadap hak-hak dasar bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, sekaligus menjadi pembangunan lintas sektoral yang harus didukung oleh program-program pembangunan dari perangkat daerah terkait. Program-program dari perangkat daerah terkait, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar, disinergikan dan diintegrasikan untuk dilaksanakan di daerah-daerah yang menjadi kantong kemiskinan di Kabupaten Probolinggo.

Peningkatan akses hak-hak dasar masyarakat miskin dan termrajinalkan dapat dilaksanakan melalui program lintas sektoral seperti berikut ini :

- 1) Peningkatan dan pemerataan akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas agar semua anak mendapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak, termasuk meningkatkan cakupan bantuan sosial pendidikan
- 2) Peningkatan dan perluasan akses terhadap layanan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan sesuai standar
- 3) Peningkatan ketersediaan perumahan dan kawasan permukiman layak
- 4) Peningkatan akses terhadap infrastruktur wilayah yang berkualitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat
- 5) Penyediaan bantuan secara responsif bagi korban bencana, utamanya di wilayah yang merupakan kantong kemiskinan dan daerah rawan bencana
- 6) Peningkatan ketersediaan pangan yang cukup dan mudah dijangkau oleh masyarakat di wilayah kantong kemiskinan
- 7) Peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui program – program pemberdayaan, khususnya bagi masyarakat miskin, rentan, dan terpinggirkan.

3. Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel, Kolaboratif, Dan Inovatif

Peningkatan daya saing daerah dapat dicapai melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, dengan mengedepankan prinsip-prinsip bersih, akuntabel, kolaboratif, dan inovatif. Tata kelola yang bersih dan transparan akan memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, meminimalisir praktik korupsi, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sementara akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya daerah akan meningkatkan

efisiensi penggunaan anggaran, yang nantinya dapat mendorong peningkatan kualitas layanan publik dan pembangunan infrastruktur yang lebih merata. Sedangkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan, seperti penerapan teknologi informasi dan sistem digitalisasi, akan mempercepat proses birokrasi, mengurangi hambatan administrasi, serta menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat dan efektif. Upaya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kolaboratif, dan inovatif dilaksanakan melalui percepatan Reformasi Birokrasi yang meliputi:

- 1) Penyederhanaan prosedur dan birokrasi untuk mempercepat layanan kepada masyarakat
- 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah melalui peningkatan keterampilan pengetahuan, dan etika kerja
- 3) Implementasi teknologi informasi dan sistem digitalisasi untuk mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan transparansi
- 4) Penguatan akuntabilitas dan transparansi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah
- 5) Peningkatan koordinasi dan sinergi antar sektor untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif dalam mencapai tujuan pembangunan
- 6) Penguatan kelembagaan dan tata kelola melalui penataan organisasi, penguatan sistem pengawasan internal, dan sistem informasi manajemen pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi merupakan tanggung jawab seluruh perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan. Namun, beberapa perangkat daerah yang berfokus pada urusan penunjang pemerintahan akan memimpin dan mengkoordinasikan upaya percepatan reformasi birokrasi ini. Dalam hal ini, perangkat daerah akan bekerja secara sinergis untuk mengelola siklus manajemen pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, hingga tindak lanjut untuk merumuskan perencanaan pembangunan yang lebih baik di masa

depan. Dengan koordinasi yang kuat dan pelaksanaan yang terintegrasi, diharapkan reformasi birokrasi dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4. Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah sebagai Pilar Kemajuan Daerah

Peningkatan penyediaan layanan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah merupakan hal mendasar dalam upaya mempercepat pembangunan dan mendorong kemajuan daerah. Infrastruktur yang berkualitas bisa menjadi pengungkit utama dalam memperluas akses terhadap layanan publik, menggerakkan aktivitas ekonomi, serta mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah.

Ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, sanitasi, dan jaringan telekomunikasi merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan yang akan membuka akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, perizinan, dan layanan administrasi lainnya secara lebih cepat, efisien, dan berkualitas. Di sisi lain, konektivitas wilayah yang baik juga akan meningkatkan pergerakan manusia, barang, dan jasa, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan daya saing daerah.

Dalam konteks pemerataan pembangunan, pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah, khususnya antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara wilayah maju dan wilayah yang masih tertinggal. Infrastruktur yang terbangun dengan baik akan menciptakan konektivitas yang memungkinkan semua wilayah untuk saling terhubung dan tumbuh bersama secara berkelanjutan. Selain itu, infrastruktur yang tangguh juga memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi perubahan iklim, bencana alam, maupun tekanan ekonomi. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang kuat juga menjadi dasar dalam

mendukung digitalisasi tata kelola pemerintahan dan pengembangan ekonomi berbasis digital.

Upaya untuk meningkatkan layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah dapat dilaksanakan melalui penyediaan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yaitu melalui langkah – langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan cakupan infrastruktur dasar meliputi pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, sistem drainase, jaringan air bersih, sanitasi, listrik desa, dan fasilitas umum lainnya yang mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat;
2. Penguatan Infrastruktur yang Mendukung Konektivitas Antarwilayah yang fokus pada pengembangan jaringan transportasi terpadu, aksesibilitas antar-kawasan, serta konektivitas antar moda transportasi untuk memperlancar distribusi barang dan mobilitas penduduk;
3. Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan dan Berketahanan Iklim dengan penerapan prinsip ramah lingkungan dan desain infrastruktur yang adaptif terhadap risiko bencana dan perubahan iklim;
4. Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan Infrastruktur dalam merencanakan, mengelola, dan memelihara infrastruktur secara berkelanjutan, termasuk penguatan regulasi, pengawasan mutu konstruksi, dan sistem pemeliharaan jangka panjang.

Kebijakan peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah harus terus didorong secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan guna mempercepat transformasi daerah menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan penguatan daya saing daerah di tingkat regional maupun nasional.

3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan, maka disusun program prioritas pembangunan daerah. Program prioritas merupakan serangkaian program terpilih yang dianggap paling penting dan mendesak untuk dicapai dalam jangka waktu 5 tahun.

Program prioritas mengacu pada janji politik Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo periode 2025-2029 yang telah dilakukan penyelarasan antara Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan 22 (dua puluh dua) Program Prioritas serta 59 aktivitas/kerja prioritas. Pelaksanaan program prioritas diharapkan mampu mencapai tujuan Pembangunan yang lebih terarah dan efektif. Program prioritas dalam periode RPJMD 2025-2029 disajikan pada tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

PROGRAM PRIORITAS BUPATI		SUB PROGRAM / KERJA PRIORITAS		PENJELASAN
1	SAE AKSES PERLINDUNGAN HUKUM:	1	KARTU SAE LAW CARE	Pendampingan hukum dan konsultasi hukum GRATIS bagi aparatur Kades, kasek, ASN, dan aparatur pemerintah lainnya sampai tingkat RT/RW. (Aparatur pemerintah dibantu dalam memahami permasalahan hukum. Dapat bekerja dengan lebih aman dan sesuai hukum, mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas, yang akhirnya berdampak positif pada kualitas pelayanan publik. (Bekerjasama dengan Lembaga Konsultasi Hukum dan Praktisi Hukum)
		2	KARTU SAE COMMUNICATION CARE	Pendampingan dan konsultasi komunikasi publik dan teknologi GRATIS bagi aparatur pemerintah. Aparatur memiliki kemampuan komunikasi publik dan pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan tugas. Lebih efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Cakap menggunakan teknologi digital yang mampu menjangkau audiens secara lebih luas secara transparan dan efisien. Sehingga kualitas pelayanan publik meningkat dan proses modernisasi pemerintahan semakin cepat.

PROGRAM PRIORITAS BUPATI		SUB PROGRAM / KERJA PRIORITAS		PENJELASAN
2	SAE KERJA	3	ASN AWARD	Reward ASN berbasis kerja prima dengan penghargaan pada organisasi pelayanan publik terbaik.
		4	GURU NYAMAN BEKERJA	Memastikan bahwa setiap sekolah di wilayah Kabupaten mendapatkan jumlah guru yang sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan zonasi tempat tinggal dan kualifikasi (Distribusi Guru Proporsional). Mengatasi ketimpangan jumlah dan kualitas guru di berbagai sekolah. Pemerataan layanan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas
		5	PROBOLINGGO BEBAS KORUPSI	Pelaksanaan pemerintahan beroperasi secara jujur, transparan, dan akuntabel tanpa melakukan praktik penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok
3	SAE LAYANAN	6	MATA PRABULINGGIH	Birokrasi transformatif 4.0 yang menjadi mata bersama untuk akses layanan pemerintahan berbasis digital dari level desa sampai pemerintah daerah. Mendorong transformasi birokrasi dengan mengintegrasikan teknologi digital dalam setiap aspek layanan publik, sehingga masyarakat mudah mengakses layanan pemerintahan dimana saja serta mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat, juga bisa terpantau dan terawasi secara publik.
4	SAE PENDAPATAN DAERAH	7	HOLDING (PERUSAHAAN INDUK) BUMD TEMBAKAU, AGRO, PERIKANAN DAN SEKTOR UNGGULAN LAINNYA	Untuk mengoptimalkan potensi sektor-sektor unggulan Kabupaten melalui pembentukan holding BUMD yang mengelola tembakau, pertanian (agro), perikanan serta sektor unggulan lainnya. Dengan adanya holding ini, diharapkan pengelolaan sumber daya daerah menjadi lebih terintegrasi, profesional, dan efisien. Program ini akan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar domestik dan internasional, menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, dan secara signifikan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, program ini akan mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berbasis pada potensi lokal.
		8	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAD	Intensifikasi PAD dilakukan dengan mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang sudah ada, agar lebih efektif dan efisien Ekstensifikasi PAD dilakukan untuk penambahan atau perluasan objek dan subjek pajak/retribusi yang baru

PROGRAM PRIORITAS BUPATI		SUB PROGRAM / KERJA PRIORITAS		PENJELASAN
5	SAE GUS-TUR	9	PROBOLINGGO MENYALA 50.000 TITIK LAMPU	Pemasangan titik di sepanjang ruas jalan khususnya di daerah gelap dan rawan secara merata dapat mengurangi risiko kecelakaan, mencegah tindak kriminal dan meningkatkan kenyamanan pengguna jalan. Berbagai tindak kejahatan diantaranya yang menjadi korban adalah pengguna jalan.
		10	INSENTIF TAMBAHAN 100 JUTATIAP DESA UNTUK INFRASTRUKTUR JALAN	Insentif ini diberikan untuk mendorong perbaikan infrastruktur jalan di desa-desa dan mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur dan mencegah ketimpangan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
		11	870 KM JALAN MULUS DALAM 3 TAHUN	Target pembangunan jalan untuk mengatasi peningkatan signifikan jalan rusak berat dan menciptakan jalan mulus yang merata secara bertahap. Memastikan bahwa kualitas dari segi bahan maupun teknik konstruksi sesuai standar. Program ini juga akan memperbaiki drainase untuk mengurangi kerusakan jalan.
		12	AKSES TRANSPORTASI TERINTEGRASI TRANS PROBOLINGGO- TRANS JATIM PLUS	Integrasi dengan sistem transportasi Trans Jatim juga memungkinkan peningkatan efisiensi dan aksesibilitas transportasi umum. Menghubungkan daerah-daerah yang infrastrukturnya belum optimal dengan pusat-pusat ekonomi dan layanan publik. Akses transportasi yang lebih baik akan meningkatkan mobilitas masyarakat dan distribusi barang, serta mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah
		13	GUGUS SATGAS INFRASTRUKTUR PENGAWASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR.	Tim pengawas bersama masyarakat secara transparan, untuk memastikan setiap proyek dan perbaikan jalan dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, memonitor kualitas material dan teknik yang digunakan, serta mencegah adanya berbagai penyelewengan proyek
		14	CAK BOGEL:CALL & DATANG MENAMBAL JALAN BERLUBANG	Program Cak Bogel akan bertindak sebagai unit respons cepat yang secara khusus menanggapi laporan masyarakat tentang jalan berlubang
6	SAE Lingkungan	15	REVITALISASI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH	Memperbaiki dan mengoptimalkan pengelolaan TPA agar lebih efisien, ramah lingkungan, dan mampu mendukung sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan
		16	GUS BARKAH: MENGELOLA SAMPAH JADI BERKAH MELALUI EKONOMI SIRKULAR	Dalam ekonomi sirkular, sampah tidak hanya dibuang, tetapi didaur ulang untuk menciptakan produk baru. Program ini akan melibatkan masyarakat dan pelaku usaha, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung keberlanjutan lingkungan. Dengan cara ini, sampah tidak lagi menjadi beban,

PROGRAM PRIORITAS BUPATI		SUB PROGRAM / KERJA PRIORITAS		PENJELASAN
				melainkan berkah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
7	SAE GUS-PUK	17	GUGUS SATGAS PUPUK DAN BIBIT KOLABORATIF INTEGRATIF DI DESA	Memastikan distribusi pupuk di tingkat desa tepat sasaran dengan membentuk tim kolaboratif yang terdiri dari perwakilan kelompok tani, perangkat desa, petani, dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Gus Puk akan menggunakan platform aplikasi laporan real-time yang memungkinkan pengecer pupuk melaporkan ketersediaan dan distribusi pupuk secara langsung, sehingga dapat dipantau oleh seluruh pihak terkait.
		18	RP 5 MILIAR UNTUK SUBSIDI PUPUK BAGI PETANI TEMBAKAU	Program Subsidi Pupuk Tembakau bertujuan untuk memberikan bantuan pupuk khusus bagi petani tembakau, guna meringankan beban biaya produksi yang selama ini tidak disubsidi. Program ini dirancang untuk mendukung peningkatan produktivitas dan kualitas hasil panen tembakau, serta memperkuat daya saing petani tembakau, sehingga kesejahteraan mereka dapat lebih terjamin
		19	1 DESA 1 PUSAT PUPUK DAN BIBIT	Bertujuan untuk menyediakan akses yang lebih mudah dan terpusat bagi petani di setiap desa dalam mendapatkan pupuk dan bibit berkualitas. Setiap pusat akan dikelola secara terintegrasi oleh kelompok tani dan perangkat desa, dengan dukungan teknologi laporan real-time untuk memantau ketersediaan stok
8	SAE Bertani	20	3 PASAR TRANSIT AGRO (tembakau, bawang merah, buah dan sayuran) – BUMD, Investor	Membangun pusat transit bagi komoditas tembakau, bawang merah, buah, dan sayuran di tiga lokasi strategis. Program ini akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bekerja sama dengan investor untuk menciptakan fasilitas penyimpanan, distribusi, dan pemasaran yang efisien bagi petani dan pelaku usaha lokal. Dengan adanya Pasar Transit Agro, diharapkan rantai pasokan komoditas dapat lebih terkendali, kualitas produk terjaga, dan akses pasar menjadi lebih luas, sehingga petani dapat meningkatkan pendapatan dan daya saing produk di pasar lokal maupun nasional.
		21	1 PASAR INDUK AGRO	Membangun pusat perdagangan utama bagi komoditas pertanian, seperti buah, sayuran, bawang merah, dan tembakau, yang akan menjadi pusat distribusi bagi wilayah sekitarnya. Pasar ini akan dikelola secara profesional dengan dukungan infrastruktur modern untuk menjaga kualitas produk dan

PROGRAM PRIORITAS BUPATI		SUB PROGRAM / KERJA PRIORITAS		PENJELASAN
9	SAE PENDAPATAN KELUARGA			mempercepat proses distribusi. Dengan adanya Pasar Induk Agro, petani dan pelaku usaha lokal dapat mengakses pasar yang lebih luas dengan sistem yang efisien, meningkatkan pendapatan petani, serta memenuhi kebutuhan konsumen akan produk segar dan berkualitas tinggi.
		22	Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Menjamin stabilitas harga komoditas utama seperti tembakau, bawang merah, dan tanaman pangan, memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian yang terjangkau, serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan petani melalui pelatihan dan pendampingan teknologi pertanian. Dengan Perda ini, pemerintah berkomitmen melindungi petani dari fluktuasi harga yang merugikan, mendukung akses mereka terhadap pupuk dan bibit unggul, serta mendorong kesejahteraan mereka melalui peningkatan produktivitas. Implementasi Perda ini diharapkan menciptakan ekosistem pertanian yang berkelanjutan dan berdampak positif pada perekonomian daerah
		23	ONE VILLAGE ONE PRODUCT	Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kabupaten Probolinggo dengan mengoptimalkan potensi lokal di setiap desa. Program ini akan mendorong setiap desa untuk menghasilkan produk unggulan yang khas dan memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan dukungan akses permodalan, pelatihan pengembangan usaha, serta sertifikasi halal bagi sektor makanan dan minuman. Melalui OVOP, diharapkan dapat tercipta lapangan kerja baru, mengurangi angka pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo dengan daya saing produk yang terstandar di pasar lokal maupun regional
		24	10 DESA MANDIRI	Program ini bertujuan untuk menciptakan desa-desa yang masuk dalam kategori Desa Mandiri, sebagaimana diatur dalam Permendes Nomor 9 Tahun 2024. Desa Mandiri didefinisikan sebagai desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan yang sudah sangat baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, program ini berfokus pada penguatan enam dimensi utama yang akan dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Pemerintah

PROGRAM PRIORITAS BUPATI		SUB PROGRAM / KERJA PRIORITAS		PENJELASAN
				Desa sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundangan yang berlaku.
		25	2.000 UMKM NAIK KELAS	Mendorong pertumbuhan dan pengembangan 2.000 UMKM di Kabupaten Probolinggo agar dapat naik kelas dan meningkatkan daya saing mereka di pasar yang lebih luas. Program ini akan menyediakan pelatihan manajemen bisnis, akses permodalan, pendampingan dalam pengurusan sertifikasi halal, dan fasilitasi pemasaran digital. Dengan dukungan ini, UMKM diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jangkauan pasar, serta memperbaiki kualitas produk dan layanan, sehingga mampu berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
		26	3.000 TOKO KELONTONG NAIK KELAS	Memberdayakan 3.000 toko kelontong di Kabupaten Probolinggo agar dapat berkembang menjadi usaha yang lebih kompetitif dan modern. Program ini akan memberikan dukungan berupa pelatihan manajemen bisnis, akses permodalan, digitalisasi transaksi melalui platform pembayaran digital, serta peningkatan kapasitas dalam hal pengelolaan stok dan pemasaran. Dengan langkah ini, diharapkan toko kelontong dapat memperluas jaringan distribusi, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada konsumen, sehingga mampu bersaing di era perdagangan modern dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.
		27	KOPERASI MERAH PUTIH	Koperasi Merah Putih adalah program strategis yang bertujuan memberdayakan masyarakat desa dan kelurahan melalui usaha bersama. Program ini mendorong pemanfaatan potensi lokal secara maksimal, dengan membentuk struktur ekonomi yang dikelola oleh dan untuk masyarakat. Jenis Layanan Koperasi Merah Putih Kantor Koperasi: Pusat administrasi dan koordinasi. Apotek & Klinik Desa: Layanan kesehatan terjangkau. Cold Storage: Penyimpanan hasil pertanian. Toko Saprotan : Penyiapan segala kebutuhan pertanian. Simpan Pinjam: Akses pembiayaan dengan bunga rendah untuk UMKM desa.

PROGRAM PRIORITAS BUPATI		SUB PROGRAM / KERJA PRIORITAS		PENJELASAN
10	SAE Kesempatan Kerja	28	10 RUMAH KREATIF MILLENNIAL	Mengatasi tingginya angka pengangguran, khususnya lulusan SMA, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Probolinggo. Program ini akan membangun 10 pusat kreativitas yang difokuskan pada pengembangan keterampilan wirausaha dan inovasi bagi generasi muda. Dengan mendorong keterlibatan generasi milenial dalam industri kreatif dan sektor produktif lainnya, program ini diharapkan mampu menekan angka pengangguran
		29	500 KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) BERBASIS RT/RW	Memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat lokal dengan membentuk kelompok usaha yang melibatkan warga di setiap RT/RW. Program ini akan memberikan dukungan berupa pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan pendampingan manajemen usaha bagi setiap KUB, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha bersama yang berkelanjutan dan sesuai dengan potensi lokal. Dengan pendekatan berbasis komunitas ini, diharapkan tercipta peluang usaha baru, peningkatan pendapatan keluarga, dan penguatan ekonomi masyarakat secara mandiri, yang pada akhirnya akan memperkuat perekonomian Kabupaten Probolinggo secara keseluruhan
		30	MEMBANGUN PERWILAYAHAN INDUSTRI	Menciptakan kawasan industri terpadu di Kabupaten Probolinggo, yang dirancang sesuai dengan potensi dan keunggulan wilayah masing-masing. Program ini akan memfasilitasi pengembangan infrastruktur industri, seperti akses jalan, listrik, dan air bersih, serta menyediakan lahan yang diperuntukkan bagi berbagai sektor usaha, termasuk industri kecil dan menengah. Dengan adanya perwilayahan industri, diharapkan tercipta ekosistem yang mendukung pertumbuhan bisnis secara efisien, mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar domestik dan internasional.
		31	REGULASI 70% PEMANFAATAN TENAGA KERJA LOKAL	Meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo dengan menetapkan kebijakan yang mewajibkan setiap perusahaan dan industri di wilayah tersebut untuk mempekerjakan minimal 70% tenaga kerja lokal. Regulasi ini akan didukung dengan program pelatihan dan sertifikasi keterampilan bagi tenaga kerja lokal agar siap bersaing di dunia industri. Dengan kebijakan ini, diharapkan terjadi

PROGRAM PRIORITAS BUPATI		SUB PROGRAM / KERJA PRIORITAS		PENJELASAN
				penurunan angka pengangguran, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta penguatan ekonomi masyarakat setempat melalui partisipasi aktif dalam sektor formal
11	SAE Milenial	32	1.000 KREATOR LOKAL	Memberdayakan ribuan anak muda di Kabupaten Probolinggo yang memiliki potensi besar dalam ekonomi kreatif namun belum mendapatkan pelatihan keterampilan yang memadai. Program ini akan menyediakan pelatihan khusus untuk mengembangkan keterampilan kreatif, seperti desain grafis, produksi konten digital, dan wirausaha kreatif, sehingga mereka dapat menjadi kreator lokal yang kompetitif. Selain itu, program ini juga akan fokus pada peningkatan akses internet dan teknologi di kecamatan-kecamatan terpencil, serta pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung ekonomi kreatif bagi kalangan milenial. Dengan langkah ini, diharapkan generasi muda Probolinggo dapat berpartisipasi lebih aktif dalam ekonomi digital dan kreatif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis inovasi.
		33	MILENIAL JOB CENTER: HUB EKONOMI KREATIF DI SETIAP KECAMATAN	Menciptakan hub ekonomi kreatif di setiap kecamatan di Kabupaten Probolinggo, dengan memanfaatkan kantor kecamatan sebagai pusat kegiatan. Setiap Milenial Job Center akan menyediakan fasilitas dan pelatihan bagi generasi muda untuk mengembangkan keterampilan di bidang ekonomi kreatif, seperti digital marketing, desain grafis, fotografi, dan produksi konten. Selain itu, program ini akan mendukung mereka dalam mengakses peluang kerja dan proyek kolaboratif melalui jaringan kerja yang dibangun di setiap pusat. Dengan adanya Milenial Job Center, diharapkan anak muda di setiap kecamatan dapat lebih mudah mendapatkan pelatihan, akses teknologi, dan peluang kerja, sehingga mereka dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah mereka.
12	SAE WISATA	34	100 DESA WISATA	Mengoptimalkan potensi pariwisata Kabupaten Probolinggo dengan mengembangkan 100 desa sebagai destinasi wisata yang dikelola secara profesional dan terintegrasi. Program ini akan mencakup promosi wisata yang terkoordinasi, peningkatan akses transportasi, pembangunan fasilitas penunjang seperti tempat parkir, akomodasi, dan fasilitas kesehatan bagi wisatawan. Selain itu, desa wisata akan

PROGRAM PRIORITAS BUPATI		SUB PROGRAM / KERJA PRIORITAS		PENJELASAN
				diberikan pelatihan dalam manajemen wisata agar dapat mengelola destinasi mereka secara profesional. Teknologi layanan wisata seperti Online Travel Agent (OTA) dan pembayaran cashless juga akan diterapkan untuk memudahkan wisatawan dalam mengakses layanan. Program ini juga mencakup pembentukan Unit Kesehatan Wisata (UKW) di setiap destinasi wisata utama, terutama di kawasan wisata alam, guna memastikan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan. Dengan 100 Desa Wisata, diharapkan pariwisata Kabupaten Probolinggo dapat berkembang lebih optimal, menarik lebih banyak pengunjung, dan memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat setempat
		35	100 EVENT WISATA	Meningkatkan daya tarik pariwisata Kabupaten Probolinggo dengan menyelenggarakan 100 acara wisata yang beragam di berbagai destinasi sepanjang tahun. Program ini akan melibatkan komunitas lokal, desa wisata, dan pelaku ekonomi kreatif dalam merancang event yang mencakup festival budaya, kegiatan olahraga, kuliner lokal, dan pameran seni. Setiap event dirancang untuk menarik wisatawan, memperkenalkan kekayaan budaya dan potensi lokal, serta menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Dengan dukungan promosi terkoordinasi dan fasilitas yang memadai, 100 Event Wisata diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, memperpanjang lama tinggal mereka, serta memperkuat citra Kabupaten Probolinggo sebagai destinasi wisata yang dinamis dan beragam.
		36	PEMBENTUKAN UNIT KESEHATAN WISATA	Menyediakan layanan kesehatan yang siap siaga di setiap destinasi wisata utama di Kabupaten Probolinggo, terutama di kawasan wisata alam. Setiap UKW akan dilengkapi dengan fasilitas kesehatan dasar dan tenaga medis yang terlatih untuk memberikan pertolongan pertama, layanan kesehatan darurat, dan dukungan medis bagi wisatawan yang membutuhkan. Program ini juga akan menyediakan sarana edukasi kesehatan bagi wisatawan untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan selama berwisata. Dengan adanya Unit Kesehatan Wisata, diharapkan keamanan dan kenyamanan wisatawan dapat lebih terjamin, sehingga meningkatkan daya tarik pariwisata dan kepercayaan wisatawan terhadap

PROGRAM PRIORITAS BUPATI		SUB PROGRAM / KERJA PRIORITAS		PENJELASAN
				fasilitas yang disediakan oleh Kabupaten Probolinggo
13	SAE GUS-TREN	37	RP 20 MILIAR BANTUAN UNTUK PESANTREN KECIL, MADIN, TPQ	Bertujuan untuk meningkatkan dukungan bagi lembaga keagamaan di Kabupaten Probolinggo yang berperan penting dalam pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Program ini akan memberikan bantuan finansial yang lebih layak bagi pesantren kecil, MADIN, dan TPQ, serta peningkatan insentif bagi para guru, termasuk guru ngaji, guru RA, dan guru swasta di MTs-MA atau setingkat. Selain itu, bantuan ini juga mencakup dana untuk fasilitas sarana dan prasarana pendidikan agar lembaga-lembaga ini dapat beroperasi dengan lebih optimal. Dengan alokasi Rp 20 Miliar, diharapkan dukungan yang diberikan dapat mendorong kesejahteraan guru, meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan, dan memperkuat peran pesantren dan lembaga keagamaan dalam pembangunan sosial di Kabupaten Probolinggo
		38	PROBOLINGGO MENGETUK LANGIT KEGIATAN KEAGAMAAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL.	Merupakan inisiatif kegiatan keagamaan berbasis kearifan lokal yang bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai spiritual dan budaya masyarakat Kabupaten Probolinggo. Program ini akan mencakup berbagai kegiatan keagamaan, seperti doa bersama, pengajian akbar, dan tradisi-tradisi lokal yang mengakar di masyarakat, sehingga menjadi wadah silaturahmi sekaligus memperkaya identitas budaya setempat. Dengan melibatkan pesantren, tokoh agama, serta komunitas lokal, Probolinggo Mengetuk Langit diharapkan dapat menjadi simbol keharmonisan antara nilai keagamaan dan kearifan lokal, meningkatkan kualitas spiritual masyarakat, dan memperkuat ikatan sosial di Kabupaten Probolinggo.
		39	EKOTREN: PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PESANTREN.	Inisiatif pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pesantren di Kabupaten Probolinggo, yang bertujuan untuk mengembangkan kemandirian ekonomi pesantren sekaligus memberdayakan masyarakat sekitar. Program ini akan melibatkan pesantren dalam berbagai kegiatan usaha produktif, seperti agribisnis, kerajinan, serta industri kecil dan menengah, dengan dukungan pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan pendampingan usaha. Melalui EkoTren, pesantren tidak hanya berperan sebagai

PROGRAM PRIORITAS BUPATI		SUB PROGRAM / KERJA PRIORITAS		PENJELASAN
				pusat pendidikan agama, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi yang mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan santri dan masyarakat sekitar, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal berbasis nilai keagamaan.
14	SAE SEKOLAH	40	10.000 BEASISWA SAMPAI SARJANA	Untuk mengatasi tingginya angka putus sekolah dan kekurangan tenaga pengajar profesional di Kabupaten Probolinggo. Program ini akan memberikan beasiswa pendidikan hingga jenjang sarjana bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk mereka yang putus sekolah, agar memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan dan meraih gelar sarjana. Selain itu, program ini juga berfokus pada pembinaan calon tenaga pengajar yang kompeten melalui pendidikan tinggi, guna memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sekolah-sekolah, terutama yang mengalami kerusakan dan kekurangan fasilitas. Dengan adanya 10.000 Beasiswa Sampai Sarjana, diharapkan peningkatan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat Probolinggo dapat terwujud, sehingga berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan daerah
		41	REHAB 1.000 SEKOLAH	Memperbaiki kondisi infrastruktur pendidikan di Kabupaten Probolinggo dengan melakukan rehabilitasi terhadap 1.000 sekolah yang mengalami kerusakan, baik ringan, sedang, maupun berat. Program ini akan mencakup perbaikan ruang kelas, fasilitas belajar, dan sarana pendukung lainnya untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa. Dengan adanya Rehab 1.000 Sekolah, diharapkan kualitas pendidikan dapat ditingkatkan melalui fasilitas yang layak, sehingga mendukung proses belajar mengajar yang lebih efektif dan memberikan motivasi belajar bagi siswa serta tenaga pengajar di Kabupaten Probolinggo.
		42	REKRUTMEN 1.000 TENAGA PENDIDIK BARU	Untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar profesional di Kabupaten Probolinggo melalui kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi. Program ini akan merekrut dan melatih 1.000 lulusan yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan untuk ditempatkan di sekolah-sekolah yang membutuhkan, termasuk di wilayah terpencil. Melalui kemitraan dengan kampus, program ini akan memastikan proses seleksi, pelatihan, dan penempatan tenaga

PROGRAM PRIORITAS BUPATI		SUB PROGRAM / KERJA PRIORITAS		PENJELASAN
				pendidik yang berkualitas dan siap mengabdikan di masyarakat. Dengan 1.000 Tenaga Pendidik Baru, diharapkan tercipta peningkatan kualitas pengajaran dan akses pendidikan yang lebih merata di Kabupaten Probolinggo.
		43	SEKOLAH RAKYAT (SR)	Program Sekolah Rakyat adalah sekolah berasrama gratis yang disiapkan oleh pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sekolah ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan berkualitas dan memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.
		44	Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	Program pemerintah yang menyediakan makanan bergizi secara gratis kepada anak-anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi, kesehatan, dan produktivitas masyarakat, terutama bagi mereka yang berisiko mengalami masalah gizi seperti stunting
15	SAE BEROBAT	45	24 JAM MUDAH BEROBAT	Untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi seluruh penduduk Kabupaten Probolinggo, yang berfokus pada layanan Kesehatan kedaruratan yang dapat diakses selama 24 jam termasuk untuk persalinan. Program ini akan menyediakan layanan kesehatan dasar dan rujukan yang dapat diakses selama 24 jam, dengan membangun fasilitas kesehatan dan memperkuat jaringan transportasi medis di wilayah yang sulit dijangkau.. Dengan 24 Jam Mudah Berobat, diharapkan seluruh masyarakat Kabupaten Probolinggo dapat memperoleh akses kesehatan yang cepat, mudah, dan merata termasuk layanan Kesehatan Tingkat desa.
		46	REKRUTMEN 500 TENAGA KESEHATAN	Untuk memperkuat layanan kesehatan di Kabupaten Probolinggo melalui rekrutmen 500 tenaga kesehatan baru yang akan ditempatkan di puskesmas dan fasilitas kesehatan di daerah terpencil. Program ini dilaksanakan dengan konsep Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Mandiri Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah, di mana puskesmas dan RSUD dapat mengelola operasional secara mandiri untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kemitraan dengan perguruan tinggi juga akan dilakukan untuk memastikan proses rekrutmen, pelatihan, dan penempatan tenaga kesehatan berkualitas dan siap mengabdikan di masyarakat. Melalui 500 Tenaga Kesehatan Baru – BLUD Mandiri Puskesmas dan RSUD, diharapkan tercipta peningkatan akses dan kualitas

PROGRAM PRIORITAS BUPATI		SUB PROGRAM / KERJA PRIORITAS		PENJELASAN
16	SAE Olahraga			layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di wilayah yang selama ini mengalami kesenjangan layanan.
		47	KTP KAB. PROBOLINGGO BISA BEROBAT DI SELURUH INDONESIA	Untuk memberikan kemudahan akses layanan kesehatan bagi warga Kabupaten Probolinggo di mana pun mereka berada. Melalui program ini, pemegang KTP Kabupaten Probolinggo akan mendapatkan fasilitas berobat di seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia yang bekerja sama, tanpa perlu melalui prosedur administratif yang rumit. Program ini akan terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta melibatkan koordinasi dengan berbagai fasilitas kesehatan di tingkat nasional. Dengan KTP Probolinggo Bisa Berobat di Seluruh Indonesia, diharapkan masyarakat Kabupaten Probolinggo dapat merasa lebih aman dan terjamin dalam hal akses kesehatan, baik di dalam maupun di luar daerah.
		48	BUAIAN BUNDA: GRATIS LAYANAN GIZI BAGI IBU DAN ANAK RISIKO TINGGI	Menyediakan layanan gizi gratis bagi ibu hamil dan anak dengan risiko tinggi di Kabupaten Probolinggo. Program ini dirancang untuk mencegah stunting, meningkatkan kesehatan ibu hamil, dan mengurangi angka kematian ibu dan bayi melalui pemberian nutrisi yang optimal. Buaian Bunda akan menyediakan paket gizi khusus dan konsultasi nutrisi berkala yang mudah diakses di puskesmas dan posyandu. Dengan fokus pada ibu dan anak berisiko tinggi, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan keluarga sejak dini dan mendukung tumbuh kembang anak yang lebih sehat.
		49	REVITALISASI GOR	Menyediakan sarana olahraga berkualitas di Kabupaten Probolinggo yang dapat dimanfaatkan oleh calon atlet dan masyarakat umum, sekaligus mendukung peningkatan kapasitas SDM keolahragaan. Program ini akan memperbaharui dan melengkapi fasilitas Gedung Olahraga (GOR) dengan standar yang memadai untuk latihan, pelatihan, dan penyelenggaraan kejuaraan. Selain itu, program ini akan menjadi pusat penyelenggaraan berbagai event kejuaraan daerah, guna menemukan bibit unggul atlet dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap pemuda berprestasi. Dengan Revitalisasi GOR, diharapkan terbentuk ekosistem olahraga yang mampu melahirkan atlet berbakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga dan kebanggaan daerah.

PROGRAM PRIORITAS BUPATI		SUB PROGRAM / KERJA PRIORITAS		PENJELASAN
		50	100 KOMPETISI OLAHRAGA BERBASIS KEARIFAN LOKAL	Menghidupkan kembali olahraga tradisional dan memperkaya budaya olahraga di Kabupaten Probolinggo melalui penyelenggaraan 100 kompetisi berbasis kearifan lokal. Program ini akan melibatkan berbagai komunitas, sekolah, dan masyarakat umum dalam kompetisi olahraga tradisional seperti egrang, gobak sodor, dan panjat pinang, yang memiliki nilai budaya dan sejarah bagi masyarakat setempat. Dengan adanya 100 Kompetisi Olahraga Berbasis Kearifan Lokal, diharapkan masyarakat, terutama generasi muda, dapat lebih mengenal dan mencintai olahraga tradisional sekaligus menjaga kearifan lokal yang kaya. Program ini juga bertujuan untuk menciptakan suasana kompetitif yang sehat dan mempererat solidaritas antar warga.
17	SAE PEREMPUAN BERDAYA SAING	51	1.000 PENGUSAHA PEREMPUAN	Pemberdayaan perempuan dengan memberikan akses pelatihan, pendampingan, dan permodalan kepada 1000 perempuan untuk memulai dan mengembangkan usaha. Menciptakan pengusaha perempuan yang mandiri dan berdaya saing di berbagai sektor seperti UMKM, perdagangan, dan industri kreatif
		52	PAMERAN PRODUK UNGGULAN PEREMPUAN	Pemerintah akan secara rutin mengadakan pameran produk unggulan perempuan untuk mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Pameran ini akan menjadi ajang networking dan memperluas pasar, sehingga produk-produk lokal dapat lebih dikenal di pasar yang lebih luas. Pameran ini juga akan melibatkan platform digital untuk memudahkan akses pemasaran.
18	SAE DISABILITAS DAN WARGA RENTAN	53	5.000 RUMAH LAYAK HUNI	Pemerintah akan membangun dan merenovasi rumah-rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan, melibatkan kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga sosial untuk pendanaan dan pelaksanaan, serta mengutamakan penggunaan bahan lokal dan ramah lingkungan. Program dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan sosial.
		54	PELATIHAN LIFE SKILL	Memberikan pendampingan dan pelatihan life skill bagi masyarakat rentan dan disabilitas untuk mengelola potensi di lingkungan sekitar.
		55	REGULASI DAERAH YANG MELINDUNGI DISABILITAS	Perda yang mengatur perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, mencakup aksesibilitas terhadap fasilitas publik, pelayanan kesehatan, pendidikan

PROGRAM PRIORITAS BUPATI		SUB PROGRAM / KERJA PRIORITAS		PENJELASAN
				inklusif, dan kesempatan kerja yang setara. Perda juga akan menjamin penanganan yang cepat dan tepat bagi korban bencana alam. Regulasi ini juga akan memastikan adanya perlindungan khusus bagi kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas, selama proses tanggap darurat dan pemulihan. Selain itu akan dilakukan perbaikan drainase dan pengerukan sungai, penguatan lereng melalui tanggul dan penanaman pohon, serta pelatihan tanggap darurat berbasis masyarakat, bantuan ekonomi disertai program trauma healing akan diprioritaskan bagi wilayah terdampak untuk meningkatkan ketahanan dan kesiapsiagaan komunitas dalam menghadapi risiko bencana. Selain itu, Perda akan menyediakan jaminan sosial dan bantuan bagi masyarakat yang termasuk dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), seperti orang miskin, lanjut usia, anak terlantar, korban kekerasan, dan korban bencana alam.
19	SAE KEBHINEKAAN	56	POLO'AN SAE: (KENDURI KEBHINEKAAN UNTUK MEMBANGUN KOMUNITAS YANG HARMONIS DAN INKLUSIF DALAM FORUM ANTAR UMAT BERAGAMA DAN MASYARAKAT).	Dalam acara ini, berbagai kelompok masyarakat dari latar belakang agama dan budaya yang berbeda akan berkumpul untuk berdialog, berbagi pengalaman, dan saling mengenal satu sama lain. Kegiatan ini tidak hanya mempererat hubungan antar umat beragama, tetapi juga mempromosikan nilai kebhinekaan sebagai kekuatan utama dalam menciptakan kedamaian dan keharmonisan di masyarakat.
20	SAE SENI BUDAYA	57	GUS WARIS: GUGUS PENGUATAN SENI DAN BUDAYA SERTA WARISAN ADAT	Gugus ini akan menjadi wadah untuk melestarikan dan mengembangkan seni, budaya, dan tradisi lokal melalui pelatihan, festival, dan pameran. Program ini melibatkan komunitas adat dan seniman untuk menjaga warisan budaya serta mempromosikannya di tingkat nasional dan internasional, sekaligus menginspirasi kreativitas generasi muda.
21	SAE INDAH BERSERI	58	DESA BERSERI TEMATIK: PERWAJAHAN DESA YANG CANTIK DENGAN TANAMAN TEMATIK.	Setiap desa akan memiliki tema tanaman yang khas, seperti desa bunga, desa herbal, atau desa buah-buahan, yang tidak hanya memperindah lingkungan tetapi juga memperluas ketersediaan RTH serta meningkatkan potensi ekonomi desa melalui agrowisata, memperkuat identitas desa, dan

PROGRAM PRIORITAS BUPATI		SUB PROGRAM / KERJA PRIORITAS		PENJELASAN
				memberdayakan masyarakat dalam menjaga kelestarian alam.
22	SAE BERIBADAH	59	TEMPAT IBADAH SEMUA AGAMA NYAMAN DAN SAE	Memastikan tempat ibadah memiliki fasilitas yang memadai, ramah lingkungan, serta terjaga kebersihannya. Selain itu, pemerintah daerah akan mendukung perawatan dan pengelolaan tempat ibadah agar menjadi ruang yang harmonis untuk semua pemeluk agama, memperkuat toleransi, dan mempromosikan kerukunan antar umat beragama di masyarakat.

Untuk menggambarkan bagaimana program prioritas Kepala Daerah akan di implementasikan dalam Pembangunan Kabupaten Probolinggo pada periode RPJMD tahun 2025-2029, dilakukan pemetaan dengan cara *cascading* atau penurunan tujuan strategis dari level atas ke level yang lebih rendah secara sistematis, agar seluruh bagian organisasi memiliki arah dan prioritas yang selaras.

Program prioritas Kepala Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029. Hal tersebut disajikan secara sistematis dalam tabel 3.10.

Tabel 3. 10 Program Prioritas RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
Visi: "Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah- Religius Serta Eksis Berdaya Saing)"						
MISI 1: SAE PEMERINTAHAN Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif MISI 2: SAE EKONOMI Menciptakan ketahanan ekonomi lokal yang kreatif dan inovatif di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan berbasis desa dan komunitas untuk menciptakan lapangan kerja dan	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah				
			Meningkatnya Persentase Tindak lanjut atas Rekomendasi BPK Secara Tuntas	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Probolinggo Bebas Korupsi – Unsur Pemerintahan Bidang Pengawasan
						Kartu Sae Law Care-Unsur Pemerintahan Bidang Pengawasan
			Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP	Kenaikan Capaian Nilai Kapabilitas APIP (Nilai)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Probolinggo Bebas Korupsi - Unsur Pemerintahan Bidang Pengawasan
						Kartu Sae Law Care-Unsur Pemerintahan Bidang Pengawasan
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD dengan perencanaan daerah (%)	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Probolinggo Bebas Korupsi – Unsur Pemerintahan Bidang Perencanaan
						Mata Prabulinggih – Unsur Pemerintahan Bidang Perencanaan

VISI/MISI		Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
memberantas kemiskinan MISI 3: SAE PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Membangun SDM Unggul, religius, berdaya saing melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya yang terjangkau MISI 4: SAE INFRASTRUKTUR Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di daerah basis produksi, daerah terluar, daerah terpencil serta				Meningkatnya Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD dengan perencanaan daerah (%)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Probolinggo Bebas Korupsi - Unsur Pemerintahan Bidang Perencanaan
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Persentase PD dengan Nilai Pelaporan Kinerja minimal 11 pada LHE AKIP PD (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Probolinggo Bebas Korupsi - Unsur Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah
				Optimalisasi Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase kebijakan dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana (%)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Probolinggo Bebas Korupsi - Unsur Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah
				Pencapaian Pengelolaan Keuangan ,penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan keuangan daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Probolinggo Bebas Korupsi - Unsur Pemerintahan Bidang Keuangan Insentif Tambahan 100 Juta Tiap Desa Untuk Infrastruktur Jalan - Unsur Pemerintahan Bidang Keuangan

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
perwilayahan industri secara merata MISI 5: SAE SOSIAL Pemberdayaan perempuan, masyarakat adat, masyarakat rentan dan disabilitas			Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Intensifikasi Dan Ekstensifikasi PAD - Unsur Pemerintahan Bidang Keuangan
						Holding BUMN Tembakau, Agro, Perikanan- Unsur Pemerintahan Bidang Keuangan
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Manajemen ASN				
			Tersedianya rencana kebutuhan ASN	Nilai Sistem Merit pada Aspek Perencanaan Kebutuhan (Nilai)	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	ASN Award - Unsur Pemerintahan Bidang Kepegawaian
			Terpenuhinya Kebutuhan ASN	Nilai Sistem Merit pada Aspek Pengadaan (Nilai)		Guru Nyaman Bekerja- Unsur Pemerintahan Bidang Kepegawaian
			Terlaksananya pelayanan sesuai dengan standart pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP)	Nilai Sistem Merit pada Aspek Perlindungan dan Pelayanan (Nilai)		Rekrutmen 1.000 Tenaga Pendidik Baru - Unsur Pemerintahan Bidang Kepegawaian
			Tersedianya data kepegawaian yang valid, akurat, dan mutakhir	Nilai Sistem Merit pada Aspek Sistem Informasi (Nilai)		Rekrutmen 500 Tenaga Kesehatan - Unsur Pemerintahan Bidang Kepegawaian
			Terlaksananya penataan dan pengisian jabatan sesuai dengan standart	Nilai Sistem Merit pada Aspek Promosi dan Mutasi (Nilai)		

VISI/MISI		Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
				kompetensi jabatan (SKJ) yang di tetapkan			
				Tersedianya data capaian kinerja ASN	Nilai Sistem Merit pada Aspek Manajemen Kinerja (Nilai)		
				Meningkatnya Produktivitas ASN	Nilai Sistem Merit pada Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin (Nilai)		
				Meningkatnya kapabilitas pegawai yang meliputi kemampuan teknis, manajerial dan sosio kultural	Nilai Sistem Merit pada Aspek Pengembangan Karir (Nilai)	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kartu Sae Law Care-Unsur Pemerintahan Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
			Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif				
				Optimalisasi Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Hukum	Persentase implementasi Renaksi Peningkatan IRH (%)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kartu Sae Law Care-Unsur Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah
							Regulasi 70% Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal- Unsur Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah

VISI/MISI		Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
							Perda Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani - Unsur Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah
							Regulasi Daerah Yang Melindungi Disabilitas - Unsur Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah
							Ekotren: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pesantren - Unsur Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah
							Rp 20 Miliar Bantuan Untuk Pesantren Kecil, Madin, TPQ - Unsur Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
						Tempat Ibadah Semua Agama Nyaman Dan Sae - Unsur Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah
						Probolinggo Mengetuk Langit Kegiatan Keagamaan Berbasis Kearifan Lokal - Unsur Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Mata Prabulinggih - Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
			Meningkatnya tata Kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (%)	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Mata Prabulinggih - Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
			Meningkatnya kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk (%)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Mata Prabulinggih - Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
						KTP Kabupaten Probolinggo Bisa Berobat Di Seluruh Indonesia - Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil (%)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Mata Prabulinggih - Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian perundang-undangan serta kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase ketepatan waktu penetapan rancangan perda APBD	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Probolinggo Bebas Korupsi - Unsur Pemerintahan Bidang Sekretariat DPRD
				Persentase penetapan Rancangan peraturan daerah		
				Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan		
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Probolinggo Bebas Korupsi - Unsur Pemerintahan Bidang Kewilayahan

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
			Meningkatnya Hasil Litbang yang Dimanfaatkan Dalam Dokumen Perencanaan, Program atau Regulasi Daerah	Persentase Hasil Litbang yang Dimanfaatkan Sebagai Rumusan Kebijakan Pembangunan Daerah (%)	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	10 Rumah Kreatif Milenial- Unsur Pemerintahan Bidang Penelitian Dan Pengembangan
			Meningkatnya Hasil Inovasi yang Diterapkan Secara Berkelanjutan	Persentase Peningkatan Hasil Inovasi yang Diimplementasikan Secara Berkelanjutan (%)		
			Meningkatnya Kepuasan Investor terhadap Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan	Persentase Layanan Perizinan yang Diselesaikan sesuai dengan SOP (%)	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	3 Pasar Transit Agro - Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
						1 Pasar Induk Agro - Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
						2.000 UMKM Naik Kelas - Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
						3.000 Toko Kelontong Naik Kelas - Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
						Koperasi Merah Putih - Urusan

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
		Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Pemerintah Daerah				Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
			Terpenuhinya Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kartu SAE Communication Care - Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
			Terpenuhinya Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)		
			Meningkatnya keamanan informasi pemerintah kabupaten/kota	Tingkat keamanan informasi pemerintah kabupaten/kota (%)	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kartu SAE Communication Care - Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
			Terpenuhinya Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (%)	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Mata Prabulinggih - Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

VISI/MISI		Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusi dan Berdaya Saing Dalam Upaya Memberantas Kemiskinan		Terpenuhinya Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)		
				Meningkatnya Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kartu SAE Communication Care - Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
			Meningkatnya Investasi Daerah				
				Meningkatnya nilai realisasi PMA dan PMDN dengan memberikan kemudahan berusaha dan daya tarik daerah sebagai tujuan investasi	Nilai Realisasi Investasi PMA (Juta Rupiah) Nilai Realisasi Investasi PMDN (Juta Rupiah)	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Membangun Perwilayahan Industri- Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
				Meningkatnya minat investor terhadap peluang penanaman modal daerah	Jumlah peluang investasi yang ditawarkan (Angka)	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Membangun Perwilayahan Industri- Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
		Meningkatnya Pengembangan Sektor Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah				
			Meningkatnya pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Holding BUMN Tembakau, Agro, Perikanan- Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan
						10 Desa Mandiri - Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan
			Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Holding BUMN Tembakau, Agro, Perikanan- Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan
						10 Desa Mandiri - Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan
			Meningkatnya produksi olahan perikanan	Jumlah produksi olahan perikanan (Ton)	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	10 Desa Mandiri - Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan
						1.000 Pengusaha Perempuan - Urusan Pemerintahan Bidang

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
						Kelautan Dan Perikanan
			Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata yang layak, nyaman, dan berdaya saing melalui penerapan prinsip Sapta Pesona	Persentase destinasi pariwisata yang meningkat kunjungannya (%)	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	100 Desa Wisata _ Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
						100 Event Wisata- Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
						Pembentukan Unit Kesehatan Wisata- Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
			Meningkatnya ketersediaan sarana distribusi perdagangan yang memadai dan merata	Persentase sarana distribusi perdagangan yang berstandar SNI (%)	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Intensifikasi Dan Ekstensifikasi PAD - Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
						3 Pasar Transit Agro- Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
						1 Pasar Induk Agro- Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
			Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri oleh masyarakat, pelaku	Persentase produk unggulan daerah yang digunakan dan	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	2.000 UMKM Naik Kelas - Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
			usaha, dan instansi pemerintah. Jumlah produk unggulan daerah yang difasilitasi promosi	dipasarkan di dalam negeri (%)		Pameran Produk Unggulan Perempuan - Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
			Meningkatnya daya saing produk ekspor unggulan daerah	Persentase produk ekspor unggulan daerah yang berhasil dipasarkan di luar Daerah (%)	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pameran Produk Unggulan Perempuan - Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
			Meningkatnya kinerja dan daya saing usaha mikro	Persentase UM yang meningkat omzetnya (%)	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	10 Rumah Kreatif Milenial- Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
						Ekotren: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pesantren - Urusan Pemerintahan Bidang Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
						2.000 UMKM Naik Kelas - Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
						3.000 Toko Kelontong Naik Kelas - Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
						One Village One Product - Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
						1.000 Pengusaha Perempuan - Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
			Meningkatnya kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan	Persentase Koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan (%)	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Koperasi Merah Putih - Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
			Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kinerja usaha Koperasi	Persentase koperasi yang meningkat status kesehatannya (%)	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Koperasi Merah Putih - Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
			Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia koperasi	Persentase Kualitas Koperasi yang meningkat kapasitas SDMnya (%)	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Koperasi Merah Putih - Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
			Meningkatnya pembangunan industri yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persentase Draft Kebijakan Pembangunan Industri yang telah disahkan sebagai kebijakan (%)	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Membangun Perwilayahan Industri- Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
			Meningkatnya kepatuhan Izin Usaha Industri	Persentase Izin Usaha Industri yang telah diterbitkan (%)	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Membangun Perwilayahan Industri- Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
			Terwujudnya ketersediaan sarana pertanian yang memadai dan berkelanjutan	Persentase ketersediaan sarana pertanian yang sesuai peruntukan (%)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Gugus Tugas Pupuk Dan Bibit Kolaboratif Integratif Di Desa - Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
			Terwujudnya ketersediaan sarana peternakan yang memadai dan berkelanjutan	Persentase ketersediaan penyediaan dan pengembangan sarana peternakan (%)		Rp 5 Miliar Untuk Subsidi Pupuk Bagi Petani Tembakau - Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
						1 Desa 1 Pusat Pupuk Dan Bibit- Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
						Desa Berseri Tematik- Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

VISI/MISI		Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
				Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok tani	Persentase kelompok tani yang nilai skor/kelas kapasitas kelembagaanya naik (%)	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3 Pasar Transit Agro-Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
							1 Pasar Induk Agro-Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
				Meningkatnya prasarana Pertanian yang berkualitas dan mudah diakses	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian (%)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Perda Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani - Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
				Meningkatnya prasarana Peternakan yang berkualitas dan mudah diakses	Persentase Peningkatan Prasarana Peternakan (%)		
			Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif				
				Meningkatnya produktivitas Tenaga Kerja	Persentase kelulusan peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi (%)	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	10 Rumah Kreatif Milenial- Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
							Milenial Job Center: Hub Ekonomi Kreatif Di Setiap Kecamatan - Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
							Pelatihan Life Skill - Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

VISI/MISI		Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
				Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan (%)	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Regulasi 70% Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal- Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
			Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif				
				Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase peningkatan PPKS yang mendapat Rehabilitasi Sosial (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Sekolah Rakyat (Sr) - Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
				Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase PSKS yang diberdayakan (Nilai)	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	500 Kelompok Usaha Bersama (Kub) Berbasis Rt/Rw - Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
	Regulasi Daerah Yang Melindungi Disabilitas - Urusan Pemerintahan Bidang Sosial						
	Terciptanya Masyarakat yang Berkualitas Unggul dan Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesejahteraan	Meratanya Akses Pendidikan					
Meningkatnya partisipasi penduduk usia sekolah pada layanan pendidikan			Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 5-6 Tahun (%)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rehab 1.000 Sekolah - Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan		

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
			PAUD, dasar, dan Nonformal Meningkatnya partisipasi penduduk usia sekolah pada layanan pendidikan PAUD, dasar, dan Nonformal	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 12 tahun (%) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 – 15 tahun (%) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun Kesetaraan (%) Persentase Penduduk Usia 19 – 59 yang mengikuti PNF/kesetaraan (%)		Rekrutmen 1.000 Tenaga Pendidik Baru - Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Sekolah Rakyat (SR) - Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Makan Bergizi Gratis (MBG) - Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Guru Nyaman Bekerja- Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 10.000 Beasiswa Sampai Sarjana Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

VISI/MISI		Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
				Meningkatnya pemenuhan dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang terpenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga pendidik (%)	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rekrutmen 1.000 Tenaga Pendidik Baru - Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
							Guru Nyaman Bekerja- Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
				Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal (%)	1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Sekolah Rakyat (SR) - Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
				Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang diterbitkan/diperbarui (%)	1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Sekolah Rakyat (SR) - Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat					
				Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terhadap populasi (Per 1000 Penduduk)	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER	Rekrutmen 500 Tenaga Kesehatan - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
					DAYA MANUSIA KESEHATAN	24 Jam Mudah Berobat - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
			Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD	Persentase capaian SPM Rumah Sakit (%)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rekrutmen 500 Tenaga Kesehatan - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) (%)		24 Jam Mudah Berobat - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
			Menguatnya sistem kesehatan	Persentase cakupan JKN (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	KTP Kabupaten Probolinggo Bisa Berobat Di Seluruh Indonesia Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
			Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita (%)		Buaian Bunda: Gratis Layanan Gizi Bagi Ibu Dan Anak Risiko Tinggi - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				Persentase Anemia pada Ibu Hamil (%)		

VISI/MISI		Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
				Meningkatnya kualitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Lanjutan	Proporsi Fasilitas Kesehatan yang terpenuhi Alat Kesehatan sesuai standar (%)		Pembentukan Unit Kesehatan Wisata-Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				Meningkatnya kualitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Lanjutan	Persentase fasilitas kesehatan primer yang memiliki obat, vaksin, dan BMHP sesuai standar (%)		24 Jam Mudah Berobat - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
					Proporsi Fasilitas Kesehatan yang terpenuhi Alat Kesehatan sesuai standar (%)		
					Persentase Puskesmas yang memenuhi rasio Puskesmas terhadap populasi (%)		
				Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita (%)		Makan Bergizi Gratis (MBG) - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
					Persentase Anemia pada Ibu Hamil (%)		

VISI/MISI		Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
				Meningkatnya Penyediaan Produk Pangan Industri Rumah Tangga yang memenuhi persyaratan	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%)	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Makan Bergizi Gratis (MBG) - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				Meningkatnya jumlah desa yang tahan pangan	Persentase Wilayah dalam Daerah yang tidak Rawan Pangan	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Buaian Bunda: Gratis Layanan Gizi Bagi Ibu Dan Anak Risiko Tinggi - Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
				Meningkatnya Keterjangkauan pangan bagi semua masyarakat dan semua wilayah	Skor PPH Ketersediaan (Skor)	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.000 UMKM Naik Kelas - Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
							Buaian Bunda: Gratis Layanan Gizi Bagi Ibu Dan Anak Risiko Tinggi - Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
				Meningkatnya persentase komoditas pangan yang beredar aman	Jumlah sampel PSAT (Sampel)	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.000 UMKM Naik Kelas - Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
			Menguatnya tata kelola ketersediaan pangan berdasarkan kemampuan dalam daerah Kabupaten Probolinggo	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kemandirian Pangan (%)	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	2.000 UMKM Naik Kelas - Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
						10 Desa Mandiri - Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
		Meningkatnya Pemberdayaan pemuda				
			Tumbuhnya usaha kreatif berbasis inovasi yang terlindungi secara hukum serta meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang terkurasi HAKI (%)	3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	10 Rumah Kreatif Milenial- Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
			Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang mengalami peningkatan	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	Milenial Job Center: Hub Ekonomi Kreatif Di Setiap Kecamatan - Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga 1.000 Kreator Lokal - Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

VISI/MISI		Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
					kapasitas/pengetahuan (%)	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Milenial Job Center: Hub Ekonomi Kreatif Di Setiap Kecamatan - Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
				Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (%)	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.000 Kreator Lokal - Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
							Revitalisasi GOR - Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
				Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (%)	1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Revitalisasi GOR - Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				Meningkatnya daya saing keolahragaan	Persentase atlet yang berprestasi di tingkat daerah (%)	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	100 Kompetisi Olahraga Berbasis Kearifan Lokal - Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
			Meningkatnya Kualitas Desa				

VISI/MISI		Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
				Meningkatnya aksesibilitas (jalan, penerangan dan transportasi) yang berkualitas	Persentase desa yang memiliki aksesibilitas yang berkualitas (%)	2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA	10 Desa Mandiri - Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
				Meningkatnya kerja sama desa yang mengembangkan aksesibilitas dan ekonomi	Persentase peningkatan kerja sama desa yang mengembangkan aksesibilitas dan ekonomi (%)	2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	10 Desa Mandiri - Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
				Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa dalam layanan dasar dan tata kelola pemeritahan yang akuntabel	Persentase administrasi Pemerintahan Desa yang memberikan layanan dasar, dan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel (%)	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kartu SAE Law Care- Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
							100 Desa Wisata _ Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
							10 Desa Mandiri - Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
							Insentif Tambahan 100 Juta Tiap Desa Untuk Infrastruktur Jalan - Urusan Pemerintahan Bidang

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
						Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
			Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan sosial dan ekonomi	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan LKD, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat yang meningkatkan pertumbuhan sosial dan ekonomi (%)	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	100 Desa Wisata _ Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
						100 Event Wisata- Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
						Desa Berseri Tematik- Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
						One Village One Product - Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
						10 Desa Mandiri - Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Infrastruktur Dalam Pengembangan Wilayah					
		Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur				
			Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap (Baik dan Sedang) (%)	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Gugus Satgas Infrastruktur Pengawasan Pembangunan Infrastruktur - Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
						Cak Bogel:Call & Datang Menambal Jalan Berlubang - Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
						870 Km Jalan Mulus Dalam 3 Tahun - Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Membangun Perwilayahan Industri- Urusan Pemerintahan Bidang

VISI/MISI		Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
							Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Persentase penurunan angka RTLH masyarakat miskin secara swadaya (%)	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	5.000 Rumah Layak Huni - Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
				Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Aset Tanah Pemda yang bersertifikat (%)	2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Rehab 1.000 Sekolah - Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
			Meningkatnya Konektivitas Wilayah yang Efisien				
				Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (%)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Probolinggo Menyala 50.000 Titik Lampu - Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
				Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Rasio konektivitas darat	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Akses Transportasi Terintegrasi Trans Probolinggo-Trans Jatim Plus - Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

VISI/MISI		Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
				Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap (Baik dan Sedang) (%)	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Akses Transportasi Terintegrasi Trans Probolinggo-Trans Jatim Plus - Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			
					Terlaksananya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	100 Desa Wisata _ Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
					Persentase jumlah titik pantau air permukaan status mutu minimal tercemar ringan (%) (%)		
					Persentase jumlah titik pantau udara ambien status mutu Baik (%) (%)		
				Meningkatnya tutupan vegetasi pada RTH perkotaan kraksaan	Persentase Peningkatan tutupan vegetasi pada RTH perkotaan kraksaan (%) (Aduan)	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Desa Berseri Tematik- Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

VISI/MISI		Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
				Meningkatnya lembaga yang berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan	Persentase peningkatan lembaga yang berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan (%)	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Desa Berseri Tematik-Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
				Persentase penanganan sampah	Jumlah pelayanan pengelolaan sampah (ton) (Ton)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Revitalisasi Tempat Pembangunan Akhir Sampah - Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
							Gus Berkah: Mengelola Sampah Jadi Berkah Melalui Ekonomi Sirkular - Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
							100 Desa Wisata _ Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

VISI/MISI		Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
		Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Daerah berbasis Kesetaraan Gender dan Kearifan Lokal	Meningkatnya Kesetaraan Gender				
				Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase organisasi perempuan yang aktif (%)	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.000 Pengusaha Perempuan - Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
							Pameran Produk Unggulan Perempuan - Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Meningkatnya Ketahanan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat rentan dan disabilitas				
				Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Mata Prabulanggih - Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
					Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)		
					Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (%)		

VISI/MISI		Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
					Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)		
					Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)		
				Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Mata Prabulinggih - Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
				Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)		
				Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)		
				Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (%)	2.14.3 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Polo'an Sae - Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

VISI/MISI		Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
				Meningkatnya Kapasitas Ormas/ LSM/ Toga/Tomas dalam Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Ormas/LSM/ Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%)	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Polo'an Sae: - Unsur Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
				Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan (%)	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Regulasi Daerah Yang Melindungi Disabilitas - Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
			Meningkatnya Pelestarian Budaya Kearifan Lokal				
				Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	Persentase Obyek Kebudayaan yang dikembangkan (%)	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Gus Waris: Gugus Penguatan Seni Budaya Serta Warisan Adat - Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
				Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan (%)	2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Gus Waris: Gugus Penguatan Seni Budaya Serta Warisan Adat - Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
							100 Event Wisata- Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Berdasarkan Tabel 3.10, dapat dijelaskan bahwa Program Prioritas Kepala Daerah telah selaras dengan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029. Program Prioritas kemudian diturunkan kepada Perangkat Daerah penanggung jawab dari setiap Program Prioritas yang bersesuaian. Perangkat Daerah kemudian meletakkan nomenklatur program yang mendukung Program Prioritas Kepala Daerah.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Perumusan Program Perangkat Daerah berbasis pada prioritas Pembangunan daerah dengan mempertimbangkan banyak faktor antara lain SPM/NSPK masing-masing Perangkat Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, Visi dan Misi Bupati Probolinggo serta Mandatory Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur. Mengacu pada Nomenklatur yang telah di tetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta Pemutakhirannya dengan harapan penggunaan anggaran dapat digunakan secara efektif dan efisien sehingga target dari indikator program dapat tercapai.

Program sebagaimana dalam Tabel 4.1 merupakan Kumpulan Program seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Probolinggo sampai dengan tahun 2030 berdasarkan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Program Perangkat Daerah, Indikator Kinerja dan Target, serta Pagu Indikatif Kabupaten Probolinggo

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					782.607.261.846,69		791.303.240.000,00		803.094.420.800,00		819.477.643.216,00		838.690.108.080,32	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					633.796.675.683,69		640.838.200.000,00		650.386.700.000,00		663.654.600.000,00		679.214.000.000,00	
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	80.51	81.32	82.12	633.796.675.683,69	82.93	640.838.200.000,00	83.73	650.386.700.000,00	84.54	663.654.600.000,00	85.34	679.214.000.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					148.408.586.163,00		150.057.500.000,00		152.293.400.000,00		155.400.200.000,00		159.043.600.000,00	
Meningkatnya partisipasi penduduk usia sekolah pada layanan pendidikan PAUD, dasar, dan nonformal	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 12 tahun (%)	99.56	99.77	100	148.408.586.163	100	150.057.500.000	100	152.293.400.000	100	155.400.200.000	100	159.043.600.000	Dinas /Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 – 15 tahun (%)	90.74	90.98	91.16		91.37		91.58		91.79		92.00		Dinas /Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 5-6 Tahun (%)	98.54	100	100		100		100		100		100		Dinas /Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun Kesetaraan (%)	33.96	42.17	50.38		56.87		63.36		69.85		76.34		Dinas /Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Penduduk usia 19-59 yang mengikuti PNF /Kesetaraan (%)	0.20	0.21	0.22		0.23		0.24		0.25		0.26		Dinas /Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					50.000.000		50.600.000		51.400.000		52.500.000		53.800.000	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal (%)	93.49	93.85	93.85	50.000.000	95.14	50.600.000	95.85	51.400.000	96.57	52.500.000	97.28	53.800.000	Dinas /Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN					150.000.000		151.700.000		154.000.000		157.200.000		160.900.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU		
TENAGA KEPENDIDIKAN															
Meningkatnya pemenuhan dan distribusi pendidik serta tenaga kependidikan sesuai kebutuhan satuan pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang terpenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga pendidik (%)	65.75	66.21	66.97	150.000.000	67.74	151.700.000	68.50	154.000.000	69.27	157.200.000	70.03	160.900.000	Dinas /Badan yang menangani Bidang Pendidikan	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik (%)	51.69	51.73	51.78		51.83		51.87		51.92		51.97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan	
	Indeks Pemerataan Guru (indeks)	PAUD = 0.41 SD = 0.72 SMP = 0.88	PAUD = 0.42 SD = 0.73 SMP = 0.89	PAUD = 0.43 SD = 0.74 SMP = 0.90		PAUD = 0.44 SD = 0.75 SMP = 0.90		PAUD = 0.45 SD = 0.76 SMP = 0.91		PAUD = 0.45 SD = 0.77 SMP = 0.91		PAUD = 0.46 SD = 0.78 SMP = 0.92		Dinas /Badan yang menangani Bidang Pendidikan	
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					102.000.000,00		104.040.000,00		106.120.800,00		108.243.216,00		110.408.080,32		
Meningkatnya kepemilikan perizinan satuan pendidikan sesuai ketentuan	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memiliki perizinan yang berlaku (%)	38.78	48.98	54.08	102.000.000	59.18	104.040.000	64.29	106.120.800	69.39	108.243.216	79.59	110.408.080	Dinas /Badan yang menangani Bidang Pendidikan	
	Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal/kesetaraan yang memiliki perizinan yang berlaku (%)	35.81	40.29	43.87		47.45		51.03		54.61		58.19		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan	
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi Pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas /Badan yang menangani Bidang Pendidikan	
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					100.000.000,00		101.200.000,00		102.800.000,00		104.900.000,00		107.400.000,00		
Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase pengembangan bahasa dan sastra (%)	65.36	66.67	68.00	100.000.000,00	69.33	101.200.000,00	70.67	102.800.000,00	71.90	104.900.000,00	72.00	107.400.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Pendidikan	
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					542.662.575.697,78		548.691.800.000,00		556.867.600.000,00		568.228.000.000,00		581.550.400.000,00		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					398.429.212.748,78		402.855.800.000,00		408.858.400.000,00		417.199.200.000,00		426.980.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	75.31	75.81	76.57	152.493.033.770	77.33	154.187.246.186	78.11	156.484.654.747	78.89	159.676.975.630	79.68	163.420.627.107,96	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kinerja pelayanan BLUD					245.936.178.979,00		248.668.553.814,10		252.373.745.252,63		257.522.224.370,10		263.559.872.892,04	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase capaian SPM Rumah Sakit (%)	85	90	91		92		93		94		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Capaian Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) (%)	87.63	88	88.5		89		89.5		90		90.5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					141.390.053.329,00		142.960.900.000,00		145.091.100.000,00		148.051.000.000,00		151.522.100.000,00	
Meningkatnya kualitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Lanjutan	Persentase fasilitas kesehatan primer yang memiliki obat, vaksin, dan BMHP sesuai standar (%)	60	64	70	50.683.534.038,00	75	49.974.525.000,00	82	50.718.565.000,00	91	51.779.210.000,00	95	50.998.445.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasyankes yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pemenuhan SPA RSUD (%)	76.64	77	78		79.5		80.5		82.5		84		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Puskesmas yang memenuhi rasio Puskesmas terhadap populasi (%)	93.93	93.93	93.93		96.96		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi Fasilitas Kesehatan yang terpenuhi Alat Kesehatan sesuai standar (%)	16.7	5.6	11.1		16.67		22.2		27.8		33.3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN (%)	40	50	55		60		65		70		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	
Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Jumlah Kematian Bayi (Orang)	240	230	220	18.825.853.873,00	210	19.183.530.000,00	200	19.470.035.000,00	190	19.867.920.000,00	180	20.333.325.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase anemia pada ibu hamil (%)	9.75	9.5	9.3		9		8.5		8		7.5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita (%)	8.5	8	7.5		7		6.5		6		5.5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat CFR direct obstetric (eklamsi dan pendarahan postpartum) (%)	0.9	0.9	0.8		0.8		0.75		0.7		0.7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Menular	Angka kesakitan malaria (annual parasit incidence) (Per 1000 Penduduk)	<1	<1	<1	7.808.978.700	<1	7.895.190.000	<1	8.012.155.000	<1	8.174.310.000	<1	8.363.780.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	79.1	82	85		90		95		97		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan tata laksana kasus penyakit menular dan tidak menular lainnya (%)	86	89	90		92		93		94		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi. (Orang)	0.26	0.24	0.22		0.2		0.18		0.16		0.14		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase desa mencapai target STBM (%)	35.45	40	45		50		60		70		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase desa yang mencapai kekebalan kelompok (%)	41.66	43	46		49		52		55		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	15	15	20	2.113.417.400,00	25	2.236.555.000,00	30	2.270.450.000,00	35	2.317.225.000,00	40	2.371.760.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Diabetes dalam pengendalian (%)	15	15	17.5		20		22.5		25		27.5		Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	
														Bidang Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	20	20	25		30		35		40		45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan layanan (%)	70	70	75		80		85		90		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Menguatnya sistem kesehatan	Persentase cakupan JKN (%)	99.42	99,45	99,48	61.958.269.318	99.51	63.671.100.000	99.54	64.619.895.000	99.58	65.912.335.000	99.60	69.454.790.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasyankes yang menerapkan tatakelola sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.535.559.230,00		1.552.700.000,00		1.575.900.000,00		1.608.100.000,00		1.645.900.000,00	
Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Persentase SDM Rumah Sakit sesuai standar (%)	100	100	100	125.494.480,00	100	126.895.319,00	100	128.791.353,00	100	131.422.917,00	100	134.512.144,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terhadap populasi (Per 1000 Penduduk)	1.87	1.94	2.02	1.410.064.750,00	2.11	1.425.804.681,00	2.19	1.447.108.647,00	2.28	1.476.677.083,00	2.36	1.511.387.856,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					523.790.000,00		529.700.000,00		537.600.000,00		548.600.000,00		561.500.000,00	
Meningkatnya kepatuhan sarana apotek, toko obat, toko alkes, optikal, dan PKRT dalam pemenuhan standar dan komitmen perizinan	Persentase Apotek, Toko obat, Toko Alat Kesehatan,Optikal, dan PKRT yang memenuhi standar (%)	55	60	60	45.880.000,00	60	50.450.000,00	60	51.200.000,00	60	52.265.000,00	60	53.540.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Penyediaan Produk Pangan Industri Rumah Tangga yang memenuhi persyaratan	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%)	70	75	76	477.910.000,00	77	479.250.000,00	78	486.400.000,00	79	496.335.000,00	80	507.960.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU		
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					783.960.390,00		792.700.000,00		804.600.000,00		821.100.000,00		840.400.000,00		
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Posyandu melayani siklus hidup (%)	38.08	75	80	783.960.390,00	85	792.700.000,00	90	804.600.000,00	95	821.100.000,00	100	840.400.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					157.502.302.578,04		160.091.312.493,47		190.060.906.237,03		241.504.386.738,67		260.213.126.709,06		
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.158.913.934,00		21.394.000.000,00		21.712.800.000,00		22.155.800.000,00		22.675.300.000,00		
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	79.1	79.6	80.1	21.158.913.934,00	80.6	21.394.000.000,00	81.1	21.712.800.000,00	81.6	22.155.800.000,00	82.1	22.675.300.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					13.564.456.080,44		13.439.375.536,00		13.286.825.669,00		13.369.592.041,00		13.559.649.291,68		
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase Bangunan Irigasi Kondisi Baik (%)	48.99	49.09	49,39	13.564.456.080,44	49,69	13.439.375.536,00	49,99	13.286.825.669,00	50,29	13.369.592.041,00	50,59	13.559.649.291,68	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					1.650.000.000,00		1.668.400.000,00		1.693.300.000,00		1.727.900.000,00		1.768.500.000,00		
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan (%)	64.71	64.76	64.81	1.650.000.000,00	64.86	1.668.400.000,00	64.91	1.693.300.000,00	64.96	1.727.900.000,00	65.01	1.768.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					219.894.573,60		222.400.000,00		225.800.000,00		230.500.000,00		236.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Layanan Persampahan	Persentase Sarana Persampahan yang Terbangun (%)	100	100	100	219.894.573,60	100	222.400.000,00	100	225.800.000,00	100	230.500.000,00	100	236.000.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					6.620.000.000,00		6.693.600.000,00		6.793.400.000,00		6.932.000.000,00		7.094.600.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (%)	63.72	63.73	63.75	6.620.000.000,00	63.76	6.693.600.000,00	63.77	6.793.400.000,00	63.79	6.932.000.000,00	63.80	7.094.600.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					360.000.000,00		364.000.000,00		369.500.000,00		377.100.000,00		386.000.000,00	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (%)	97.90	97.90	97.90	360.000.000,00	97.90	364.000.000,00	97.90	369.500.000,00	97.90	377.100.000,00	97.90	386.000.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					590.000.000,00		596.600.000,00		605.500.000,00		617.900.000,00		632.400.000,00	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%)	68.42	71.42	72.42	590.000.000,00	73.42	596.600.000,00	74.42	605.500.000,00	75.42	617.900.000,00	76.42	632.400.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					430.000.000,00		434.800.000,00		441.300.000,00		450.400.000,00		461.000.000,00	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (%)	10	10	100	430.000.000,00	100	434.800.000,00	100	441.300.000,00	100	450.400.000,00	100	461.000.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					111.456.436.659,00		113.809.336.957,47		143.441.680.568,03		194.121.894.697,67		211.842.577.417,38	
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap (Baik dan Sedang) (%)	73.08	74.27	75.50	111.456.436.659,00	76,73	113.809.336.957,47	78,23	143.441.680.568,03	80,13	194.121.894.697,67	82,23	211.842.577.417,38	Dinas /Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					494.100.636,00		499.600.000,00		507.100.000,00		517.500.000,00		529.700.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	
Meningkatnya Tenaga Operator/ Teknis/ Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Rasio Tenaga Operator/ Teknis/ Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi (%)	37	38	44.4	494.100.636,00	50.8	499.600.000,00	57.2	507.100.000,00	63.6	517.500.000,00	70	529.700.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					958.500.695,00		969.200.000,00		983.700.000,00		1.003.800.000,00		1.027.400.000,00	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tata Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	64	69	71	958.500.695,00	73	969.200.000,00	75	983.700.000,00	77	1.003.800.000,00	79	1.027.400.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					14.262.173.259,00		14.420.900.000,00		14.636.100.000,00		14.935.000.000,00		15.285.400.000,00	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.782.173.259,00		7.868.700.000,00		7.986.000.000,00		8.149.000.000,00		8.340.100.000,00	
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	79.26	79,31	79.36	7.782.173.259,00	79.41	7.868.700.000,00	79.46	7.986.000.000,00	79.51	8.149.000.000,00	79,56	8.340.100.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					400.000.000,00		404.500.000,00		410.600.000,00		419.000.000,00		428.900.000,00	
Terpenuhiya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Rumah Korban Bencana / Relokasi Program yang Dibangun dan Direhabilitasi (%)	100	100	100	400.000.000,00	100	404.500.000,00	100	410.600.000,00	100	419.000.000,00	100	428.900.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					150.000.000,00		151.700.000,00		154.000.000,00		157.200.000,00		160.900.000,00	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase areal kawasan kumuh (Ha) tertangani (%)	1.98	1.98	1.98	150.000.000,00	1.98	151.700.000,00	1.98	154.000.000,00	1.98	157.200.000,00	1.98	160.900.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					5.750.000.000,00		5.813.900.000,00		5.900.600.000,00		6.021.000.000,00		6.162.200.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU		
Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Persentase penurunan angka RTLH masyarakat miskin secara swadaya (%)	0.51	1.69	1.87	5.750.000.000,00	2.16	5.813.900.000,00	2.50	5.900.600.000,00	2.89	6.021.000.000,00	3.34	6.162.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					170.000.000,00		171.900.000,00		174.500.000,00		178.100.000,00		182.300.000,00		
Meningkatnya penyediaan PSU Permukiman	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (Nilai)	71	73	73.5	170.000.000,00	74	171.900.000,00	74.5	174.500.000,00	75	178.100.000,00	75.5	182.300.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					10.000.000,00		10.200.000,00		10.400.000,00		10.700.000,00		11.000.000,00		
Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana (%)	87	87	87	10.000.000,00	87	10.200.000,00	87	10.400.000,00	87	10.700.000,00	87	11.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					32.263.273.056,85		32.622.000.000,00		33.108.200.000,00		33.783.800.000,00		34.576.000.000,00		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					20.218.007.756,85		20.442.700.000,00		20.747.300.000,00		21.170.600.000,00		21.667.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	76,96	77,11	77,27	16.678.452.714,82	77,42	16.863.808.216,00	77,57	17.115.082.068,00	77,72	17.464.275.179,00	77,88	17.873.770.716,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	78,40	78,79	79,19	3.539.555.042,03	79,58	3.578.891.784,00	79,98	3.632.217.932,00	80,38	3.706.324.821,00	80,78	3.793.229.284,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					8.548.050.600,00		8.643.100.000,00		8.771.900.000,00		8.950.900.000,00		9.160.800.000,00	
Meningkatnya Ketentrman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	52.63	54.37	57.98	8.548.050.600,00	60.52	8.643.100.000,00	64.85	8.771.900.000,00	68.15	8.950.900.000,00	70.65	9.160.800.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas /Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (%)	10	10	10		10		10		10		10		Dinas /Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	10	10	10		10		10		10		10		Dinas /Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					960.000.000,00		970.700.000,00		985.200.000,00		1.005.300.000,00		1.028.900.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%)	100	100	100	960.000.000,00	100	970.700.000,00	100	985.200.000,00	100	1.005.300.000,00	100	1.028.900.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					2.537.214.700,00		2.565.500.000,00		2.603.800.000,00		2.657.000.000,00		2.719.300.000,00	
Meningkatnya Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (%)	10	10	10	2.537.214.700,00	10	2.565.500.000,00	10	2.603.800.000,00	10	2.657.000.000,00	10	2.719.300.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														Perlindungan Masyarakat
	Persentase Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					27.299.633.154,65		27.603.100.000,00		28.014.700.000,00		28.586.500.000,00		29.256.900.000,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.603.616.514,65		4.654.800.000,00		4.724.200.000,00		4.820.600.000,00		4.933.700.000,00	
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	80	81	82	4.603.616.514,65	83	4.654.800.000,00	84	4.724.200.000,00	85	4.820.600.000,00	86	4.933.700.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					655.303.040,00		662.600.000,00		672.500.000,00		686.300.000,00		702.400.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase PSKS yang diberdayakan (%)	70	75	78	655.303.040	81	662.600.000	84	672.500.000	87	686.300.000	90	702.400.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					170.669.000		172.600.000		175.200.000		178.800.000		183.000.000,00	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Peningkatan PPKS yang mendapat Rehabilitasi Sosial (%)	0.72	6.92	7.35	170.669.000	7.78	172.600.000	8.21	175.200.000	8.65	178.800.000	12.97	183.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					21.787.924.600		22.030.000.000		22.358.300.000		22.814.500.000		23.349.400.000,00	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Peningkatan PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (%)	0.65	7.11	7.46	21.787.924.600	7.82	22.030.000.000	8.17	22.358.300.000	8.53	22.814.500.000	8.88	23.349.400.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					66.758.000,00		67.500.000,00		68.600.000,00		70.000.000,00		71.700.000,00	
Meningkatnya perlindungan sosial dan jaminan sosial korban bencana alam dan sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlindungi (%)	100	100	100	66.758.000,00	100	67.500.000,00	100	68.600.000,00	100	70.000.000,00	100	71.700.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN					15.362.000,00		15.600.000,00		15.900.000,00		16.300.000,00		16.700.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	
TAMAN MAKAM PAHLAWAN														
Meningkatnya tata kelola TMP	Persentase TMP yang terkelola dengan baik (%)	100	100	100	15.362.000,00	100	15.600.000,00	100	15.900.000,00	100	16.300.000,00	100	16.700.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					17.884.219.368,00		18.083.100.000,00		18.352.700.000,00		18.727.300.000,00		19.166.600.000,00	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.424.075.368,00		6.495.500.000,00		6.592.300.000,00		6.726.800.000,00		6.884.600.000,00	
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	78,71	79.10	79.73	6.424.075.368,00	80.53	6.495.500.000,00	81.42	6.592.300.000,00	82.32	6.726.800.000,00	83.31	6.884.600.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.02 – PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Persentase Penyusunan dokumen rencana tenaga kerja (RTK) (%)	37	37	37.5	10.000.000	38	10.000.000	38.5	10.000.000	39	10.000.000	39	10.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					6.454.958.400,00		6.526.700.000,00		6.624.000.000,00		6.759.200.000,00		6.917.700.000,00	
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase kelulusan peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi (%)	100	100	100	6.454.958.400	100	6.526.700.000	100	6.624.000.000	100	6.759.200.000	100	6.917.700.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					1.040.000.000,00		1.051.600.000,00		1.067.300.000,00		1.089.100.000,00		1.114.700.000,00	
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan (%)	42.5	43	45	1.040.000.000,00	50	1.051.600.000,00	55	1.067.300.000,00	60	1.089.100.000,00	62	1.114.700.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					3.965.185.600,00		4.009.300.000,00		4.069.100.000,00		4.152.200.000,00		4.249.600.000,00	
Meningkatnya Pekerja Yang Terlindungi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	36.5	37	37.5	3.955.185.600,00	38	3.999.300.000,00	38.5	4.059.100.000,00	39	4.142.200.000,00	39	4.239.600.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					8.268.996.570,39		8.361.100.000,00		8.486.000.000,00		8.659.600.000,00		8.863.000.000,00	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.408.996.570,39		7.491.400.000,00		7.603.100.000,00		7.758.300.000,00		7.940.200.000,00	
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	70.89	71	72	7.408.996.570	73	7.491.400.000	74	7.603.100.000	75	7.758.300.000	76	7.940.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					485.000.000,00		490.400.000,00		497.800.000,00		508.000.000,00		520.000.000,00	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%)	5	5	7	485.000.000,00	9	490.400.000,00	9	497.800.000,00	10	508.000.000,00	10	520.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Partisipasi Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Politik (%)	30	30	30		30		30		30		30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Persentase organisasi perempuan yang aktif (%)	53	50	52		52		53		55		55		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	58.3	58.86	59.42		59.98		60.54		61.10		61.66		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					50.000.000,00		50.600.000,00		51.400.000,00		52.500.000,00		53.800.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya pemberian pelayanan yang komprehensif terhadap Perempuan Korban Kekerasan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan komprehensif (%)	50	100	100	50.000.000	100	50.600.000	100	51.400.000	100	52.500.000	100	53.800.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					70.000.000,00		70.800.000,00		71.900.000,00		73.400.000,00		75.200.000,00	
Meningkatnya kualitas keluarga	Persentase Permasalahan keluarga yang terselesaikan (%)	100	100	100	70.000.000,00	100	70.800.000,00	100	71.900.000,00	100	73.400.000,00	100	75.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					5.000.000,00		5.100.000,00		5.200.000,00		5.400.000,00		5.600.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase pemanfaatan data gender dan anak (%)	50	50	55	5.000.000	60	5.100.000	65	5.200.000	70	5.400.000,00	75	5.600.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					125.000.000,00		126.400.000,00		128.300.000,00		131.000.000,00		134.100.000,00	
Meningkatnya pemenuhan hak anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	55.72	56.42	57.12	125.000.000,00	57.82	126.400.000,00	58.52	128.300.000,00	59.22	131.000.000,00	59.92	134.100.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					125.000.000,00		126.400.000,00		128.300.000,00		131.000.000,00		134.100.000,00	
Meningkatnya pemberian pelayanan yang komprehensif terhadap anak korban kekerasan	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Terlayani secara komprehensif (%)	100	100	100	125.000.000	100	126.400.000	100	128.300.000	100	131.000.000	100	134.100.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	75.98	76.04	76.10		76.16		76.22		76.28		76.34		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU		
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					5.805.153.905,78		5.869.900.000,00		5.957.500.000,00		6.079.400.000,00		6.222.200.000,00		
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.161.373.905,78		5.218.800.000,00		5.296.600.000,00		5.404.700.000,00		5.531.500.000,00		
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	77.61	77.61	77.81	5.161.373.905,78	78	5.218.800.000,00	78.20	5.296.600.000,00	78.40	5.404.700.000,00	78.60	5.531.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan	
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					106.000.000,00		107.200.000,00		108.800.000,00		111.100.000,00		113.800.000,00		
Menguatnya tata kelola ketersediaan pangan berdasarkan kemampuan dalam daerah Kabupaten Probolinggo	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kemandirian Pangan (%)	100	100	100	106.000.000,00	100	107.200.000,00	100	108.800.000,00	100	111.100.000,00	100	113.800.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan	
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					377.780.000,00		382.000.000,00		387.700.000,00		395.700.000,00		405.000.000,00		
Meningkatnya Keterjangkauan pangan bagi semua masyarakat dan semua wilayah	Skor PPH Ketersediaan (Skor)	80.46	81.09	81.56	377.780.000,00	82.46	382.000.000,00	83.46	387.700.000,00	84.46	395.700.000,00	84.46	405.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan	
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					150.000.000,00		151.700.000,00		154.000.000,00		157.200.000,00		160.900.000,00		
Meningkatnya jumlah desa yang tahan pangan	Persentase Wilayah dalam Daerah yang tidak Rawan Pangan	74.22	74.88	75	150.000.000	75.25	151.700.000	76	154.000.000	77	157.200.000	77	160.900.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan	
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					10.000.000,00		10.200.000,00		10.400.000,00		10.700.000,00		11.000.000,00		
Meningkatnya persentase komoditas pangan yang beredar aman	Jumlah sampel PSAT (Sampel)	40	45	50	10.000.000,00	55	10.200.000,00	60	10.400.000,00	65	10.700.000,00	65	11.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan	
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					30.000.000,00		30.500.000,00		31.100.000,00		32.000.000,00		32.900.000,00		
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN					10.000.000,00		10.200.000,00		10.400.000,00		10.700.000,00		11.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	
SENGKETA TANAH GARAPAN														
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terelesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi (%)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.200.000,00	100	10.400.000,00	100	10.700.000,00	100	11.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					5.000.000,00		5.100.000,00		5.200.000,00		5.400.000,00		5.600.000,00	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (%)	100	100	100	5.000.000,00	100	5.100.000,00	100	5.200.000,00	100	5.400.000,00	100	5.600.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		1	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	
Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	Persentase tanah objek landreform yang siap didistribusikan (%)	100	100	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					10.000.000,00		10.200.000,00		10.500.000,00		10.900.000,00		11.300.000,00	
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Aset Tanah Pemda yang bersertifikat (%)	27.13	27.13	27.13	10.000.000,00	27.13	10.200.000,00	27.13	10.500.000,00	27.13	10.900.000,00	27.13	11.300.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					19.956.955.149,74		20.179.300.000,00		20.480.700.000,00		20.899.100.000,00		21.389.500.000,00	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.716.955.149,74		16.902.700.000,00		17.154.600.000,00		17.504.600.000,00		17.915.000.000,00	
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	78.56	78.60	78.64	16.716.955.149,74	78.68	16.902.700.000,00	78.72	17.154.600.000,00	78.76	17.504.600.000,00	78.80	17.915.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	
														Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					60.000.000,00		60.700.000,00		61.700.000,00		63.000.000,00		64.500.000,00	
Tersusunnya dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan hidup yang tersusun (%)	100	100	100	60.000.000,00	100	60.700.000,00	100	61.700.000,00	100	63.000.000,00	100	64.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					825.000.000,00		834.200.000,00		846.700.000,00		864.000.000,00		884.300.000,00	
Terlaksananya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah lahan kritis yang terehabilitasi (Ha)	2	2	2	825.000.000,00	2	834.200.000,00	3	846.700.000,00	4	864.000.000,00	5	884.300.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase jumlah titik pantau air permukaan status mutu minimal tercemar ringan (%)	40	40	40		45		50		55		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase jumlah titik pantau udara ambien status mutu Baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					500.000.000,00		505.600.000,00		513.200.000,00		523.700.000,00		536.000.000,00	
Meningkatnya tutupan vegetasi pada RTH perkotaan kraksaan	Persentase Peningkatan tutupan vegetasi pada RTH perkotaan kraksaan (%)	2	2	2	500.000.000,00	2	505.600.000,00	2	513.200.000,00	2	523.700.000,00	2	536.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					50.000.000,00		50.600.000,00		51.400.000,00		52.500.000,00		53.800.000,00	
Meningkatnya pengelolaan limbah B3	Persentase Peningkatan Pengendalian di bidang pengelolaan limbah B3 (%)	8	10	10	50.000.000,00	10	50.600.000,00	10	51.400.000,00	10	52.500.000,00	10	53.800.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					20.000.000,00		20.300.000,00		20.700.000,00		21.200.000,00		21.700.000,00	
Meningkatnya ketaatan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup	Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup (%)	50.6	50	51	20.000.000,00	51	20.300.000,00	52	20.700.000,00	52	21.200.000,00	53	21.700.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					10.000.000,00		10.200.000,00		10.400.000,00		10.700.000,00		11.000.000,00	
Meningkatnya pendampingan terhadap desa yang mendapatkan validasi pengakuan MHA	Persentase peningkatan pendampingan terhadap desa yang mendapatkan validasi pengakuan MHA (%)	4.84	4.84	4.84	10.000.000,00	4.84	10.200.000,00	4.84	10.400.000,00	4.84	10.700.000,00	4.84	11.000.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					300.000.000,00		303.400.000,00		308.000.000,00		314.300.000,00		321.700.000,00	
Meningkatnya lembaga yang berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan	Persentase peningkatan lembaga yang berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan (%)	100	100	100	300.000.000,00	100	303.400.000,00	100	308.000.000,00	100	314.300.000,00	100	321.700.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					10.000.000,00		10.200.000,00		10.400.000,00		10.700.000,00		11.000.000,00	
Meningkatnya lembaga/keompok masyarakat yang meraih penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten	Persentase peningkatan lembaga/keompok masyarakat yang meraih penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten (%)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.200.000,00	100	10.400.000,00	100	10.700.000,00	100	11.000.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					10.000.000,00		10.200.000,00		10.400.000,00		10.700.000,00		11.000.000,00	
Meningkatnya penanganan pengaduan lingkungan hidup yang dapat diselesaikan	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup yang dapat diselesaikan (%)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.200.000,00	100	10.400.000,00	100	10.700.000,00	100	11.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					1.455.000.000,00		1.471.200.000,00		1.493.200.000,00		1.523.700.000,00		1.559.500.000,00	
Terlaksananya penanganan sampah dan pengurangan sampah	Persentase Penanganan sampah (%)	15.63	15.72	15.81	1.455.000.000,00	15.9	1.471.200.000,00	15.99	1.493.200.000,00	16.08	1.523.700.000,00	16.17	1.559.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase Pengurangan sampah (%)	3.27	13.43	13.59		13.75		13.91		14.07		14.23		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					5.968.508.224,66		6.036.900.000,00		6.128.700.000,00		6.255.500.000,00		6.403.800.000,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.352.345.024,66		5.411.900.000,00		5.492.600.000,00		5.604.700.000,00		5.736.200.000,00	
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	74.76	76.76	78.76	5.352.345.025	80.76	5.411.900.000	82.81	5.492.600.000	84.86	5.604.700.000	86.96	5.736.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					36.208.600,00		36.700.000,00		37.300.000,00		38.100.000,00		39.000.000,00	
Meningkatnya kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk (%)	73	79	80	36.208.600,00	80	36.700.000,00	81	37.300.000,00	81	38.100.000,00	82	39.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					504.335.600,00		510.000.000,00		517.600.000,00		528.200.000,00		540.600.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU		
Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil (%)	95	98	98	504.335.600,00	99	510.000.000,00	99	517.600.000,00	99	528.200.000,00	99	540.600.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					59.619.000,00		60.300.000,00		61.200.000,00		62.500.000,00		64.000.000,00		
Meningkatnya pemanfaatan data administrasi kependudukan oleh lembaga berdasar PKS	Persentase lembaga yang memanfaatkan data administrasi kependudukan berdasar PKS (%)	90	100	100	59.619.000,00	100	60.300.000,00	100	61.200.000,00	100	62.500.000,00	100	64.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					16.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		24.000.000,00		
Meningkatnya pemutakhiran data dalam profil kependudukan	Persentase data yang dimutakhirkan dalam profil kependudukan (%)	0	0	15	16.000.000	16	18.000.000	18	20.000.000	19	22.000.000	20	24.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					9.923.079.585,80		10.033.600.000,00		10.183.300.000,00		10.391.300.000,00		10.635.300.000,00		
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.953.229.010,00		5.008.300.000,00		5.083.000.000,00		5.186.700.000,00		5.308.400.000,00		
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	78,81	79,00	80,00	4.953.229.010,00	81,00	5.008.300.000,00	82,00	5.083.000.000,00	83,00	5.186.700.000,00	84,00	5.308.400.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					30.000.000,00		30.400.000,00		30.900.000,00		31.600.000,00		32.400.000,00		
Meningkatnya aksesibilitas (jalan, penerangan dan transportasi) yang berkualitas	Persentase desa yang memiliki aksesibilitas yang berkualitas (%)	89,48	90,36	90,52	30.000.000,00	91,04	30.400.000,00	91,56	30.900.000,00	92,09	31.600.000,00	92,61	32.400.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					25.000.000,00		25.300.000,00		25.700.000,00		26.300.000,00		27.000.000,00	
Meningkatnya kerja sama desa yang mengembangkan aksesibilitas dan ekonomi	Persentase peningkatan kerja sama desa yang mengembangkan aksesibilitas dan ekonomi (%)	72,78	73,68	73,96	25.000.000,00	74,48	25.300.000,00	75,00	25.700.000,00	75,52	26.300.000,00	76,65	27.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					4.146.850.575,80		4.193.000.000,00		4.255.500.000,00		4.342.400.000,00		4.444.300.000,00	
Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa dalam layanan dasar dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Persentase administrasi Pemerintahan Desa yang memberikan layanan dasar, dan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel (%)	82,22	82,82	83,20	4.146.850.575,80	83,73	4.193.000.000,00	84,25	4.255.500.000,00	84,77	4.342.400.000,00	85,29	4.444.300.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					768.000.000,00		776.600.000,00		788.200.000,00		804.300.000,00		823.200.000,00	
Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan sosial dan ekonomi	Persentase Fasilitas Pemberdayaan LKD, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat yang meningkatkan pertumbuhan sosial dan ekonomi (%)	74,42	75,32	75,70	768.000.000,00	76,22	776.600.000,00	76,74	788.200.000,00	77,27	804.300.000,00	77,79	823.200.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					12.429.605.000,00		12.567.800.000,00		12.755.200.000,00		13.015.600.000,00		13.321.000.000,00	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					494.400.000,00		499.900.000,00		507.400.000,00		517.800.000,00		530.000.000,00	
Terkendalnya pertambahan jumlah penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	63,6	65,6	67,5	494.400.000	68,5	499.900.000	69	507.400.000	70,5	517.800.000	71	530.000.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	
	Persentase Penurunan Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 th) (%)	52	51,5	51		51		50,3		50		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	TFR (Angka Kelahiran Total) (%)	2.02	2.02	2.02		2.01		2.01		2.01		2.00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					5.934.805.000,00		6.000.800.000,00		6.090.300.000,00		6.214.600.000,00		6.360.400.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (%)	22.7	35.74	42.64	5.934.805.000	51.4	6.000.800.000	60.5	6.090.300.000	70.0	6.214.600.000	79.5	6.360.400.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	3.5	3.4	3.3		3.2		3.0		3.0		3.0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (%)	11	10	9		8		8		7		7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR (%))	70.22	71.51	72.80		73.00		74.29		75.58		76.87		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	98.6	98.6	98,7		98.7		98.8		98.9		98.9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN					6.000.400.000,00		6.067.100.000,00		6.157.500.000,00		6.283.200.000,00		6.430.600.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	
KELUARGA SEJAHTERA (KS)														
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	60.20	60.32	62.60	6.000.400.000	64.95	6.067.100.000	67.27	6.157.500.000	69.50	6.283.200.000	71,75	6.430.600.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	81.2	82.24	83.34		84.38		85.38		86.52		87.62		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	53.82	55.32	56.82		59.82		61.32		62.82		64.32		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					32.685.052.512,47		33.048.300.000,00		33.540.900.000,00		34.225.400.000,00		35.028.000.000,00	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					27.443.537.008,47		27.748.500.000,00		28.162.000.000,00		28.736.600.000,00		29.410.400.000,00	
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	79.41	79.81	80.17	27.443.537.008,47	80.53	27.748.500.000,00	80.89	28.162.000.000,00	81.25	28.736.600.000,00	81.61	29.410.400.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					2.931.515.504,00		2.964.100.000,00		3.008.300.000,00		3.069.700.000,00		3.141.700.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (%)	13,23	13,26	13,54	2.931.515.504,00	13,81	2.964.100.000,00	14,08	3.008.300.000,00	14,36	3.069.700.000,00	14,63	3.141.700.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Rasio terjadinya kecelakaan Lalu Lintas Jalan (per jumlah kendaraan) (Nilai)	0.09	0.09	0.09		0.09		0.09		0.09		0.09		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Kinerja lalu lintas kabupaten (Nilai)	0.21	0.21	0.21		0.21		0.21		0.21		0.21		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	
	Rasio Konektivitas darat (Nilai)	0,59	0,59	0,59		0,60		0,60		0,61		0,61		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase Angkutan Jalan yang laik jalan (%)	90	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					1.510.000.000,00		1.526.800.000,00		1.549.600.000,00		1.581.300.000,00		1.618.400.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	Rasio Konektivitas Perairan (Nilai)	1	1	1	1.510.000.000,00	1	1.526.800.000,00	1	1.549.600.000,00	1	1.581.300.000,00	1	1.618.400.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					800.000.000,00		808.900.000,00		821.000.000,00		837.800.000,00		857.500.000,00	
Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api	Persentase keselamatan di perlintasan Sebidang Kereta Api Kewenangan Kabupaten (%)	83,33	100	100	800.000.000,00	100	808.900.000,00	100	821.000.000,00	100	837.800.000,00	100	857.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					8.047.251.014,64		8.136.900.000,00		8.258.200.000,00		8.426.900.000,00		8.624.600.000,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.427.902.014,64		5.488.300.000,00		5.570.100.000,00		5.683.800.000,00		5.817.100.000,00	
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	77,91	78,00	78,05	5.427.902.014,64	78,10	5.488.300.000,00	78,15	5.570.100.000,00	78,20	5.683.800.000,00	78,25	5.817.100.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					1.241.149.000,00		1.266.100.000,00		1.299.900.000,00		1.346.900.000,00		1.402.000.000,00	
Meningkatnya Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	73,38	73,4	73,45	1.241.149.000,00	73,5	1.266.100.000,00	73,55	1.299.900.000,00	73,6	1.346.900.000,00	73,65	1.402.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN					1.378.200.000,00		1.382.500.000,00		1.388.200.000,00		1.396.200.000,00		1.405.500.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	
APLIKASI INFORMATIKA														
Terpenuhinya Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (%)	57,69	57,71	57,73	1.378.200.000,00	57,75	1.382.500.000,00	57,77	1.388.200.000,00	57,83	1.396.200.000,00	57,92	1.405.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
Terpenuhinya Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	93,58	93,63	93,67		93,71		93,74		93,81		93,97		
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					18.046.354.063,93		18.270.800.000,00		18.566.100.000,00		18.966.700.000,00		19.431.900.000,00	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.619.504.063,93		17.815.300.000,00		18.080.800.000,00		18.449.700.000,00		18.882.300.000,00	
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	75	76	77	17.619.504.063,93	78	17.815.300.000,00	79	18.080.800.000,00	80	18.449.700.000,00	81	18.882.300.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					125.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		225.000.000,00	
Meningkatnya legalitas hukum kelembagaan koperasi	Persentase koperasi yang telah memiliki ijin USP (%)	94	94	94	125.000.000,00	94	150.000.000,00	94	175.000.000,00	94	200.000.000,00	94	225.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					23.900.000,00		24.200.000,00		24.600.000,00		25.200.000,00		25.800.000,00	
Meningkatnya kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan	Persentase Koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan (%)	82	82	82	23.900.000,00	82	24.200.000,00	82	24.600.000,00	82	25.200.000,00	82	25.800.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					11.200.000,00		11.400.000,00		11.600.000,00		11.900.000,00		12.200.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	
Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kinerja usaha Koperasi	Persentase koperasi yang meningkat status kesehatannya (%)	0,85	1	1,1	11.200.000,00	1,2	11.400.000,00	1,3	11.600.000,00	1,4	11.900.000,00	1,5	12.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					55.560.000,00		56.200.000,00		57.100.000,00		58.300.000,00		59.700.000,00	
Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia koperasi	Persentase Kualitas Koperasi yang meningkat kapasitas SDMnya (%)	75	75	75	55.560.000,00	75	56.200.000,00	75	57.100.000,00	75	58.300.000,00	75	59.700.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOOPERASI					31.540.000,00		31.900.000,00		32.400.000,00		33.100.000,00		33.900.000,00	
Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi	Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya (%)	25	25	25	31.540.000,00	25	31.900.000,00	25	32.400.000,00	25	33.100.000,00	25	33.900.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					174.000.000,00		176.000.000,00		178.700.000,00		182.400.000,00		186.700.000,00	
Meningkatnya kinerja dan daya saing usaha mikro	Persentase UM yang meningkat omzetnya (%)	5	5	5	174.000.000,00	5	176.000.000,00	5	178.700.000,00	5	182.400.000,00	5	186.700.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					5.650.000,00		5.800.000,00		5.900.000,00		6.100.000,00		6.300.000,00	
Meningkatnya kapasitas dan keberlanjutan usaha mikro	Persentase usaha mikro yang meningkat Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil (%)	0,10	0,10	0,10	5.650.000,00	0,10	5.800.000,00	0,10	5.900.000,00	0,10	6.100.000,00	0,10	6.300.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					6.280.353.920,93		6.350.300.000,00		6.445.400.000,00		6.577.200.000,00		6.731.600.000,00	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.087.353.920,93		6.155.000.000,00		6.246.800.000,00		6.374.300.000,00		6.523.800.000,00	
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	80.31	80.42	80.52	6.087.353.920,93	80.63	6.155.000.000,00	80.74	6.246.800.000,00	80.85	6.374.300.000,00	80.96	6.523.800.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	
														Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					35.000.000,00		35.400.000,00		36.000.000,00		36.800.000,00		37.700.000,00	
Meningkatnya nilai realisasi PMA dan PMDN dengan memberikan kemudahan berusaha dan daya tarik daerah sebagai tujuan investasi	Nilai Realisasi Investasi PMA (Juta Rupiah)	1.828.4 04	392.689	401.141 ,78	35.000.000,00	409.794,6 7	35.400.000,00	418.653 ,34	36.000.000,00	427.723,6 5	36.800.000,00	437.011,6 9	37.700.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
	Nilai Realisasi Investasi PMDN (Juta Rupiah)	472132 0.7	117806 6.98	120342 5.35		1229384.0 3		125596 0.03		1283170.9 5		1311035. 07		Dinas /Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					60.000.000,00		60.700.000,00		61.700.000,00		63.000.000,00		64.500.000,00	
Meningkatnya minat investor terhadap peluang penanaman modal daerah	Jumlah peluang investasi yang ditawarkan (Angka)	2	2	3	60.000.000,00	4	60.700.000,00	5	61.700.000,00	5	63.000.000,00	5	64.500.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					70.000.000,00		70.800.000,00		71.900.000,00		73.400.000,00		75.200.000,00	
Meningkatnya Kepuasan Investor terhadap Pelayanan Perizinan dan Non- Perizinan	Persentase Layanan Perizinan yang Diselesaikan sesuai dengan SOP (%)	100	100	100	70.000.000,00	100	70.800.000,00	100	71.900.000,00	100	73.400.000,00	100	75.200.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					20.000.000,00		20.300.000,00		20.700.000,00		21.200.000,00		21.700.000,00	
Meningkatnya kepatuhan dan kinerja investor sesuai ketentuan perijinan dan komitmen investasi	Persentase kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perizinan dan non-perizinan (%)	90	100	100	20.000.000,00	100	20.300.000,00	100	20.700.000,00	100	21.200.000,00	100	21.700.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					8.000.000,00		8.100.000,00		8.300.000,00		8.500.000,00		8.700.000,00	
Tersedianya data dan sistem informasi penanaman modal yang akurat, mutakhir, dan	Persentase Pembaruan Data Tepat Waktu (%)	100	100	100	8.000.000,00	100	8.100.000,00	100	8.300.000,00	100	8.500.000,00	100	8.700.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
mudah diakses untuk mendukung perumusan kebijakan dan pelayanan investasi daerah														
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					8.030.000.000,00		8.119.400.000,00		8.240.600.000,00		8.408.800.000,00		8.606.000.000,00	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					240.000.000,00		242.700.000,00		246.400.000,00		251.500.000,00		257.400.000,00	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (%)	13.49	13.52	13.56	240.000.000,00	13.60	242.700.000,00	13.64	246.400.000,00	13.68	251.500.000,00	13.72	257.400.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					6.940.000.000,00		7.017.200.000,00		7.121.800.000,00		7.267.100.000,00		7.437.500.000,00	
Meningkatnya prestasi keolahragaan	Persentase atlet berprestasi (%)	29.15	46.75	46.80	6.940.000.000,00	46.85	7.017.200.000,00	46.90	7.121.800.000,00	46.95	7.267.100.000,00	47	7.437.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					850.000.000,00		859.500.000,00		872.400.000,00		890.200.000,00		911.100.000,00	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (%)	18.53	19.03	19.53	850.000.000,00	20.03	859.500.000,00	20.53	872.400.000,00	21.03	890.200.000,00	21.53	911.100.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					75.000.000,00		75.900.000,00		77.100.000,00		78.700.000,00		80.600.000,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					75.000.000,00		75.900.000,00		77.100.000,00		78.700.000,00		80.600.000,00	
Terpenuhinya Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	48,08	48,09	48,10	75.000.000	48,11	75.900.000	48,12	77.100.000	48,13	78.700.000	48,14	80.600.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terpenuhinya Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	48,08	48,09	48,10		48,11		48,12		48,13		48,14		
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					50.000.000,00		50.600.000,00		51.400.000,00		52.500.000,00		53.800.000,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					50.000.000,00		50.600.000,00		51.400.000,00		52.500.000,00		53.800.000,00	
Meningkatnya keamanan informasi pemerintah kabupaten/kota	Tingkat keamanan informasi pemerintah kabupaten/kota (%)	52,56	53,00	53,50	50.000.000	54,00	50.600.000	54,50	51.400.000	55,00	52.500.000	55,50	53.800.000	Dinas /Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					1.420.000.000,00		1.435.900.000,00		1.457.500.000,00		1.487.300.000,00		1.522.300.000,00	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					850.000.000,00		859.500.000,00		872.400.000,00		890.200.000,00		911.100.000,00	
Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	Persentase Obyek Budaya yang dikembangkan (%)	50	55	58	850.000.000	62	859.500.000	69	872.400.000	71	890.200.000	79	911.100.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					500.000.000,00		505.600.000,00		513.200.000,00		523.700.000,00		536.000.000,00	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan (%)	33.33	37.5	37.5	500.000.000	40	505.600.000	40	513.200.000	45.45	523.700.000	45.45	536.000.000	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					70.000.000		70.800.000		71.900.000		73.400.000		75.200.000	
Meningkatnya Cagar Budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda Yang Ditetapkan (%)	28.57	28.57	33.33	70.000.000	33.33	70.800.000	38.10	71.900.000	38.10	73.400.000	42.86	75.200.000	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Persentase Warisan Budaya Yang Dilestarikan (%)		57.14	61.90		66.67		71.43		76.19		80.95		
2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU		
Meningkatnya Tata Kelola Museum	Persentase Koleksi Museum Yang Dihimpun (%)	4.00	4.00	6.00	70.000.000	8,00	70.800.000	10,00	71.900.000	12,00	73.400.000	14,00	75.200.000		
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					5.123.493.139,10		5.180.500.000,00		5.257.800.000,00		5.365.200.000,00		5.491.200.000,00		
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.745.829.039,10		4.798.600.000,00		4.870.100.000,00		4.969.500.000,00		5.086.100.000,00		
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	76.71	77.00	77.67	4.745.829.039,10	78.47	4.798.600.000,00	79.47	4.870.100.000,00	80.68	4.969.500.000,00	85.67	5.086.100.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Perpustakaan	
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					362.533.100,00		366.600.000,00		372.100.000,00		379.700.000,00		388.700.000,00		
Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	68.30	78	80	362.533.100,00	82	366.600.000,00	84	372.100.000,00	86	379.700.000,00	88	388.700.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan	
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					15.131.000,00		15.300.000,00		15.600.000,00		16.000.000,00		16.400.000,00		
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (%)	7.00	7.00	8.00	15.131.000,00	8.00	15.300.000,00	9.00	15.600.000,00	9.00	16.000.000,00	9.00	16.400.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan	
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					199.231.100,00		214.700.000,00		217.500.000,00		225.300.000,00		229.800.000,00		
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					180.631.100,00		182.700.000,00		185.500.000,00		189.300.000,00		193.800.000,00		
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (%)	72.25	100	100	180.631.100,00	100	182.700.000,00	100	185.500.000,00	100	189.300.000,00	100	193.800.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan	
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					18.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		26.000.000,00		26.000.000,00		
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (%)	0	0	70	18.000.000	72	24.000.000	74	24.000.000	76	26.000.000	78	26.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan	
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					600.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (%)	0	0	1.5	600.000	2	8.000.000	2	8.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					8.392.251.616,33		8.485.700.000,00		8.612.400.000,00		8.788.300.000,00		8.994.500.000,00	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.999.251.616,33		6.066.000.000,00		6.156.400.000,00		6.282.000.000,00		6.429.300.000,00	
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	80,66	80,86	81,06	5.999.251.616,33	81,06	6.066.000.000,00	81,46	6.156.400.000,00	81,66	6.282.000.000,00	81,86	6.429.300.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					1.673.000.000,00		1.691.600.000,00		1.716.900.000,00		1.752.000.000,00		1.793.100.000,00	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	31985.20	32624.90	33277.40	1.673.000.000,00	33942.95	1.691.600.000,00	34621.81	1.716.900.000,00	35314.25	1.752.000.000,00	36020.53	1.793.100.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					520.000.000,00		525.800.000,00		533.700.000,00		544.600.000,00		557.400.000,00	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	15121.19	15423.61	15732.09	520.000.000,00	16046.73	525.800.000,00	16367.66	533.700.000,00	16695.02	544.600.000,00	10017028.92	557.400.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					15.000.000,00		15.200.000,00		15.500.000,00		15.900.000,00		16.300.000,00	
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan (%)	50	50	50	15.000.000,00	50	15.200.000,00	50	15.500.000,00	50	15.900.000,00	50	16.300.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					185.000.000,00		187.100.000,00		189.900.000,00		193.800.000,00		198.400.000,00	
Meningkatnya produksi olahan perikanan	Jumlah produksi olahan perikanan (Ton)	4102.09	4184.13	4267.81	185.000.000,00	0,354353.17	187.100.000,00	4440.23	189.900.000,00	4529.04	193.800.000,00	4619.62	198.400.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					6.397.674.868,00		6.469.000.000,00		6.565.700.000,00		6.699.900.000,00		6.857.200.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.502.674.868,00		5.563.900.000,00		5.646.900.000,00		5.762.100.000,00		5.897.200.000,00	
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE Akip PD	79,80	79,88	80,04	5.502.674.868	80,16	5.563.900.000	80,28	5.646.900.000	80,40	5.762.100.000	80,50	5.897.200.000	Dinas /Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					785.000.000,00		793.800.000,00		805.700.000,00		822.200.000,00		841.500.000,00	
Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata yang layak, nyaman, dan berdaya saing melalui penerapan prinsip Sapta Pesona	Persentase destinasi pariwisata yang meningkat kunjungannya (%)	28.57	28.57	29	785.000.000,00	30	793.800.000,00	31	805.700.000,00	32	822.200.000,00	33	841.500.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					40.000.000,00		40.500.000,00		41.200.000,00		42.100.000,00		43.100.000,00	
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi pariwisata yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan (%)	11.09	11.09	12.09	40.000.000,00	13.09	40.500.000,00	14.09	41.200.000,00	15.09	42.100.000,00	16.09	43.100.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					25.000.000,00		25.300.000,00		25.700.000,00		26.300.000,00		27.000.000,00	
Tumbuhnya usaha kreatif berbasis inovasi yang terlindungi secara hukum serta meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang terkurasi HAKI (%)	19	20	21.66	25.000.000	22.22	25.300.000	22.50	25.700.000	22.66	26.300.000	24	27.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					45.000.000,00		45.500.000,00		46.200.000,00		47.200.000,00		48.400.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU		
Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang mengalami peningkatan kapasitas/ pengetahuan (%)	0,65	0.71	0.75	45.000.000	0.80	45.500.000	0.85	46.200.000	0.90	47.200.000	0.95	48.400.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata	
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					48.283.567.408,62		48.868.284.464,00		49.643.653.531,00		50.700.264.743,00		51.931.942.628,00		
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					26.591.464.509,12		26.886.900.000,00		27.287.600.000,00		27.844.300.000,00		28.497.200.000,00		
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	77,45	78,23	79,02	26.591.464.509,12	79,81	26.886.900.000,00	80,61	27.287.600.000,00	81,41	27.844.300.000,00	82,23	28.497.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian	
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					9.800.546.390,50		9.909.500.000,00		10.057.200.000,00		10.262.400.000,00		10.503.100.000,00		
Terwujudnya ketersediaan sarana pertanian yang memadai dan berkelanjutan	Persentase ketersediaan sarana pertanian yang sesuai peruntukan (%)	100	100	100	2.940.163.917,00	100	2.972.850.000,00	100	3.017.160.000,00	100	3.078.720.000,00	100	3.150.930.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian	
Terwujudnya ketersediaan sarana peternakan yang memadai dan berkelanjutan	Persentase ketersediaan penyediaan dan pengembangan sarana peternakan (%)	90	90	90	6.860.382.473,50	90	6.936.650.000,00	90	7.040.040.000,00	90	7.183.680.000,00	90	7.352.170.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian	
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					5.062.190.310,00		5.118.500.000,00		5.194.800.000,00		5.300.800.000,00		5.425.100.000,00		
Meningkatnya prasarana Pertanian yang berkualitas dan mudah diakses	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian (%)	1	1	1	4.049.752.248,00	1	4.094.800.000,00	1	4.155.840.000,00	1	4.240.640.000,00	1	4.340.080.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian	
Meningkatnya prasarana Peternakan yang berkualitas dan mudah diakses	Persentase Peningkatan Prasarana Peternakan (%)	1	1	1	1.012.438.062,00	1	1.023.700.000,00	1	1.038.960.000,00	1	1.060.160.000,00	1	1.085.020.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian	
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					1.216.400.000,00		1.230.000.000,00		1.248.400.000,00		1.273.900.000,00		1.303.800.000,00		
Meningkatnya derajat kesehatan hewan untuk keberlanjutan usaha peternakan	Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan (%)	8	8	8	1.066.400.000,00	8	1.078.323.000,00	8	1.094.454.000,00	8	1.116.809.500,00	8	1.143.022.300,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU		
Meningkatnya derajat keamanan produk hewan untuk mendukung kesehatan masyarakat serta keberlanjutan usaha peternakan	Persentase peningkatan produk hewan yang ASUH (%)	5	5	5	150.000.000,00	5	151.677.000,00	5	153.946.000,00	5	157.090.500,00	5	160.777.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian	
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					980.645.720,00		1.039.484.464,00		1.101.853.531,00		1.167.964.743,00		1.238.042.628,00		
Berkurangnya risiko kerugian usaha tani akibat bencana pertanian melalui sistem mitigasi dan penanggulangan yang efektif	Persentase Luas Wilayah yang Terkendali Bencana Pertaniannya (%)	90	90	90	980.645.720,00	90	1.039.484.464,00	90	1.101.853.531,00	90	1.167.964.743,00	90	1.238.042.628,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian	
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					30.000.000,00		30.400.000,00		30.900.000,00		31.600.000,00		32.400.000,00		
Meningkatnya kemudahan berusaha di sektor Pertanian melalui layanan perizinan yang cepat, transparan, dan akuntabel	persentase rekomendasi izin usaha bidang pertanian yang diawasi pelaksanaannya secara berkala (%)	100	100	100	6.000.000,00	100	6.080.000,00	100	6.180.000,00	100	6.320.000,00	100	6.480.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian	
Meningkatnya kemudahan berusaha di sektor Peternakan melalui layanan perizinan yang cepat, transparan, dan akuntabel	persentase rekomendasi izin usaha peternakan dan kesehatan hewan yang diawasi pelaksanaannya secara berkala (%)	100	100	100	24.000.000,00	100	24.320.000,00	100	24.720.000,00	100	25.280.000,00	100	25.920.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian	
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					4.602.320.479,00		4.653.500.000,00		4.722.900.000,00		4.819.300.000,00		4.932.300.000,00		
Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok tani	Persentase kelompok tani yang nilai skor/kelas kapasitas kelembagaanya naik (%)	2	2	2	4.602.320.479,00	2	4.653.500.000,00	2	4.722.900.000,00	2	4.819.300.000,00	2	4.932.300.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian	
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					1.838.300.000,00		1.859.000.000,00		1.887.000.000,00		1.925.800.000,00		1.971.200.000,00		
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					20.000.000,00		20.300.000,00		20.700.000,00		21.200.000,00		21.700.000,00		
Meningkatnya Kepatuhan Perusahaan dalam	Persentase usaha perdagangan yang memiliki izin usaha (%)	20	20	20	20.000.000,00	20	20.300.000,00	20	20.700.000,00	20	21.200.000,00	20	21.700.000,00	Dinas/Badan yang menangani	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU		
Perizinan dan Pendaftaran														Bidang Perdagangan	
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					490.000.000,00		495.500.000,00		502.900.000,00		513.200.000,00		525.300.000,00		
Meningkatnya ketersediaan sarana distribusi sarana perdagangan yang memadai dan merata	Persentase sarana distribusi perdagangan yang berstandar SNI (%)	6	9	11	490.000.000,00	14	495.500.000,00	17	502.900.000,00	20	513.200.000,00	23	525.300.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Perdagangan	
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					1.025.000.000,00		1.036.400.000,00		1.051.900.000,00		1.073.400.000,00		1.098.600.000,00		
Meningkatnya keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting bagi masyarakat.	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil (%)	61	61	61	1.025.000.000,00	61	1.036.400.000,00	61	1.051.900.000,00	61	1.073.400.000,00	61	1.098.600.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Perdagangan	
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					50.450.000,00		51.100.000,00		51.900.000,00		53.000.000,00		54.300.000,00		
Meningkatnya daya saing produk ekspor unggulan daerah	Persentase produk ekspor unggulan daerah yang berhasil dipasarkan di luar Daerah (%)	83	86	88	50.450.000,00	89	51.100.000,00	90	51.900.000,00	91	53.000.000,00	92	54.300.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Perdagangan	
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					2.850.000,00		2.900.000,00		3.000.000,00		3.100.000,00		3.200.000,00		
Meningkatnya kepastian hukum dan perlindungan hak-hak konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku (%)	95	95	95	2.850.000,00	95	2.900.000,00	95	3.000.000,00	95	3.100.000,00	95	3.200.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Perdagangan	
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					250.000.000,00		252.800.000,00		256.600.000,00		261.900.000,00		268.100.000,00		
Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri oleh masyarakat, pelaku usaha, dan instansi pemerintah. Jumlah produk unggulan daerah yang difasilitasi promosi	Persentase produk unggulan daerah yang digunakan dan dipasarkan di dalam negeri (%)	83	86	88	250.000.000,00	89	252.800.000,00	90	256.600.000,00	91	261.900.000,00	92	268.100.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Perdagangan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU		
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					9.106.959.800,00		9.303.700.000,00		9.534.900.000,00		9.817.200.000,00		10.131.000.000,00		
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					8.706.959.800,00		8.803.700.000,00		8.934.900.000,00		9.117.200.000,00		9.331.000.000,00		
Meningkatnya pembangunan industri yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persentase Draft Kebijakan Pembangunan Industri yang telah disahkan sebagai kebijakan (%)	50	50	50	8.706.959.800,00	50	8.803.700.000,00	50	8.934.900.000,00	50	9.117.200.000,00	50	9.331.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian	
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		
Meningkatnya kepatuhan Izin Usaha Industri	Persentase Izin Usaha Industri yang telah diterbitkan (%)	20	30	40	200.000.000,00	50	250.000.000,00	60	300.000.000,00	70	350.000.000,00	80	400.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian	
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		
Meningkatnya Integrasi Data Industri	Persentase perusahaan industri yang telah memenuhi kewajiban penyampaian informasi di SIINas (%)	25	25	25	200.000.000,00	25	250.000.000,00	25	300.000.000,00	25	350.000.000,00	25	400.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian	
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					51.325.736.811,14		51.896.100.000,00		52.669.500.000,00		53.744.200.000,00		55.004.300.000,00		
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					30.023.491.811,14		30.357.100.000,00		30.809.500.000,00		31.438.100.000,00		32.175.200.000,00		
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	73,16	73,25	73,50	140.000.000,00	73,75	141.555.620,00	74,00	143.665.169,00	74,25	146.596.340,00	74,50	150.033.449,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Daerah	
Optimalisasi Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Umum	Persentase Kebijakan di bidang TU pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, RT dan perlengkapan yang dilaksanakan (%)	90,00	92,00	92,25	28.483.491.811,14	92,50	28.799.988.180,00	92,75	29.229.183.151,00	93,00	29.825.540.266,00	93,25	30.524.832.071,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Persentase PD dengan Nilai Pelaporan Kinerja minimal 11 pada LHE AKIP PD (%)	100	100	100	700.000.000,00	100	707.778.100,00	100	718.325.840,00	100	732.981.697,00	100	750.167.240,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
														Sekretariat Daerah	
Optimalisasi Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kelembagaan dan Anjab, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan RB	Persentase kebijakan dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi yang terlaksana (%)	100	92,00	92,25	-	92,50	-	92,75	-	93,00	-	93,25	-	Dinas /Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah	
	Persentase PD dengan Nilai IKM minimal diatas 85 (%)	61,00	55,00	65,00		75,00		85,00		90,00		95,00		Dinas /Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah	
Optimalisasi Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Prokopim	Persentase kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi yang terlaksana (%)	90,00	92,00	92,00	700.000.000,00	92,00	707.778.100,00	92,00	718.325.840,00	92,00	732.981.697,00	92,00	750.167.240,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah	
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					19.242.245.000,00		19.456.100.000,00		19.746.000.000,00		20.148.900.000,00		20.621.300.000,00		
Optimalisasi Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kesra	Persentase kebijakan dibidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana (%)	90,00	92,00	93,00	17.892.245.000,00	94,00	18.091.096.331,00	95,00	18.360.657.490,00	96,00	18.735.290.777,00	97,00	19.174.548.075,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah	
Optimalisasi Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Hukum	Persentase implementasi Renaksi Peningkatan IRH (%)	87,32	90,00	90,00	750.000.000,00	90,00	758.335.370,00	90,00	769.634.728,00	90,00	785.338.458,00	90,00	803.751.070,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah	
	Persentase kebijakan dibidang Perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana (%)	99,74	100	100		100		100		100		100		Dinas /Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah	
Optimalisasi Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pemerintahan	Persentase kebijakan dibidang administrasi pemerintahan, administrasi Kewilayahan dan otonomi serta Kerja sama daerah yang terlaksana (%)	98,06	98,15	98,50	600.000.000,00	98,60	606.668.299,00	98,70	615.707.782,00	98,90	628.270.765,00	99,00	643.000.855,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					2.060.000.000,00		2.082.900.000,00		2.114.000.000,00		2.157.200.000,00		2.207.800.000,00	
Optimalisasi Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Administrasi Pembangunan	Persentase kebijakan dibidang penyusunan program, pengendalian program, dan evaluasi serta pelaporan yang terlaksana (%)	90,00	92,00	92,25	360.000.000,00	92,50	364.001.941,00	92,75	369.436.893,00	93,00	376.986.408,00	93,25	385.829.127,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Optimalisasi Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase kebijakan dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian, dan sumber daya alam yang terlaksana (%)	90,00	90,00	91,00	950.000.000,00	92,00	960.560.672,00	93,00	974.902.913,00	94,00	994.825.242,00	95,00	1.018.160.193,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Optimalisasi Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase kebijakan dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana (%)	75,00	90,00	91,00	750.000.000,00	92,00	758.337.387,00	93,00	769.660.194,00	94,00	785.388.350,00	95,00	803.810.680,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					43.746.699.213,21		44.232.800.000,00		44.891.900.000,00		45.807.800.000,00		46.881.800.000,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					41.437.900.467,21		41.898.300.000,00		42.522.600.000,00		43.390.100.000,00		44.407.400.000,00	
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	67,11	70,50	71,00	41.437.900.467	71,50	41.898.300.000	72,00	42.522.600.000	72,50	43.390.100.000	73,00	44.407.400.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					2.308.798.746,00		2.334.500.000,00		2.369.300.000,00		2.417.700.000,00		2.474.400.000,00	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian perundang undangan serta kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase ketepatan waktu penetapan rancangan perda APBD (%)	100	100	100	2.308.798.746,00	100	2.334.500.000,00	100	2.369.300.000,00	100	2.417.700.000,00	100	2.474.400.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase penetapan Rancangan peraturan daerah (%)	70	70	75		75		80		80		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	
	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan (%)	60	70	75		76		78		80		83		Dinas /Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					7.564.998.903,33		7.649.200.000,00		7.763.400.000,00		7.921.900.000,00		8.107.800.000,00	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.664.998.903,33		6.739.100.000,00		6.839.600.000,00		6.979.200.000,00		7.142.900.000,00	
Peningkatan Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	80.96	81.53	82.10	6.664.998.903,33	82.67	6.739.100.000,00	83.25	6.839.600.000,00	83.83	6.979.200.000,00	84.42	7.142.900.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					300.000.000,00		303.400.000,00		308.000.000,00		314.300.000,00		321.700.000,00	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kinerja tujuan dan sasaran PD yang telah mencapai nilai > 80% (%)	83.97	84	86	300.000.000,00	87	303.400.000,00	88	308.000.000,00	89	314.300.000,00	90	321.700.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					600.000.000,00		606.700.000,00		615.800.000,00		628.400.000,00		643.200.000,00	
Keselaran Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD dengan perencanaan daerah (%)	96.63	96,75	96,90	600.000.000,00	97,00	606.700.000,00	97,15	615.800.000,00	97,30	628.400.000,00	97,50	643.200.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN					525.630.913.643,42		541.468.745.229,93		549.388.779.038,34		562.903.500.131,31		563.299.571.193,17	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.200.960.649,64		12.336.600.000,00		12.520.500.000,00		12.776.000.000,00		13.075.600.000,00	
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	81.86	82.67	83.08	12.200.960.649,64	83.49	12.336.600.000,00	84.31	12.520.500.000,00	85.13	12.776.000.000,00	86.30	13.075.600.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					512.169.743.988,78		527.857.845.229,93		535.574.879.038,34		548.807.600.131,30		548.873.071.193,17	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	
Pencapaian Pengelolaan Keuangan ,penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan keuangan daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	87	90	92	512.169.743.988,78	94	527.857.845.229,93	96	535.574.879.038,34	98	548.807.600.131,30	100	548.873.071.193,17	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					699.496.105,00		707.300.000,00		717.900.000,00		732.600.000,00		749.800.000,00	
Terkelolanya Barang Milik Daerah dengan tertib sesuai peraturan dan perundang undangan	Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPA) (Indeks)	80	80	82	699.496.105,00	84	707.300.000,00	86	717.900.000,00	88	732.600.000,00	90	749.800.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					560.712.900,00		567.000.000,00		575.500.000,00		587.300.000,00		601.100.000,00	
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	1,2	1.3	1.4	560.712.900,00	1.5	567.000.000,00	1.6	575.500.000,00	1.7	587.300.000,00	1.8	601.100.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					9.476.871.155,94		9.582.300.000,00		9.725.200.000,00		9.923.700.000,00		10.156.400.000,00	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.639.048.855,94		8.735.100.000,00		8.865.300.000,00		9.046.200.000,00		9.258.300.000,00	
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	81.0	81.5	81.54	8.639.048.855,94	81.58	8.735.100.000,00	81.62	8.865.300.000,00	81.66	9.046.200.000,00	81.70	9.258.300.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					837.822.300,00		847.200.000,00		859.900.000,00		877.500.000,00		898.100.000,00	
Tersedianya rencana kebutuhan ASN	Nilai Sistem Merit pada Aspek Perencanaan Kebutuhan (Nilai)	40	40	40	2.400.000,00	40	2.426.900,00	40	2.463.300,00	40	2.513.700,00	40	2.572.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Terpenuhinya Kebutuhan ASN	Nilai Sistem Merit pada Aspek Pengadaan (Nilai)	40	40	40	150.000.000,00	40	151.679.000,00	40	153.952.400,00	40	157.103.400,00	40	160.791.900,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Terlaksananya pelayanan sesuai dengan standart pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP)	Nilai Sistem Merit pada Aspek Perlindungan dan Pelayanan (Nilai)	14	16	16	209.000.000,00	16	211.339.000,00	16	214.507.500,00	16	218.897.900,00	16	224.036.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Tersedianya data kepegawaian yang	Nilai Sistem Merit pada Aspek Sistem Informasi (Nilai)	19	20	20	16.600.000,00	22	16.785.900,00	22	17.037.500,00	22	17.386.200,00	22	17.794.300,00	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	
valid, akurat, dan mutakhir														Bidang Kepegawaian
Terlaksananya penataan dan pengisian jabatan sesuai dengan standart kompetensi jabatan (SKJ) yang di tetapkan	Nilai Sistem Merit pada Aspek Promosi dan Mutasi (Nilai)	22,5	22,5	25	149.968.000,00	25	151.646.600,00	27.5	153.919.900,00	30	157.070.300,00	35	160.757.600,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Tersedianya data capaian kinerja ASN	Nilai Sistem Merit pada Aspek Manajemen Kinerja (Nilai)	67,5	67,5	67,5	295.294.300,00	70	298.599.600,00	70	303.075.700,00	70	309.278.900,00	70	316.539.500,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya Produktivitas ASN	Nilai Sistem Merit pada Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin (Nilai)	40	40	40	14.560.000,00	40	14.723.000,00	40	14.943.700,00	40	15.249.600,00	40	15.607.600,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					270.015.400,00		273.100.000,00		277.200.000,00		282.900.000,00		289.600.000,00	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					270.015.400,00		273.100.000,00		277.200.000,00		282.900.000,00		289.600.000,00	
Meningkatnya kapabilitas pegawai yang meliputi kemampuan teknis, manajerial dan sosio kultural	Nilai Sistem Merit pada Aspek Pengembangan Karir (Nilai)	80	80	82,5	270.015.400,00	82,5	273.100.000,00	87,5	277.200.000,00	95	282.900.000,00	95	289.600.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					984.000.000,00		1.087.800.000,00		1.292.900.000,00		1.349.900.000,00		1.358.200.000,00	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					334.000.000,00		337.800.000,00		342.900.000,00		349.900.000,00		358.200.000,00	
Meningkatnya Hasil Litbang yang Dimanfaatkan Dalam Dokumen Perencanaan, Program atau Regulasi Daerah	Persentase Hasil Litbang yang Dimanfaatkan Sebagai Rumusan Kebijakan Pembangunan Daerah (%)	47	66.7	66.7	130.000.000,00	66.7	125.000.000,00	66.7	125.000.000,00	66.7	125.000.000,00	66.7	135.000.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya Hasil Inovasi yang Diterapkan Secara Berkelanjutan	Persentase Peningkatan Hasil Inovasi yang Diimplementasikan Secara Berkelanjutan (%)	50	50	50	204.000.000,00	50	212.800.000,00	50	217.900.000,00	50	224.900.000,00	50	223.200.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					650.000.000,00		750.000.000,00		950.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	
Meningkatnya Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Persentase Produk Riset dan Inovasi yang Diimplementasikan (%)	0	40	42.00	650.000.000,00	44.00	750.000.000,00	46.00	950.000.000,00	48.00	1.000.000.000,00	50.00	1.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					21.752.038.687,00		21.993.800.000,00		22.321.600.000,00		22.777.100.000,00		23.311.300.000,00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.846.011.887,00		17.033.200.000,00		17.287.000.000,00		17.639.700.000,00		18.053.300.000,00	
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	80.70	81.51	82.33	16.846.011.887,00	83.15	17.033.200.000,00	83.98	17.287.000.000,00	84.82	17.639.700.000,00	85.67	18.053.300.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					3.768.725.600,00		3.810.600.000,00		3.867.400.000,00		3.946.300.000,00		4.038.900.000,00	
Meningkatnya Persentase Tindaklanjut atas Rekomendasi BPK Secara Tuntas	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	50%	51%	52%	3.768.725.600,00	53%	3.810.600.000,00	54%	3.867.400.000,00	55%	3.946.300.000,00	56%	4.038.900.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.137.301.200,00		1.150.000.000,00		1.167.200.000,00		1.191.100.000,00		1.219.100.000,00	
Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP	Kenaikan Capaian Nilai Kapabilitas APIP (Nilai)	3.000	3.050	3.100	1.137.301.200,00	3.150	1.150.000.000,00	3.200	1.167.200.000,00	3.250	1.191.100.000,00	3.300	1.219.100.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					74.464.948.236,97		75.322.774.248,72		76.445.576.696,68		78.005.152.369,92		79.834.287.546,43	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					68.066.942.636,97		68.823.391.405,37		69.849.080.916,25		71.274.314.928,66		72.945.619.359,29	
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	70.75	70.79	70.82	2.454.416.254,57	70.86	2.481.692.933,69	70.89	2.518.678.126,65	70.93	2.570.070.438,26	70.96	2.630.335.768,27	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	73.31	73.35	73.38	2.594.182.465,85	73.42	2.623.012.409,66	73.46	2.662.103.716,56	73.49	2.716.422.552,42	73.53	2.780.119.678,82	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	72.41	72.45	72.48	2.559.841.669,05	72.52	2.588.289.973,07	72.55	2.626.863.804,18	72.59	2.680.463.588,04	72.63	2.743.317.516,21	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	72,21	72,93	73,66	2.372.684.843,53	74,40	2.399.053.216,46	75,14	2.434.806.812,29	75,89	2.484.487.773,55	76,65	2.542.746.284,03	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	100	100	100	2.690.008.172,10	100	2.719.903.056,31	100	2.760.438.344,95	100	2.816.763.647,54	100	2.882.813.662,46	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	70.91	70.95	70.98	2.394.521.120,14	71.02	2.421.132.166,30	71.05	2.457.214.809,37	71.09	2.507.352.994,10	71.12	2.566.147.668,91	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	70.46	70.50	70.53	2.534.905.972,54	70.57	2.563.077.158,53	70.60	2.601.275.237,75	70.64	2.654.352.900,28	70.67	2.716.594.561,49	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	70.31	70.35	70.38	2.624.188.435,21	70.42	2.653.351.844,54	70.45	2.692.895.306,43	70.49	2.747.842.428,60	70.52	2.812.276.316,61	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	100	100	100	2.323.543.886,15	100	2.349.366.140,58	100	2.384.379.239,45	100	2.433.031.252,41	100	2.490.083.163,98	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	71.81	71.85	71.88	2.516.090.706,59	71.92	2.544.052.792,77	71.95	2.581.967.347,86	71.99	2.634.651.042,97	72.03	2.696.430.717,26	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	71,50	72,21	72,94	2.606.218.224,09	73,67	2.635.181.924,96	74,40	2.674.454.596,72	75,15	2.729.025.445,84	75,90	2.793.018.096,25	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	72,21	72,93	73,66	2.997.779.808,36	74,40	3.031.095.052,97	75,14	3.076.268.101,54	75,89	3.139.037.745,35	76,65	3.212.644.734,02	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	72.56	0.05	0.05	2.662.577.513,55	0.05	2.692.167.552,46	0.05	2.732.289.493,03	0.05	2.788.040.433,00	0.05	2.853.416.920,07	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	100	100	100	2.802.865.984,48	100	2.834.015.092,11	100	2.876.251.016,47	100	2.934.939.416,13	100	3.003.760.523,07	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	71.36	71.40	71.43	3.067.217.491,14	71.47	3.101.304.417,98	71.50	3.147.523.811,51	71.54	3.211.747.390,86	71.57	3.287.059.340,89	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	72,00	72.04	72.07	2.681.649.325,64	72.11	2.711.451.315,43	72.14	2.751.860.645,99	72.18	2.808.010.925,12	72.22	2.873.855.698,30	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	72,05	72,77	73,50	2.440.335.389,37	74,23	2.467.455.583,52	74,98	2.504.228.594,25	75,73	2.555.326.070,71	76,48	2.615.245.661,49	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	72,76	73,49	74,22	2.762.165.706,94	74,96	2.792.862.499,92	75,71	2.834.485.118,53	76,47	2.892.321.306,86	77,24	2.960.143.065,93	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	100	100	100	2.785.259.832,78	100	2.816.213.277,85	100	2.858.183.898,02	100	2.916.503.647,57	100	2.984.892.455,98	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	100	100	100	7.331.933.419,15	100	7.413.415.439,50	100	7.523.899.132,62	100	7.677.420.364,53	100	7.857.447.442,78	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	72,76	72.80	72.83	2.786.544.603,32	72.87	2.817.512.326,44	72.91	2.859.502.306,61	72.94	2.917.848.957,59	72.98	2.986.269.312,04	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	100	100	100	2.747.811.491,13	100	2.778.348.761,32	100	2.819.755.078,62	100	2.877.290.708,18	100	2.944.760.016,21	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	100	100	100	2.725.916.430,00	100	2.756.210.373,67	100	2.797.286.757,91	100	2.854.363.933,12	100	2.921.295.633,46	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	72,56	73,2856	74,02	2.604.283.891,29	74,76	2.633.226.095,33	75,51	2.672.469.618,94	76,26	2.726.999.965,63	77,02	2.790.945.120,76	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					551.552.600,00		557.682.172,87		565.993.427,88		577.542.228,12		591.084.959,27	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%)	100	100	100	7.200.000,00	100	7.280.015,80	100	7.388.511,41	100	7.539.270,13	100	7.716.057,74	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%)	100	100	100	12.400.000,00	100	12.537.805,00	100	12.724.658,55	100	12.984.298,56	100	13.288.766,10	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%)	100	100	100	56.800.000,00	100	57.431.235,79	100	58.287.145,60	100	59.476.464,36	100	60.871.122,15	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%)	100	100	100	36.120.000,00	100	36.521.412,62	100	37.065.698,93	100	37.822.005,15	100	38.708.889,65	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%)	100	100	100	12.000.000,00	100	12.133.359,67	100	12.314.185,69	100	12.565.450,22	100	12.860.096,23	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%)	100	100	100	32.480.000,00	100	32.840.960,18	100	33.330.395,93	100	34.010.485,25	100	34.807.993,79	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	
														Bidang Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%)	100	100	100	30.000.000,00	100	30.333.399,18	100	30.785.464,23	100	31.413.625,54	100	32.150.240,57	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%)	100	100	100	24.000.000,00	100	24.266.719,35	100	24.628.371,38	100	25.130.900,43	100	25.720.192,46	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%)	100	100	100	8.951.200,00	100	9.050.677,43	100	9.185.561,58	100	9.372.988,17	100	9.592.774,45	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%)	100	100	100	32.400.000,00	100	32.760.071,12	100	33.248.301,36	100	33.926.715,59	100	34.722.259,82	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%)	100	100	100	7.000.000,00	100	7.077.793,14	100	7.183.274,99	100	7.329.845,96	100	7.501.722,80	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%)	100	100	100	36.371.900,00	100	36.776.112,06	100	37.324.194,21	100	38.085.774,90	100	38.978.844,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%)	100	100	100	30.000.000,00	100	30.333.399,18	100	30.785.464,23	100	31.413.625,54	100	32.150.240,57	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%)	100	100	100	36.000.000,00	100	36.400.079,02	100	36.942.557,07	100	37.696.350,65	100	38.580.288,69	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%)	100	100	100	8.700.000,00	100	8.796.685,76	100	8.927.784,63	100	9.109.951,41	100	9.323.569,77	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%)	100	100	100	44.500.000,00	100	44.994.542,12	100	45.665.105,27	100	46.596.877,89	100	47.689.523,52	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%)	100	100	100	10.200.000,00	100	10.313.355,72	100	10.467.057,84	100	10.680.632,68	100	10.931.081,79	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%)	100	100	100	3.600.000,00	100	3.640.007,90	100	3.694.255,71	100	3.769.635,07	100	3.858.028,87	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%)	100	100	100	23.000.000,00	100	23.255.606,04	100	23.602.189,24	100	24.083.779,58	100	24.648.517,77	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%)	100	100	100	51.000.000,00	100	51.566.778,61	100	52.335.289,18	100	53.403.163,42	100	54.655.408,97	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%)	100	100	100	16.000.000,00	100	16.177.812,90	100	16.418.914,25	100	16.753.933,62	100	17.146.794,97	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%)	100	100	100	10.088.000,00	100	10.200.111,03	100	10.352.125,44	100	10.563.355,15	100	10.811.054,23	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%)	100	100	100	10.341.500,00	100	10.456.428,25	100	10.612.262,61	100	10.828.800,29	100	11.082.723,76	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase dokumen pelayanan yang sesuai standart (%)	100	100	100	12.400.000,00	100	12.537.805,00	100	12.724.658,55	100	12.984.298,56	100	13.288.766,10	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.192.174.000,00		3.227.649.606,78		3.275.751.949,29		3.342.591.956,79		3.420.972.068,27	
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan	Persentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%)	100	100	100	25.800.000,00	100	26.086.723,30	100	26.475.499,23	100	27.015.717,97	100	27.649.206,89	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan	Persentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%)	100	100	100	50.800.000,00	100	51.364.555,95	100	52.130.052,76	100	53.193.739,25	100	54.441.074,04	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan	Persentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%)	100	100	100	39.522.000,00	100	39.961.220,08	100	40.556.770,57	100	41.384.310,29	100	42.354.726,93	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan	Persentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%)	100	100	100	35.300.000,00	100	35.692.299,71	100	36.224.229,57	100	36.963.366,06	100	37.830.116,41	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan	Persentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%)	100	100	100	12.000.000,00	100	12.133.359,67	100	12.314.185,69	100	12.565.450,22	100	12.860.096,23	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan	Persentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%)	100	100	100	17.000.000,00	100	17.188.926,20	100	17.445.096,39	100	17.801.054,47	100	18.218.469,66	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan	Persentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%)	100	100	100	65.200.000,00	100	65.924.587,56	100	66.907.075,58	100	68.272.279,51	100	69.873.189,51	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan	Persentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%)	100	100	100	20.000.000,00	100	20.222.266,12	100	20.523.642,82	100	20.942.417,03	100	21.433.493,71	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan	Persentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%)	100	100	100	11.396.000,00	100	11.522.647,24	100	11.694.371,68	100	11.932.989,22	100	12.212.804,72	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan	Persentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%)	100	100	100	44.400.000,00	100	44.893.430,79	100	45.562.487,05	100	46.492.165,80	100	47.582.356,05	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan	Persentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%)	100	100	100	11.200.000,00	100	11.324.469,03	100	11.493.239,98	100	11.727.753,54	100	12.002.756,48	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan	Persentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%)	100	100	100	37.600.000,00	100	38.017.860,31	100	38.584.448,50	100	39.371.744,01	100	40.294.968,18	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan	Persentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%)	100	100	100	29.118.000,00	100	29.441.597,25	100	29.880.371,58	100	30.490.064,95	100	31.205.023,50	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan	Persentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%)	100	100	100	38.000.000,00	100	38.422.305,63	100	38.994.921,35	100	39.790.592,35	100	40.723.638,06	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan	Persentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%)	100	100	100	11.481.000,00	100	11.608.591,87	100	11.781.597,16	100	12.021.994,50	100	12.303.897,07	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan	Persentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%)	100	100	100	7.600.000,00	100	7.684.461,13	100	7.798.984,27	100	7.958.118,47	100	8.144.727,61	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan	Persentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%)	100	100	100	23.400.000,00	100	23.660.051,36	100	24.012.662,10	100	24.502.627,92	100	25.077.187,65	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan	Persentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%)	100	100	100	21.600.000,00	100	21.840.047,41	100	22.165.534,24	100	22.617.810,39	100	23.148.173,21	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan	Persentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%)	100	100	100	58.700.000,00	100	59.352.351,07	100	60.236.891,67	100	61.465.993,98	100	62.907.304,05	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan	Persentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%)	100	100	100	2.528.800.000,00	100	2.556.903.328,45	100	2.595.009.397,78	100	2.647.959.209,11	100	2.710.050.945,28	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan	Persentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%)	100	100	100	24.000.000,00	100	24.266.719,35	100	24.628.371,38	100	25.130.900,43	100	25.720.192,46	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan	Persentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%)	100	100	100	29.050.000,00	100	29.372.841,54	100	29.810.591,19	100	30.418.860,73	100	31.132.149,62	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan	Persentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%)	100	100	100	8.207.000,00	100	8.298.206,90	100	8.421.876,83	100	8.593.720,83	100	8.795.234,15	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan	Persentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan (%)	100	100	100	42.000.000,00	100	42.466.758,86	100	43.099.649,92	100	43.979.075,76	100	45.010.336,80	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.216.607.500,00		1.230.128.031,54		1.248.460.888,92		1.273.935.081,24		1.303.807.460,26	
Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Trantibum Yang Terlaksana (%)	100	100	100	9.600.000,00	100	9.706.687,74	100	9.851.348,55	100	10.052.360,17	100	10.288.076,98	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Trantibum Yang Terlaksana (%)	100	100	100	27.722.000,00	100	28.030.083,07	100	28.447.821,31	100	29.028.284,24	100	29.708.965,64	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Trantibum Yang Terlaksana (%)	100	100	100	85.446.000,00	100	86.395.587,55	100	87.683.159,21	100	89.472.288,27	100	91.570.315,20	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Trantibum Yang Terlaksana (%)	100	100	100	22.508.000,00	100	22.758.138,29	100	23.097.307,63	100	23.568.596,12	100	24.121.253,83	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Trantibum Yang Terlaksana (%)	100	100	100	56.778.700,00	100	57.409.699,07	100	58.265.287,92	100	59.454.160,69	100	60.848.295,48	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Trantibum Yang Terlaksana (%)	100	100	100	57.730.700,00	100	58.372.278,94	100	59.242.213,32	100	60.451.019,74	100	61.868.529,78	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Trantibum Yang Terlaksana (%)	100	100	100	72.212.000,00	100	73.014.514,06	100	74.102.664,75	100	75.614.690,92	100	77.387.772,41	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Trantibum Yang Terlaksana (%)	100	100	100	25.893.100,00	100	26.180.857,95	100	26.571.036,79	100	27.113.204,92	100	27.748.979,81	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Trantibum Yang Terlaksana (%)	100	100	100	61.113.000,00	100	61.792.167,48	100	62.713.069,17	100	63.992.696,59	100	65.493.255,07	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Trantibum Yang Terlaksana (%)	100	100	100	41.400.000,00	100	41.860.090,87	100	42.483.940,63	100	43.350.803,25	100	44.367.331,99	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Trantibum Yang Terlaksana (%)	100	100	100	12.163.600,00	100	12.298.777,81	100	12.482.069,09	100	12.736.759,19	100	13.035.422,21	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Trantibum Yang Terlaksana (%)	100	100	100	86.394.800,00	100	87.354.931,86	100	88.656.800,82	100	90.465.796,54	100	92.587.120,14	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Trantibum Yang Terlaksana (%)	100	100	100	58.200.000,00	100	58.846.794,41	100	59.723.800,60	100	60.942.433,55	100	62.371.466,71	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Trantibum Yang Terlaksana (%)	100	100	100	64.253.200,00	100	64.967.265,48	100	65.935.486,33	100	67.280.865,49	100	68.858.527,92	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Trantibum Yang Terlaksana (%)	100	100	100	25.438.100,00	100	25.720.801,39	100	26.104.123,92	100	26.636.764,93	100	27.261.367,82	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Trantibum Yang Terlaksana (%)	100	100	100	58.516.000,00	100	59.166.306,22	100	60.048.074,15	100	61.273.323,74	100	62.710.115,91	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Trantibum Yang Terlaksana (%)	100	100	100	66.890.000,00	100	67.633.369,04	100	68.641.323,40	100	70.041.913,75	100	71.684.319,73	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Trantibum Yang Terlaksana (%)	100	100	100	23.800.000,00	100	24.064.496,69	100	24.423.134,95	100	24.921.476,26	100	25.505.857,52	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Trantibum Yang Terlaksana (%)	100	100	100	28.600.000,00	100	28.917.840,55	100	29.348.809,23	100	29.947.656,35	100	30.649.896,01	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Trantibum Yang Terlaksana (%)	100	100	100	92.100.000,00	100	93.123.535,49	100	94.511.375,17	100	96.439.830,42	100	98.701.238,56	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Trantibum Yang Terlaksana (%)	100	100	100	64.689.000,00	100	65.407.908,66	100	66.382.696,51	100	67.737.200,76	100	69.325.563,75	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Trantibum Yang Terlaksana (%)	100	100	100	78.081.000,00	100	78.948.738,05	100	80.125.327,74	100	81.760.243,20	100	83.677.431,14	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Trantibum Yang Terlaksana (%)	100	100	100	47.459.900,00	100	47.987.336,40	100	48.702.501,79	100	49.696.250,90	100	50.861.573,42	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Trantibum Yang Terlaksana (%)	100	100	100	49.618.400,00	100	50.169.824,47	100	50.917.515,94	100	51.956.461,25	100	53.174.783,23	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN					1.167.683.500,00		1.198.801.213,66		1.216.667.200,39		1.241.492.660,26		1.270.604.298,55	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PEMERINTAHAN UMUM														
terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	9.000.000,00	100	9.100.019,75	100	9.235.639,27	100	9.424.087,66	100	9.645.072,17	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.555.665,30	100	51.309.107,04	100	52.356.042,57	100	53.583.734,29	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	71.000.000,00	100	71.789.044,73	100	72.858.932,00	100	74.345.580,45	100	76.088.902,69	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	37.200.000,00	100	37.613.414,99	100	38.173.975,64	100	38.952.895,67	100	39.866.298,31	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	28.000.000,00	100	28.311.172,57	100	28.733.099,94	100	29.319.383,84	100	30.006.891,20	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	72.400.000,00	100	73.204.603,00	100	74.295.587,00	100	75.811.550,00	100	77.589.247,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	35.600.000,00	100	35.995.633,70	100	36.532.084,21	100	37.277.502,31	100	38.151.618,81	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	104.000.000,00	100	105.155.783,83	100	106.722.942,65	100	108.900.568,55	100	111.454.167,32	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang	100	100	100	31.262.000,00	100	31.609.424,18	100	32.080.506,09	100	32.735.092,06	100	33.502.694,02	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Terlaksana Dengan Baik (%)													
terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	36.200.000,00	100	36.602.301,68	100	37.147.793,50	100	37.905.774,82	100	38.794.623,62	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	6.200.000,00	100	6.268.902,50	100	6.362.329,27	100	6.492.149,28	100	6.644.383,05	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	69.000.000,00	100	69.766.818,12	100	70.806.567,72	100	72.251.338,75	100	73.945.553,31	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	66.888.000,00	100	67.631.346,82	100	68.639.271,04	100	70.039.819,51	100	71.682.176,38	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	67.724.000,00	100	68.476.638,00	100	69.497.159,00	100	70.915.213,00	100	72.578.096,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	1.000.000,00	100	1.011.113,31	100	1.026.182,14	100	1.047.120,85	100	1.071.674,69	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	5.280.000,00	100	5.338.678,26	100	5.418.241,70	100	5.528.798,10	100	5.658.442,34	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	47.400.000,00	100	47.926.770,71	100	48.641.033,48	100	49.633.528,36	100	50.797.380,10	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang	100	100	100	17.870.532	100	18.140.889,38	100	18.411.246,88	100	18.786.918,76	100	19.227.451,37	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Terlaksana Dengan Baik (%)														
terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	54.400.000,00	100	55.004.563,85	100	55.824.308,46	100	56.963.374,32	100	58.299.102,90	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan	
terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	171.400.000,00	100	173.304.820,70	100	175.887.618,90	100	179.476.513,90	100	183.685.041,10	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan	
terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	36.800.000,00	100	37.208.969,66	100	37.763.502,78	100	38.534.047,33	100	39.437.628,43	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan	
terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	63.888.000,00	100	64.598.006,90	100	65.560.724,61	100	66.898.456,96	100	68.467.152,32	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan	
terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	17.941.500,00	100	18.140.889,38	100	18.411.246,88	100	18.786.918,76	100	19.227.451,37	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan	
terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	85.100.000,00	100	86.045.742,35	100	87.328.100,19	100	89.109.984,46	100	91.199.515,76	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan	
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					269.988.000,00		285.121.818,50		289.622.313,94		295.275.514,84		302.199.400,79		
terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%)	100	100	100	25.200.000,00	100	25.480.055,31	100	25.859.789,95	100	26.387.445,46	100	27.006.202,08	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan	
terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%)	100	100	100	8.000.000,00	100	8.088.906,45	100	8.209.457,13	100	8.376.966,81	100	8.573.397,49	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	
terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%)	100	100	100	8.000.000,00	100	8.088.906,45	100	8.209.457,13	100	8.376.966,81	100	8.573.397,49	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%)	100	100	100	44.600.000,00	100	45.095.653,45	100	45.767.723,48	100	46.701.589,97	100	47.796.690,98	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%)	100	100	100	8.000.000,00	100	8.088.906,00	100	8.209.457,00	100	8.376.967,00	100	8.573.397,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%)	100	100	100	2.925.317	100	3.033.339,92	100	3.141.362,55	100	3.141.362,55	100	3.215.024,06	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%)	100	100	100	6.000.000,00	100	6.066.679,84	100	6.157.092,84	100	6.282.725,11	100	6.430.048,11	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%)	100	100	100	20.000.000,00	100	20.222.266,12	100	20.523.642,82	100	20.942.417,03	100	21.433.493,71	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%)	100	100	100	7.740.000,00	100	7.826.016,99	100	7.942.649,77	100	8.104.715,39	100	8.294.762,07	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%)	100	100	100	32.200.000,00	100	32.557.848,46	100	33.043.064,94	100	33.717.291,42	100	34.507.924,88	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%)	100	100	100	4.000.000,00	100	4.044.453,22	100	4.104.728,56	100	4.188.483,41	100	4.286.698,74	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%)	100	100	100	21.000.000,00	100	21.233.379,43	100	21.549.824,96	100	21.989.537,88	100	22.505.168,40	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%)	100	100	100	2.925.317	100	3.033.339,92	100	3.141.362,55	100	3.141.362,55	100	3.215.024,06	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kewilayahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	
terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	100	100	100	3.000.000,00	100	3.033.339,92	100	3.078.546,42	100	3.141.362,55	100	3.215.024,06	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%)	100	100	100	1.000.000,00	100	1.011.113,31	100	1.026.182,14	100	1.047.120,85	100	1.071.674,69	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%)	100	100	100	2.925.317	100	3.033.339,92	100	3.141.362,55	100	3.141.362,55	100	3.215.024,06	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%)	100	100	100	8.400.000,00	100	8.493.351,77	100	8.619.929,98	100	8.795.815,15	100	9.002.067,36	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%)	100	100	100	2.925.317	100	3.033.339,92	100	3.141.362,55	100	3.141.362,55	100	3.215.024,06	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.111.133,06	100	10.261.821,41	100	10.471.208,51	100	10.716.746,86	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%)	100	100	100	20.000.000,00	100	20.222.266,12	100	20.523.642,82	100	20.942.417,03	100	21.433.493,71	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%)	100	100	100	12.000.000,00	100	12.133.359,67	100	12.314.185,69	100	12.565.450,22	100	12.860.096,23	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%)	100	100	100	10.848.000,00	100	10.968.557,14	100	11.132.023,86	100	11.359.167,00	100	11.625.526,99	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.111.133,06	100	10.261.821,41	100	10.471.208,51	100	10.716.746,86	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan
terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan Kecamatan (%)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.111.133,06	100	10.261.821,41	100	10.471.208,51	100	10.716.746,86	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kewilayahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					6.428.905.871,46		6.500.600.000,00		6.597.800.000,00		36.732.800.000,00		36.891.000.000,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.712.208.901,46		3.753.500.000,00		3.809.500.000,00		3.887.300.000,00		3.978.500.000,00	
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	76.41	78.50	79.50	3.712.208.901,46	80.50	3.753.500.000,00	81.50	3.809.500.000,00	82.50	3.887.300.000,00	83.50	3.978.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					201.913.100,00		204.200.000,00		207.300.000,00		211.600.000,00		216.600.000,00	
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	90	100	100	201.913.100,00	100	204.200.000,00	100	207.300.000,00	100	211.600.000,00	100	216.600.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					1.920.216.100,00		1.941.600.000,00		1.970.600.000,00		32.010.900.000,00		32.058.100.000,00	
Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%)	90	100	100	1.920.216.100,00	100	1.941.600.000,00	100	1.970.600.000,00	100	32.010.900.000,00	100	32.058.100.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					134.815.200,00		136.400.000,00		138.500.000,00		141.400.000,00		144.800.000,00	
Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Ormas (%)	90	100	100	134.815.200,00	100	136.400.000,00	100	138.500.000,00	100	141.400.000,00	100	144.800.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN					294.906.570,00		298.200.000,00		302.700.000,00		308.900.000,00		316.200.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA															
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (%)	90	100	100	294.906.570,00	100	298.200.000,00	100	302.700.000,00	100	308.900.000,00	100	316.200.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					164.846.000,00		166.700.000,00		169.200.000,00		172.700.000,00		176.800.000,00		
Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (%)	90	100	100	164.846.000,00	100	166.700.000,00	100	169.200.000,00	100	172.700.000,00	100	176.800.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik	
TOTAL KESELURUHAN					2.532.484.354.763,87		2.571.770.756.436,12		2.637.887.136.303,05		2.771.769.547.198,89		2.836.426.136.156,98		

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dokumen perencanaan pembangunan daerah, tidak terkecuali Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus dilengkapi dengan indikator dan target kinerja penyelenggaraan daerah. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 merupakan ukuran keberhasilan pencapaian visi-misi kepala daerah dan wakil kepala daerah selama periode perencanaan. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam RPJMD ini sangat penting karena akan menjadi acuan dalam perumusan target kinerja perencanaan pembangunan jangka pendek daerah (Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) maupun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rencana Kerja/Renja).

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 terdapat tiga kelompok indikator kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu:

- 1) Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi;
- 2) Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci;
- 3) Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

Penetapan IKU, IKD dan IKK serta penentuan target pencapaiannya dalam dokumen RPJMD sangat penting karena menggambarkan ketercapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah yang identik dengan gambaran kesejahteraan masyarakat. Penetapan target IKU dan IKD didasarkan atas evaluasi terhadap keberhasilan / capaian pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah sebelumnya, yaitu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Probolinggo tahun 2024-2026. Pada sisi lain target IKU dan IKD merupakan ukuran yang dipergunakan untuk

pengendalian dan evaluasi proses pembangunan ke depan, untuk mengetahui apakah sudah berada di arah yang tepat sebagaimana dimaksud dalam substansi Visi dan Misi RPJMD.

Pada tabel 4.2 telah ditentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kabupaten Probolinggo sampai dengan tahun 2030, selanjutnya Pada tabel 4.3 disajikan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penyajian Indikator Kinerja Urusan sebagaimana dimaksud untuk menggambarkan ukuran kinerja setiap Perangkat Daerah pada periode RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029. Selanjutnya berbagai target kinerja yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) menjadi acuan dalam penyusunan target kinerja dalam dokumen perencanaan Perangkat daerah, baik perencanaan jangka menengah (Rencana Strategis Perangkat Daerah) maupun rencana jangka pendek (Rencana Kerja Perangkat Daerah).

**Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Probolinggo
sampai dengan tahun 2030**

NO	INDIKATOR	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	81,9	82,4	82,9	83,4	83,9	84,4	85
2	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.82	5,09	5.22	5.36	5.48	5.61	5.76
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	16,45	15,15	13,85	12,55	11,25	9,95	8,65
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,85	71,86	72,56	73,47	74,37	75,38	76,44
5	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	72,70	75,50	76,11	76,73	77,39	78,09	78,84
6	Indeks Kesejahteraan Sosial	Puluhan	0,5	0,51	0,52	0,54	0,56	0,58	0,6
7	Rasio Gini	Angka	0,339	0,334	0,329	0,324	0,319	0,314	0,309

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Probolinggo Sampai Dengan Tahun 2030

NO		INDIKATOR	Satuan	Baseline (2024)	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	ASPEK GEOGRAFI dan DEMOGRAFI									
	1.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	61,56	74,77	74,85	74,93	75,00	75,08	75,16
	1.2	Indeks Infrastruktur Dasar	Indeks	69,49	70,28	70,84	71,40	71,99	72,63	73,30
	1.3	Indeks Konektivitas Wilayah	Indeks	67,67	68,26	68,90	69,93	70,70	72,07	73,14
	1.4	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	%	11,83	9,61	9,2	8,79	8,38	7,97	7,56
	1.5	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	(Ton Co2 eq)	24.135,11	24.786,34	25.437,57	26.088,79	26.740,02	27.391,25	28.042,48
	1.6	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	153,31	150,75	147,07	143,57	140,24	137,06	134,00
	1.7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah	%	12,75	13,26	13,77	14,28	14,79	15,29	15,8

NO		INDIKATOR	Satuan	Baseline (2024)	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	1.8	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah	%	23,66	25,98	26,18	26,38	26,58	26,78	26,98
2	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
	2.1	Kesejahteraan Ekonomi								
	2.1.1	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	3,00	2,80	2,60	2,40	2,20	2,00	1,80
	2.2	Kesehatan Untuk Semua								
	2.2.1	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	per 100.000 kelahiran hidup	103,16	98,08	92,94	87,73	82,45	77,09	71,65
	2.2.2	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) (SSGI)	%	26,3	22,28	21,48	20,68	19,88	17,14	16,42
	2.2.3	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,93	74,13	74,38	74,63	74,89	75,14	75,39

NO		INDIKATOR	Satuan	Baseline (2024)	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	2.2.4	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	%	79,1	82	85	90	95	97	98
	2.2.5	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	24,2	33,12	34,83	36,54	38,25	39,95	41,66
	2.2.6	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	99,42	99,45	99,48	99,51	99,54	99,58	99,60
	2.3	Pendidikan Berkualitas yang Merata								
	2.3.1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,64	12,88	13	13,2	13,4	13,6	13,9
	2.3.2	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	6,31	6,7	6,9	7,1	7,4	7,7	8
	2.4	Perlindungan Sosial yang Adaptif								
	2.4.1	Persentase penurunan PPKS	%	3,99	4,02	4,44	4,94	5,54	6,3	7,26
	2.5	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju								
	2.5.1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	59	59,5	60	60,5	61	61,5	62

NO		INDIKATOR	Satuan	Baseline (2024)	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	2.6	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif								
	2.6.1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	86,63	87,46	87,81	88,16	88,51	88,86	89,21
	2.6.2	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	61,19	71,29	72,29	72,54	72,8	73,06	73,32
	2.6.3	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	55	55,2	55,4	55,6	55,8	56	56,2
	2.6.4	Persentase Disabilitas yang Berdaya (bekerja di sektor formal)	%	2	2,1	2,5	3	3,5	4	4,2
	2.6.5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	58,3	58,86	59,42	59,98	60,54	61,10	61,66
3	ASPEK DAYA SAING									
	3.1	Daya Saing Sumber Daya Manusia								
	3.1.1	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	%	5.48 (2023)	7,49	7,54	7,62	7,71	8,01	9,13

NO		INDIKATOR	Satuan	Baseline (2024)	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	3.2	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi								
	3.2.1	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	48,55	52	54	56	58	60	62
	3.2.2	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	38,54	38,88	39,27	39,67	40,07	40,46	41,86
	3.2.3	Kontribusi PDRB Kabupaten Probolinggo terhadap provinsi (%)	%	1,41	1,44	1,45	1,47	1,50	1,53	1,57
	3.2.4	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	1,58	1,85	2,11	2,38	2,64	2,91	3,17
	3.2.5	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	27,19	27,35	27,43	27,44	27,45	27,47	27,48
	3.2.6	Persentase PDRB Perdagangan	%	4,11	4,67	5,23	5,78	6,34	6,9	7,46
	3.2.7	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,57	1,84	1,9	1,95	2,01	2,06	2,12
	3.2.8	Nilai Realisasi Investasi	Juta	6.549.724 ,40	1.570.755 ,98	1.604.567 ,13	1.639.178 ,71	1.674.613 ,38	1.710.894 ,61	1.748.046 ,77
	3.2.9	ICOR	Angka	5,81	5,55	5,48	5,42	5,4	5,39	5,38

NO		INDIKATOR	Satuan	Baseline (2024)	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	3.3	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global								
	3.3.1	Pembentukan Modal tetap bruto (% PDRB)	%	26,59	26,77	27,08	27,49	27,28	28,58	29,22
	3.4	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi								
	3.4.1	Persentase Desa Mandiri	%	32,31	40,00	42,46	44,92	47,38	49,85	52,31
	3.4.2	Persentase Jalan berkeselamatan	%	59,9	60,10	61,1	61,5	62	62,80	63,7
	3.5	Stabilitas Ekonomi Makro								
	3.5.1	Rasio PAD terhadap Total Belanja Daerah (%)	%	14,22	16,31	17,33	18,35	19,37	20,00	20,39
4	ASPEK PELAYANAN UMUM									
	4.1	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif								
	4.1.1	Nilai SAKIP	Nilai	67,11	70,5	71	71,5	72	72,5	73

NO		INDIKATOR	Satuan	Baseline (2024)	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	4.1.2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	70	71	72	73	74	75	76
	4.1.3	Maturitas SPIP	Nilai	3,117	3,137	3,157	3,177	3,197	3,217	3,237
	4.1.4	Indeks Sistem Merit	Indeks	0,79	0,80	0,81	0,82	0,84	0,86	0,87
	4.1.5	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,20	4,20	4,30	4,40	4,45	4,51	4,55
	4.1.6	Indeks kepuasan Masyarakat	Indeks	86,75	87,50	88,25	89,00	89,5	90,00	91,00
	4.1.7	Indeks SPBE ^(a)	Indeks	3,51	4,27	1,67	1,77	1,87	1,97	2,07
	4.1.8	Indeks Integritas Pemerintah Kabupaten Probolinggo	Indeks	71,65	72,85	74,05	75,25	76,45	77,65	78,85
	4.2	Hukum, Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial								
	4.2.1	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Indeks	44,91	48,07	53,64	57,51	60,77	66,11	68,6
	4.2.2	Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD	%	25,10	27,36	30,09	33,10	36,58	40,42	44,87
	4.3	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan								

NO		INDIKATOR	Satuan	Baseline (2024)	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	4.3.1	Indeks daya saing daerah	Indeks	3,4	3,43	3,46	3,49	3,52	3,55	3,58
4.4	Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah									
4.4.1	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Dasar									
4.4.1.1	Pendidikan									
	1.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 tahun	%	90.56	93.12	95.97	98.21	100	100	100
	2.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	%	99.56	99.77	100	100	100	100	100
	3.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	%	90.74	90.95	91.16	91.37	91.58	91.79	92.00
	4.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 tahun	%	97.33	97.55	97.77	97.98	98.20	98.42	98.63
	5.	Angka partisipasi Sekolah (APS) 7-18 tahun kesetaraan	%	33.96	42.17	50.38	56.87	63.36	69.85	76.34
	6.	Literasi	Nilai							
	a.	Pendidikan Dasar		77.03	79.03	80.03	81.03	82.03	83.03	84.03
	b.	Pendidikan Menengah Pertama		70.90	72.90	74.90	76.90	78.90	80.90	82.90

NO		INDIKATOR	Satuan	Baseline (2024)	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	7.	Numerasi a. Pendidikan Dasar b. Pendidikan Menengah Pertama	Nilai	74.31 70.34	76.31 72.34	78.31 74.34	80.31 76.34	82.31 78.34	84.31 80.34	86.31 82.34
	8.	Iklim Keamanan a. Pendidikan Dasar b. Pendidikan Menengah Pertama	Indeks	74.21 67.09	75.12 68.60	76.02 70.10	76.92 71.60	77.82 73.10	78.72 74.60	79.62 76.10
	9.	Iklim Kebinekaan a. Pendidikan Dasar b. Pendidikan Menengah Pertama	Indeks	71.7 68.43	72.13 69.44	73.13 70.44	74.13 71.44	75.13 72.44	76.13 73.44	77.13 74.44
	10.	Iklim Inklusivitas a. Pendidikan Dasar b. Pendidikan Menengah Pertama	Indeks	59.21 55.07	61.71 57.48	64.21 59.88	66.71 62.28	69.21 64.68	71.71 67.08	74.21 69.48
	11.	Proporsi PAUD Akreditasi Min B	%	63.79	64.21	64.62	65.03	65.44	65.85	66.26
	12.	Proporsi Guru PAUD Formal S1/D IV	%	50.25	50.25	52.25	54.84	55.84	56.84	57.84
	13.	Persentase Anak Tidak Sekolah	%	3,9	3,59	3,43	3,27	3,11	2,96	2,8
4.4.1.2		Kesehatan								

NO		INDIKATOR	Satuan	Baseline (2024)	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	1.	Angka Kematian Balita	per 1.000 kelahiran hidup	15,47	14,94	14,41	13,86	13,31	12,75	12,18
	2.	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi Paripurna	%	97,14	97,14	94,44	94,44	100	100	100
	3.	Angka Populasi Bebas Penyakit Menular	%	41,67	50	58,33	66,67	75	83,33	91,67
	4.	Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular	%	47	48	50	52	54	56	58
	5.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	92,74	100	100	100	100	100	100
	6.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	98,89	100	100	100	100	100	100
	7.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100	100	100
	8.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100

NO		INDIKATOR	Satuan	Baseline (2024)	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	9.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	93,7	100	100	100	100	100	100
	10.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	79,15	100	100	100	100	100	100
	11.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	91,12	100	100	100	100	100	100
	12.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
	13.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
	14.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
	15.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan	%	100	100	100	100	100	100	100

NO		INDIKATOR	Satuan	Baseline (2024)	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
		pelayanan TBC sesuai standar								
	16.	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
4.4.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	1.	Persentase Peningkatan Bangunan Irigasi Kondisi Baik	%	1,18	0,10	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	2.	Persentase peningkatan SR yang menggunakan air minum layak	%	0,69	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	3.	akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	%	17,29	23,44	28,06	32,68	37,3	41,92	45
	4.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	0,96	2,7	4,44	6,18	7,92	9,66	11,4
	5.	Persentase peningkatan SR yang menggunakan sanitasi layak	%	0,54	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	6.	Persentase peningkatan bangunan pelayanan publik berkualitas baik	%	5,26	3,00	1	1	1	1	1

NO		INDIKATOR	Satuan	Baseline (2024)	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	7.	Persentase Peningkatan Jalan dan Jembatan Mantap	%	1,33	1,19	1,23	1,23	1,50	1,90	2,10
	8.	Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	37	38	44,4	50,8	57,2	63,6	70
	9.	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	64,00%	69,00%	74,00%	78,00%	82,00%	86,00%	90,00%
4.4.1.4	Perumahan dan Kawasan Permukiman									
	1.	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	58.27	62	59,91	61,19	62,47	63,64	64,91
	2.	Persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	92,58	95,11%	95,26%	95,44%	95,63%	95,85%	96,09%
4.4.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat									
	1.	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Indeks	86,06	86,61	87,17	87,83	88,94	89.50	90,06

NO		INDIKATOR	Satuan	Baseline (2024)	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	2.	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum ^(b)	Indeks	29,32	35,87	47,33	53,54	59,03	62,27	65,58
	3.	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat	Indeks	13,28	13,87	19,08	22,69	27,15	31,68	35,82
	4.	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Indeks	51	56	61	66	68	78	83
4.4.1.6	Sosial									
	1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100
	2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR		Satuan	Baseline (2024)	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.4.2	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Dasar									
4.4.2.1	Ketenagakerjaan									
	1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	73,18	73,30	73,50	73,70	73,80	74,00	74,20
	2.	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%	96,8	96,83	96,86	96,89	96,92	96,95	96,98
4.4.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
	1.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,442	0,438	0,435	0,432	0,419	0,406	0,393
	2.	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	60,72	61,45	62,18	62,91	63,64	64,37	65,10
	3.	Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	Indeks	79,81	80,81	81,94	82,94	84,07	85,07	86,2
4.4.2.3	Pangan									
	1.	Skor Pola Pangan Harapan (skor PPH))	Nilai	85,7	86.6	87.5	88.4	89.3	90.2	91
4.4.2.4	Pertanahan									
	1.	Persentase peningkatan bangunan pelayanan publik berkualitas baik	%	5,26	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

NO		INDIKATOR	Satuan	Baseline (2024)	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.4.2.5	Lingkungan Hidup									
	1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	36,25	74,29	74,39	74,49	74,59	74,69	74,79
	2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	88,71	79,02	79,12	79,22	79,32	79,42	79,52
	3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL)	Indeks	54,82	67,73	67,73	67,73	67,73	67,73	67,73
	4.	Persentase Pengelolaan Sampah	%	28,90	29,15	29,40	29,65	29,90	30,15	30,40
	5.	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Persetujuan lingkungan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo terhadap Persetujuan Lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup bidang lingkungan hidup	%	38,89	38,50	38,00	37,50	37,00	36,50	36,00

NO		INDIKATOR	Satuan	Baseline (2024)	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.4.2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
	1.	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	68,1	71,6	71,7	71,8	71,9	72	72,1
	2.	Persentase Penyediaan Data Kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100
4.4.2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
	1.	Indeks Desa	Indeks	486,49	498,43	500,85	504,17	507,50	510,82	514,14
4.4.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
	1.	TFR (Angka Kelahiran Total)	Nilai	2,02	2,02	2,02	2,01	2,01	2,01	2
	2.	ASFR 15 - 19 tahun	Nilai	52	51,5	51	51	50,3	50	50
	3.	I - bangga	Indeks	61,19	63,08	64,98	66,98	68,82	70,77	72,75
	4.	IPBK	Indeks	63,6	65,6	67,5	68,5	69	70,5	71
	5.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	70,22	71,51	72,8	73	74,29	75,58	76,87
	6.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	3,5	3,4	3,3	3,2	3	3	3

NO		INDIKATOR	Satuan	Baseline (2024)	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	7.	Proporsi kebutuhan kb yang terpenuhi (demand satisfied)	%	98,6	98,6	98,7	98,7	98,8	98,80	98,90
	8.	Persentase kampung keluarga berkualitas mandiri	%	22,7	35,74	42,64	51,4	60,5	70,00	79,50
	9.	Persentase kehamilan tidak direncanakan	%	11,00	10,00	9,00	8,00	8,00	7,00	7,00
	10.	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	%	53,82	55,32	56,82	59,82	61,32	62,82	64,32
	11.	Indeks lansia berdaya	Indeks	60,2	60,321	62,6	64,95	67,27	69,50	71,75
	12.	Indeks pengasuhan keluarga remaja	Indeks	81,2	82,24	83,34	84,38	85,48	86,52	87,62
4.4.2.9	Perhubungan									
	1.	Rasio konektivitas Kabupaten	Nilai	0,71	0,71	0,71	0,72	0,72	0,73	0,73
	2.	Kinerja lalu lintas kabupaten	Nilai	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
4.4.2.10	Komunikasi dan Informatika									

NO	INDIKATOR		Satuan	Baseline (2024)	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	1.	Indeks Masyarakat Digital (IMDI) Pilar 1: Infrastruktur dan Ekosistem ^(c)	Indeks	42,68	43,50	44,00	44,50	45,00	45,50	46,00
4.4.2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
	1.	Meningkatnya omzet koperasi	%	7,53	8	8,5	9	9,5	10	10,5
	2.	Meningkatnya omzet UM	%	1,97	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25
4.4.2.12	Penanaman Modal									
	1.	Persentase pertumbuhan realisasi investasi PMA dan PMDN	%	56,549	-76,018 ^(d)	2,153	2,157	2,162	2,167	2,171
4.4.2.13	Kepemudaan dan Olahraga									
	1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	13,49	13,61	13,74	13,87	14	14,12	14,25
	2.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	15,17	15,3	15,42	15,55	15,68	15,8	15,93

NO		INDIKATOR	Satuan	Baseline (2024)	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	3.	Jumlah Medali yang diperoleh dalam Kejuaraan Tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional	Angka	175	176	177	178	179	180	181
4.4.2.14	Statistik									
	1.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,31	2,32	2,33	2,34	2,35	2,36	2,37
4.4.2.15	Persandian									
	1.	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	52,56%	53,00%	53,50%	54,00%	54,50%	55,00%	55,50%
4.4.2.16	Kebudayaan									
	1.	Persentase Obyek Kebudayaan yang dilestarikan	%	59,38	59,5	60	61	62	63,5	65
	2.	Nilai Pemantauan dan Evaluasi PPKD	Nilai	0	55	60	65	70	75	77

NO		INDIKATOR	Satuan	Baseline (2024)	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.4.2.17	Perpustakaan									
	1.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	68,3	78	80	82	84	86	88
	2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	12.24	12.30	12.40	12.60	12.80	13.00	13.30
4.4.2.18	Kearsipan									
	1.	Tingkat ketersediaan arsip	%	100	100	100	100	100	100	100
4.4.3	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan									
4.4.3.1	Pariwisata									
	1.	Pengeluaran Wisatawan	Rupiah	119,39 M	127,60 M	135,34 M	144,48 M	150,75 M	154,81 M	160,44 M
4.4.3.2	Kelautan dan Perikanan									
	1.	Meningkatnya Produksi Perikanan	%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
4.4.3.3	Pertanian									
	1.	Persentase peningkatan produksi sub sektor tanaman pangan	%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%

NO		INDIKATOR	Satuan	Baseline (2024)	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	2.	Persentase peningkatan produksi sub sektor hortikultura	%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
	3.	Persentase peningkatan produksi sub sektor Perkebunan	%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
	4.	Persentase peningkatan produksi dan populasi sub sektor peternakan	%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
4.4.3.4	Perdagangan									
	1.	Kontribusi PDRB Sub Sektor Perdagangan	%	13	13.5	14	14.5	15	15.5	16
4.4.3.5	Perindustrian									
	1.	Kontribusi PDRB Sub Sektor Industri	%	26,5	27	27.5	28	28.5	29	29.5
4.4.4	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Penunjang Urusan									
4.4.4.1	Perencanaan Pembangunan									
	1.	Nilai SAKIP a. Komponen perencanaan	Nilai	23,39	23,55	23,71	23,88	24,05	24,22	24,38
		b. Komponen pengukuran		19,48	19,53	19,67	19,81	19,94	20,08	20,22

NO		INDIKATOR	Satuan	Baseline (2024)	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.4.4.2	Keuangan									
	1.	Persentase Pengalokasian Anggaran dalam APBD	%	75	60	70	80	90	95	100
	2.	Persentase Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
	3.	Persentase Penyerapan Anggaran	%	87,0	92.0	92.5	93.0	93.5	94.0	94.0
	4.	Persentase Kemandirian Keuangan Daerah	%	14	16,31	17,33	18,35	19,37	20.0	20,39
	5.	Fleksibilitas Keuangan	%	2,00	2,02	2,05	2,07	2,09	2,15	2,19
	6.	Solvabilitas Jangka Panjang	%	0	15,69	28,07	51.63	290	84	101
	7.	Solvabilitas Layanan (Rp/org)	Rp/org	2.286.321	2.336.391	2.526.165	2.366.364	2.232.173	2.118.124	2.020.211
	8.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	9.	Solvabilitas Jangka Pendek	%	100	100	100	100	100	100	100
	10.	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	%	70	100	100	100	100	100	100
	11.	Solvabilitas Operasional		81,8	81,9	82	82,1	82,2	82,3	82,4

NO		INDIKATOR	Satuan	Baseline (2024)	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.4.4.3	Kepegawaian									
	1.	Nilai Sistem Merit pada layanan Kepegawaian Daerah	Nilai	243	246	248,5	253	255,5	258	263
4.4.4.4	Pendidikan dan Pelatihan									
	1.	Nilai Sistem Merit pada Layanan Pengembangan SDM	Nilai	80	80	82,5	82,5	87,5	95	95
4.4.4.5	Penelitian dan Pengembangan									
	1.	Persentase Inovasi yang berkualitas (Kematangan)	%	0,26	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55
4.4.4.6	Kewilayahan									
	1.	IKM Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks	85,95	86,79	87,63	84,83	89,34	90,20	91,08
4.4.4.7	Kesatuan Bangsa dan Politik									
	1.	Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN)	Indeks	74	75	76	77	78	79	81
	2.	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	Indeks	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0

NO		INDIKATOR	Satuan	Baseline (2024)	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.4.4.8		Pengawasan								
	1.	NILAI SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai	13,65	17,63	17,75	17,88	18,00	18,13	18,25
	2.	Maturitas SPIP	Nilai	3,117	3,137	3,157	3,177	3,197	3,217	3,237
	3.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Nilai	3,000	3,010	3,020	3,030	3,040	3,050	3,060
4.4.4.9		Sekretariat DPRD								
	1.	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang tepat waktu dan tepat sasaran	%	69	70	71	72	73	74	75
4.4.4.10		Sekretariat Daerah								
	1.	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	Nilai	10,59	10,93	11,01	11,08	11,16	11,24	11,32
	2.	Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai IKM Minimal Diatas 85	%	61,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00

NO		INDIKATOR	Satuan	Baseline (2024)	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	3.	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	2,95	3,06	3,11	3,16	3,21	3,26	3,29

Keterangan:

- (a) : Instrumen evaluasi akan mengalami perubahan menjadi Indeks Pemerintah Digital mulai tahun 2026 sehingga target disesuaikan;
- (b) : Instrumen evaluasi ini merupakan IUP RPJPD “Indeks Ketenteraman dan Ketertiban” yang berubah nomenklaturnya menjadi “Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum”;
- (c) : Instrumen evaluasi ini merupakan IUP RPJPD “Indeks Pembangunan TIK” yang berubah nomenklaturnya menjadi “Indeks Masyarakat Digital (IMDI)”;
- (d) : Angka Target Negatif pada tahun 2025, karena pada tahun 2024 terdapat realisasi investasi Proyek berskala besar (PSN:Jalan Tol, KSPN BTS, Jalan Prim dan PLTU) sedangkan di tahun 2025 tidak ada PSN sehingga persentase pertumbuhan investasi turun.

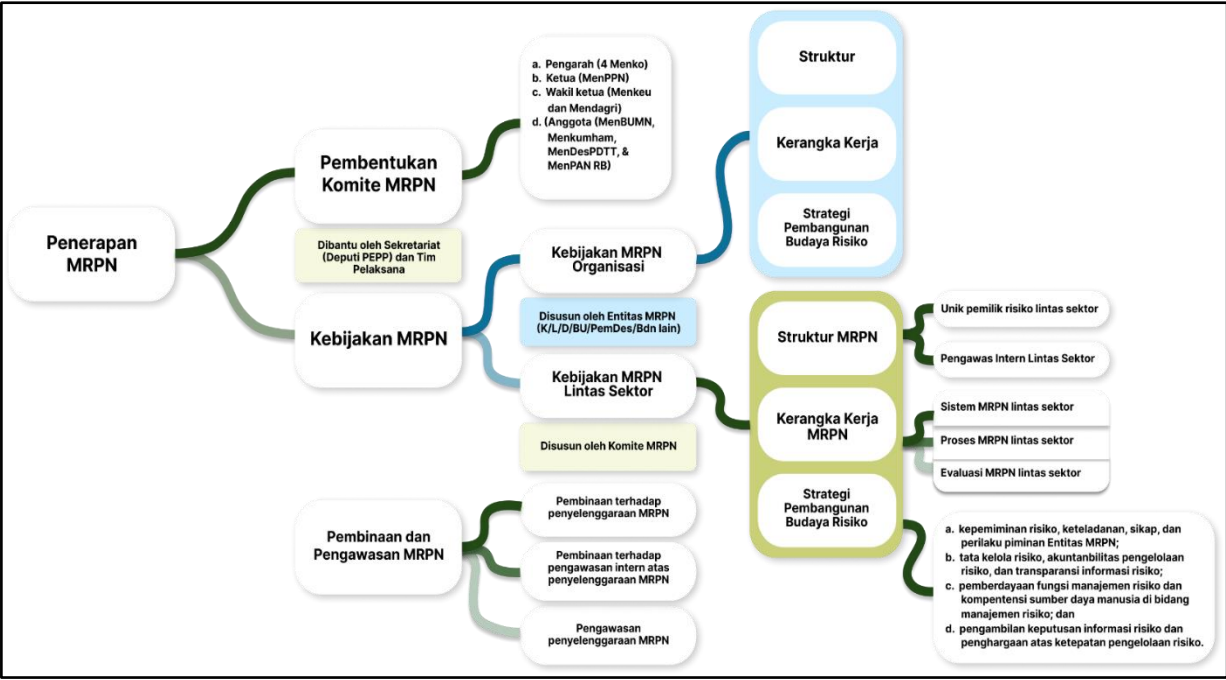
4.3. Manajemen Risiko Pembangunan Daerah (MRPD)

Manajemen risiko pembangunan daerah adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian target pembangunan daerah. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 mengatur penerapan manajemen risiko sebagai bagian integral dari tata kelola pembangunan yang efektif dan akuntabel.

Pencapaian sasaran pembangunan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan prioritas yang melibatkan banyak instansi serta berbagai tingkatan pemerintahan. Kompleksitas pelaksanaan program dan kegiatan prioritas tersebut, yang semakin meningkat seiring dengan ketidakpastian serta tingkat konektivitas global yang terus berkembang, berpotensi meningkatkan intensitas risiko yang harus dihadapi. Karena pelaksanaan program dan kegiatan prioritas bersifat lintas instansi dan kewenangan, pengelolaan risiko yang muncul perlu dilakukan secara kolaboratif, sistematis, dan terintegrasi agar dapat dikendalikan dengan efektif dan memastikan keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

Dalam Perpres ini, pemerintah daerah diwajibkan melakukan identifikasi risiko secara menyeluruh, menilai probabilitas dan dampak risiko, serta merancang strategi mitigasi yang tepat. Proses manajemen risiko harus diintegrasikan dalam seluruh siklus pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi.

Perpres juga menekankan pentingnya koordinasi antar stakeholder, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, guna memastikan pengelolaan risiko berjalan optimal dan berkelanjutan. Implementasi manajemen risiko sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2023 bertujuan untuk meminimalkan potensi kerugian, meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya, dan memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Gambar 4.1 merupakan penjelasan tentang manajemen risiko Pembangunan nasional yang diatur dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2023.



Gambar 4. 1 Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional menurut Perpres 39/2023

Gambar 4.1 menggambarkan penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023. Penerapan MRPN dilakukan melalui pembentukan kelembagaan (Komite MRPN), penyusunan kebijakan pada level organisasi dan lintas sektor, serta penguatan struktur, kerangka kerja, dan strategi pembangunan budaya risiko. Proses ini didukung oleh pembinaan dan pengawasan berjenjang guna memastikan pengelolaan risiko dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Seluruh elemen tersebut menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam mengintegrasikan pengelolaan risiko ke dalam seluruh tahapan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Penerapan manajemen risiko dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo 2025–2029 bertujuan untuk memastikan bahwa setiap misi, tujuan, dan sasaran pembangunan dapat dicapai secara efektif meskipun dihadapkan pada berbagai ketidakpastian. Melalui pendekatan ini, setiap potensi risiko diidentifikasi sejak awal, dianalisis tingkat probabilitas dan dampaknya, kemudian dirumuskan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Proses manajemen risiko ini dilakukan secara terintegrasi dalam seluruh siklus pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,

pemantauan, hingga evaluasi, sehingga menjadi bagian yang melekat dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Tujuan utama penerapan manajemen risiko dalam RPJMD adalah menjamin ketercapaian sasaran strategis daerah dengan meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pembangunan, memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, serta mendorong kesiapsiagaan terhadap perubahan dan ketidakpastian, termasuk bencana alam dan dinamika sosial-ekonomi. Sasaran penerapan manajemen risiko meliputi teridentifikasinya risiko utama pada setiap misi dan sasaran pembangunan, tersedianya rencana mitigasi yang terukur, terlaksananya pemantauan risiko secara periodik, serta terwujudnya koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam penanganan risiko.

BAB V

PENUTUP

Perencanaan pembangunan daerah dalam kurun lima tahun disiapkan sebagai informasi tentang komitmen politik kepala daerah yang dipilih oleh rakyat dalam Pilkada tahun 2024. perencanaan diuraikan setiap lima tahun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD adalah dokumen perencanaan yang menggambarkan cita-cita, harapan, kebijakan yang dituangkan dalam program kepala daerah, termasuk kebijakan yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, kebijakan pengembangan regional, keuangan daerah, dan indikasi kerangka pendanaan pembangunan selama lima tahun. Seiring dengan pemilihan kepala regional simultan di semua wilayah otonom Indonesia pada tahun 2024, kepala daerah baru dipilih untuk periode dari tahun 2025 hingga 2029, menciptakan desain RPJMD baru untuk periode itu. Visi, misi, dan komitmen politik yang akan dilaksanakan tertuang dalam dokumen RPJMD, termasuk Kabupaten Probolinggo, untuk periode RPJMD 2025 hingga tahun 2029.

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 mengenai Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah. Pada Bab II Bagian Keempat Pasal 41 hingga Pasal 72 Permendagri 86/2017, dijelaskan bahwa tata cara penyusunan RPJMD yang terdiri dari enam tahap, yaitu persiapan penyusunan RPJMD, penyusunan Rancangan Awal RPJMD, penyusunan Rancangan RPJMD, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RPJMD, penyusunan Rancangan Akhir RPJMD, dan penetapan Peraturan Daerah. Pada bulan Maret 2025, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Instruksi melalui Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang memuat tata cara penyusunan dokumen tersebut. Dijelaskan bahwa proses penyusunan diawali dengan tahap penyiapan yang meliputi pembentukan tim penyusun, pelaksanaan

orientasi tim penyusun dan penyusunan agenda kerja tim, analisis data evaluasi hasil pembangunan 5 tahun terakhir, dan inventarisasi data, informasi, dan hal lain yang diperlukan dalam proses penyusunan. Proses dilanjutkan dengan pembahasan teknokratik Visi Misi Kepala Daerah yang dilantik dan penulisan dokumen Rancangan Awal RPJMD sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan.

5.1 Pedoman Transisi

Panduan masa peralihan Kepala Daerah, akan digunakan sebagai panduan dan acuan untuk RKPD Tahun 2030. Masa peralihan atau transisi ini, dengan tujuan menjaga kesinambungan pembangunan. Pedoman yang menjadi acuan umum pada saat periodisasi RPJMD ini berakhir ditetapkan sebagai berikut:

1. Permasalahan di Kabupaten Probolinggo yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD ini, maka permasalahan pembangunan tersebut juga menjadi bagian dari RPJMD periode selanjutnya, agar dapat dituangkan dan dilaksanakan dengan program-program pembangunan pada periode selanjutnya;
2. Program prioritas dan/atau program strategis daerah yang telah dilaksanakan pada periode RPJMD ini dan masih relevan / perlu dilanjutkan pada periode selanjutnya dan direkomendasikan untuk diakomodasi dalam RPJMD periode berikutnya, dengan tujuan memaksimalkan layanan pemerintah oleh masyarakat.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Tata cara pelaksanaan peralihan ini bertujuan untuk menyajikan berbagai hal penting terkait pelaksanaan perencanaan jangka menengah daerah dan menciptakan koordinasi antar pelaku pembangunan, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas pembangunan, baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan program. Tata cara pelaksanaan masa peralihan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Perlu segera disusun dokumen perencanaan spasial baik di level makro (RTRW) maupun di level mikro (RDTR) untuk melihat relevansi pencapaian target kinerja dan intervensi program dalam RPJMD dengan sebaran data spasial. Dengan demikian strategi pencapaian target dapat lebih spesifik.

2. Seluruh Perangkat Daerah (PD) atau unit kerja yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, agar melakukan koordinasi, baik pada tiap rumpun atau lintas rumpun (*Joint Outcomes*) untuk memastikan pencapaian *outcome* RPJMD berjalan dengan efektif dan efisien;

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Mekanisme pengendalian melibatkan tim dari internal Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo seperti pelaksana urusan perencanaan dan pengawasan serta lembaga lain terkait untuk memantau progres, dengan evaluasi dilakukan setiap semester menggunakan indikator kinerja. Laporan kinerja disampaikan ke DPRD Kabupaten Probolinggo, dan hasil evaluasi menjadi dasar penyesuaian program. Untuk memastikan RPJMD Kabupaten Probolinggo 2025 – 2029 berjalan sesuai rencana, mekanisme pengendalian dan evaluasi meliputi: a) Jadwal evaluasi periodik, setiap triwulan atau tahunan, dengan laporan kemajuan disampaikan ke DPRD; b) Indikator kinerja utama (IKU) untuk mengukur pencapaian target, seperti capaian pembangunan infrastruktur, peningkatan IPM, atau penurunan angka kemiskinan; c) Mekanisme penyesuaian rencana berdasarkan hasil evaluasi, termasuk revisi program jika diperlukan; d) Pembentukan Tim Pengendali: Tim terdiri dari Bappeda, Inspektorat, dan perangkat daerah dan pihak lain terkait, dengan jadwal rapat bulanan untuk memantau progres dan tindak lanjutnya.

Demikian pedoman transisi, kaidah pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 sebagai acuan pelaksanaan perencanaan pembangunan. Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen ini akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

MOHAMMAD HARIS